

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-4
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).....	I-5
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Kondisi Kependudukan.....	II-10
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-14
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-103
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD	II-116
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-153
 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2019 dan Perkiraan Tahun 2020.....	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-18
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-22
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-26
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-26

	3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-32
	3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-35
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.....	IV-7
	4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020	IV-7
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021.....	IV-9
	4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2021.....	IV-10
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
	5.1. Rencana Program Prioritas	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan	II-2
2.2	Formasi Geologi Kota Jambi	II-4
2.3	Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara.....	II-5
2.4	Jumlah Curah Hujan Dari Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Jambi Tahun 2017.....	II-5
2.5	Penggunaan Lahan Di Kota Jambi	II-7
2.6	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2014-2018.....	II-11
2.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2019 Per Kecamatan	II-13
2.8	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2015-2019.....	II-14
3.1	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019.....	III-5
3.2	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019.....	III-6
3.3	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019.....	III-8
3.4	Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019	III-9
3.5	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019	III-11
3.6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019	III-13
3.7	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019.....	III-14
3.8	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2015-2019.....	III-15
3.9	Inflasi Kota Jambi.....	III-15

3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun 2021.....	III-23
3.11	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III-24
3.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III-25
3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi.....	III-26
3.14	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2018 dengan TA 2019	III-29
3.15	Perbandingan Target Realisasi Dana Perimbangan TA 2018 Dengan TA 2019.....	III-30
3.16	Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2018 Dengan TA 2019.....	III-31
3.17	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Jambi.....	III-34
3.18	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi ..	III-35
4.1	Misi Tujuan dan Sasaran Menengah Kota Jambi	IV-5
4.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Serta Arah Kebijakan.....	IV-9
4.3	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	IV-12
4.4	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	IV-14
5.1	Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2021.....	V-2
5.2	Rencana Program OPD Tahun 2021.....	V-13
6.1	Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi.....	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Utama Kota Jambi Tahun 2021	VI-2
6.3	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021	VI-3

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1.	Diagram Alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2021	I-2
2.1.	Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi.....	II-2
2.2.	Peta Topografi Kota Jambi.....	II-3
2.3.	Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi.....	II-8
2.4.	Peta Rawan Bencana Kota Jambi	II-10
2.5.	Perkembangan Demografi Kota Jambi 2015-2019.....	II-11
2.6.	Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2015-2019.....	II-16
2.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-24
2.8.	Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2015-2019	II-32
3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan Perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan Nasional	III-4
3.2.	Porsi Masing-masing Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Kota Jambi Tahun 2020	III-10
3.3.	Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2013-2018	III-17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

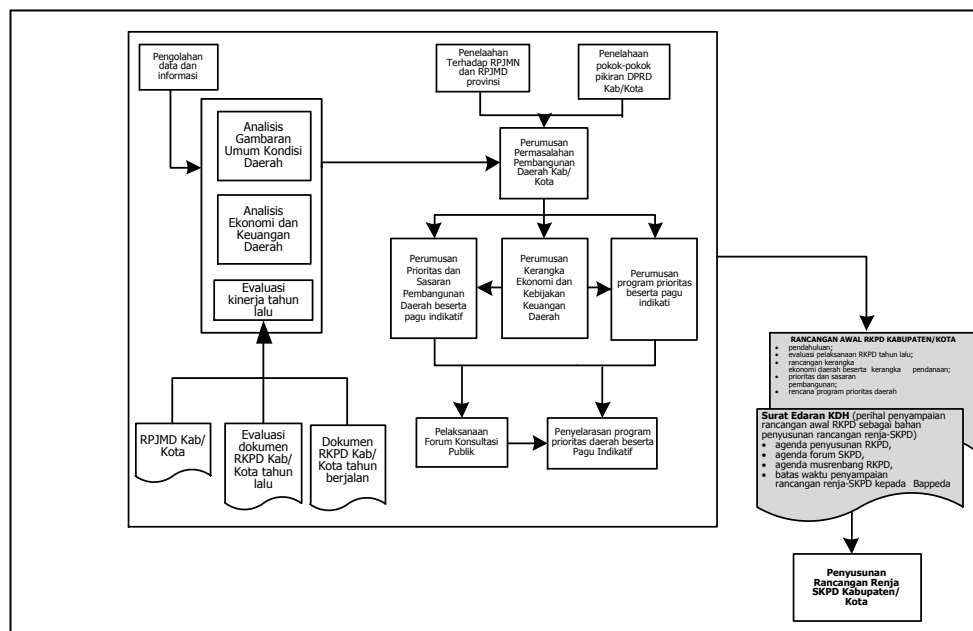
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada esensinya berupaya meningkatkan kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu *Sistem Perencanaan* guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004 mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir atau Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian tiga pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, untuk itu dalam penyusunan RKPD tahun 2021 ini berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Proses penyusunan Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Diagram alur penyusunan RKPD 2021

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

15. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus;
18. Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
23. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kota Jambi 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.4.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program/kegiatan yang didasarkan pada Prinsip- prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2021, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan

dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, RKP/program strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Jambi untuk penyusunan RKPD Kota Jambi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah

dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Jambi.

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang

diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN Republik Indonesia.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2021, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

5.2. Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota untuk Perencanaan Tahun 2021. Selanjutnya, Walikota memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kota Jambi adalah Ibukota sekaligus Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Jambi. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Provinsi Jambi, Kota Jambi mempunyai jumlah penduduk pada siang hari mencapai $\pm$ 1 juta jiwa sedangkan pada malam hari $\pm$ 750 jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jambi berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Jambi. Kondisi umum daerah Kota Jambi dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Jambi secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41" Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 KM², dimana secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

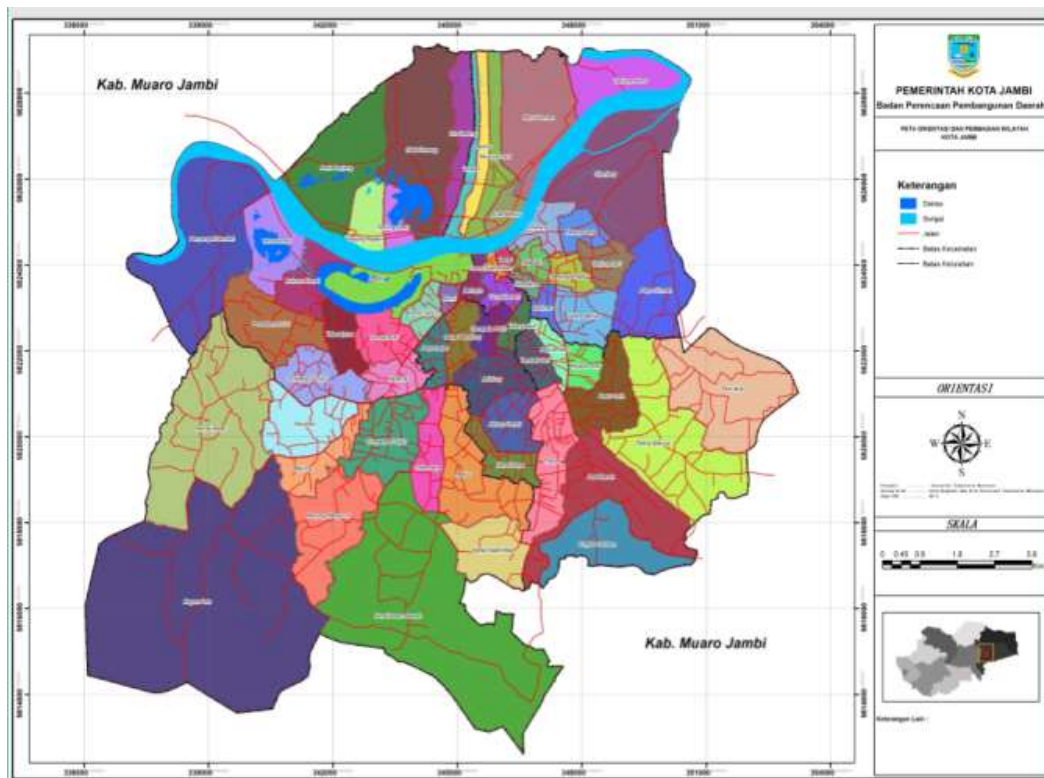
Tabel 2.1.

Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	6
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	5
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	5
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	5
Jumlah		175,53	100	62

Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2019 (data diolah)

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini



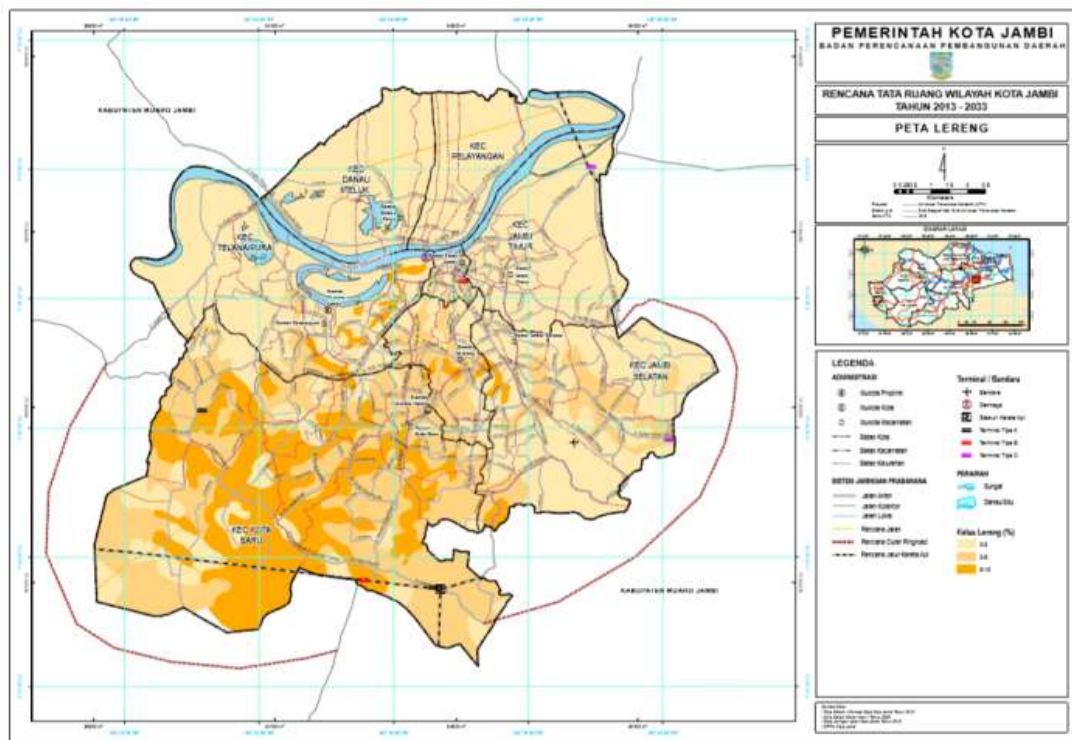
Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2019 (data diolah)

Gambar 2.1.

Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi

2.1.1.2.Topografi

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti : Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 - 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 - 40 meter dari permukaan laut.



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2019 (data diolah)

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Jambi

2.1.1.3.Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau

Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Dilihat luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 2.2. berikut

Tabel 2.2.
Formasi Geologi Kota Jambi

NO.	FORMASI GEOLOGI	LUAS (HA)	%
1.	Endapan Permukaan	10.454	50,90
2.	Batuan Sedimen Umur miosen	8.375	40,78
3.	Batuan Sedimen Umur pliosen	1.709	8,32
Jumlah		20.538	100,00

Sumber: Data Pokok Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2013

2.1.1.4.Klimatologi

Pada tahun 2019 umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat musim barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April - bulan Oktober, sementara musim timur angin bertiup ke arah timur dan selatan yang berlangsung pada bulan Oktober - bulan April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

Selama tahun 2019 suhu udara rata-rata Kota Jambi terendah sebesar 27,1°C terjadi pada bulan Februari dan tertinggi sebesar 28,2°C terjadi pada bulan Mei, dengan kelembaban udara rata-rata terendah 74% pada bulan Agustus dan September, sedangkan tertinggi sebesar 87% pada bulan April. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Rata-rata suhu dan kelembaban udara

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	31,5	23,5	27,5	100	47	84
Februari	30,9	23,3	27,1	100	57	86
Maret	31,6	23,2	27,4	99	52	82
April	32,0	23,8	27,9	100	63	87
Mei	32,2	24,2	28,2	99	59	86
Juni	32,2	23,7	27,9	100	61	86
Juli	32,3	23,4	27,9	99	49	79
Agustus	32,5	23,3	27,9	95	43	74
September	32,1	23,0	27,5	95	39	74
Oktober	32,2	23,4	27,8	97	47	80
November	32,1	23,5	27,8	97	55	82
Desember	32,1	23,7	27,9	98	56	85

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2019 terjadi pada bulan April yaitu 386,3 mm³ dan paling rendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 2,8 mm³. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Desember sebanyak 27,9 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 1 hari terjadi pada bulan Agustus. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Jumlah Curah Hujan dari Hari Hujan Menurut Bulan
Di Kota Jambi Tahun 2019

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
Januari	167,0	18
Februari	291,2	23
Maret	150,6	18
April	386,3	21
Mei	160,6	16
Juni	159,8	13
Juli	20,8	7
Agustus	2,8	1
September	48,2	8
Oktober	194,9	17
November	99,7	19
Desember	148,1	27,9

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

2.1.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari sehingga membentuk morfologi kota terbelah dengan 2 (dua) bagian besar yaitu bagian Selatan dan bagian Utara.

Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah Kota Jambi. Pada wilayah ini sedikit nya terdapat 7 (tujuh) buah anak Sungai Batanghari, yaitu :

1. Sungai Kenali Besar

DAS Kenali Besar memiliki panjang sungai 13,79 Km dan luas 3.623 Ha (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga hektar) melewati Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Alam Barajo Kecamatan Telanaipura, kemudian masuk kedalam Danau Teluk Kenali menuju ke Danau Sipin dan akhirnya akan bermuara ke Sungai Batanghari.

2. Sungai Kenali kecil

DAS Kenali Kecil memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 1.759 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh Sembilan hektar), melewati Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telanaipura kemudian masuk ke danau teluk kenali menuju ke danau sipin dan bermuara ke Sungai Batanghari.

3. Sungai Kambang

DAS Kambang dengan panjang sungai 4,304 Km dan luas 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hektar) Daerah pengaliran Sungai Kambang melewati Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Telanaipura dan bermuara di danau sipin dan berakhir di sungai Batanghari.

4. Sungai Asam

DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km dan luas 2.930 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh hektar) Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi dan berakhir di sungai Batanghari.

5. Sungai Tembuku

DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km dan luas 684 Ha (enam ratus delapan puluh empat hektar). Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Kecamatan Jambi Selatan, sebagian antara Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Timur dan berakhir di sungai Batanghari.

6. Sungai Selincih

DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km dan luas 1.887 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar) Daerah pengaliran Sungai Selincih meliputi Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jambi Timur dan Berakhir di Sungai Batanghari.

7. Sungai Danau Teluk

DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km dan luas 1.889 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan hektar). Daerah pengaliran Sungai Danau teluk Mengalir dari sungai Batanghari menuju danau teluk di Kecamatan Danau teluk.

Disamping itu, selain berfungsi hidrologis juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Dari Citra satelit Kota Jambi tahun 2014 dengan memperhatikan kemajuan pembangunan tahun 2018 dengan skala 1:5.000 dengan persentase tertinggi pada penggunaan lahan permukiman sebesar 26,48%, Hutan sebesar 18,29% dan Bangunan 13,56%. Secara rinci penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5.
Penggunaan Lahan Di Kota Jambi

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan	2.380	13,56
Belukar	1.073	6,11
Danau	245	1,39
Hutan	3.209	18,29
Industri	113	0,64
Jalan	744	4,24
Kebun	2.083	11,87
Kilang	0	0,00
Kolam	100	0,57
Ladang	1.181	6,73

Kecamatan Pelayangan. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui :

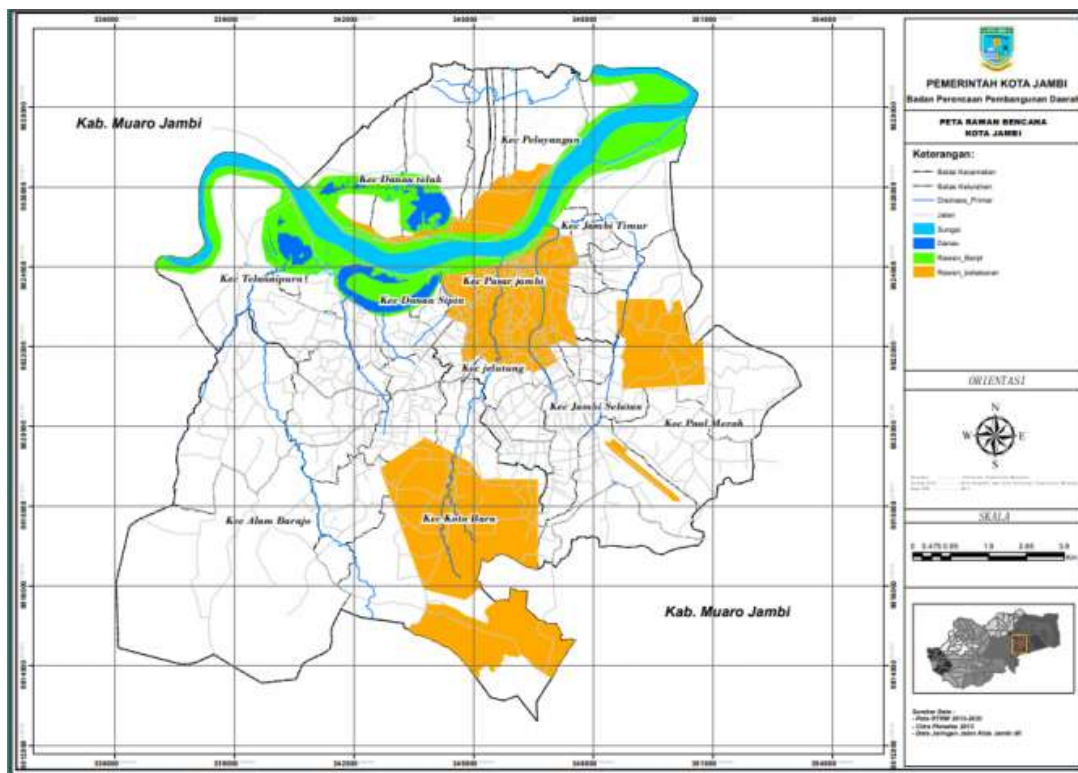
- a. Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari
- c. Melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan - kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi - lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Jambi, meliputi :

- a. Kecamatan Danau Teluk
- b. Kecamatan Pelayangan
- c. Kecamatan Telanaipura
- d. Kecamatan Pasar Jambi
- e. Kecamatan Jambi Timur
- f. Kecamatan Jelutung

Adapun rencana pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui :

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan;
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi - lokasi rawan bencana;
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2017

Gambar 2.4.
Peta Rawan Bencana Kota Jambi

2.1.2. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

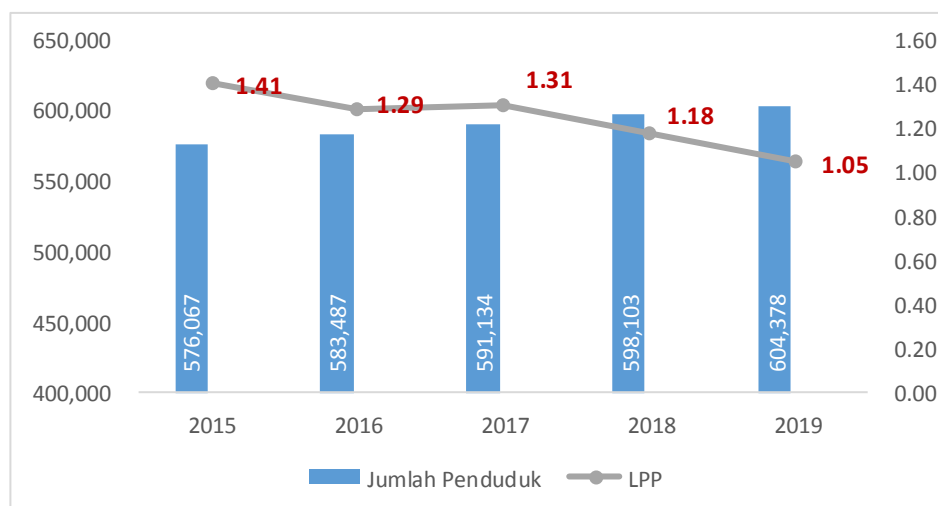
Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 568.062 jiwa, dan terus meningkat menjadi 598.103 jiwa pada tahun 2018. Adapun pertumbuhan penduduknya setiap tahun selama kurun waktu 2014 - 2018 berkisar antara 1,18% sampai dengan 2,11% pertahunnya dan dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,46%. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi dari tahun 2014 - 2018.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2015	576.067	1,41
2016	583.487	1,29
2017	591.134	1,31
2018	598.103	1,18
2019	604.378	1,05
Rata-rata		1,25

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2015 - 2019 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2018 (data diolah)

Gambar 2.5.
Perkembangan Demografi Kota Jambi 2015 – 2019

Penduduk Kota Jambi tahun 2019 sebanyak 604.378 jiwa yang terdiri atas 303.818 jiwa penduduk laki-laki dan 300.920 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, pada tahun 2019 penduduk Kota Jambi mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar 1,05 persen dengan rasio jenis kelamin 100,96. Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi

pada tahun 2019 berada di Kecamatan Alam Barajo kemudian Kecamatan Paal Merah. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Jambi tahun 2019 mencapai 3.445 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Jelutung sebesar 8.405 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Danau Teluk sebesar 799 jiwa/Km². Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 11 kecamatan di Kota Jambi, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Alam Barajo dengan penduduk sebanyak 101.350 jiwa pada tahun 2019 atau sekitar 16,76 persen dari total penduduk Kota Jambi, diikuti oleh Kecamatan Paal Merah sebanyak 91.383 jiwa atau 15,11 persen dan Kecamatan Kotabaru sebanyak 78.620 jiwa atau sekitar 13,00 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Danau Teluk yaitu sebanyak 12.160 jiwa, atau 2,01 persen dari total penduduk Kota Jambi.

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah dikarenakan kedua kecamatan ini memang mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Jelutung 8.404 Jiwa/Km² pada tahun 2019, Kecamatan Jambi Selatan 8.375 jiwa/km² dan Kecamatan Pasar Jambi 7.420 jiwa/km². Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 799 Jiwa/Km² hingga 6.752 Jiwa/Km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan yang berada di kawasan pusat kota dan 8 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2019 per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan (Jiwa/Km ²)				
		(Km ²)	2015	2016	2017	2018	2018
1.	Kotabaru	26,26	2.109	2.036	2.088	2.131	2.994
2.	Alam Barajo	39,87	-	2.274	2.332	2.386	2.542
3.	Jambi Selatan	7,51	3.978	5.357	5.411	5.464	8.376
4.	Paal Merah	23,77	-	3.280	3.311	3.341	3.844
5.	Jelutung	7,64	7.892	7.943	8.001	8.055	8.405
6.	Pasar Jambi	1,68	3.132	3.124	3.117	3.109	7.420
7.	Telanaipura	19,2	3.185	2.220	2.243	2.264	2.680
8.	Danau Sipin	7,28	-	6.059	6.120	6.179	6.752
9.	Danau Teluk	15,21	764	767	770	772	799
10.	Pelayangan	12,78	874	881	888	896	1080
11.	Jambi Timur	14,33	3.921	4.166	4.185	4.255	4.692
Kota Jambi		175,53	2.766	2.805	2.851	2.878	3.445

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020 (data diolah)

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 100,96 sampai dengan 101,17 untuk kurun waktu tahun 2015-2019. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Jambi menurut jenis kelamin.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi
Tahun 2015-2019

Tahun	Jenis Kelamin				Laki + Perempuan	Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2015	289.713	50,29	286.354	49,71	576.067	101,17
2016	293.217	50,25	290.270	49,75	583.487	101,02
2017	297.036	50,25	294.098	49,75	591.134	101,00
2018	300.775	50,29	297.537	49,75	598.103	101,09
2019	303.818	50,27	300.920	49,79	604.378	100,96

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020 (data diolah)

Melihat tingginya angka *sex ratio* di beberapa kecamatan yang merupakan sentra bisnis, ditengarai kaum migran yang masuk ke Kota Jambi lebih didominasi oleh penduduk laki-laki berusia produktif (usia 15-64 tahun) yang bertujuan mencari nafkah/bekerja. Analisa ini didukung oleh lebih tingginya jumlah penduduk usia produktif laki-laki dibandingkan perempuan pada tahun 2019. Tidak dapat dipungkiri, tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi telah menjadi magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk tinggal dan mencari nafkah di Kota Jambi. Penduduk usia produktif merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana dan prasarana pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya secara kumulatif tentu akan mendorong naiknya angka IPM.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Jambi, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013 - 2033 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 pengembangan struktur ruang Kota Jambi memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu :

- a) Perwujudan pusat - pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
- b) Peningkatan aksesibilitas perkotaan; dan
- c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi :
 - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah kota; dan
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
 - pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
 - Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
 - Pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

- a) kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pada kawasan perdagangan dan jasa di BWK I Kecamatan Pasar Jambi, sebagian Kecamatan Jambi Timur dan sebagian Kecamatan Jelutung;
- b) kawasan strategis dari perspektif sosial budaya, pada kawasan Jambi Kota Seberang, Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

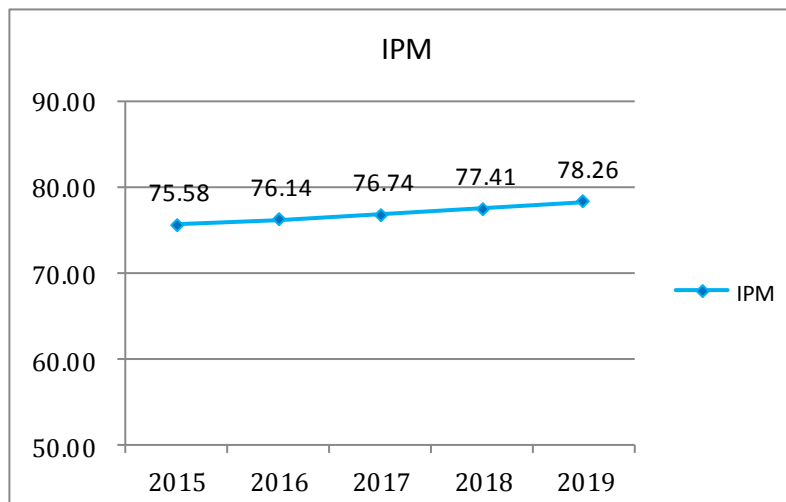
1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Capaian IPM Kota Jambi Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020 (data diolah)

Gambar 2.6.
Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2015-2019

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,58 poin meningkat menjadi 78,26 poin pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan 2,68 poin. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

menandakan bahwa angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah serta pendapatan perkapita masyarakat semakin baik.

2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.9.
Data Kemiskinan Kota Jambi 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	9,67	8,87	8,84	8,49	8,12
Penduduk Miskin (orang)	55.510	51.610	52.080	50.610	48.950
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	372.600	397.088	413.722	466.854	466.854
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,36	1,59	1,13	1,26	1,52
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,25	0,43	0,27	0,28	0,42

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kota Jambi mengalami penurunan dari tahun ketahun dimana tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9,67% menurun menjadi 8,12% pada tahun 2019. Laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata penurunan sekitar 0,3% pertahun. Namun demikian dengan tingkat kemiskinan 8,12% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan.

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan satu tahun). Unit-unit

produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu : (1) Pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) Pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) Pengadaan listrik, (5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) Transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) Informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) Real estate, (13) Jasa perusahaan, (14) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) Jasa pendidikan, (16) Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) Jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) Konsumsi pemerintah, (4) Pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) Perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) Ekspor barang dan jasa, dan (7) Impor barang dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan dan tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Nilai PDRB menurut lapangan usaha bisa disajikan atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dan juga dapat disajikan atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017*	2018*	2019**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	285.976,4	310.926,4	318.350,8	342.166,8	341.076,1
B Pertambangan dan Penggalan	541.713,1	519.833,2	407.736,9	579.545,2	548.011,4
C Industri Pengolahan	2.467.766,5	2.655.297,7	2.830.668,4	2.981.194,5	3.112.496,3
D Pengadaan Listrik dan Gas	38.209,0	47.918,2	55.563,3	61.123,6	66.741,9
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.355,4	62.059,2	66.782,8	71.414,8	83.912,4
F Konstruksi	1.929.782,2	2.090.379,7	2.308.869,3	2.554.035,8	2.801.840,3
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.999.141,8	7.233.207,3	7.952.233,5	8.896.456,5	9.712.778,1
H Transportasi dan Pergudangan	2.535.824,6	3.072.603,0	3.329.315,5	3.570.367,9	3.707.783,4
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	484.230,5	558.390,6	631.987,4	682.667,2	735.067,0
J Informasi dan Komunikasi	941.735,8	1.115.130,2	1.205.592,8	1.333.277,7	1.436.661,6
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.251.236,8	1.465.861,8	1.536.121,0	1.582.389,7	1.646.667,0
L Real Estate	526.996,7	586.664,0	634.744,9	715.290,4	785.761,9
M Jasa Perusahaan	633.413,1	729.191,4	792.132,2	860.369,7	931.781,5
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.021.306,5	2.152.994,6	2.263.899,9	2.503.891,0	2.632.520,9
P Jasa Pendidikan	956.332,3	1.091.377,9	1.190.858,8	1.288.997,8	1.398.837,2
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473.040,5	544.568,9	587.990,4	635.721,5	703.369,8
R Jasa Lainnya	150.391,9	169.123,8	181.462,2	199.918,8	210.598,1
PDRB	21.293.452,91	24.405.528,00	26.293.310,98	28.858.828,79	30.855.904,84
PDRB TANPA MIGAS	20.855.763,68	23.967.718,64	25.903.375,94	28.297.201,81	30.323.577,73

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.11.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015–2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017*	2018*	2019**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	180.644,7	183.855,4	187.682,2	195.983,3	190.877,4
B Pertambangan dan Penggalan	526.090,1	509.005,0	418.285,0	432.125,5	425.967,3
C Industri Pengolahan	1.962.940,8	2.045.889,0	2.124.292,0	2.205.318,0	2.272.932,0
D Pengadaan Listrik dan Gas	29.450,5	31.178,2	31.726,2	33.645,4	35.614,5
E Pengadaan Air,	41.270,4	42.990,4	43.958,3	46.128,1	46.497,1

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017*	2018*	2019**
Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F Konstruksi	1.516.106,7	1.578.659,8	1.703.565,8	1.809.482,7	1.943.292,0
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.219.918,0	4.544.458,6	4.784.479,7	5.120.193,4	5.505.779,5
H Transportasi dan Pergudangan	1.995.122,5	2.242.842,8	2.398.293,7	2.481.597,0	2.530.301,1
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.227,2	379.073,8	415.165,6	447.018,7	476.257,5
J Informasi dan Komunikasi	776.304,7	843.486,1	900.356,3	974.847,8	1.037.678,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	936.666,3	1.050.080,2	1.085.941,6	1.079.091,2	1.104.819,9
L Real Estate	402.011,5	421.727,5	444.988,5	474.671,3	510.073,5
M Jasa Perusahaan	446.930,1	476.179,4	504.519,6	531.246,6	558.898,5
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.215.546,1	1.251.814,4	1.282.749,4	1.341.765,9	1.402.197,4
P Jasa Pendidikan	725.595,6	771.534,5	805.599,0	858.389,0	924.883,4
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401.894,3	430.571,1	457.497,0	486.045,0	534.364,8
R Jasa Lainnya	125.234,4	133.095,9	139.239,0	148.782,7	155.351,3
PDRB	15.851.953,80	16.936.442,08	17.728.338,77	18.661.331,65	19.655.785,31
PDRB TANPA MIGAS	15.400.736,50	16.484.678,81	17.321.018,16	18.240.831,18	19.239.879,91

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

4. Struktur Perekonomian

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017*	2018*	2019**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	285.976,4	310.926,4	318.350,8	342.166,8	341.076,1
B Pertambangan dan Penggalan	541.713,1	519.833,2	407.736,9	580.545,2	548.011,4
C Industri Pengolahan	2.467.766,5	2.655.297,7	2.830.668,4	2.981.194,5	3.112.496,3
D Pengadaan Listrik dan Gas	38.209,0	47.918,2	55.563,3	61.123,6	66.741,9
E Pengadaan Air,	56.355,4	62.059,2	66.782,8	71.414,8	83.912,4

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017*	2018*	2019**
Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F Konstruksi	1.929.782,2	2.090.379,7	2.308.869,3	2.554.035,8	2.801.840,3
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.999.141,8	7.233.207,3	7.952.233,5	8.896.456,5	9.712.778,1
H Transportasi dan Pergudangan	2.535.824,6	3.072.603,0	3.329.315,5	3.570.367,9	3.707.783,4
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	484.230,5	558.390,6	631.987,4	682.667,2	735.067,0
J Informasi dan Komunikasi	941.735,8	1.115.130,2	1.205.592,8	1.333.277,7	1.436.661,6
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.251.236,8	1.465.861,8	1.536.121,0	1.582.389,7	1.646.667,0
L Real Estate	526.996,7	586.664,0	634.744,9	715.290,4	785.761,9
M Jasa Perusahaan	633.413,1	729.191,4	792.132,2	860.369,7	931.781,5
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.021.306,5	2.152.994,6	2.263.899,9	2.503.891,0	2.632.520,9
P Jasa Pendidikan	956.332,3	1.091.377,9	1.190.858,8	1.288.997,8	1.398.837,2
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473.040,5	544.568,9	587.990,4	635.721,5	703.369,8
R Jasa Lainnya	150.391,9	169.123,8	181.462,2	199.918,8	210.598,1
PDRB	21.293.452,91	24.405.528,00	26.294.309,98	28.858.828,79	30.855.904,84
PDRB TANPA MIGAS	20.855.763,68	23.967.718,64	25.904.375,94	28.297.201,81	30.323.577,73

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2019 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor sama seperti pada tahun 2018, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2019 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Berikut ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

Tabel 2.13
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017*	2018*	2019**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,27	1,21	1,19	1,11
B Pertambangan dan Penggalian	2,54	2,13	1,55	2,01	1,78
C Industri Pengolahan	11,59	10,88	10,77	10,33	10,09
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,20	0,21	0,21	0,22
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,25	0,25	0,25	0,27
F Konstruksi	9,06	8,57	8,78	8,85	9,08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,17	29,64	30,24	30,83	31,48
H Transportasi dan Pergudangan	11,91	12,59	12,66	12,37	12,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,29	2,40	2,37	2,38
J Informasi dan Komunikasi	4,42	4,57	4,59	4,62	4,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,88	6,01	5,84	5,48	5,34
L Real Estate	2,47	2,40	2,41	2,48	2,55
M Jasa Perusahaan	2,97	2,99	3,01	2,98	3,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,49	8,82	8,61	8,68	8,53
P Jasa Pendidikan	4,49	4,47	4,53	4,47	4,53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,22	2,23	2,24	2,20	2,28
R Jasa Lainnya	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	97,94	98,21	98,52	98,05	98,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

*Angka Sementara

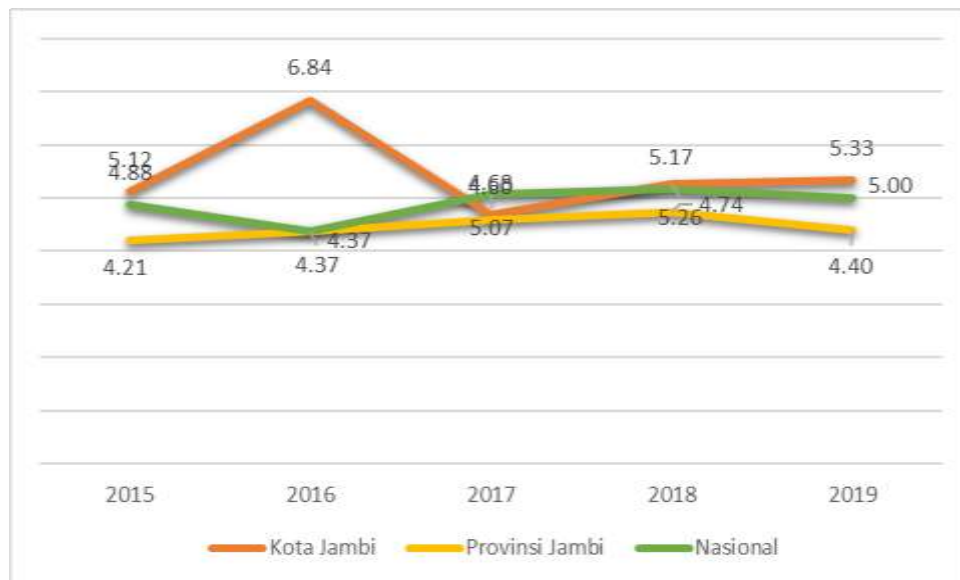
**Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2019 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,48%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,02%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,09%; sektor Konstruksi sebesar 9,08%; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,53%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2015-2019, LPE Kota Jambi tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6,84%. Pada tahun selanjutnya, LPE Kota Jambi mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional. Pada tahun 2019,

LPE Kota Jambi tercatat sebesar 5,33% berada di atas LPE Provinsi Jambi, yaitu 4,40% dan LPE Nasional yang tercatat sebesar 5,00%.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015–2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019*
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	180.644,7	183.855,4	187.682,2	195.983,3	190.877,4
B Pertambangan dan Penggalan	526.090,1	509.005,0	418.285,0	432.125,5	425.967,3
C Industri Pengolahan	1.962.940,8	2.045.889,0	2.124.292,0	2.200.318,0	2.272.932,0
D Pengadaan Listrik dan Gas	29.450,5	31.178,2	31.726,2	33.645,4	35.614,5
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41.270,4	42.990,4	43.958,3	46.128,1	46.497,1
F Konstruksi	1.516.106,7	1.578.659,8	1.703.565,8	1.809.482,7	1.943.292,0
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.219.918,0	4.544.458,6	4.784.479,7	5.120.193,4	5.505.779,5

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019*
H Transportasi dan Pergudangan	1.995.122,5	2.242.842,8	2.398.293,7	2.516.597,0	2.530.301,1
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.227,2	379.073,8	415.165,6	447.018,7	476.257,5
J Informasi dan Komunikasi	776.304,7	843.486,1	900.356,3	974.847,8	1.037.678,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	936.666,3	1.050.080,2	1.085.941,6	1.079.091,2	1.104.819,9
L Real Estate	402.011,5	421.727,5	444.988,5	474.671,3	510.073,5
M Jasa Perusahaan	446.930,1	476.179,4	504.519,6	531.246,6	558.898,5
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.215.546,1	1.251.814,4	1.282.749,4	1.341.765,9	1.402.197,4
P Jasa Pendidikan	725.595,6	771.534,5	805.599,0	858.389,0	924.883,4
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401.894,3	430.571,1	457.497,0	486.045,0	534.364,8
R Jasa Lainnya	125.234,4	133.095,9	139.239,0	148.782,7	155.351,3
PDRB	15.851.953,80	16.936.442,08	17.728.338,77	18.661.331,65	19.655.785,31
PDRB TANPA MIGAS	15.400.736,50	16.484.678,81	17.321.018,16	18.240.831,18	19.239.879,91

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2019 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5.505.779,5 juta; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2.530.301,1 juta; sektor Industri Pengolahan sebesar 2.272.932,0 juta; sektor Konstruksi sebesar 1.943.292,0; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1.402.197,4 juta.

Sedangkan untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017*	2018*	2019**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,58	1,78	2,08	4,42	-2,61
B Pertambangan dan Penggalian	-31,34	-3,25	-17,82	3,31	-1,43
C Industri Pengolahan	5,17	4,23	3,83	3,58	3,30
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,55	5,87	1,76	6,05	5,85

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017*	2018*	2019**
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,97	4,17	2,25	4,94	0,80
F	Konstruksi	2,50	4,13	7,91	6,22	7,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,13	7,69	5,28	7,02	7,53
H	Transportasi dan Pergudangan	5,70	12,42	6,93	3,47	1,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,10	8,24	9,52	7,67	6,54
J	Informasi dan Komunikasi	9,36	8,65	6,74	8,27	6,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	12,11	3,42	-0,63	2,38
L	Real Estate	2,43	4,90	5,52	6,67	7,46
M	Jasa Perusahaan	6,82	6,54	5,95	5,30	5,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,42	2,98	2,47	4,60	4,50
P	Jasa Pendidikan	7,64	6,33	4,42	6,55	7,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,28	7,14	6,25	6,24	9,94
R,S	Jasa Lainnya	7,99	6,28	4,62	6,85	4,41
PDRB		5,12	6,84	4,68	5,26	5,33
PDRB TANPA MIGAS		7,04	7,04	5,07	5,31	5,48

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

6. PDRB Menurut Penggunaan

Dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014-2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.16.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota
Jambi Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	12.086,27	13.123,57	14.212,68	15.432,10	16.415,75
2.	Atas Dasar Harga Konstan	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	63,69	61,63	58,24	58,69	56,74
2.	Atas Dasar Harga Konstan	63,65	63,54	62,16	62,45	61,41

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4.702,83 miliar rupiah,

5.000,77 miliar rupiah (2015); dan 5.154,58 miliar rupiah (2016); 5.607,61 miliar rupiah (2018) serta sebesar 5.937,85 pada tahun 2019. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.17.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota
Jambi Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.702,83	5.000,77	5.154,58	5.607,61	5.937,85
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.411,11	3.424,91	3.394,85	3.563,88	3.718,73
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	24,78	23,49	21,12	21,33	20,53
2.	Atas Dasar Harga Konstan	22,62	21,61	20,04	20,10	19,89

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 2.17, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.702,83 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp.5.937,85 milyar pada tahun 2018. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur

Tabel 2.18.
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51
Pembentukan Modal Tetap Bruto						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.993,04	5.123,10	5.611,09	6.247,44	6.247,44
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4.033,81	4.014,60	4.223,48	4.179,20	4.383,19
Persentase PMTB thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	26,31	24,06	22,32	23,26	21,75
2.	Atas Dasar Harga Konstan	26,75	25,33	24,94	23,57	23,44

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

7. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 39,96 juta rupiah naik menjadi 51,02 juta rupiah pada tahun 2019. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2015 PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp. 27,52 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 32,50 juta rupiah pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB (miliar rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.293,31	28.858,83	30.855,90
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.661,33	19.655,79
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	39.963,50	41.827,00	44.481,10	48.369,10	51.023,58
2.	Atas Dasar Harga Konstan	27.517,55	29.026,25	29.990,39	31.264,70	32.502,98
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	3,66	5,48	3,32	5,48	3,96

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

8. Inflasi

Laju inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang dimana laju inflasi terendah pada tahun 2015 sebesar 1,37% dan laju inflasi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 4,54%. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20.
Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Inflasi	1,37	4,54	2,68	3,02	2,97	2,92

Sumber : BPS Kota Jambi, 2020

Inflasi Kota Jambi tahun 2019 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,13 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,28 persen; kelompok kesehatan 0,10 persen dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,58 persen.

Jika melihat inflasi pada tahun 2019 yang terjadi pada bahan makanan maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuhkan kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

9. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Jambi Tahun 2019 mencapai 0,33 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang dan angka ini lebih rendah dari Koefisien Gini Provinsi sebesar 0,346. Keadaan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi telah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Gambar 2.8.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2015-2019

2.1.2.1. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.1.1. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antaralain tingginya angka melek huruf (AMH) dan tingginya angka rata-rata lama sekolah (RLS). Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang mengajar telah mencukupi untuk semua murid serta kualitas gurupun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21.
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	406.997	461.118	461.198	461.198	462.208
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	407.235	461.203	461.257	461.257	461.487
Angka melek huruf	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Melek huruf dapat disebut juga dengan melek aksara yaitu kemampuan membaca dan menulis, jadi angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, dimana pada data tersebut angka melek huruf untuk Penduduk diatas 15 tahun sudah sangat baik, yakni tersisa 0.01 yang harus menjadi perhatian kita.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Peningkatan angka RLS dari 10,63 Tahun 2015 menjadi 10,68 pada Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi periode pembangunan lima Tahun yang lalu. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22.
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,63	10,65	10,66	10,67	10,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

3. Angka Harapan Lama Sekolah

HLS Kota Jambi dari 13,80 poin pada tahun 2015 menjadi 14,64 poin pada Tahun 2019 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan cenderung akan terus meningkat seiring dengan perkembangan angka harapan lama sekolah. Gambaran perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Lama Sekolah	13,80	13,81	14,63	14,62	14,64

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

4. Angka Partisipasi Kasar

Secara umum, capaian APK pada tingkat SD/MI dari Tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dan berada pada angka di atas 100%. Perkembangan angka partisipasi kasar di Kota Jambi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C
di Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SD	71.011	71.197	73.485	73.521	57.383
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	65.228	65.393	66.234	66.234	58.097
3	APK SD/MI, Paket A	108,87%	108,88%	110.95%	111,00%	101,00
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMP	34.894	35.962	34.985	34.992	26.900
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	31.614	32.574	31.236	31.236	30.754
3	APK SMP/MTS, Paket B	110,38%	110,40%	112.00%	112,02%	112,04%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMA	35.015	33.710	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	38.532	35.984	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	APK SMA/SMK, Paket C	90,87%	93,68%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Persentase angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Persentase APK di Kota Jambi terhitung cukup tinggi bahkan melebihi 100% untuk tingkat SD dan SMP, hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Secara umum, pada tingkat SD/MI capaian APK dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dan berada pada angka di atas 100%. Di tahun 2015 APK Kota Jambi mencapai 108,87% meningkat di tahun 2019 menjadi 101,00%.

Pada tingkat SMP, APK di tingkat SMP sudah mencapai lebih dari 100% dan cenderung meningkat. Di tahun 2015 APK Kota Jambi mencapai 110,38% meningkat di tahun 2019 menjadi 112,04 %.

Melihat angka capaian APK Kota Jambi di tiap tingkatan yang mendekati atau bahkan melebihi angka 100%, hal ini dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM di suatu wilayah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jumlah pendidikan tingkat tertentu pada tahun bersangkutan dengan total jumlah penduduk pada tahun bersangkutan.

Adapun angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Jambi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25.
Angka Kelulusan SD/MI di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	11.164	11.164	11.074	11.308	11.308
2.	Jumlah SiswaSD	11.164	11.164	11.074	11.308	11.308
3.	Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Tabel 2.26.
Angka Kelulusan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	13.448	13.343	13.343	13.380	11.235
2.	Jumlah SiswaSMP/MTS	13.448	13.343	13.343	13.380	11.235
3.	Angka Kelulusan SMP/MTS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Persentase tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi cenderung stabil. Hal ini dikarenakan minat belajar penduduk di Kota Jambi mulai tingkat SD/MI dengan tingkat SMP/MTS terbilang tinggi. Selain itu juga jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTS tersebar di wilayah Kelurahan sehingga memudahkan murid untuk bersekolah.

6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat daya serap partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	65.154	65.325	66.212	66.212	57.383
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	65.228	65.393	66.234	66.234	58.097
3	APM SD/MI, Paket A	99,89%	99,90%	99.97%	99.97%	98.77%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	30.775	29.989	29.698	26.698	26.900
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	32.574	31.614	31.236	31.236	30.754
3	APM SMP/MTS, Paket B	94,48%	94,86%	95.08%	95.08%	87.46%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa Usia 16-18 tahun	28.436	28.182	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	35.984	36.550	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	APM SMA/SMK, Paket C	79,02%	79,22%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Tabel di atas menunjukkan APM Kota Jambi yang meningkat setiap tahunnya di setiap tingkatan. Untuk tingkat SD/MI, pada tahun 2015-2019 hampir seluruh anak usia sekolah bersekolah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya APM tingkat SD/MI yang berada pada 98,77%. Anak usia sekolah tingkat SMP/MTs, angka APM yang dicapai mengalami penurunan di kisaran 87,46%.

2.1.2.1.2. Kesehatan

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2014 - 2019 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kematian Bayi	9	9	12	7	7
2	Jumlah Kelahiran Hidup	12.745	10.430	13.039	10.603	10.833

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2020

Indikasi penurunan angka kematian bayi dari 9 jiwa pada Tahun 2015 menjadi 7 orang Tahun 2019 didukung dengan meningkatnya jumlah kelahiran hidup bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi periode 2015-2019. Hal ini didukung juga dengan fakta adanya penurunan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB di Kota Jambi yang semakin menurun dari 0,02% pada tahun 2015 turun menjadi 0,01 pada tahun 2019.

Tabel 2.29.
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	11	5	6	4	4
2	Jumlah Balita	58.012	52.933	72.942	47.805	45.853
3	Rasio PBGB (%)	0.02	0.01	0.01	0.01	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2020

2.1.2.1.3. Ketenagakerjaan

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Adapun rasio penduduk yang bekerja di Kota Jambi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016***	2017	2018	2019
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	254.351	-	268.264	277.802	286.387
2	Angkatan Kerja (AK)	274.449	-	284.018	297.290	307.022
3	Rasio PYB (%)	92,68	-	94,45	93,44	93,28

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2020

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

2.1.2.2.Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.31.
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Grup Kesenian (unit)	185	185	185	185	185
Jumlah Gedung Kesenian (unit)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2019

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah cabang olahraga. Dari tahun 2015 jumlah cabang olahraga sebanyak 28 menjadi 32 pada tahun 2019, dengan sebanyak 32 cabang olahraga tetapi jumlah gedung hanya 2 unit, artinya masih kekurangan gedung olahraga.

Tabel 2.32.
Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Cabang Olahraga (unit)	28	28	28	30	32
Jumlah Gedung Olahraga (unit)	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kota Jambi, 2020

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

2.1.3.1.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar

2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7–12; 13–15 dan 16–18 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7–12); usia SMP (13–15) dan usia SMA (16–18). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2019 untuk usia SD/MI sebesar 98,77 %, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 98,77 persen. Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 87,46 %. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2014 mengalami fluktuasi, walaupun mengalami kenaikan yang relatif stabil. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi. Semakin tinggi tingkatan sekolahnya semakin turun tingkat partisipasi sekolahnya.

Tabel 2.33.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	67.552	62.444	66.212	61.106	57.383
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	67.651	62.544	66.234	58.300	58.097
1.3.	APS SD/MI	99,85	99,84	99,99	100,48	98,77
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	30.357	27.918	29.698	26.651	26.900
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	32.420	27.968	31.236	30.795	30.754
2.3.	APS SMP/MTs	93,63	99,82	95,07	83,00	87,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

2. Ketersediaan Sekolah

Pada Tabel 2.30. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2015-2019. Secara umum, sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 2.34.
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1. SD/MI						
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	2.327	2.432	2.595	2.602	2.625
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	67.651	62.544	66.234	58.300	58.097
1.3.	Rasio	0.034	0.038	0.039	0,044	0,045
2. SMP/MTS						
2.1.	Jumlah gedung sekolah	1.007	1.007	1.125	1.131	1.135
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	32.420	27.968	31.236	30.795	26.900
2.3.	Rasio	0,033	0,036	0,037	0,037	0.042

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2019

Sebaran gedung sekolah perkecamatan dapat terlihat pada tabel 2.31, untuk tingkat SD dan SMP relatif sebaran antar kecamatan cukup merata. Persebaran ini dirasa masih kurang dalam menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid dapat melengkapinya.

Tabel 2.35.
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2019

No	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTs
1.	Kotabaru	27	10
2.	Alam Barajo	21	5
3.	Jambi Selatan	26	8
4.	Paal Merah	22	9
5.	Jelutung	25	7
6.	Pasar Jambi	6	3
7.	Telanaipura	22	10
8.	Danau Sipin	16	9
9.	Danau Teluk	6	1
10.	Pelayangan	4	1
11.	Jambi Timur	32	11
Kota Jambi		229	207

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36.
Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2019

No	Kecamatan	Ruang Kelas SD/MI			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Kotabaru	37	195	28	41
2.	Alam Barajo	39	152	5	16
3.	Jambi Selatan	28	212	42	37
4.	Paal Merah	18	176	8	37
5.	Jelutung	63	155	22	33
6.	Pasar Jambi	6	21	8	23
7.	Telanaipura	87	194	9	8
8.	Danau Sipin	5	180	2	8
9.	Danau Teluk	4	38	15	6
10.	Pelayangan	5	30	18	23
11.	Jambi Timur	73	235	28	33
Kota Jambi		340	1.588	185	232

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Sedangkan untuk kondisi ruang kelas SMP/MTS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37.
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2019

No	Kecamatan	Ruang Kelas SD/MI			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Kotabaru	38	122	34	18
2.	Alam Barajo	4	12	10	1
3.	Jambi Selatan	30	51	3	5
4.	Paal Merah	22	25	17	13
5.	Jelutung	49	8	4	4
6.	Pasar Jambi	36	16	2	7
7.	Telanaipura	64	116	4	17
8.	Danau Sipin	15	0	0	0
9.	Danau Teluk	0	17	0	0
10.	Pelayangan	0	6	6	0
11.	Jambi Timur	39	98	13	5
Kota Jambi		297	471	93	70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2019

3. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi

untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.38.

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.477	3.354	3.607	3.206	3.184
1.2.	Jumlah Murid	69.958	69.973	66.212	62.336	60.976
1.3.	Rasio	0,049	0,047	0,054	0,051	0,052
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	2.295	2.273	1.777	1.557	1.558
2.2.	Jumlah Murid	34.838	34.928	29.698	26.350	26.442
2.3.	Rasio	0,065	0,065	0,059	0,059	0,058

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2019 di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39.

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	412	8.254	0,049	139	2.179	0,063
2	Kec. Danau Sipin	294	4.620	0,063	167	3.397	0,049
3	Kec. Danau Teluk	104	1.456	0,071	28	584	0,047
4	Kec. Jambi Selatan	401	7.856	0,051	126	3.045	0,041
5	Kec. Jambi Timur	578	9.779	0,059	268	4.425	0,060
6	Kec. Jelutung	456	7.452	0,061	120	1.917	0,062
7	Kec. Kota Baru	392	7.650	0,051	310	4.802	0,064
8	Kec. Paal Merah	328	7.781	0,042	205	4.125	0,049
9	Kec. Pasar Jambi	79	1.258	0,062	133	1.258	0,105
10	Kec. Pelayangan	90	1.167	0,077	18	124	0,145
11	Kec. Telanai Pura	473	8.939	0,052	263	3842	0,068
Jumlah		3.607	66.212	0,052	1.777	29.698	0,058

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40.
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	11,164	11,164	11.074	11.308	11.438
2	Jumlah Siswa SD	11,164	11,164	11.074	11.308	11.438
3	Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	13,448	13,448	13.343	13.308	11.235
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	13,448	13,448	13.343	13.308	11.235
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMA/SMK	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Siswa SMA/SMK	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	Angka Kelulusan SMA/SMK	100.00%	100.00%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.1.2. Urusan Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Posyandu	460	460	460	460	460
2	Jumlah Balita	58.012	52.933	72.942	47.805	45.853
3	Rasio RPPB (%)	7,93	8,69	6,31	9,6	10,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2020

Tabel 2.42.
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Rumah Sakit	14	14	17	17	17
2	Jumlah Penduduk	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355
3	Rasio RSPP (%)	0,0024	0,0024	0,0029	0,0028	0,0028

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2020

Tabel 2.43.
Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	59	59	58	58
2	Jumlah Penduduk	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2020

Tabel 2.44.
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2014-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokter	255	255	259	326	868
2	Jumlah Penduduk	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355
3	Rasio DPP (%)	0,044	0,043	0,043	0,053	0,014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2020

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain : (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2019, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas ini sebanyak 20 unit terdiri dari puskesmas perawatan 4 unit, dan poskesdes 7 unit. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 45 orang, dokter gigi 25 orang, bidan 266 orang, dan perawat sebanyak 169 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan

rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu-dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjabtim.

2.1.3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi trigger bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah dalam kerangka rencana pembangunan yang mengedepankan aspek *thematic, holistic, integrative dan spatial*.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan operasional cost yang mumpuni untuk memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45

Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Variabel	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan Status Kota (Km)	506.670	510.452	510.452	510.452	510.452
2	Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)	431.380	456.000	466.140	484.930	444.390
3	Ratio Jaringan Jalan Kondisi Baik (%)	85,14	89,33	91,32	95,98	87,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima Tahun terakhir rasio panjang jalan yang baik di Kota Jambi setiap tahunnya terus mengalami perbaikan. Dimana peningkatan rata-rata ratio panjang jalan yang baik berkisar $\pm 3,61\%$ dan ditambah lagi dengan peningkatan panjang jalan status kota dari 506.670 Km pada tahun 2015 menjadi 510.452 Km pada Tahun 2019. Kondisi awal panjang jalan di Kota Jambi relatif baik dan setiap tahunnya ditargetkan terus mengalami

perbaikan. Namun demikian, guna menjawab persoalan perkotaan khususnya dalam mengurai titik kemacetan, kondisi panjang jalan yang baik saja tidaklah cukup, untuk itu Pemerintah Kota Jambi juga dituntut terus melakukan peningkatan lebar ruas jalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan yang beredar di Kota Jambi.

Sebagai wujud nyata dalam perencanaan berbasis spasial, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan inventarisir jalan kota berbasis GIS dan berdasarkan tata ruang. Disamping upaya peningkatan status jalan lingkungan menuju kawasan pemukiman yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait pengembangan kawasan perkotaan.

Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi dilakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Sedangkan pada aspek pengelolaan sumber daya air, dimulai dari Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari daerah hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu ± 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS

Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (sawmill/penggergajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir akses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Dimana sesuai SK Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase Kota Jambi adalah 127,2 Km dengan capaian realisasi panjang drainase dalam kondisi baik dalam tabel berikut.

Tabel 2.46.
Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2014-2019

No	Variabel	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Drainase Status Kota (Km)	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2
2	Panjang Drainase Kondisi Baik (Km)	70,27	105,94	107,10	114,48	127,2	127,2
3	Ratio Jaringan Drainase Kondisi Baik (%)	57,60	83,29	84,20	90,00	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima Tahun terakhir rasio panjang Drainase yang baik di Kota Jambi setiap tahunnya terus mengalami perbaikan. Khususnya pada periode 5 Tahun terakhir dimana peningkatan rata-rata ratio panjang drainase jalan yang baik berkisar $\pm 11,34\%$ per Tahunnya.

Terkait dengan urusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini diwujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap Tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan.

Fakta dari adanya beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi rekomendasi perizinan serta pengawasan. Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Kota Jambi	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533
Luas RTH (Ha)	1.272,14	1.290,47	1.609,53	1.844,47	1.755,28
Ratio RTH (%)	7.26	7.36	9.18	10.52	10.76

Sumber : DPUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2020

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada tabel diatas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2015 baru mencapai 7,26% atau seluas 1.272,14 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan melakukan pendataan lebih valid dan terdigitasi dengan baik dan terus melaksanakan “*land banking*” setiap Tahunnya. Setelah dilakukan pendataan aset dan ruang hijau dengan digitasi, perbaikan data luasan rasio RTH Kota Jambi di

Tahun 2019 telah mencapai 10,75% atau seluas 1.755,28 Ha. Penambahan luasan RTH ini secara signifikan didapatkan dari data ruang hijau aset Provinsi Jambi, vegetasi taman pada median dan bahu jalan (*pedestrian*), serta data luasan pekarangan rumah hunian dan gedung non hunian.

Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum masih terus mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dari data yang saat ini masih 67,7 % yang artinya masih ada 32,3% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.

Tabel 2.48.

Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2014-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pelanggan (SL)	64.847	69.379	72.965	77.020	82.269
Cakupan Pelayanan (%)	68	72	75	77	67,7

Sumber : PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut : 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49.
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perumahan Formal	57	30	46		
2	Jumlah PSU yang sudah diserahkan ke Pemkot	2	6	1		
3	Jumlah PSU yang sudah diverifikasi	53	19	13		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2020

Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.50.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	-	300	232		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2020

Tabel 2.51.
Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak	Jumlah RTLH
Alam Barajo	7.064	6.122	942
Danau Sipin	7.722	6.367	1.355
Danau Teluk	2.357	1.855	502
Jambi Selatan	8.189	7.667	522
Jambi Timur	11.895	10.856	1.039
Jelutung	13.224	9.441	3.783
Kotabaru	30.216	27.848	2.368
Paal Merah	34.098	33.001	1.097
Pasar Jambi	3.074	1.574	1.500
Pelayangan	2.641	1.789	852
Telanaipura	11.390	10.121	1.269
Total	131.870	116.641	15.229

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2020

Berdasarkan yang disampaikan pada tahun 2017 jumlah RTLH sebanyak 15.229 unit dan telah dilaksanakan beberapa tahun sehingga yang tersisa saat ini sebanyak 14.697 unit. Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi

pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 206,24 hektar. Dan pada tahun 2019 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 152,99 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.52.
Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2019 Berdasarkan SK Walikota

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam		10,06	
2.	Kawasan Kumuh Beringin		23,02	
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih - Sei. Asam		45,41	
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung		3,71	
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh		18,01	
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru		13,93	
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar		3,41	
8.	Kawasan Kumuh Jelutung		27,03	
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil		9,89	
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya		4,12	
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya		3,41	
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas		2,60	
13.	Kawasan Kumuh Legok		147,34	
14.	Kawasan Kumuh Murni		14,04	
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin		1,61	
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang		64,19	
17.	Kawasan Kumuh Kasang		36,28	
18.	Kawasan Kumuh Rajawali		29,41	
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya		9,97	
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari		51,72	
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang		53,98	
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana - Budiman		55,13	
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincih		8,79	
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah		41,13	
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali		14,16	
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali		18,09	
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur		36,16	
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura		2,55	
29.	Kawasan Kumuh Rawasari		7,29	
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar		13,64	
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete		6,97	
32.	Kawasan Kumuh Jelmu		12,14	
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut		31,10	
34.	Kawasan Kumuh Tengah		14,26	
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor		2,80	
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir - Tanjung Raden - Pasir Panjang		70,54	
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu		23,91	
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong - Olak Kemang		54,78	
TOTAL			986,57	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2020

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini jumlah titik lampu jalan yang telah terpasang sampai dengan di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53.
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang Terpasang Tahun 2019
di Kota Jambi

Kecamatan	Jumlah Lampu Terpasang
Telanaipura	1.735
Jambi Selatan	1.680
Jambi Timur	1.610
Pasar Jambi	978
Pelayangan	481
Danau Teluk	522
Kotabaru	3.124
Jelutung	1.770
Alam Barajo	2.784
Danau Sipin	1.358
Paal Merah	2.142
TOTAL	18.184

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2020

Dari total sebanyak 18.184 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energy (LED) kapasitas 150 watt sebanyak 1.690 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 1.559 titik, 40 Watt Sebanyak 623 Titik, 90 Watt Sebanyak 609 Titik, dan 180 Watt Sebanyak 58 Titik.

Untuk jumlah pemakaman umum yang ada di Kota Jambi yang juga merupakan tanggung jawab urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2019 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 926.368 M².

2.1.3.1.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2019, jumlah personil Satpol PP 263 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1 : 1500, dengan jumlah penduduk ± 609.620 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2019 adalah 582 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan 9,39.

Tabel 2.54.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2019

Uraian	Tahun 2019	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	$\frac{263 \text{ orang}}{609.620 \text{ jiwa}}$	0,04
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	$\frac{582}{62}$	9,39

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55.
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
Di Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pelanggaran Perda	20	24	tad	tad	tad
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	20	24	tad	tad	tad
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	tad	tad	tad
Jumlah Pelanggaran K3	552	703	tad	tad	tad
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	552	703	tad	tad	tad
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	tad	tad	tad

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2020

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

2.1.3.1.1.6. Urusan Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada tahun 2019 sebanyak 27.711 orang lansia potensial dan 8.482 lansia miskin, untuk tahun 2019 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 113 orang mendapat bantuan APBN. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum

maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2019 ditetapkan sebanyak 10.423 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang di dalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 647 orang PMKS (6,20%).

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS dari tahun 2015-2018 meningkat terus namun tahun 2019 menurun menjadi 647 orang, sementara jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 647 orang atau sekitar 6,20%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tingginya partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.

Tabel 2.56.
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Populasi PMKS	7.563	9.039	10.569	12.099	10.423
2.	Jumlah Penanganan	4.671	5.317	7.398	7.993	647
3.	Persentase	61,92	70,00	70,00	66,06	6,20

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2020

Selain data PMKS, terdapat juga beberapa terdapat beberapa jenis kasus/pelanggaran yang telah diidentifikasi oleh kepolisian resort beserta pengadilan di wilayah Kota Jambi. Beberapa data yang terhadap pelanggaran sosial tersebut dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57.
Data Jumlah Pelanggaran/Kasus Tahun 2019 di Kota Jambi

No	Uraian	Jumlah Kasus
1	Pelanggaran lalu lintas	
2	Kecelakaan lalu lintas	
3	Tahanan kepolisian	
4	Perkara pidana anak	33
5	Perkara pidana biasa	
6	Perkara tipikor	
7	Perkara pidana cepat	
8	Perkara lalu lintas di pengadilan	
9	Perkara pidana cepat di pengadilan	

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2. Urusan Layanan Wajib Non Dasar

2.1.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.

Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2014-2016 dan pada tahun 2017 seiring dengan pembentukan perangkat daerah urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.58.
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016***	2017	2018	2019
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	254.351	-	268.264	277.802	286.387
2	Angkatan Kerja (AK)	274.449	-	284.018	297.290	307.022
3	Rasio PYB (%)	92,68	-	94,45	93,44	93,28

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2020

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, adapun kondisi di Kota Jambi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.59.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan Kerja (AK)	274.449	-	284.018	297.290	307.022
2	Penduduk Usia Kerja (PUK)	428.542	-	443.343	451.865	451.865
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	64,04	-	64,06	65,79	66,84

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2020

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada tahun 2019 di kota Jambi sebesar 66,84% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.665	2.237	2.703	2.156	1.854
2	Pencari Kerja Yang Mendaftar	4.692	5.903	5.431	5.102	4.554
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan (Rasio) %	35,49	37,90	49,77	42,26	40,71

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2020

Dari data tersebut saat ini di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun.

Sedangkan kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.61.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengangguran Terbuka	20.098	dt	15.754	19.488	20.635
2	Angkatan Kerja (AK)	274.449	dt	284.018	297.290	307.022
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	7,32	dt	5,55	6,56	6,72

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2020

***** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran**

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2019 sekitar 6,72 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

2.1.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2014 - 2018 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak

mengalami peningkatan justru penurunan dari tahun ke tahun hal disebabkan setiap tahunnya bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara jumlah pegawai perempuan baru relatif kecil terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.62.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	93.797	81.588	-	101.423	113.460
2	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	5.156	5.227	4.554	4.440	4.315
3	Persentase	5.50%	6.41%	-	4.40%	3.80 %

Sumber: - BKPSDMD Kota Jambi, 2019 - BPS Provinsi Jambi 2019

Disamping itu, selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu lima tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.63.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	82.761	92.842	-	101.423	113.460
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	37.959	39.105	-	52.466	53.065
3	Persentase	45.87%	45.87%	-	51.73%	46.77 %

Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2019 dan BPS Provinsi Jambi 2019

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2014-2018, persentase rata-rata perempuan yang bekerja mengalami peningkatan.

Tabel 2.64.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	209.688	213.694	-	221.219	225.580
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	95.991	99.978	-	107.570	122.066
3	Persentase	45.78%	46.79%	-	48.63%	54.11%

Sumber : BPS Kota Jambi, 2019 dan BPS Provinsi Jambi 2019

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat pada tahun 2015 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 60 kasus, namun pada tahun 2019 mencapai 85 kasus, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 36,4% atau 44 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2015-2019 berfluktuasi, yaitu sebanyak 60 kasus (tahun 2015), 67 kasus (tahun 2017), 85 kasus (tahun 2018) dan pada tahun 2019 sebanyak 85 kasus, namun dari fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.

Tabel 2.65.
Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak	60 kasus	44 kasus	67 kasus	85 kasus	85 kasus
2	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	60 kasus	44 kasus	67 kasus	85 kasus	85 kasus
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu : (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas / keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas / keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain : beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi tahun 2019 adalah : dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.188 kkal/kap/hari (101,7% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 135 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 82,2 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 47,34 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar defiasi eror yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil estimasi dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Susenas. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menggunakan data pangan yang dikonsumsi namun

tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut di asumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka over supplay diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.66.
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2019

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	271,5	1.130,7	51,7	52,6	0,5	25,8	26,3	25,0	25,0
Umbi-umbian	42,2	105,8	4,8	4,9	0,5	2,4	2,5	2,5	2,5
Pangan Hewani	135,0	284,4	13,0	13,2	2,0	26,0	26,5	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	24,7	222,4	10,2	10,3	0,5	5,1	5,2	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	82,2	29,8	1,4	1,4	0,5	0,7	0,7	1,0	0,7
Kacang-kacangan	21	71,0	3,2	3,3	2,0	6,5	6,5	10,0	6,6
Gula	30,9	112,5	5,1	5,2	0,5	2,6	2,6	2,5	2,5
Sayur dan Buah	317,3	105,0	4,8	4,9	5,0	24,0	24,4	30,0	24,4
Lain-lain	42,4	126,3	5,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2020

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2019, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 90,70 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini berarti telah beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,7

2.1.3.1.2.4. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu : 1) Pemberian izin lokasi; 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) Pemberian izin membuka tanah dan 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.67.
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	608	614	614	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	295	295	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	49	48	48	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi, 2020

Selain dari itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.68.
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Hak Milik	5.694	5.413	4.664	7.362	12.163
2.	Hak Guna Bangunan	461	788	736	991	3.458
3.	Hak Pakai	17	24	34	26	80
4.	Hak Pengelolaan	0	0	0	0	1
5.	Hipotek	9	15	12	11	61

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.6. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8 Sub-DAS dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sampel air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang. Hasil pemantauan Tahun 2019 Faktor pembatas (tekanan) ditunjukkan oleh parameter yang melampaui Baku Mutu, meliputi : DO, Sulfida sbg (H₂S) dan Detergent (MBAS).

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada tahun 2019 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 18. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2019 mencapai 100%.

Tabel 2.69.
Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemantauan status mutu air (sungai)	%	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan kualitas air	Titik	22	22	24	24	24
3.	Pemantauan kualitas udara	Titik	4	5	5	5	9
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jml Dok	1	6	0	2	7
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	Jml Dok	37	44	17	36	18
6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
7.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2020

Penanganan sampah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbunan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo dibandingkan dengan volume produksi sampah terangkut, rata-rata penanganan sampah pada tahun 2019 sebesar 79,11 persen.

Tabel 2.70.
Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	378.670	406.397	410.260	438.520	454.148
2.	Volume Produksi Sampah	578.475	555.627	560.037	566.594	574.072
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	65,46	73,14	73,26	77,35	79,11
4.	Jumlah TPS	402	443	455	445	445
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³ /hari)	906	994	1.018	1.018	1.018
6.	Jumlah Penduduk	576.067	583.487	591.134	597.043	604.923
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2020

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 39-46 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah E.Choli yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 82.

Tabel 2.71.
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Kualitas Air	46,05	45,79	39,41	43,24	43,32
2.	Indeks Kualitas Udara	95,33	93,05	91,27	91,27	91,30
3.	Indeks Tutupan Lahan	26,84	27,77	27,77	60,77	61,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2020

Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 61,00, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada tahun 2015 dan 2019 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{ITL} \times 40\%) \\
 \text{IKLH 2015} &= (46,05 \times 30\%) + (95,33 \times 30\%) + (26,84 \times 40\%) = 53,15 \\
 \text{IKLH 2019} &= (43,32 \times 30\%) + (91,30 \times 30\%) + (61,00 \times 40\%) = 64,79
 \end{aligned}$$

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks tahun 2015 ke tahun 2019 yaitu 53,15 menjadi 64,79.

2.1.3.1.2.7. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga.

Hingga tahun 2019, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 218.832 orang. Jika dipersandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk ber KTP-el baru mencapai 50,06%. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 95,68%

Tahun 2019 bayi lahir 1 tahun yang berakte kelahiran sebanyak 254.387 bayi dengan jumlah bayi lahir 616.359. Kondisi ini naik turun setiap tahunnya karena kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Dengan demikian, semua bayi yang lahir belum memperoleh akta kelahiran.

Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.72.
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	8.327	8.287	183.991	229.944	254.387
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	9.017	8.935	610.854	614.329	616.359
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	418.231	438.234	437.549	446.304	437.164
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	301.122	308.077	406.759	427.041	218.832
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	72,00%	70,30%	92,96%	95,68%	50,06%
5.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	266.605	273.263	276.650	281.998	286.265
6.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	74.241	78.811	82.346	90.755	123.449

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.8. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.73.
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70	70	73	73	73
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	70	70	73	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)					
	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)					
	a. Bidang Infrastruktur	202	324	310	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0

Sumber: BPMPPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2020

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada tahun 2019 telah tercapai 100%.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok.

Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

2.1.3.1.2.9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.74.
Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,04	2,05	2,05	2,06	2,3
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	74,34	71,27	72,25	73,50	61,06
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	91.431	91.431	68.280	67.513	66.948
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	72,32	67,99	68,78	69,99	59,31

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.10. Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75.
Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)					
	a. Terminal	5	5	2	2	2
	b. Pelabuhan					
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	5	5	2	2	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)					
	a. Jumlah total rambu (unit)	356	491	607	746	796
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	70	135	116	138	21
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	-	-	822	700	60
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	-	-	-	-	-
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill (%))	-	-	61%	61%	
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)					
	a. Jumlah halte (unit)	1	-	2	-	25
	b. Jumlah marka jalan (unit)	859	-	3.341	2.292	2.218
	c. Jumlah paku jalan (unit)	441	-	-	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)	35	38	38		--
7.	Jumlah ATCS (unit)	-	-	-	5	3
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	-	13.826	12.769		
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)					
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	262	403	414	455	457
11.	Jumlah korban kecelakaan					
	a. Meninggal	32	25	30	53	45
	b. Luka Berat	22	19	3	1	1
	c. Luka Ringan	379	656	655	723	661
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	160	263	433	534	815

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi di Kota Jambi dan jumlahnya cenderung menurun. Pada tahun 2016 kasus pelanggaran lalu lintas tercatat 13.826 kasus. Jumlah kasus ini berkurang sampai dengan 12.769 kasus di tahun 2017. Masih tingginya angka pelanggaran

lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi masih rendah.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 45 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari tahun 2015-2019.

Tabel 2.76.
Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1
2.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%					
3.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%					
4.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang					
5.	Rasio ijin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio					
6.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%					
7.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	113	94	115	81	113
	b. Mobil Bus	Unit	894	863	805	813	617
	c. Mobil Barang	Unit	27.259	27.508	25.342	28.700	25.664
	Jumlah kendaraan bermotoryang wajib uji (dua kali uji)	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	51	52	62	62	70

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	b. Mobil Bus	Unit	457	466	478	489	498
	c. Mobil Barang	Unit	14.488	15.829	16.876	18.928	20.707
8.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	45	45	45	20
9.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	-	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	-	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus						
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	60.000	60000	60.000	60.000	60.000
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	e. Biaya Denda	Rupiah					
	f. Buku Uji	Rupiah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	g. Tanda Samping Uji (Cat)	Rupiah					
	h. Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.11. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus sesuai kebutuhan rakyat, antara lain menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integritas system sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) tahun 2018 sebagai diamanatkan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti :

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	<1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

- Domain seperti kebijakan internal, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.
- Aspek Seperti Tata Kelola, layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Dan 35 Indikator, Merupakan informasi spesifik dari aspek pelayanan SPBE yang dinilai.

Penilaian SPBE yang belum terpenuhi sehingga Kota Jambi pada Tahun 2019 memperoleh Indeks SPBE dari Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 35 Indikator penilaian untuk Kota Jambi mendapat nilai 2,85 (Baik). Sedangkan Provinsi Jambi mendapat nilai indeks SPBE 1,61 (Kurang).

Sedangkan untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (media online); media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

Tabel 2.77.

Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Website milik Pemerintah Daerah	8	14	25	28	40
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	14,81	25,92	46,29	51,85	74,07
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:					
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-
	b. Media baru seperti website (media online).	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	-	-	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2020

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

Tabel 2.78.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	15	15	15	15	15
2.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	32	32	32	32	32
Total		47	47	47	47	47

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2020

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan terutama pada rentang waktu Tahun 2015 sampai Tahun 2017. Pada periode tahun ini semua penyiaran baik radio lokal maupun televisi nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali untuk penyiaran radio nasional yang jumlah konstan pada 1 penyiaran dan tv lokal yang jumlah konstan pada 2 penyiaran. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya Kota Jambi sehingga berdampak positif terhadap jumlah penyiaran untuk radio maupun televisi baik lokal maupun nasional.

Tabel 2.79.
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2015 s/d 2019 Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	8	13	13	13	13
2.	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Penyiaran TV Lokal	2	2	2	2	2
4.	Jumlah Penyiaran TV Nasional	10	14	14	15	15
Total		17	21	30	31	31

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.12. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Untuk tahun 2019 koperasi aktif jumlahnya tetap dibanding tahun 2018 dengan jumlah 218 unit, hal ini berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasannya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kuantitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja

koperasi semakin baik, sesuai dengan visi Kota Jambi “Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”,

Tabel 2.80.
Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koperasi aktif	362	377	381	218	218
2	Jumlah koperasi	787	801	804	674	381
3	Persentase koperasi aktif	46,00	47,07	47,39	32,34	57,22%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2020

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hingga tahun 2019 jumlah UMKM sebesar 10.763 unit dengan kondisi pada tahun 2015 sebesar 10.545 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perijinan pada tahun 2018 jumlah UMKM yang memiliki sertifikat sebanyak 539 unit. Sampai tahun

2019 secara keseluruhan UMKM yang telah memiliki sertifikat sebanyak 1.200 unit, terjadi peningkatan sebesar 122,63% dari tahun sebelumnya.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan sampai tahun 2019 baru 0,0078% pelaku UMKM atau sebanyak 95 pelaku yang mendapatkan kesempatan mengikuti pameran.

Tabel 2.81.
Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Unit	10.545	10.704	10.763	10.763	10.763
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0071	0,0070	0,0074	0,0078	0,0088
		Unit	75	75	80	95	95
3.	Cakupan bina kelompok UMKM	Unit	-	-	-	-	-
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	15	58	335	539	1.200
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	-	-	-	77,61	49

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.13. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim investasi di Kota Jambi saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa termasuk investasi di bidang perdagangan, namun potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri besar relatif terbatas karena keterbatasan lahan.

Perkembangan penanaman modal di Kota Jambi setiap tahunnya menunjukkan variasi dan juga semakin menjanjikan. Total realisasi investasi berskala nasional di Kota Jambi tahun 2019 sebesar Rp 1.055,27 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total realisasi Investasi tahun 2015 sebesar Rp 413,13 milyar.

Tabel 2.82.
Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)
Kota Jambi 2015-2019

NO	URAIAN	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (unit)	12	22	14	17	14
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Milyar)	413,13	541,94	640,53	317,73	1.055,27
3.	Jenis Izin yang Dilayani	43	51	73	73	
4.	Izin yang Diterbitkan	16.651	11.265	10.172	9.835	

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2020

Saat ini salah satu kendala penanaman modal di Kota Jambi adalah masih belum selesainya Rancangan Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Jambi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proses maupun waktu dalam menerbitkan rekomendasi perizinan. Untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Jambi perlu lebih ditingkatkan, terutama di event-event besar.

Tabel 2.83.
 Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN	160	957	2.859	2.909	8.731
2.	Jumlah seluruh PMDN	12	22	14	17	432
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	91	96	143	116	

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2020

Berdasarkan tabel di atas, daya serap tenaga kerja di Kota Jambi, pada tahun 2019 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 87% , terjadi peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 91% dan 96% dan kemudian tahun 2017 meningkat signifikan menjadi sebesar 143%. Pada tahun 2018 sebesar 116%.

2.1.3.1.2.14. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84.
 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah klub olahraga (buah)	28	28	28	28	30	218
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	28	28	28	28	30	32
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	15	15	14	20	50	50
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	6	6	6	6	6	6

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.15. Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota.

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Jambi telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi sebagai Perangkat Daerah yang memiliki Tupoksi penyelenggaraan urusan statistik. Hasil dari pelaksanaan urusan statistik antara lain adalah Buku “Kota Jambi dalam Angka” sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan Kota Jambi. Sejak tahun 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah kewenangan urusan statistik daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

2.1.3.1.2.16. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi adalah a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya di Kota Jambi, Urusan Persandian dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian berkaitan dengan ketersediaan Tempat Kegiatan Sandi (TKS), sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang persandian, dan informasi persandian.

Tabel 2.85.
Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah SDM sandi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi persandian	Orang	1	2	2	2	3
2.	Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	66,67	50	75	142	113

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.17. Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, dan sejarah serta dan pengembangan seni dan kebudayaan. Pelestarian dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni, pementasan seni budaya, lomba seni dan festival budaya serta pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Jambi.

Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
Capaian Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	5	5	5	5
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	-	-	-	-	8
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.18. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah meliputi :

- a) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup :
 - ✓ Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan lingkup :
 - ✓ Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Rasio kinerja urusan perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah koleksi judul buku yang terdapat di perpustakaan, dimana pada tahun 2015 hanya sebanyak 18.298 judul mengalami

peningkatan signifikan pada tahun 2019 menjadi 24.479 judul, secara perbandingan jumlah buku dengan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara detil pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.87.
Capaian Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah perpustakaan	Buah	1	1	1	1	370
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	14.896	28.435	37.337	30.274	32.423
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	18.298	19.569	20.128	23.142	24.479
4.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	41.326	44.639	46.180	50.021	55.352
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	576.067	583.487	591.134	614.329	615.675
6.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Jambi	Persen	7,17	7,65	7,81	8,14	8,99

Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2020

2.1.3.1.2.19. Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pelaksanaan

urusan kearsipan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.88.
Capaian Urusan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah OPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Buah	-	1	12	6	5
2.	Jumlah OPD	Buah	50	50	50	50	39
3.	Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	Persen	0	2	24	15	28

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, 2020

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pariwisata

Peran pariwisata di Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan peran yang berbasis potensi daerah dan memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan-peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata baik tingkat nasional maupun internasional.

Namun dalam hal peningkatan-peningkatan ini masih dihadapi berbagai masalah, diantaranya belum dimilikinya dokumen perencanaan yang terintegrasi di bidang pariwisata, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah dan belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergitas antar stakeholder bidang kepariwisataan. Saat ini di Kota Jambi telah terbentuk lembaga kepariwisataan antara lain PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia); ASITA (Asosiasi Indonesia Tours dan Travel). Permasalahan yang paling utama adalah Kota Jambi tidak memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada daerah lainnya, namun Kota Jambi terus berbenah dalam meningkatkan daya guna potensi destinasi pariwisata, seperti pembangunan tugu keris, pedestrian, Hutan Kota, taman-taman Kota hingga Danau Sipin. Jumlah restoran dan hotel berbintang maupun non bintang terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini menandakan geliat ekonomi Kota Jambi terus tumbuh.

Tabel 2.89.
Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,27	2,29	2,40	2,36	2,38
2.	Dokumen RIPPDA Kota Jambi	Dok	-	1	-	-	1
3.	Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan	sistem	-	-	-	-	4
4.	Jumlah Restoran	Unit	479	527	617	672	710
5.	Jumlah Hotel						
	a. Berbintang	unit	23	26	28	30	30
	b. Non Bintang	unit	68	67	68	69	69

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2020

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi selama 5 tahun terakhir yang peningkatannya belum signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi pada tahun 2015-2019 berada pada kisaran 2%, dimana kontribusi tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,40%.

2.1.3.2.2. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Tabel 2.90.
Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi Padi	ton	2.012	4.383	5.509,5	6.243	3.920
2.	Produksi Palawija	ton	1.292,92	3.012,26	6.750,36	2.250,00	2.807,73
3.	Produksi Sayur-sayuran	ton	54.570	8.497,8	6.660,31	5.138,9	5.485,21
4.	Produksi Tanaman Buah-buahan	kwintal	34.329,85	28.010,5	10.327,8	5.107,71	496,52
5.	Produksi Daging	Kg	5.451.876	6.024.856	tad	6.577.008	5.108.196
6.	Produksi Telur	Kg	2.665.976	2.818.750	tad	1.688.596	189.300

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Hasil padi sawah yang dipanen dalam Kota Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar 3.920 ton. Jika dibandingkan tahun 2015 yang produksi padi sebesar 2.012 ton berarti terjadi peningkatan produksi sebesar 1.908 ton.

Untuk Palawija, produksi palawija seperti jagung sebesar 351,5 ton, ubi kayu sebesar 6.294,5 ton, ubi jalar 95,28 ton, dan kacang tanah sebesar 54,08 ton. Data produksi tanaman buah-buahan di Kota Jambi seperti jeruk siam 74,8 ton, alpukat 485,5 ton, pepaya 3.658,04 ton, dan pisang 2.037,49 ton, mangga dan rambutan masing-masing sebesar 486,05 ton dan 1.131,57 ton

Sarana prasarana milik Pemerintah Kota Jambi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

2.1.3.2.3. Perdagangan

Perdagangan secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional). Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri saja atau nasional. Penjual, pembeli, dan tempat transaksinya juga hanyabersifat domestik atau dilakukan di dalam negeri saja. Sedangkan perdagangan luar negeri/internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud yaitu :

- 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
- 2) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- 3) Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- 4) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- 5) Perlindungan konsumen.

Sedangkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan luar negeri meliputi :

- 1) Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- 2) Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- 3) Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan yang dimiliki Kota Jambi antara lain adalah tersedianya pasar. Tahun 2019 tercatat ada 20 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi dan hanya 6 unit yang kategori sebagai pasar tradisional/rakyat. Dari total seluruh pasar tersebut hanya 1 unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 3 lokasi, tidak terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3 lokasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; Pemantuan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin/periodik; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.91.
Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pasar yang diawasi						
	a. Pasar Tradisional	Unit	6	6	7	7	6
	b. Pasar Modern	Unit	-	-	-	-	-
2.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	frekuensi	-	-	-	365 hari	365 hari
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	%	28,17	29,64	30,24	30,83	31,48
4.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	5.999,14	7.223,21	7.952,23	8.896,46	9.712,78
5.	Jumlah pasar daerah	Unit	19	19	21	21	20
6.	Jumlah pasar daerah kategori sehat	Unit	1	1	1	1	1
7.	Lokasi PKL yang tertata	Lokasi	-	2	2	3	3

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2020

2.1.3.2.4. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar yang lebih ketat lagi ketika telah berlakunya Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*, yang berlaku sejak Tahun 2015. Produk dari luar negeri terutama negara-negara ASEAN semakin deras masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir.

Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standardisasi mutu, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar.

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti Jumlah dan pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah) serta kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.

Tabel 2.92.
Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah IKM	Unit	2.403	2.884	2.990	3.120	3.562
2.	Jumlah IKM yang mendapat binaan atau bantuan	Unit	-	402	792	390	407
3.	Jumlah sentra industri yang berkembang	Sentra	-	3	3	3	3
4.	Jumlah IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	20	30	45	34	52
5.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi HaKI	Unit	10	20	35	10	-
6.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	%	11,59	10,88	10,77	10,36	10,38
7.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	2.467,77	2.655,30	2.830,67	2.998,23	3.195,26

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah IKM mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2015 hingga 2019, yaitu dari 2.403 unit menjadi 3.562 unit. Untuk IKM yang mendapat binaan/bantuan, mengikuti promosi/pameran serta mendapatkan fasilitas HAKI memang terjadi penurunan.

Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kota Jambi terus menunjukkan peningkatan dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB selama periode tahun 2015-2019. Peningkatan sektor industri ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah sentra industri yang berkembang setiap tahunnya.

2.1.3.2.5. Kelautan dan perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kota Jambi sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kontribusi sektor perikanan selama beberapa tahun terakhir relatif kecil akan tetapi terus menunjukkan tren naik terhadap PDRB di Kota Jambi dari sisi nilai tetapi dilihat dari persentasenya tren tiap tahun menurun, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berada pada kisaran 0,06%-0,07%.

Potensi areal perikanan di Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 4.877,06 Ha, terdiri dari perairan umum 687 Ha, kolam 3612,77 Ha, dan Keramba 576,99 Ha. Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang berfluktuasi. Produksi ikan pada tahun 2015 sebesar 2.329,7 ton meningkat menjadi 4.189,76 ton pada tahun 2019.

Tabel 2.93.

Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015 (ton)	2016 (ton)	2017 (ton)	2018 (ton)	2019 (ton)
1	Perairan Umum	678,27	908,34	751,20	670,8	687,3
2	Sawah	0	0	0	0	0
3	Tambak (Kolam)	1.246,75	1.130,75	979,97	1.395,7	3.612,77
4	Keramba	1.082,95	1.435,98	1.409,55	996,46	576,99
	Total	3.007,97	3.475,06	3.140,72	3.062,96	4.877,06

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2020

2.1.3.3.Fokus Layanan Penunjang Urusan

2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down dan Bottom-up. Di Kota Jambi dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan multisektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multisektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's. Berbagai dokumen perencanaan multi sektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Jumlah dokumen perencanaan per tahun yang telah disusun terus meningkat selama periode tahun 2015-2019, yaitu dari 6 dokumen menjadi 7 dokumen. Dari beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun, sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% yang diimplementasikan, yaitu

ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh PD lainnya.

Hal ini menjadi salah satu indikasi masih belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini adalah banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multi sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Penyebab lainnya adalah masih kurangnya kapasitas SDM perencana yang salah satu indikasinya dari masih terbatasnya jumlah Perencana di Kota Jambi.

Tabel 2.94.
Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan	Dok/th	6	6	6	6	7
2.	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang tersusun	Dok/th	2	1	1	3	4
3.	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan, social dan budaya yang tersusun	Dok/th	7	2	4	3	4
4.	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang tersusun	Dok/th	5	4	3	5	4

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2018

Selain dari jumlah dokumen dan implementasi perencanaan dalam pembangunan, tidak kalah penting dilihat dari sisi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.95.
Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah program RKPD	59	59	59	59	59
2.	Jumlah program RPJMD	59	59	59	59	59
3.	Ratio penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2020

2.1.3.3.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 19,00% pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 23,15% pada tahun 2019. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah : PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan surat edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.96.
Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	52,12	49,31	56,85	58,37	41,89
2.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	19,00	18,30	26,50	20,85	23,15
3.	Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya (%)	11,90	8,50	9,00	11,55	13,37
4.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	85,45	86,04	89,54	89,95	89,86
5.	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	86	91	102	100,89	103,06
6.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Disclemer	WTP	WTP	WTP	Menunggu Hasil
7.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	26,99	27,79	28,02	28,24	26,01
8.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	48,55	47,28	40,71	38,94	40,60
9.	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, 2020

2.1.3.3.3. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan *"merit system"* semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Jambi dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik (public servant). Indikator kinerja dalam rangka mendorong padapeningkatan

disiplin, tertib hukum dan pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha secara professional.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam diklatpim dalam penyesuaian jabatan, menerapkan diklat pra-jabatan bagi CPNS dan melakukan diklat teknis fungsional.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam kurun waktu 2015-2019 yang tersebar di 50 perangkat daerah.

Tabel 2.97.
Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ASN	Orang	8.030	6.886	6.581	6326	6.213
2.	Jumlah ASN berpendidikan S-3	Orang	13	8	10	6	5
3.	Jumlah ASN berpendidikan S-2	Orang	416	323	319	333	327
4.	Jumlah ASN berpendidikan S-1	Orang	4.602	3.855	3.722	3.640	3.689
5.	Jumlah ASN berpendidikan SLTA/Sederajat	Orang	1.635	1.445	1.307	1.184	1.087
6.	Jumlah ASN berpendidikan SLTP/Sederajat	Orang	122	108	97	79	70
7.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim II	Orang	1	0	2	10	5
8.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim III	Orang	11	19	19	15	5
9.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim IV	Orang	0	0	7	29	30
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	Orang	80	370	240	190	120
11.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	243	0	1	1	239
12.	Jumlah ASN pensiun setiap tahun	Orang	245	364	343	317	442
13.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang ditangani	Kasus	88	40	36	36	30
14.	Persentase pengelolaan data kepegawaian	%	88	90	95	95	97

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2020

2.1.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu urusan penunjang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penelitian dan pengembangan. Jumlah kajian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi Hal ini juga disebabkan masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kota Jambi.

2.1.3.3.5. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada

tahun 2019 mencapai 430 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai tahun 2019, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 100%.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Jambi telah meraih skor 71,82. Dengan pencapaian skor tersebut artinya, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi.

Tabel 2.98.
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	66,7	66,2	64,52	60,07	60
2.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	96	89	68	322	430
3.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori dan pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	10%	20%	30%	40%	40%
5.	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota	level	N/A	N/A	N/A	Level II	Level III
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,27	55,09	55,74	71,28	71,82

Sumber: Inspektorat Kota Jambi, 2020

2.1.3.2.1. Sekretariat Dewan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kota Jambi tahun 2019 sebanyak 45 orang yang berasal dari 8 fraksi di DPRD, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut, 8 anggota dewan dari Fraksi Demokrat Kebangsaan, 6 anggota dewan dari Fraksi PDI-P, 7 anggota dari fraksi Gerindra, 4 anggota dari fraksi PAN, 5 anggota dewan dari fraksi Nasdem, 5 anggota dewan dari fraksi PKS, 4 anggota dari fraksi Golkar dan 6 anggota dewan dari fraksi PDRB.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) Memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) Pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.99.
Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	PERDA yang ditetapkan	Perda	17	15	12	12	11
2.	RAPERDA yang disetujui dalam Prolegda	Ranperda	22	24	17	18	17
3.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Kep	29	36	30	30	41
4.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi Kota Jambi, 2020

2.1.3.2.2. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Pembangunan, 4) Bagian Perekonomian, 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Kerjasama Daerah, dan 9) Bagian Humas

Tabel 2.100.
Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai LPPD	2,84 (tinggi)	3,06 (sangat tinggi)	Hasil blm keluar	2,9893 (Tinggi)	Hasil belum keluar
2.	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	16	16	5	7	10
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	42	80	5	88	66
4.	Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	1	1	5	4 Perda 1 Perwal	4 Perda 3 Perwal
5.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai LKJiP	n/a	CC	B	B	B
7.	Jumlah kerjasama daerah	7	13	23	29	52
8.	Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2020

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies (CURDS)*, Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari

daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

2.1.4.1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014 - 2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan,

baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.101.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
di Kota Jambi Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	12.086,27	13.123,57	14.212,68	15.432,00	16.415,75
ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	63,69	61,63	58,24	58,69	56,74
Rata-rata konsumsi RT					
ADHB (Juta Rp)	89,73	96,04	102,69	110,05	115,70
ADHK 2010 (Juta Rp)	71,26	73,71	76,06	78,95	80,94
Rata-rata konsumsi Perkapita					
ADHB (Juta Rp)	21,28	22,78	24,36	26,11	27,45
ADHK 2010 (JutaRp)	16,90	17,48	18,04	18,73	19,20
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	3,76	3,44	3,19	3,81	2,51
Perkapita	3,76	3,48	3,19	3,81	2,51

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Selama periode 2014 – 2018 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 63,69 persen (2014); 61,63 persen (2015); 58,24 persen (2016); 58,69 persen (2017) dan 56,74 persen (2018). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 63,69 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 56,74 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi per-rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 89,73 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 96,04 juta Rupiah (2015); 102,69 juta Rupiah (2016); 110,05 juta Rupiah (2017) dan 115,70 juta Rupiah (2018). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 2 s.d 3 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,81 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 16,90 s.d 27,45 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.102.
Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Makanan, Minuman, dan Rokok	42,98	43,42	42,93	44,29	44,55
Pakaian dan Alas Kaki	5,52	5,59	5,50	5,20	5,08
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,40	11,13	11,64	12,01	12,65
Kesehatan & Pendidikan	10,26	10,35	10,71	10,43	10,22
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	27,70	27,14	26,82	25,63	25,07
Hotel & Restoran	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22
Lainnya	1,95	2,17	2,20	2,23	2,21
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Secara rata-rata dari tahun 2014 s.d 2018, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Jambi, bahwa konsumsi bukan makanan

tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 42,98 persen (2014); 43,42 persen (2015); 42,93 persen (2016); 44,29 (2017) dan 44,55 (2018).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan tahun 2018 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

b. Aksesibilitas Daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103.

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Jalan (KM)	506,27	510,45	510,45	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan					
	a. Roda 4	dta	dta	dta	dta	dta
	b. Roda 2	dta	dta	dta	dta	dta
3.	Rasio	dta	dta	dta	dta	dta

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2020

c. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.

Tabel 2.104.
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih
di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ledeng (Perpipaan)	64.847	69.379	72.965	164.489	237.858
2.	Sumur Lindung	21.862	22.148	20.435	40299	60.734
3.	Sumur Tidak Terlindung	4.980	3.201	3.241	34144	37.385
4..	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	109.502	110.270	122.389	337.604	459.993
5..	Jumlah Rumah Tangga	124.216	125.007	130.678	557.435	688.113
6..	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	88,15	88,21	93,66	60,56	66,85

Sumber: BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2020

d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 290.887 rumah tangga. Adapun pada tahun 2018, rumah tangga pengguna listrik meningkat menjadi 458.187 rumah tangga. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.105.
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Listrik
di Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Rumah Tangga	290.887	371.983	247.105	428.587	458.187
2.	Jumlah Pelanggan PLN	317.252	406.973	271.731	470.225	502.116
3.	Rasio Elektrifikasi	1,09%	1,09%	0,99%	1,10%	1,10%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan,

pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106.
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2019

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
3.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	4 Hari Kerja	-	Gratis
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	4 Hari Kerja	-	Gratis
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
6.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	4 Hari Kerja	13 dokumen	Gratis
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4 Hari Kerja	7	disesuaikan
8.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)	4 Hari Kerja	5	disesuaikan
9.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 Hari Kerja	7	Gratis
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	4 Hari Kerja	7	Gratis

Sumber : DPMPSTSP Kota Jambi, 2020

b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 256.028.625.688,65 atau tercapai sebesar 105,87% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 242.090.000.000,00 selain pajak daerah terdapat retribusi yang pada tahun 2019 sebesar Rp. 38.541.261.596 atau sebesar 85,22% dari target sebesar Rp. 45.068.647.000,00. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir.

Tabel 2.107.
Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pajak Daerah					
	Target	190.882.000.000	187.252.000.000	198.940.000.000	203.500.000.000	242.090.000.000
	Realisasi	147.889.448.423	158.740.884.099	201.429.136.841	215.444.433.999	256.028.625.688
	Persentase	77%	85%	101%	105,87%	105,76%
2.	Jumlah Retribusi					
	Target	63.057.026.000	73.679.471.000	46.403.840.000	44.012.000.000	45.068.647.000
	Realisasi	58.812.352.554	80.679.063.851	43.077.425.944	40.389.059.087,09	38.541.261.596
	Persentase	93%	110%	93%	91,77%	85,22%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2020

c. Angka Kriminalitas

Jika dilihat dari kejadian kejahatan tahun 2019 tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang.

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 2.108.
Jumlah Kasus Kejahatan Di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kasus Narkoba	194	209	141		
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	5	5		
3.	Jumlah Kasus Seksual	11	29	9		
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	352	265	213		

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
5.	Jumlah Kasus Pencurian	596	614	686		
6.	Jumlah Kasus Penipuan	626	616	549		
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	-	-		

Sumber: Polresta Jambi, 2020

d. Angka Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi didominasi oleh demonstrasi politik. Salah satu permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.109.
Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Demonstrasi Politik	-	tad	tad	6	5
2.	Demonstrasi Ekonomi	65	tad	tad	-	-
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	tad	tad	-	1
Jumlah		65	tad	tad	6	6

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi, 2020

2.1.4.4.Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kota Jambi diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja sebanyak 274.449 meningkat menjadi 307.022 pada tahun 2019. Dari sisi jenjang pendidikan, angkatan kerja Kota Jambi juga memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus meningkat disesuaikan dengan perkembangan harga serta kemampuan pemberi kerja. Nilai UMK Kota Jambi tahun 2015 sebesar Rp. 1.710.000 per pekerja per bulan dan meningkat menjadi Rp. 2.839.728 per pekerja per bulan pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan positifnya pertumbuhan perekonomian di Kota Jambi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Tabel 2.110.
Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2015-2019

Tahun	Angkatan Kerja		Total Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
	Bekerja	Pengangguran				
2015	254.351	20.098	274.449	154.093	64,04	7,32
2016	BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016					
2017	268.264	15.754	284.018	159.325	64,06	5,55
2018	277.809	19.488	297.290	154.575	65,79	6,56
2019	283.387	20.635	307.022	152.340	66,84	4,19

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2020

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019 mencapai 4,19% mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ketersediaan angkatan kerja yang cukup banyak dengan tingkat pendidikan yang memadai memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tantangan tersebut harus dijawab oleh pemerintah dengan membuat kebijakan - kebijakan pembangunan yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat menyerap surplus tenaga kerja cukup banyak (*labour intensive*).

Tabel 2.111.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan S1	54.668	55.491	42.479	45.329	47.839
2.	Jumlah lulusan S2	4.556	4.610	3.637	3.892	4.135
3.	Jumlah lulusan S3	406	409	254	269	279
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	61.645	62.526	46.370	49.490	52.253
5.	Jumlah penduduk	576.067	583.487	610.854	614.329	616.355
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 ((4/5)x10000)	1.070,10	1.071,59	759,10	805,59	847,77

Sumber: Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Jambi, 2020

b. Tingkat Ketergantungan

Selain itu, salah satu fokus dalam aspek sumber daya manusia adalah angka *dependency ratio*/rasio ketergantungan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan SDM produktif (15-64) tahun terhadap usia nonproduktif (0-15 dan 65+). Per tahun 2019, rasio ketergantungan Kota jambi berada pada angka 40,02 dimana angka ini terus menurun dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2015 sebesar 41,69 menjadi 40,02 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan

perkembangan yang baik, dimana masyarakat dengan usia produktif memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang kurang produktif.

Tabel 2.112.
Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	148.672	148.302	147.899	147.302	147.827
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	20.828	21.826	22.947	24.189	25.014
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	169.500	170.128	170.846	171.491	172.841
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	406.566	413.359	420.288	426.612	431.897
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	41.69	41.16	40,65	40,20	40,02

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Jambi secara umum dapat terpilah dalam Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; serta Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan di Kota Jambi diidentifikasi melalui analisa data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Jambi, bahwa tidak semua data mencerminkan peningkatan atau penurunan capaian sasaran. Namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Jambi dengan dasar bahwa Kota Jambi sebagai Ibukota dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Jambi.

Berdasarkan presentase jumlah penduduk miskin Kota Jambi dari tahun ketahun mengalami penurunan tetapi apabila dilihat dari jumlah penduduk mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah warga miskin berdasarkan data BPS Kota Jambi penduduk miskin pada tahun 2017 yaitu sebesar 52.080 atau 8,84% dari total jumlah penduduk. Data menunjukkan tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Jambi disebabkan oleh masih rendahnya pemberdayaan penduduk miskin, untuk itu diperlukan penyediaan akses kebutuhan dasar (misalnya: pendidikan, kesehatan, air bersih) dan pemberdayaan warga miskin; serta peningkatan perlindungan masalah sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya dengan target akhir RPJMD

maka **permasalahan pembangunan daerah** Kota Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan akar permasalahan yaitu: Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan (Rendahnya kualitas daya saing siswa, Rendahnya daya tampung sekolah, Rendahnya kualitas lulusan yang dapat diterima di SMA favorit, Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, Rendahnya kompetensi tenaga pendidik, Tidak optimalnya penerapan Kurikulum K13, Distribusi tenaga pendidik tidak merata), layanan kesehatan yang belum optimal, disebabkan oleh Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular, Rendahnya sapras pelayanan kesehatan dasar, Rendahnya kualitas tenaga kesehatan, Masih kurangnya Alat kesehatan, Tingginya Masyarakat dengan pola hidup tidak sehat. Serta masih rendahnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal dan belum optimalnya penyelesaian Konflik terhadap ketenagakerjaan.
2. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: Rendahnya ketersediaan produk lokal di pasaran, Rendahnya Kualitas Produk dan daya saing UMKM/IKM, Rendahnya kualitas pengelolaan sarana prasarana perdagangan, Rendahnya kreativitas dalam pengelolaan kepariwisataan, Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan, dan masih minimnya penyelenggaraan event berskala Nasional/Internasional.
3. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan akar permasalahan yaitu: masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.
4. Pelayanan infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, masih terdapat genangan air saat musim

hujan, belum optimalnya jaringan drainase dan belum optimalnya pelayanan parkir.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dari permasalahan pembangunan daerah di Kota Jambi dan dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan **isu strategis pembangunan Kota Jambi tahun 2020** sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan: menyediakan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin; meningkatkan perlindungan sosial melalui kualitas permukiman, perlindungan terhadap penyandang masalah sosial dan meningkatkan kualitas sarpras rehabsos; serta melakukan pemberdayaan kepada warga miskin dengan cara penguatan kelembagaan.
2. Upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dengan :
 - Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi distribusi guru.
 - Meningkatkan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, optimalisasi tindakan preventif, promotif, dan kuratif.
 - Meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Upaya untuk meningkatkan Daya saing daerah dalam bidang ekonomi melalui penyediaan kualitas produk lokal yang berdaya saing, penyediaan sarana prasarana perdagangan, meningkatkan sinergisitas antar stakeholders kepariwisataan, dan penyelenggaraan job fair.
4. Optimalisasi Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui penyediaan sarana dan prasarana TIK.
5. Peningkatan Pelayanan infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, bedah rumah, peningkatan SR air bersih, mengurangi genangan air melalui pembangunan

jaringan drainase yang terintegrasi dan penyediaan pelayanan Sarana dan prasarana perhubungan darat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Propinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2020, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan..

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan berjalan (*current account*), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah

dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan

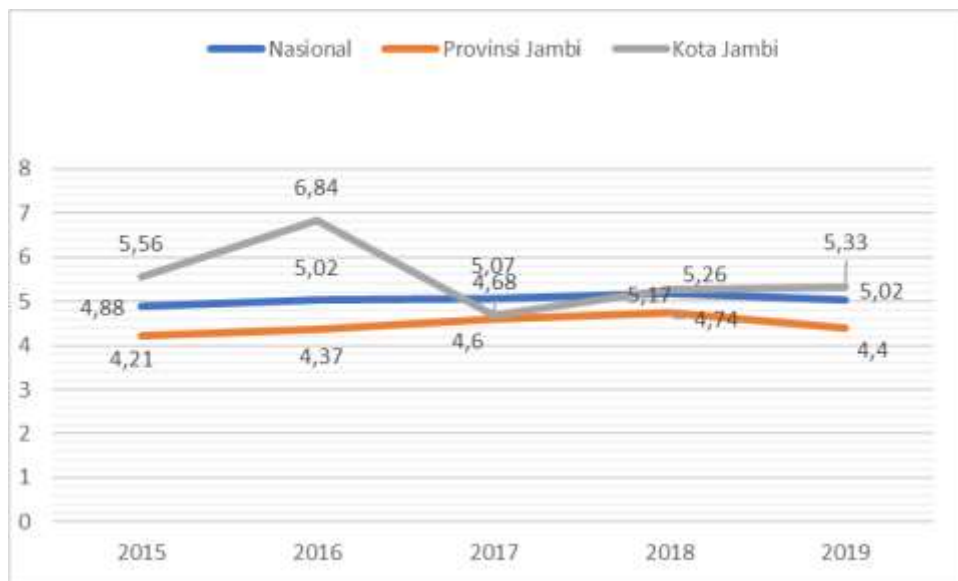
Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2015-2019, LPE Kota Jambi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, kecuali tahun 2017. LPE tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6.84 % dan Pada tahun selanjutnya mengalami fluktuasi, hal

ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional. Pada tahun 2019, LPE Kota Jambi meningkat menjadi 5.33% berada di atas LPE Provinsi Jambi, yaitu 4,4 % dan LPE Nasional yang sebesar 5,02 %. Untuk mengetahui perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan
perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan nasional



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Salah satu informasi yang dapat diperoleh dari perhitungan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum, perekonomian di Kota Jambi pada Tahun 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat dan meninggalkan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Jambi (berdasarkan harga konstan 2010). Kondisi ini menggambarkan kondisi sektor riil di Kota Jambil yang lebih kondusif, sehingga terjadi peningkatan investasi. Dilihat dari sisi permintaan, semua komponen permintaan akhir meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang merata dan berkesinambungan (*equity* dan *sustainable growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara dengan pemanfaatan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi Tahun 2015-2019 cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Dari

Grafik 3.1 pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sebesar 6,84 persen, kemudian menurun drastis pada tahun 2017 adalah sebesar 4,68 persen. Pada Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi meningkat sebesar 5,26 persen dan terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga Tahun 2019 mencapai angka 5.33 persen dan merupakan pertumbuhan yang tertinggi selama periode analisis. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada Tahun 2017, yakni karena masih lemahnya ekonomi global, dan juga erat kaitannya dengan penurunan sektor perdagangan besar sebagai sektor utama Kota Jambi.

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015–2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	180.64	183.86	187.68	195.98	190.88
B. Pertambangan dan Penggalian	526.09	509	418.28	432.13	425.97
C. Industri Pengolahan	1962.94	2045.89	2124.29	2200.32	2272.93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	29.45	31.18	31.73	33.65	35.61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41.27	42.99	43.96	46.13	46.5
F. Konstruksi	1516.11	1578.66	1703.57	1809.48	1943.29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4219.92	4544.46	4784.48	5120.19	5505.78
H. Transportasi dan Pergudangan	1995.12	2242.84	2398.29	2481.6	2530.3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.23	379.07	415.17	447.02	476.26
J. Informasi dan Komunikasi	776.3	843.49	900.36	974.85	1037.68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	936.67	1050.08	1085.94	1079.09	1104.82
L. Real Estate	402.01	421.73	444.99	474.67	510.07
M,N. Jasa Perusahaan	446.93	476.18	504.52	531.25	558.9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1215.55	1251.81	1282.75	1341.77	1402.2
P. Jasa Pendidikan	725.6	771.53	805.6	858.39	924.88
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401.89	430.57	457.5	486.04	534.36
R,S,T,U. Jasa lainnya	125.23	133.1	139.24	148.78	155.35
Produk Domestik Regional Bruto	15851.95	16936.44	17728.34	18661.33	19655.79

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2019 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5505,78 Miliar; (b), sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 2530,3 Miliar; (c), sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2272,93 Miliar; (d), sektor Konstruksi sebesar Rp. 1943,29 Miliar; dan (e), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 1402.2 Miliar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.58	1.78	2.08	4,42	-2,61
B. Pertambangan dan Penggalian	-31,34	-3.25	-17.82	3.31	-1,43
C. Industri Pengolahan	5.17	4.23	3.83	3,58	3,3
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.55	5.87	1.76	6.05	5,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.97	4.17	2.25	4.94	0,8
F. Konstruksi	2.5	4.13	7.91	6.22	7,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.13	7.69	5.28	7.02	7,53
H. Transportasi dan Pergudangan	5.7	12.42	6.93	3,47	1,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.1	8.24	9.52	7.67	6,54
J. Informasi dan Komunikasi	9.36	8.65	6.74	8.27	6,45
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.85	12.11	3.42	-0.63	2,38
L. Real Estate	2.43	4.9	5.52	6.67	7,46
M,N. Jasa Perusahaan	6.82	6.54	5.95	5.3	5,21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.42	2.98	2.47	4.6	4,5
P. Jasa Pendidikan	7.64	6.33	4.42	6.55	7,75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.28	7.14	6.25	6.24	9,94
R,S,T,U. Jasa lainnya	7.99	6.28	4.62	6.85	4,41
Produk Domestik Regional Bruto	5,12	6,84	4.68	5,26	5,33

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan mumentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. 2019. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	285.98	310.93	318.35	342.17	341.08
B. Pertambangan dan Penggalian	541.71	519.83	406.74	579.55	548.01
C. Industri Pengolahan	2467.77	2655.3	2830.67	2981.19	3112.5
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38.21	47.92	55.56	61.12	66.74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.36	62.06	66.78	71.41	83.91
F. Konstruksi	1929.78	2090.38	2308.87	2554.04	2801.84
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5999.14	7233.21	7952.23	8896.46	9712.78
H. Transportasi dan Pergudangan	2535.82	3072.6	3329.32	3570.37	3707.78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	484.23	558.39	631.99	682.67	735.07
J. Informasi dan Komunikasi	941.74	1115.13	1205.59	1333.28	1436.66
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1251.24	1465.86	1536.12	1582.39	1646.67
L. Real Estate	527	586.66	634.74	715.29	785.76
M,N. Jasa Perusahaan	633.41	729.19	792.13	860.37	931.78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2021.31	2152.99	2263.9	2503.89	2632.52
P. Jasa Pendidikan	956.33	1091.38	1190.86	1289	1398.84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473.04	544.57	587.99	635.72	703.37
R,S,T,U. Jasa lainnya	150.39	169.12	181.46	199.92	210.6
Produk Domestik Regional Bruto	21293.45	24405.53	26293.31	28858.83	30855.9

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2019 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2019 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu

pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Berikut ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

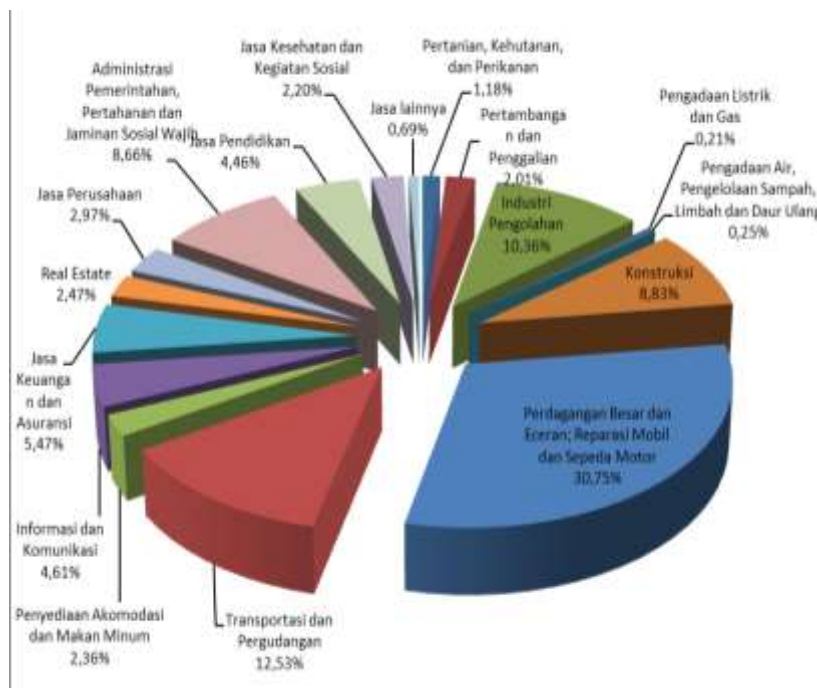
Tabel 3.4.
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,27	1,21	1,19	1,11
B Pertambangan dan Penggalan	2,54	2,13	1,55	2,01	1,78
C Industri Pengolahan	11,59	10,88	10,77	10,33	10,09
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,20	0,21	0,21	0,22
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,25	0,25	0,25	0,27
F Konstruksi	9,06	8,57	8,78	8,85	9,08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,17	29,64	30,24	30,83	31,48
H Transportasi dan Pergudangan	11,91	12,59	12,66	12,37	12,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,29	2,40	2,37	2,38
J Informasi dan Komunikasi	4,42	4,57	4,59	4,62	4,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,88	6,01	5,84	5,48	5,34
L Real Estate	2,47	2,40	2,41	2,48	2,55
M Jasa Perusahaan	2,97	2,99	3,01	2,98	3,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,49	8,82	8,61	8,68	8,53
P Jasa Pendidikan	4,49	4,47	4,53	4,47	4,53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,22	2,23	2,24	2,20	2,28
R Jasa Lainnya	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	97,94	98,21	98,52	98,05	98,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2019 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,48%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,02%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,09%; sektor Konstruksi sebesar 9,08%; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,53%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat porsi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Jambi pada tahun 2019 seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2

Porsi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB Kota Jambi tahun 2019

Sedangkan jika dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.5
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	13.123,57	14.212,68	15.432,10	16.415,75	17,613,64
2.	Atas Dasar Harga Konstan	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38	12,072,05
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	61,63	58,24	58,69	56,88	57,08
2.	Atas Dasar Harga Konstan	63,54	62,16	62,45	61,54	61,42

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan

tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku adalah sebesar 13.123.57 Juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 17.613.64 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Tabel 3.6
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	5.000,77	5.154,58	5,739,32	6,165,09	6,626,44
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.424,91	3.394,85	3,676,52	3,915,40	4,210,23
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	23,49	21,12	21,83	21,36	21,48
2.	Atas Dasar Harga Konstan	21,61	20,04	20,74	20,98	21,42

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.000.77 juta rupiah (2016); 5.154.58 juta rupiah (2017); dan 5.739.32 juta rupiah (2018); 6.165.09 juta rupiah serta (2019) sebesar 6.626.44 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 3.7, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 5.123.10 Juta pada tahun 2015 dan terus

meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp. 6.855.91 Juta. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.7
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Rakitan 2015-2019 (data Rapihan)						
No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	5,123,10	5,447,32	5,853,90	6,292,62	6,855,91
2	Atas Dasar Harga Konstan	4,014,60	4,179,20	4,383,19	4,522,82	4,777,22
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto thd PDRB (persen)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	24,06	22,32	22,26	21,80	22,22
2	Atas Dasar Harga Konstan	25,33	24,68	24,72	24,24	24,30

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

3.1.1.2. Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2019 mencapai 51.024 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp 44.479 juta dan Rp 48.369 juta. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini

disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.8.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB (miliar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	36.963	41.827	44.479	48.369	51.024
2	Atas Dasar Harga Konstan	27.518	29.026	29.990	31.201	32.503
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	3,66	5,48	3,32	4,25	4,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

3.1.1.3. Inflasi

Inflasi Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal administered price terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listri. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 laju inflasi terjadi pada kelompok volatile food

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Inflasi Kota Jambi	1,37	4,54	2,68	3,02	1,27	3.6
Inflasi Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	3,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Perkembangan inflasi Kota Jambi cenderung berfluktuasi dan capaian tahun 2017 sebesar 2,68% masih di bawah rata rata inflasi nasional yang sebesar 3,17%. Proyeksi inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,02% dan 1,27 % pada tahun 2019 didasari oleh pertimbangan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI yang trennya cenderung stabil dan meningkat. Selain itu didukung dengan upaya-upaya pengendalian harga bahan pokok secara konsisten khususnya terkait dengan kelancaran supply dan distribusi, antisipasi iklim yang kurang mendukung dan jaminan ketersediaan yang mencukupi.

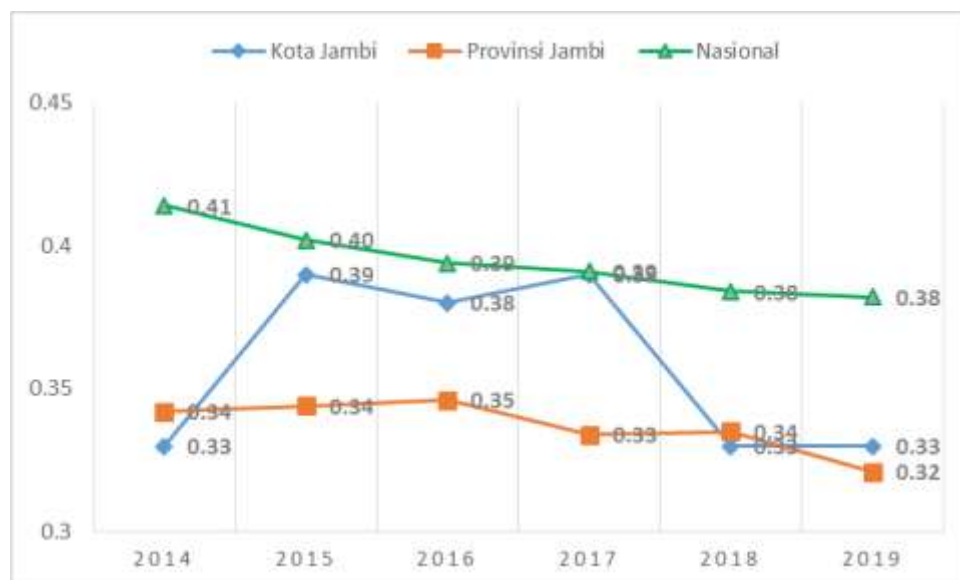
Jika melihat inflasi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang terjadi pada *volatile food* maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuh kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

3.1.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2019 mencapai sebesar 0,33 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,39 atau 0.06 poin. Capaian ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Jambi yang relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2017 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan

masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,31.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Gambar 3.3.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi
Tahun 2014-2019

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2020 dan 2021 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2015-2019), bahkan tahun 2029 mampu tumbuh 7,79 persen, sehingga diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 8,8 persen tahun 2020 dan 2021 di proyeksi menjadi 9,02 persen.

Namun prediksi target pertumbuhan ekonomi tersebut berubah dengan cepat dan tidak mungkin tercapai akibat pengaruh Pandemi Covid 19. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Jambi menyebabkan terganggu bahkan berhentinya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerintah kota Jambi harus merubah skenario target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan 2021 menjadi target yang lebih rasional lagi, demikian juga target indikator makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berdampak negatif terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta inflasi, bahkan berimplikasi kepada meningkatnya problem sosial politik.

3.1.2.1. Pandemi Covid 19 dan Ekonomi Kota Jambi

Diawali pada awal tahun 2020 terjadi perubahan dahsyat ekonomi dunia akibat dari **Pendemi Covid 19 atau Virus Corona**, yang dimulai dari negara China berhembus ke semua negara di dunia (Negara Eropa, Amerika, Asia) termasuk Indonesia, yang pada akhirnya berimbas negatif kepada semua Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk kepada Kota Jambi. Virus Corona merupakan persoalan kesehatan yang sudah menyebabkan kematian kepada banyak manusia di dunia dan Indonesia. Kebijakan pemerintah malukan pembatasan gerakan sosial

dan sentuhan secara fisik, bahkan banyak negara melakukan “lock down” untuk menutup akses virus corona tersebut.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembatasan sosial dan fisik (*social and physical distancing*) bahkan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), meskipun tidak untuk semua wilayah telah menimbulkan dampak negatif kepada berhentinya sebagian aktivitas ekonomi masyarakat sehingga terus berimbas kepada terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis. Namun hampir semua negara Eropa dan Amerika Serikat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan negatif pada tahun 2020. Indonesia diperkirakan hanya mampu tumbuh dibawah 2 persen.

3.1.2.2. Prospek Ekonomi Kota Jambi Tahun 2020 dan 2021

Kota Jambi yang merupakan ibu kota Provinsi Jambi terkait erat dengan kondisi ekonomi eksternal (dunia, Indonesia dan Provinsi Jambi) karena perekonomian Kota Jambi termasuk ekonomi terbuka (*open economy*), sehingga fluktuasi ekonomi dunia dan Indonesia mempengaruhi fluktuasi perkembangan ekonomi Kota Jambi. Penurunan pertumbuhan ekonomi eksternal akan menurunkan permintaan terhadap produk ekonomi Kota Jambi. Pandemi Covid 19 telah membuat perubahan dalam perekonomian Kota Jambi, sehingga semua estimasi yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya (asumsi kondisi normal harus berubah), ada dua skenario target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2020 yaitu :

1. Skenario optimis, artinya Virus Corona yang terjadi pada kuartalan pertama (Q1) tahun 2020 bisa diatas dan dampak negatif terhadap masyarakat menurun pada kuartalan kedua (Q2), dan terus terjadi pada kuartalan ketiga (Q3), bahkan dapat hilang pada kuartalan ke empat (Q4), maka pertumbuhan ekonomi Kota Jambi terkoreksi, namun di estimasi masih mampu tumbuh mencapai **sekitar 3.5 sampai 4.5 persen**. Hal ini disebabkan : (a), pada periode lima tahun sebelumnya relatif tinggi (2015-2019) bahkan tahun 2019 mampu mencapai 5.33 persen; dan (b), Kota Jambi tidak termasuk **zona merah** dan dikategorikan dalam **wilayah kebijakan PSBB**, sehingga aktivitas ekonomi masih tetap jalan terutama untuk sektor-sektor unggulan (sektor

perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas; serta industri pengolahan) bahkan terjadi kenaikan untuk jasa sektor Jasa dan Komunikasi. Kemudian ditopang oleh masih berjalannya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebagai penggerak sektor lainnya.

2. Skenari moderat, artinya sampai akhir tahun 2020, Virus Corona tidak mampu diturunkan pada kuartalan ke dua, tiga bahkan sampai kuartalan ke empat. Pada sisi lain kebijakan ekonomi pemerintahan Kota Jambi sangat terkait dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi, tidak mampu melanggarkan kegiatan ekonomi bahkan aktivitas sektor riil masih tetap tidak berjalan dengan baik sebagaimana kondisi normal, maka pertumbuhan ekonomi Kota Jambi diperkirakan akan lebih kecil berikisar **antara 2 sampai 3 persen namun masih lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional**. Hal ini disebabkan (a), beberapa sektor unggulan di Kota Jambi tidak bergerak dengan baik terutama sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas dan industri pengolahan; (b), kemudian sektor informal yang masih menjadi motor penggerak perekonomian menjadi tidak berjalan, karena semakin diperketatnya kebijakan social dan physical distancing. Apalagi jika Kota Jambi ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan zona merah; dan (c), semakin menurunnya permintaan konsumen luar wilayah Jambi terhadap produk Jambi.

Skenario optimis pada tahun 2020 dan semakin membaik pada tahun 2021, asumsi terjadi kestabilan kesehatan masyarakat dimana Covid 19 sudah dapat diatasi dan bahkan tidak ada, maka kebijakan pemerintah akan fokus melakukan pemulihan ekonomi bahkan meningkatkan daya saing daerah Kota Jambi yang semakin dinamis terutama mendorong berkembangannya sektor perdagangan barang dan jasa yang menjadi orientasi kota Jambi, demikian juga daya saing pariwisata yang unggul dan kompetitif serta mendorong sektor administrasi pemerintahan yang semakin dinamis dan inovatif sebagai lokomotif menggerakkan sektor lainnya.

Pada kondisi optimisme ekonomi akan kembali normal, **maka pada Tahun 2021** perekonomian Kota Jambi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik menjadi **sebesar 4 sampai 5 persen** dan lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional. Hal ini disebabkan bahwa secara makro kondisi perekonomian nasional diperkirakan sudah membaik seiring dengan kondisi perekonomian global yang semakin membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga dan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan pada percepatan pengembangan daerah. Kemudian, faktor-faktor lain yang diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tersebut adalah:

1. Implementasi perdagangan bebas ASEAN (MEA) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri, peningkatan daya saing produk dan peningkatan nilai ekspor sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kota Jambi.
2. Pergeseran struktur perekonomian di Kota Jambi ke arah sektor tersier diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan peluang dan lapangan kerja baru sehingga akan berdampak terhadap pendistribusian pendapatan kepada masyarakat luas.
3. Kebijakan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan diharapkan dapat meningkatkan sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa masih merupakan penopang terbesar perekonomian Kota Jambi, namun terus mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan pula dapat memacu peningkatan laju pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

Meskipun tidak diharapkan kondisi yang semakin parah, namun tahun 2021 masih sulit melakukan prediksi secara pasti tentang perbaikan kondisi variabel gangguan Covid 19, apakah sudah mampu diatasi dengan baik oleh pemerintah dan semua komponen masyarakat, namun terdapat optimisme bahwa Pandemi Covid 19 akan berkurang pada tahun 2021, karena semua negara bergerak menuju titik yang sama untuk menghilangkan Virus Corona tersebut karena jika berlangung

lama, ekonomi dunia dan Indonesia akan menuju kepada resesi. Kemudian juga didukung dengan kebiasaan masyarakat secara mandiri terbiasa mengatas dampak Virus Corona tersebut secara mandiri dan akhirnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Logika rasionalitas tersebut membuat keyakinan Kota Jambi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi **diatas 4 sampai 5 persen** (lebih tinggi dari tahun 2020) dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan nasional.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun 2021
(Berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2018-2028)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	397.327.847.290	338.891.882.592,96	393.552.656.640	403.484.193.000	442.917.916.000
1.1.1	Pajak daerah	201.429.136.841	215.444.388.499	256.027.807.314	255.000.000.000	270.860.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	43.077.425.944	40.389.059.087,09	38.540.603.597	47.568.000.000	48.826.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.066.340.479	8.854.962.599,49	9.783.144.577	10.000.000.000	10.269.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.754.944.026	74.203.426.907,38	89.201.101.152	90.916.193.000	112.962.916.000
1.2	Dana perimbangan	1.013.005.895.282	1.110.714.904.091,00	1.110.177.033.331	1.126.863.703.930	1.179.293.447.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	108.336.723.678	118.633.409.807	132.185.357.673	102.028.814.930	141.000.000.000
1.2.2	Dana alokasi umum	714.783.378.000	714.783.378.000	757.404.051.000	763.018.217.000	795.344.649.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	189.885.793.604	277.298.116.284	220.587.624.658	261.816.672.000	242.948.798.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90.299.495.375	175.270.526.028,23	147.840.401.081	215.159.326.000	188.287.067.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.819.000.000	59.419.509.209,40	11.918.148.000	58.911.800.000	61.845.400.000
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	80.760.495.375	94.131.016.818,83	114.911.044.081	131.000.000.000	104.430.458.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		18.000.000.000	11.291.209.000	18.527.526.000	15.291.209.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	6.720.000.000	3.720.000.000	9.720.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1.500.633.237.947	1.624.877.312.712,19	1.651.570.091.052	1.745.507.222.930	1.810.498.430.000

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	633.792.563.865	657.258.424.968	795.111.216.885	753.881.710.930	743.865.148.930
2.1.1	Belanja pegawai	609.075.861.181	614.857.160.444	769.336.362.485	721.563.236.930	721.563.236.930
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi				1.000.000.000	
2.1.4	Belanja hibah	18.623.738.650	36.588.195.224	14.725.400.000	21.553.843.619	14.725.400.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.407.880.000	3.915.540.000	7.651.455.000	7.637.723.000	4.178.512.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.132.400	100.000.000	1.292.133.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.392.951.634	605.396.900	2.105.867.000	2.026.907.381	2.105.867.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	633.792.563.865	759.889.727.857	795.111.216.885	753.881.710.930	743.865.148.930
2.2	Belanja Langsung	862.510.115.270	921.345.540.132,20	915.500.926.000	1.458.798.632.000	1.193.190.402.701
2.2.1	Belanja pegawai	74.716.530.322	59.749.332.455,	64.233.008.032	64.787.962.108	76.810.075.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	368.476.988.979	415.787.045.628,24	472.736.494.365	567.399.452.976	576.438.738.000
2.2.3	Belanja modal	419.316.595.968	445.809.162.048,96	378.531.423.603	826.611.216.916	539.941.589.701
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	862.751.591.768	921.345.540.132,20	915.500.926.000	1.458.798.632.000	1.193.190.402.701
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.496.302.679.135	1.578.603.965.100	1.710.612.142.885	2.212.680.342.930	1.937.055.551.631

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	134.489.386.517	131.650.797.287,90	50.558.257.885	67.173.120.000	127.557.121.631
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				400.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	134.489.386.517	131.650.797.288	50.558.257.885	467.173.120.000	127.557.121.631
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	6.988.000.000	5.000.000.000		0	
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	181.148.041			0	1.000.000.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.169.148.041	5.000.000.000		0	1.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	127.320.238.476	126.650.797.288	50.558.257.885	467.173.120.000	126.557.121.631

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan prediksi tahun 2020 penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	TARGET 2020
1	PAJAK DAERAH	201.429.136.841,40	215.444.388.499	256.027.807.314	255.000.000.000
2	RETRIBUSI DAERAH	43.077.425.943,53	40.389.059.087,09	38.540.603.597	47.568.000.000
3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.066.340.478,60	8.854.962.599,49	9.783.144.577	10.000.000.000
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	144.754.944.025,57	74.203.472.407,38	89.201.101.152	90.916.193.000
PAD		397.327.847.289,10	338.891.882.592,96	393.552.656.640	403.484.193.000
5	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	108.336.723.678,00	118.633.409.807	132.185.357.673	102.028.814.930
6	D A U	714.783.378.000,00	714.783.378.000	757.404.051.000	763.018.217.000
7	D A K	189.885.793.604,00	277.298.116.284	220.587.624.658	261.816.672.000
DANA PERIMBANGAN		1.013.005.895.282,00	1.110.714.904.091,00	1.110.177.033.331	1.126.863.703.930
8	PENDAPATAN HIBAH	2.819.000.000,00	59.419.509.209,40	11.918.148.000	58.911.800.000
9	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	80.760.495.375,60	94.131.016.818,83	114.911.044.081	131.000.000.000
10	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	0	18.000.000.000	11.291.209.000	18.527.526.000
11	BANTUAN KEUANGAN	6.720.000.000,00	3.720.000.000	9.720.000.000	6.720.000.000
LAIN-LAIN PEND. DAERAH		90.299.495.375,60	175.270.526.028,23	147.840.401.081	215.159.326.000
JUMLAH PENDAPATAN SELURUHNYA		1.500.633.237.946,70	1.624.877.312.712,19	1.651.570.091.052	1.745.507.222.930

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan penerimaan daerah, maka untuk tahun 2021 kebijakan -kebijakan yang diambil yaitu :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan pemungutan, efisiensi biaya, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum.
- Meningkatkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada komponen bagi hasil pajak melalui intensifikasi Pajak-pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.
- Menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain.

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Jambi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pencapaian target yang telah direncanakan, pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan kegiatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari masing-masing objek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data pajak daerah yang akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan dan atau perubahan data objek pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Melakukan pinjaman daerah untuk percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik baik melalui lembaga perbankan/non perbankan.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas Keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya Tertib Administrasi Ketetapan dan Administrasi Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan APBD Perubahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.673.334.071.976,00 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2019 mencapai Rp. 393.552.656.639,79 atau 103,09% dari target penerimaan sebesar Rp. 381.743.685.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 23,83% terhadap pendapatan Kota Jambi Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 338.892.256.292,96 maka PAD Tahun 2019 meningkat 16,13% atau naik Rp. 54.660.774.046,83.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2018 dengan Tahun 2019.

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2018 dengan TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	203.500.000	215.444.388	105,87	242.090.000	256.027.807	105,76
2.	Ret. Daerah	44.012.000	40.389.059	91,77	45.068.647	38.540.603	85,52
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	8.850.000	8.854.962	100,06	9.700.000	9.783.144	100,86
4.	Lain-lain PAD yg sah	79.540.135	74.203.846	93,29	84.885.038	89.201.101	105,08
TOTAL		390.892.633	335.902.135	100,89	381.743.685	393.552.656	103,09

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Perbandingan tahun 2017 dan 2018 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2018 dengan TA 2019 *(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)*

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	118.890.269	118.633.409	99,78	137.965.056	132.185.357	95,81
2.	Dana Alokasi Umum	714.783.378	714.783.378	100,00	757.404.051	757.404.051	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus	291.823.567	277.298.116	95,02	234.950.785	220.587.624	93,89
TOTAL		390.892.633	335.902.135	100,89	381.743.685	393.552.656	103,09

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak terdiri dari : bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil PPh pasal 21, 25 dan 29 serta bagi hasil bukan pajak/SDA. Target pos bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar Rp. 137.965.056.000,00 realisasinya mencapai Rp. 132.185.357.673,00 atau 95,81%.

Target penerimaan dari pos Dana Alokasi Umum tahun 2019 adalah sebesar Rp. 757.404.051.000,00 dan realisasinya mencapai Rp. 757.404.051.000,00 atau 100,00%, sedangkan pada penerimaan dari pos Dana Alokasi Khusus hanya mencapai realisasi sebesar 93,89% yaitu Rp. 220.587.624.658,00.

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2019, ditargetkan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp. 81.347.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.911.044.081,07 (141,26%). Sedangkan pendapatan hibah sebesar Rp. 61.479.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.918.148.000,00 (19,39%).

Untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terealisasi sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 dengan Tahun 2019 di bawah ini:

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2018 dengan TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	62.534.000	35.914.102	57,43	61.479.800	11.918.148	19,39
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.347.485	92.499.055	113,71	81.347.485	114.911.044	141,26
4.	Dana Penyesuaian Otsus	18.000.000	18.000.000	100,00	11.291.209	11.291.209	100,00
5.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	5.220.000	3.720.000	71,26	9.720.000	9.720.000	100,00
TOTAL		95.684.861	167.101.485	89,85	163.838.494	147.840.401	90,24

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga tehnis (staf) dalam pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.

- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum optimal.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi agar lebih tegas.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa; dan (3) belanja modal.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.

- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2020 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Jambi adalah sebesar Rp. 2.212.680.342.930,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1.458.798.632.000,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 753.881.710.930,00. Jika dibanding dengan jumlah Anggaran Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 1.846.258.216.875,00 maka tahun 2020 belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan.

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan target tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021, Belanja Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Jambi

No.	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	614.857.160.444	780.513.273.241	721.563.236.930	721.563.236.930
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	1.000.000.000	
2.1.4	Belanja hibah	36.588.195.224	14.726.000.000	21.553.843.619	14.725.400.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.915.540.000	7.651.455.000	7.637.723.000	4.178.512.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1.292.132.400	1.307.132.400	100.000.000	1.292.133.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	605.396.900	2.105.867.000	2.026.907.381	2.105.867.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	657.258.424.968	806.303.727.641	753.881.710.930	743.865.148.930
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	59.749.332.455,00	66.138.355.995	64.787.962.108	76.810.075.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	415.787.045.628,24	523.039.125.378	567.399.452.976	576.438.738.000
2.2.3	Belanja modal	445.809.162.048,96	450.777.007.861	826.611.216.916	539.941.589.701
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	921.345.540.132,20	1.039.954.489.234	1.458.798.632.000	1.193.190.402.701
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.578.603.965.100	1.846.258.216.875	2.212.680.342.930	1.937.055.551.631

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2020, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan rencana Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Sedangkan tidak terdapat pengeluaran pembiayaan Daerah.

Selama tahun 2017 dan 2018 pembiayaan di Kota Jambi untuk realisasi penerimaan pembiayaan masing-masing sebesar Rp. 134.489.386.517,00 dan Rp 131.650.797.287,90. Penerimaan pembiayaan dimaksud untuk menutupi defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibanding dengan anggaran belanja.

Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.169.148.041 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp 5.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan merupakan upaya pemanfaatan surplus realisasi anggaran tahun sebelumnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 serta proyeksi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	131.650.797.287,90	172.924.144.899	67.173.120.000	127.557.121.631
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	400.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN	131.650.797.287,90	172.924.144.899	467.173.120.000	127.557.121.631

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PEMBIAYAAN				
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	5.000.000.000	0	0	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	1.000.000.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	0	0	1.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	127.320.238.476	172.924.144.899	467.173.120.000	126.557.121.631

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto. Dalam APBD tahun anggaran 2020, pembiayaan netto ditargetkan Rp. 467.173.120.000, sedangkan realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 126.650.797.287.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1)Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu;dan (3)Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu ***"MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA"***

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
- Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan

dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sector perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tabel 4.1.
Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	OPD
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,66	DISKOMINFO SETDA
					Indeks Profesionalitas ASN	59	BKPSDMD BAPPEDA SETWAN SETDA DKP
					Nilai SAKIP	BB	SETDA BAPPEDA INSPEKTORAT
					Indeks persepsi anti Korupsi	3,73	BPKAD INSPEKTORAT
					Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	DPMPTSP DKPS KECAMATAN
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	75%	SATPOL PP
			Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	DISDAMKAR
		Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%	BKBP
				Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	BKBP
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	70,61	DPUPR DISHUB DPRKP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	38,5	DLH
					Indeks Kualitas Udara	80,74	DLH
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,00	DLH

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	OPD
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	68	DPP
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	91,5	DPKP
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,39%	DPK
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	BPPRD
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	474,62 M	DPMPTSP
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,50%	DTKK
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9,01%	DTKK
					Persentase Daya Saing Produk IKM	6,5	DPP
					Persentase koperasi berkualitas	23,85%	DTKK
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,36	DINKES
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,62	DISDIK DKP
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	12,32	DISDIK
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,70	DISDIK
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,03	DPPKB
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,69%	DPPKB
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,93	DPMPPA
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,30	DPMPPA
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	90%	DPMPPA
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	63	DPMPPA
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	51	DISPORA
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	75	DINSOS

4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2021 adalah “Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi”.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antar daerah dengan program aksi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.

4. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
5. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
6. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.
7. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan.
8. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antar wilayah.
9. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim.
11. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan Pemajuan Seni Budaya.
13. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.
14. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.
15. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
16. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
17. Reformasi Pelayanan Publik.
18. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis.
19. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
20. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusatpusat pertumbuhan wilayah
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2020-2024 adalah sebesar 6,0%. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, kemudian diturunkan target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2015-2020): “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2021, antara lain antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,7 persen Inflasi secara nasional dibawah 4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,9-7,2 persen, Jawa-Bali 5,6-6,2

persen, Nusa Tenggara 4,7-7,5 persen, Kalimantan 5,7-8,3 persen, Sulawesi 6,9-8,8 persen, Maluku 6,2-9,1 persen Papua 5,4-9,0 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan	Indikator	Target
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa	Indeks Pembangunan Manusia	71,5
		Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat		
		Mendorong pembangunan Gender		
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3%
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana	Share Sektor Sekunder	21,5%
		Peningkatan nilai tambah industri pengolahan	Total Factor Productivity	1.
		Meningkatkan nilai tambah jasa produktif		
		Menumbuh kembangkan riset teknologi untuk komoditas unggulan		
3	Peningkatan Konektivitas & Sarana Prasarana Wilayah	Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan	Jalan provinsi dalam kondisi mantap	78,93%
		Memperluas akses terhadap air minum layak	Akses terhadap air minum layak	75%
		Memperluas akses terhadap sanitasi layak	Akses terhadap sanitasi layak	75%
		Meningkatkan rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	95%

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan	Indikator	Target
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Ketersediaan Energi	1.
		Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat		
		Meningkatkan peranan energi terbarukan dalam energi bauran	Peningkatan Pemanfaatan EBT	1.
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas	Meningkatkan tata kelola layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Meningkatkan akuntabilitas	Indeks Demokrasi Indonesia	77
		Meningkatkan kemampuan ASN		
		Meningkatkan kamtibmas		

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2021

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2021 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan system manajemen logistic kebencanaan
		2. Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
		3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
		4. Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
		5. Menyiapkan program padat karya perbaikan lingkungan dan permukiman

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mengembangkan minat baca masyarakat dan peningkatan pengelolaan kearsipan daerah
		2. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
		3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
		4. Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga
		5. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan
		2. Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
		3. Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi
		4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis
		5. Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal
		6. Meningkatkan partisipasi dan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan
		7. Memperkuat akses pemenuhan hak anak
		8. Meningkatkan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
		9. Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
		10. Meningkatkan Pengendalian ketersediaan, distribusi bahan pangan dan juga keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
		11. Mendorong percepatan rekonstruksi dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	1. Mengembangkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
		2. Mengembangkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
		3. Memantapkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
5	Good Governance	1. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
		2. Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
		3. Memperkuat Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
		4. Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
		5. Meningkatkan pengawasan pembangunan secara

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
		komprehensif, transparan dan akuntabel
		6. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama untuk memperkuat potensi dan kapasitas daerah
		7. Memperkuat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
		8. Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta efektivitas fasilitasi orkemas dan parpol
		9. Mengoptimalkan pendapatan daerah

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI	KOTA
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Konektivitas & Sarana Prasarana Wilayah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
Penyederhanaan Regulasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas	Good Governance
Penyederhanaan Birokrasi	Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	
Transformasi Ekonomi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
		Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2021 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik rencana program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
I	<u>URUSAN WAJIB</u>				
	<i>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</i>				
1	Pendidikan	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan pendidikan Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan kecakapan hidup Angka partisipasi kasar (APK) SD Angka Partisipasi Murni (APM) SD Angka Partisipasi SD Rerata UAS SD Angka partisipasi kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Angka Partisipasi SMP Rerata UN SMP Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional	APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40% Paket A : 40 Orang, Paket B : 300 Orang, Paket C : 450 Orang 180 Orang 114,6% 98% 100,80% 60,73% 99,5% 72,5% 84% 51,50% 93,20%	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	6 Puskesmas Utama 40%	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular Persentase Rumah Sakit pemerintah yang terakreditasi Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan Persentase Pelayanan Imunisasi Persentase pelayanan gizi masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan remaja Cakupan pelayanan kesehatan lansia Persentase pencapaian Keluarga berPHBS Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100% 100% A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 75% 100% 100% 100%	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program fasilitas koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	Rasio Kesesuaian Ruang	95.5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah Rasio Bangunan dalam kondisi baik	71,39% 2,16% 69,54%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Perencanaan Teknis ke PU-an	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	90%	
		Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai	Rasio Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	47,37%	
		Pembangunan , peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	94.53% 97.3%	
		Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	87%	
		Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	60%	
		Program Pengembangan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	50%	
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	90% 79%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	72%	
		Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manaje	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%	Disdamkar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
		men Logistik Kebencanaan	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%	
6	Sosial	Program Penanggulangan Kemiskinan Pemberday aan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin	100% 100% 100% 100%	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produkti vitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	7% 58%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak	Penurunan Ratio KDRT Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	0,020% 0,0217% 85%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Penurunan Pangan segar yang Tercemar	89,5 5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen	160	Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber daya alam	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	16%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	76%	
			Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	24%	
		Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Ke pendudukan	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil validitas database kependudukan Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	99% 91 % 91% 45%	
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	Persentase Kelompok UEM yang Aktif Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	79% 67% 80% 95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	1,03 96,69%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan Cakupan yang terlayani angkutan umum	84% 70.19%	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	28 Titik	
		Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase Pelayanan Perparkiran	88.99%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
9	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan akses dan kualitas informasi public	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	60%	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Cakupan akses dan kualitas informasi public Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	70% 68,8% 50,38%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Penanaman Modal	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Peningkatan Realisasi Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Realisasi Investasi	86,85 % 474,62M	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	60% 75,56%	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Statistik	Program Manajemen data/informasi/statistik daerah	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	39%	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Persandian	Program Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	50%	
15	Kebudayaan	Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan kebudayaan	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16	Perpustakaan	Program Peningkatan Mutu dan pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Tahunan	42.836 Pengunjung	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Kearsipan	Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang terselamatkan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1.200 36	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
II	<u>URUSAN PILIHAN</u> <i>URUSAN PILIHAN</i>				
1	Pariwisata	Pembinaan, peningkatan, dan perluasan pengelolaan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan PAD Sektor Pariwisata Lama Kunjungan wisata	600.000 47 M 3 Hari	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pertanian	Peningkatan, Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	3.080 82	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Perdagangan	Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan	Cakupan bina perdagangan	95,25%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Perindustrian	Pembinaan dan peningkatan Industri kecil menengah	Cakupan bina industri kecil menengah	6,5	
III	<u>PENUNJANG URUSAN</u> <i>PENUNJANG URUSAN</i>				
1	Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Interna , Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	100%	Inspektorat
2	Perencanaan	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah		Bappeda
3	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	100% 37 OPD	BPKAD
			Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	85%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
		Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	30 OPD 40 OPD dan 21 BLUD 9% 100% 65% 20%	BPPRD
4	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Program Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan Persentase Penilaian Kinerja ASN Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN	97% 91% 88% 87% 53% 52%	BKPSDMD
5	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	Bappeda

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
IV	PENDUKUNG PENDUKUNG				
1	Sekretariat Dewan	Program Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	6 dok	Setwan
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program-program kerja DPRD	9 dok	
2	Setda	Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan dan kelembagaan Keagamaan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	80%	Sekretariat Daerah
		Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	75%	
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	73,68%	
		Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	90% 3 Telaah rekomendasi	
		Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	17,07%	
		Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	74% 20%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
		Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Luar Negeri Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti Persentase Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	9 Kec 100% 85,71% 100%	
		Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	
		Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	
			Rata-rata indeks pelayanan public	20%	
			Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	50%	
			Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	59%	
		Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tertib administrasi pembangunan	80%	
			Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	30,44%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD
V	<u>KEWILAYAHAN</u>	Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	92	Kecamatan
	<u>KEWILAYAHAN</u>	Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat kecamatanantahun	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	80%	
1	Pemerintahan Umum	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	60%	
		Pemberdaya masyarakat kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	60%	
VI	<u>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</u> <u>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</u>				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	

Tabel 5.2
Rencana Program OPD Tahun 2021

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	Dinas Pendidikan			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	5,170,500,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,417,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	228,000,000	-	-
	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	138,413,940,000	-	-
	JUMLAH	145,229,440,000		
2	Dinas Kesehatan			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	5,093,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,110,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	204,000,000	-	-
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	114,864,295,285	-	422,500,000
	JUMLAH	121,271,295,285		422,500,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	31,585,587,000	-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Rujukan	16,814,413,000	-	-
	JUMLAH	48,400,000,000		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	5,532,237,350	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,050,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	21,000,000	-	-
	Program Fasilitas, Koordinasi Pembinaan dan Keterpaduan Tata Ruang	1,792,060,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
	Program Perencanaan Teknis Ke-PU-an	7,278,600,000	-	-
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/Sungai	69,650,000,000	-	-
	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	119,839,052,288	-	-
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	117,903,047,220	-	-
	JUMLAH	323,065,996,858		
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,828,362,235	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	530,150,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44,735,000	-	-
	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	4,035,000,000	-	-
	Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	23,690,000,000	-	-
	Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	7,575,000,000	-	-
	JUMLAH	37,703,247,235		
6	Satuan Polisi Pamong Praja			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,349,900,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	485,258,800	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	24,500,000	-	-
	Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat	480,000,000	-	-
	Program Penyelenggaraan Trantibum, Serta Penegakan Regulasi Daerah	5,430,918,400	-	-
	JUMLAH	8,770,577,200		
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	5,006,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,245,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	7,000,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM		PAGU		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN
		Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan	5,889,194,000	-	-
		JUMLAH	12,147,194,000		
8	Dinas Sosial				
		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,208,000,000	-	-
		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	393,000,000	-	-
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	41,000,000	-	-
		Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5,480,000,000	-	-
		JUMLAH	8,122,000,000		
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,665,000,000	-	-
		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	970,000,000	-	-
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	69,000,000	-	-
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	911,000,000	-	-
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	645,000,000	-	-
		Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,874,030,900	-	-
		JUMLAH	6,134,030,900		
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	3,147,730,000	-	-
		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	767,000,000	-	-
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	36,000,000	-	-
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani	3,253,270,000	-	-
		Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	4,175,000,000	-	-
		JUMLAH	11,379,000,000		

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
11	Dinas Lingkungan Hidup			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,965,151,596	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	706,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	65,000,000	-	-
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	42,657,848,404	-	-
	Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	11,307,000,000	-	-
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2,138,000,000	-	-
	JUMLAH	59,839,000,000		
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	4,244,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	371,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	204,000,000	-	-
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,941,524,000	-	-
	JUMLAH	8,760,524,000		
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,773,500,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	392,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	151,000,000	-	-
	Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	3,963,510,000	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	4,616,000,000	-	-
	JUMLAH	11,896,010,000		
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,599,486,150	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	449,500,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20,700,000	-	-
	Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2,747,000,000	-	4,118,933,000
	JUMLAH	4,816,686,150		4,118,933,000
15	Dinas Perhubungan			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	11,075,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,790,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	17,000,000	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	26,840,000,000	-	-
	Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas	2,600,000,000	-	-
	Peningkatan Pelayanan Perparkiran	5,500,000,000	-	-
	JUMLAH	47,822,000,000		
16	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,391,738,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	878,240,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	137,420,000	-	-
	Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi Publik	8,586,409,000	-	-
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	460,000,000	-	-
	Program Manajemen Data / Informasi / Statistik Daerah	150,000,000	-	-
	JUMLAH	11,603,807,000		
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,160,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	620,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	124,000,000	-	-
	Peningkatan Realisasi Investasi	698,000,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM		PAGU		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	816,000,000	-	-
		JUMLAH	4,418,000,000		
18	Dinas Pemuda dan Olahraga				
		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,756,591,000	-	-
		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	490,000,000	-	-
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	54,000,000	-	-
		Program Pembinaan dan Peningkatan Saranan dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	7,080,309,100	-	-
		JUMLAH	9,380,900,100		
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	4,957,000,000	-	-
		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	372,000,000	-	-
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	3,000,000	-	-
		Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1,284,000,000	-	-
		Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	1,101,000,000	-	-
		JUMLAH	7,717,000,000		
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,520,000,000	-	-
		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	449,000,000	-	-
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	134,000,000	-	-
		Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Pariwisata	2,060,000,000	-	-
		Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan	1,545,000,000	-	-
		JUMLAH	5,708,000,000		
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	5,930,000,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,180,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	186,000,000	-	-
	Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan	6,071,000,000	-	-
	Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil Menengah	2,570,000,000	-	-
	JUMLAH	15,937,000,000		
22	Inspektorat Daerah			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,393,800,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	750,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	60,000,000	-	-
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3,001,000,000	-	-
	JUMLAH	5,204,800,000		
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,331,774,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,270,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	330,000,000	-	-
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4,000,000,000	-	-
	Penelitian dan Pengembangan	400,000,000	-	-
	JUMLAH	8,331,774,000		
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	4,499,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	952,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	176,000,000	-	-
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	3,715,000,000	-	-
	JUMLAH	9,342,000,000		

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	5,764,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	621,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44,000,000	-	-
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,753,000,000	-	-
	JUMLAH	10,182,000,000		
26	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Daerah			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	3,088,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,151,500,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	50,000,000	-	-
	Program Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	5,908,600,500	-	-
	JUMLAH	10,198,100,500		
27	Sekretariat Daerah			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	13,449,582,560	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,137,602,440	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	847,010,000	-	-
	Proram Fasilitas dan Kooordinasi Kegiatan dan Kelembagaan Keagaamaan	9,508,000,000	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Pembinaan Perekonomian	847,000,000	-	-
	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8,577,000,000	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan	4,040,805,000	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumah Tanggaan	1,321,000,000	-	-
	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah	1,165,400,000	-	-
	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	868,000,000	-	-
	Program Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan	1,170,000,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
	Program Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang / Jasa	2,347,000,000	-	-
	Program Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	15,341,000,000	-	-
	JUMLAH	62,619,400,000		
28	Sekretariat DPRD			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	14,060,098,500	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,813,798,700	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	57,000,000	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Pelayanan Kedinasan DPRD	33,640,482,000	-	-
	JUMLAH	51,571,379,200		
29	Kecamatan Kota Baru			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	7,805,475,600	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	287,500,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	85,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	650,000,000	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	1,000,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,495,000,000	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5,000,000,000	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	1,300,000,000	-	-
	JUMLAH	17,622,975,600		
30	Kecamatan Telanaipura			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,797,126,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	349,500,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	35,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	335,875,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	1,000,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,070,582,000	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3,516,246,000	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	744,075,000	-	-
	JUMLAH	9,848,404,000		
31	Kecamatan Jelutung			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,985,078,185	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	282,090,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	333,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	380,095,000	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	1,000,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,994,746,375	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3,523,794,825	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	1,408,496,500	-	-
	JUMLAH	11,907,300,885		
32	Kecamatan Pasar			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,006,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	280,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	255,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	1,525,000,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	300,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,180,000,000	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3,480,000,000	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	-	-	-
	JUMLAH	9,026,000,000		
33	Kecamatan Jambi Selatan			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,494,000,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	269,100,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	72,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	1,560,000,000	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	1,000,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,295,482,400	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	555,207,000	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	1,494,000,000	-	-
	JUMLAH	8,739,789,400		
34	Kecamatan Jambi Timur			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	3,958,880,800	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	440,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	148,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	431,975,000	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	1,260,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3,105,869,400	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4,217,792,600	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	1,218,076,000	-	-
	JUMLAH	14,780,593,800		
35	Kecamatan Danau Teluk			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,157,127,200	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	13,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	215,000,000	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	600,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,465,000,000	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1,815,000,000	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	1,100,000,000	-	-
	JUMLAH	6,489,127,200		
36	Kecamatan Pelayangan			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,772,176,770	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	273,400,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	162,100,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	308,581,000	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	600,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,794,576,000	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.250,336,860	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	1,033,878,600	-	-
	JUMLAH	8,195,049,230		
37	Kecamatan Alam Barajo			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2,022,000,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM	PAGU		
		APBD Kota	APBD Prov	APBN
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	409,400,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	150,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	485,000,000	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	1,250,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,595,483,000	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3,852,621,500	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	1,177,500,000	-	-
	JUMLAH	10,942,004,500		
38	Kecamatan Danau Sipin			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,697,700,000	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	264,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	228,000,000	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	2,375,000,000	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	1,000,000,000	-	-
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,475,483,000	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4,450,000,000	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	1,529,737,400	-	-
	JUMLAH	13,019,920,400		
39	Kecamatan Paal Merah			
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,480,225,600	-	-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	214,000,000	-	-
	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	54,687,713	-	-
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	133,708,945	-	-
	BANGKIT BERDAYA Usulan Masyarakat	1,100,000,000	-	-

NO	NAMA OPD / NAMA PROGRAM		PAGU		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,529,742,200	-	-
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.091,447,800	-	-
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	-	-	-
		JUMLAH	7,603,812,258		
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1,095,600,000	-	-
		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	510,400,000	-	-
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	24,200,000	-	-
		Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	742,630,000	-	-
		Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Bagi Orkemas dan Parpol	530,000,000	-	-
		JUMLAH	2,902,830,000		
TOTAL			1,188,648,969,701		4,541,433,000
			1,193,190,402,701		

5.2. TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
1	Syofni Herawati, SP	1.1	DEMOKRAT	I	1	Pendataan penerima program bedah rumah untuk warga RT. 17 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Mengoptimalkan pendapatan daerah Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					2	Renovasi perbaikan Posyandu RT. 17 Kelurahan Simpang III Sipin.	DINKES	PRIORITAS 2	
					3	Perbaikan jalan di Jl. Kemuning di RT. 17 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					4	Validasi data dan pendataan ulang bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunandi RT. 17 Kelurahan Simpang	BPPRD	PRIORITAS 5	
					5	Kelanjutan perbaikan jalan akses RT. 16 ke RT. 18 Lr. Lobis Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					6	Pengadaan tiang dan lampu penerangan jalan di Lr. Nur Zahra RT. 16 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPRKP	PRIORITAS 1	
					7	Realisasi pembangunan pembuatan drainase RT. 16,18,35,36 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					8	Sosialisasi e-planing di Kelurahan Simpang III Sipin.	BAPPEDA	PRIORITAS 5	
					9	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di belakang Masjid Baitul Muslim Kelurahan Simpang III Sipin.	DPRKP	PRIORITAS 1	
					10	Perbaikan jalan dan lampu penerangan jalan umum di perbatasan Kelurahan Sukakarya dengan Kelurahan Simpang III Sipin.	DPRKP	PRIORITAS 1	
					11	Pengecoran drainase di RT. 32 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					12	Program car free day dan pengadaan Kampung Layak Anak di Kelurahan Simpang III Sipin.	DPRKP	PRIORITAS 1	

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
2	Muhammad Yasir, S.	1.2	Gerindra	III	13	Pengadaan penambahan tempat pemakaman umum di Kelurahan Simpang III Sipin.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					1	Penyaluran bantuan pembangunan septitank di RT. 16 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Perbaikan Jalan dan Jembatan di Jl. Gado-gado RT. 09 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Perbaikan Jalan dan pembangunan parit jalan sepanjang 350 meter di RT. 28,45,09 Kelurahan Kenali Asam Bawah	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Bantuan untuk warga yang baru menyelesaikan pendidikan SMK berupa program pelatihan yang dapat mendukung dan menunjang keahlian di Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
					5	Perbaikan pembangunan jalan dan jembatan di RT. 40 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					6	Kelanjutan pembangunan parit jalan di RT. 13 sepanjang 300 meter dan di RT. 14 sepanjang 200 meter Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Penyambungan jaringan pipa saluran air bersih PDAM di RT. 13 Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Penambahan kuota gas bersubsidi di Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					9	Optimalisasi fungsi Mobil Jenazah di Kelurahan Kenali Asam Atas.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
10	Pengawasan, penertipan dan penegasan terhadap pangkalan gas subsidi di Kelurahan Kenali Asam Atas dan Simpang III Sipin.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga					

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
3	Suprapti, SE	1.3	PDI Perjuangan	II	11	Penambahan bertahap insentive untuk guru Pengajian Magrib Isya.	KESRA/KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					12	Percepatan pembangunan infrastruktur pelebaran dan pembangunan parit jalan M. Kukuh RT. 14 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					13	Realisasi perbaikan pembangunan jalan di Jl. Pesona Kenali Perumahan Vila Kenali.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					14	Peninjauan saluran pembuangan air dan drainase Kelurahan Paal V yang bermuara di RT. 13.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Peninjauan izin terhadap pihak pengembang perumahan dan ruko yang tidak memperhatikan saluran pembuangan air di Kelurahan Paal V.	DPMPTSP	PRIORITAS 4	Memantapkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
					1	Realisasi perbaikan perawatan untuk normalisasi drainase di Jl. Sunangiri RT. 04 Sukakarya sepanjang 200 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Perbaikan pengaspalan jalan dan pembangunan parit jalan di Lr. Pendekar RT. 04 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Perbaikan jalan di RT. 36 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Pengadaan pembangunan pembuatan sumur bor di RT. 36 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Peningkatan mutu pelayanan untuk masyarakat pengguna jaminan BPJS.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					6	Pengkajian dan revisi ulang Peraturan Walikota terkait kebijakan yang menyebabkan harga jual tanah menjadi tidak wajar.	PEM	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					7	Peninjauan pembebasan lahan terkait belum terealisasinya kelanjutan pengaspalan dan pelebaran jalan di RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	PEM/DPUPR	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					8	Pengadaan lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 titik di lorong Masjid Al-Muttaqim RT. 06 Kelurahan Paal V.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
4	Joni Ismed, SE	1.4	Golkar	III	9	Pembangunan jalan lingkungan di sebelah pemakaman umum Bumi Ikhlas menuju SMP N 8 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Penertipan balapan liar dan anak punk di hutan kota.	SATPOL PP	PRIORITAS 5	Memperkuat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
					2	Pengkajian penyelesaian senketa lahan SD N 212 dengan ahli waris terkait pemilikan tanah.	PEM	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					3	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di sekitar SD N 212 Kenali Asam Bawah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					4	Pembangunan infrastruktur untuk penyandang difabel atau berkebutuhan khusus.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Peningkatan kualitas mutu pelayanan Posyandu Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					6	Pembangunan drainase di RT. 37 sampai RT. 44 Kelurahan Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Bantuan untuk optimalisasi pengelolaan bank sampah Kenali Asam Bawah.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					8	Pengawasan penyaluran dana bantuan untuk UMKM Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DTKK	PRIORITAS 3	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local
					9	Peningkatan insentive guru ngaji secara bertahap.	KESRA/ KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					10	Perbaikan normalisasi drainase di Jl. P.Hidayat depan Lr. Purnama.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Realisasi tapal batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi.	PEM	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					12	Bantuan sarana prasarana olah raga lapangan bola kaki di RT. 36 Kenali Asam Bawah.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
13	Perbaikan kedalaman pembangunan turap RT. 04, 21, 27 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					14	Pelebaran jalan di Lr. Suka Sari Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Pendataan dan penyaluran program KIS di RT. 08 Kelurahan Paal V.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					16	Realisasi pembangunan drainase di RT. 23 Kelurahan Paal V di belakang Perumahan Teguh Permai IV.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					17	Perbaikan jalan Jl.Kol.M.Kukuh menuju Lr. Cepat menembus Jl. Peltu Simatupang Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					18	Perbaikan normalisai drainase di Jl. Peltu Simatupang RT. 14 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					19	Perbaikan tong sampah di RT. 14 Kelurahan Paal V.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					20	Pembangunan pelebaran jalan di RT. 07 Kelurahan Sukakarya sepanjang 200 meter lebar 5 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					21	Perbaikan parit jalan di Jl. Sunan Bonang RT. 18 Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					22	Pembangunan drainase lanjutan di RT. 18 Simpang III Sipin sepanjang 150 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					23	Pengaspalan jalan di Jl. Sunan Bonang RT. 18 Simpang III Sipin sepanjang 100 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					24	Perbaikan jalan lingkungan di Jl. Sunan Gunung Jati RT. 40 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					25	Pembangunan pembuatan parit jalan di Jl. Sunan Gunung Jati RT. 40 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					26	Perbaikan jembatan di Lorong SMK Satria.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					27	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di Jl. Purnama RT. 13 Perumahan Purnama Regency Kelurahan Sukakarya sebanyak 4 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir	OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					28 Renovasi pembangunan parit jalan tertutup di Perumahan Graha Purnama 200 meter dan Perumahan Purnama Asri Sepanjang 250 Meter Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					29 Penimbunan tanah rawan banjir di pemakaman umum Purnama Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					30 Pengangkutan sampah di RT. 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					31 Pembersihan normalisasi sungai belakang kantor Walikota mengarah ke CPM.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					32 Perbaikan jalan lingkungan Perum Cofee Residence RT. 34 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					33 Perbaikan pembangunan jalan di Jl. Tegal Rejo dan Lr. Permai RT. 30 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					34 Pembangunan jalan di Jl. Bensol RT. 48 akses menuju SMP 21 Kelurahan Kenali Asam Bawah sepanjang 1 Km.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					35 Pengaspalan jalan lanjutan di RT. 47 Kelurahan Kenali Asam Bawah sepanjang 60 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					36 Pengadaan pemasangan tiang lampu jalan sebanyak 6 titik di RT. 47 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					37 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 09 Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					38 Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum RT. 09 Kenali Asam Bawah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					39 Pembangunan drainase RT. 09 Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					40 Pembangunan drainase di RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					41	Pengadaan pemasangan lampu penerangan lampu jalan di Lr. Siolo RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					42	Pengaspalan jalan di Lr. Siolo RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					43	Perbaikan jalan lingkungan RT. 03 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					44	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum RT. 03 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					45	Realisasi pembangunan infrastruktur di jl. Marjan RT. 30 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					46	Pembangunan jalan lanjutan di RT. 02 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					47	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di RT. 19 Kelurahan Sukakarya.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					48	Perbaikan jalan lingkungan di Jl. Gado-gado RT. 19 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					49	Pengadaan tempat pembuangan sampah di RT. 44 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					50	Pembangunan jalan lingkungan di Jl. Simpang gado-gado RT. 09 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					51	Perbaikan drainase 2 sisi jalan RT. 09 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					52	Perbaikan jalan lingkungan di Lr. Jati Luhur RT. 14 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					53	Perbaikan normalisasi drainase di Lr. Puja Kusuma RT. 05 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					54	Perbaikan jalan lingkungan di gang Pembina RT. 06 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					55	Pembangunan drainase di Jl. Berdaya RT. 18 Kelurahan Sukakarya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					56	Kecamatan dan Kelurahan untuk Proaktif dalam permintaan dana Program CSR.	EKONOMI	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					57	Masing masing Kelurahan di Kecamatan Kota Baru menyediakan lahan seluas 400 m2 untuk fasilitas pengolahan sampah dengan metode 3R.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					58	Perbaikan jalan masuk lorong Langgar RT. 35,41 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					59	Perbaikan saluran air drainase di lorong seroja RT. 41 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					60	Pembangunan drainase di lorong Sunan Giri RT. 44 Kelurahan Simpang III Sipin sepanjang 75 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					61	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum RT. 44 Kelurahan Simpang III Sipin sebanyak 7 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					62	Perbaikan normalisasi box culvert di depan Madrasah Mahdaliyah RT. 04 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					63	Perbaikan jalan lingkungan di Lr. Putro Rofi’ah RT. 20 Kelurahan Paal V sepanjang 1 km.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					64	Pembangunan parit di Lr. Putro Rofi’ah RT. 20 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					65	Perbaikan jalan lingkungan RT. 38 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					66	Pembangunan jalan tembusan RT. 16 ke RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah sepanjang 250 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					67	Pengadaan pemasangan lampu jalan RT. 13 Kenali Asam Bawah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					68	Pembangunan parit jalan RT. 13 Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					69	Pemerintah Kota Jambi untuk melibatkan developer perumahan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					70	Perbaikan jalan dan gorong-gorong di RT. 12 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					71	Penyaluran program-program bantuan sosial di RT. 12 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
					72	Perbaikan parit dan pengecoran jalan di Jl. Jati RT. 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah sepanjang 150 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					73	Pengadaan lampu penerangan jalan di Jl. Jati RT. 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah sebanyak 4 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					74	Perbaikan normalisasi parit jalan di RT. 23 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					75	Bantuan pengadaan buku agama di taman pendidikan Al-quran Kelurahan Kenali Asam Atas RT. 19.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					76	Perbaikan jalan lingkungan dan parit jalan di RT. 22 Kenali Asam Atas sepanjang 400 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					77	Pengadaan lampu penerangan jalan umum dan tiang sebanyak 6 titik di RT. 22 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					78	Pengaspalan jalan di Jl. Kenari II RT. 04 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					79	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di Jl. Kenari II RT. 04 Kelurahan Kenali Asam Atas sebanyak 5 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					80	Pengadaan sumber air bersih sumur bor di Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					81	Perbaikan pengaspalan jalan di Lr. Ambarawa Jl. Sunan Giri RT. 10 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					82	Perbaikan jalan dan pembangunan parit jalan kanan kiri Lr. Banyumas Kelurahan Simpang III Sipin sepanjang 750 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
5	Pangeran HK	1.5	Nasdem	III	83	Perbaikan jalan dan parit di RT. 13 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					84	Realisasi pengadaan dan pembangunan infrastruktur di RT. 16 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Perbaikan pengecoran jalan lingkungan di RT. 28 Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Pengadaan lampu penerangan jalan di RT. 34 Kenali Asam Atas.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					3	Pengawasan dan pengkajian satuan tarif pemasangan dan satuan biaya tarif tagihan perbulan saluran air bersih PDAM.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Pengawasan penyaluran bantuan sosial raskin di RT. 08 Kelurahan Paal V.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
					5	Pengawasan penyaluran bantuan untuk UKM Kelurahan Paal V.	DTKK	PRIORITAS 3	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local
					6	Realisasi pembangunan dan pelebaran jalan di RT. 18 Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Perbaikan jalan di belakang mini market fresh star RT. 09 Kelurahan Suka Karya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas tanda keramaian di setiap acara kegiatan malam di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Jambi agar tidak terjadi kemacetan.	DISHUB	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Pengawasan proses penerimaan peserta didik baru terkait sekolah yang melakukan pungli.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					10	Penambahan peningkatan besaran penerimaan program Jambi Cerdas.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
11	Perbaikan jalan di Jl. Total dan Jl. Oil RT. 02 Kelurahan Kenali Asam Atas sepanjang 430 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					
12	Perbaikan jalan di Jl. Candikia dan Lr. Keluarga Kelurahan Kenali Asam Atas Sepanjang 180 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					13	Pembangunan parit jalan di Jl. Brory Masyur RT. 16 Kelurahan Kenali Asam Atas Sepanjang 80 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					14	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di Jl. Brory Masyur RT. 16 Kelurahan Kenali Asam Atas sebanyak 6 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					15	Perbaikan pengaspalan jalan di Lr. Jambu RT. 26 Perumahan Grand Namura Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					16	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di RT. 26 Perumahan Grand Namura Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					17	Pengaspalan jalan di Jl. Singgalang II RT.28 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					18	Pengadaan lampu penerangan jalan di Jl. Singgalang II RT.28 Kelurahan Kenali Asam Atas 1 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					19	Pengecoran jalan utama masuk ke Perumahan Jasmine Residence Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					20	Penyaluran bantuan untuk UMKM di RT. 01, 04 Kelurahan Simpang III Sipin.	DTKK	PRIORITAS 3	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local
					21	Pengecoran jalan dan pembangunan parit jalan di Jl. Sunan Giri RT. 10 Kelurahan Simpang III Sipin sepanjang 30 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					22	Perbaikan jalan di Lr. Banyumas Jl. Ir.Juanda RT. 28 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					23	Perbaikan normalisasi drainase di RT. 28 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					24	Perbaikan jalan lingkungan di RT. 27 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					25	Perbaikan normalisasi parit jalan di RT. 27 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					26	Pembangunan jalan lanjutan di Lr. Bersama Jl. Ir.Juanda RT. 34 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					27	Pengadaan pemasangan lampu jalan di Lr. Bersama Jl. Ir.Juanda RT. 34 Kelurahan Simpang III Sipin.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					28	Koordinasi Pemerintah Kota Jambi dengan Pertamina terkait pipa milik Pertamina di depan rumah warga Jl. Lirik Pertamina RT. 14 Kelurahan Kenali Asam Bawah.			
					29	Pendataan penambahan penerima jaminan kesehatan Jambi Bugar di RT. 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					30	Perbaikan jalan lingkungan di Jl. Lingkar Barat I RT. 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					31	Pembangunan drainase di Jl. Lingkar Barat I RT. 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					32	Pembangunan jalan di masuk dari arah SMP N 21 di Jl. Sidoerejo Perumahan Mutiara Selatan RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					33	Penyambungan instalasi pipa air bersih PDAM di RT. 18 Perumahan Mutiara Selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					34	Pembangunan Jalan di Jl. Pertamina Kap.Ramli Umar RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					35	Penyambungan instalasi pipa air bersih PDAM di RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					36	Pengadaan lampu penerangan jalan di Jl. Dolok Sanggul RT. 26 Kelurahan Paal V.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					37	Pengaspalan jalan RT. 05 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					38	Pembangunan parit jalan RT. 05 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					39	Pengawasan dan evaluasi data penerima bantuan program keluarga harapan di RT. 29 Kelurahan Paal V.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
6	H. Jasrul, S.Ag	1.6	PKS	IV	40	Pembangunan dan perbaikan normalisasi drainase di Jl. Widuri RT. 29 dan RT. 01 Kelurahan Paal V.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Penambahan peningkatan besaran penerimaan Program Jambi Cerdas.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					2	Pengadaan bantuan buku bacaan keagamaan untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an RT. 19 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					3	Kelanjutan pengaspalan Jalan Sirsak sepanjang 300 meter RT. 17 dan RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Penambahan kuota untuk penerima gas subsidi RT. 17 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					5	Pengadaan pipa gas di Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					6	Pengawasan pangkalan gas untuk menghindari penyalahgunaan penyaluran gas Kelurahan Kenali Asam Atas.			
					7	Pengadaan instalasi gas alam ke Kelurahan Kenali Asam Atas.			
					8	Pengadaan penyambungan instalasi pipa air bersih PDAM untuk Kelurahan Kenali Asam Atas dan Kelurahan Kenali Asam Bawah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Realisasi program pembuatan sumur bor di setiap Kecamatan dari PUPR.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					10	Koordinasi kontraktor dengan RT setempat terkait pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Kelanjutan pengaspalan Jalan Kenari RT. 07 dan RT. 08 dengan panjang total 600 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					12	Pengaspalan jalan di RT. 07 Kelurahan Kenali Asam Atas seluas 135 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
7	H. Muslim	2.1	Gerindra	IV	13	Perbaikan parit RT. 07 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					14	Perbaikan parit RT. 14 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Pembuatan parit RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					16	Pengaspalan jalan RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					17	Sosialisasi e-planning untuk warga melalui Lurah dan Ketua RT.	BAPPEDA	PRIORITAS 5	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
					1	Koordinasi Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi terkait jalan protokol dari Lapas sampai dengan pemancar RCTI yang sempit dan sering terjadi macet.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Bantuan pelatihan untuk industri ekonomi kreatif di wilayah eks lokalisasi Kelurahan Rawasari.	DTKK	PRIORITAS 3	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local
					3	Penyaluran bantuan program pembibitan dan pemeliharaan bebek di Kelurahan Kenali Besar.	DPKP	PRIORITAS 3	1.
					4	Pengadaan lampu penerangan jalan sebanyak 8 titik di RT. 10 Kelurahan Beliung.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					5	Perbaikan jalan sebanyak 3 titik total sepanjang 680 meter di RT. 10 Kelurahan Beliung.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					6	Pembangunan saluran air drainase sepanjang 100 meter di RT. 10 Kelurahan Beliung.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Pengadaan lampu penerangan jalan sebanyak 2 titik di lingkungan perumahan Kanahaya RT. 51 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					8	Bantuan pengadaan alat kompiangan dan seragamnya untuk kegiatan Karang Taruna di RT. 54 Perumahan Permata Kenali Asri Kelurahan Kenali Besar.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
8	Maria Magdalena, SS	2.2	PDI Perjuangan	IV	9	Perbaikan jalan lorong Prastika RT. 07 Kelurahan Kenali Besar didepan Masjid As-Syuhada Simpang Rimbo.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					10	Perbaikan drainase lorong Prastika RT. 07 Kelurahan Kenali Besar didepan Masjid As-Syuhada Simpang Rimbo.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Komitmen realisasi kampung ekonomi kreatif dan central UMKM RT. 05 Kelurahan Rawasari yang dibina oleh Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi disertai dengan bantuan peralatan untuk pemasaran hasil produksi dengan menjadikan rumah-rumah warga sebagai gerai pusat cenderamata.	DPP/DTKK	PRIORITAS 3	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal
					2	Pendataan ulang kartu pelanggan elpiji 3 kg melalui RT dan Lurah.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
				3	Penertiban pangkalan gas elpiji di RT. 05 Kelurahan Rawasari.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga	
9	H. Jefrizen, SE	2.3	Nasdem	IV	1	Realisasi pengadaan lampu penerangan jalan umum di Lr. Budi Luhur RT. 22 Kelurahan Bagan Pete sebanyak 7 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					2	Pembangunan drainase di sungai RT. 24, 35,25, 22 Kelurahan Bagan Pete .	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Pembangunan jalan lingkungan di RT. 35 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Penertipan tempat pembuang sampah rongsokan.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					5	Pengaspalan jalan setapak Jl. Kebun Daging RT. 24 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					6	Pengadaan pemasangan tiang listrik RT. 24 Kelurahan Bagan Pete.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					7	Pengadaan pemasangan rambu –rambu lalu lintas di persimpangan Kelurahan Bagan Pete.	DISHUB	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Pengkajian hibah tanah wakaf pemakaman di RT. 22 Kelurahan Bagan Pete.	PEM/ KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					9	Pembersihan dan pengangkutan sampah di RT. 28 Kelurahan Bagan Pete.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					10	Pengadaan lampu penerangan jalan umum di RT. 22 Kelurahan Bagan Pete.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					11	Perbaikan jalan di Jl. Kayu Putih RT. 36 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					12	Penyaluran bantuan dana dan pelatihan untuk usaha kecil menengah yang sudah berjalan lama di Kelurahan Bagan Bete.	DTKK	PRIORITAS 3	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local
					13	Realisasi pengadaan pembangunan sekolah di RT. 28 Kelurahan Bagan Pete.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					14	Perbaikan pengaspalan jalan di RT. 28 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Pembangunan saluran air drainase untuk penanggulangan banjir di RT. 28 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					16	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di Lr. Harapan I RT. 25 perbatasan dengan RT. 28 depan Masjid Musimasihal Kelurahan Bagan Pete sebanyak 4 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					17	Pengecoran jalan lingkungan di RT. 25 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					18	Pengadaan tempat pembuangan sampah di RT. 28 Kelurahan Bagan Pete.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					19	Pelebaran jalan masuk ke Sumber Rejo RT. 28 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
10	Ir. Anti Yosefa	2.4	PKS	II	20	Pengecoran jalan di perumahan Telaga Biru RT. 27 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					21	Pembangunan drainase di Perumahan Telaga Biru RT. 27 Kelurahan Bagan Pete.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					22	Peninjauan dan tindak lanjut terhadap pengolahan minyak mentah di RT.8 dan RT. 24 Kelurahan Bagan Pete.	DPMPTSP	PRIORITAS 4	Memantapkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
					1	Pembangunan box culvert RT. 11 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Perbaikan posyandu RT. 11 Kelurahan Kenali Besar.			
					3	Perbaikan jalan rabat beton blok DA-DB RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 100 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Perbaikan jalan rabat beton blok DC-DD RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 70 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Perbaikan jalan rabat beton blok DF RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 70 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					6	Perbaikan jalan rabat beton blok DJ RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 70 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Perbaikan jalan rabat beton blok DM-DN RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 120 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Perbaikan jalan rabat beton blok DO-DP RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 120 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Perbaikan jalan rabat beton blok EJ-EL RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 50 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					10	Perbaikan jalan rabat beton blok EN-EP RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 70 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Perbaikan drainase RT. 22 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 1500 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					12	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 22 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					13	Peningkatan penyaluran air PDAM Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					14	Pengadaan buku bacaan seperti buku agama dan buku perjuangan untuk taman bacaan Perumahan Bougenville Kelurahan Kenali Besar.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					15	Peningkatan mutu pelayanan BPJS Kelurahan Kenali Besar.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					16	Sosialisasi Program Jambi Bugar untuk warga kurang mampu Kelurahan Kenali Besar.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					17	Dispensasi terhadap denda untuk keterlambatan pembayaran tagihan air bersih PDAM di sekolah, karena terkait penggunaan Dana Bos.			
					18	Pengajuan santunan biaya sekolah anak kurang mampu Kelurahan Kenali Besar.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					19	Sosialisasi e-planning seluruh Kelurahan Kecamatan Alam Barajo.	BAPPEDA	PRIORITAS 5	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
					20	Koordinasi Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat terkait normalisasi sungai di Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					21	Pembangunan Sekolah Menengah Atas di daerah Bougenville.			
					22	Pengadaan tiang listrik untuk mengganti tiang listrik yang kondisinya sudah tidak layak RT. 22 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					23	Pengawasan penyaluran gas RT. 22 Kelurahan Kenali Besar.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					24	Pengadaan sarana olahraga untuk kegiatan pemuda Kelurahan Kenali Besar.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
					25	Perbaikan jalan dari Masjid luar sampai di sungai RT. 08 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
11	Suherman, SE	2.5	Persatuan Bintang	III	26	Pengaspalan Jalan Nangka RT. 08 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Pengadaan tiang listrik sebanyak 4 unit RT. 01 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					2	Perbaikan jalan Lorong Tanjung Raya RT. 01 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Pengawasan pangkalan gas RT. 01 terkait kuota gas dan penyaluran gas elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					4	Pembuatan sertifikat tanah wakaf pemakaman di RT. 48 Kelurahan Kenali Besar.	PEM/ KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					5	Penambahan pagar pemakaman di RT. 48 Kelurahan Kenali Besar sepanjang 42 meter.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					6	Kelanjutan perbaikan jalan Lorong Teratai RT. 12 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Realisasi pengadaan tiang listrik dan lampu penerangan jalan Lorong Teratai RT. 12 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					8	Pembuatan embung RT. 12 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 73 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					10	Perbaikan jalan RT. 73 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Perbaikan drainase RT. 73 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
12	Pengadaan pos kamling RT. 73 Kelurahan Kenali Besar.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK					

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					13	Pengadaan sarana olahraga volley RT. 44 Kelurahan Kenali Besar.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
					14	Pengadaan lampu penerangan jalan sebanyak 3 titik, jalan menuju SD Nurqoir RT. 08 Jalan Thayib Fahrudin Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					15	Pembuatan polisi tidur di Masjid Suhada RT. 08 Jalan Thayib Fahrudin Kelurahan Kenali Besar.	DISHUB/ KECAMATAN	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					16	Pengadaan lampu penerangan jalan di 4 titik (3+1 tiang) RT. 26 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					17	Pengaspalan jalan Lorong Merak 1 dan Lorong Merak 2 RT. 60 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					18	Pembangunan drainase 400 meter RT. 60 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					19	Pengadaan lampu penerangan jalan utama dan 10 tiang lampu jalan RT. 60 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					20	Kelanjutan cor beton Merak sepanjang 100 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					21	Perbaikan Jalan Abadi RT. 09 Kelurahan Kenali Besar	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					22	Perbaikan Jalan Perumahan Amanda 5, 4, 3 RT. 09 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					23	Perbaikan Jalan Perumahan Mutiara 2 RT. 09 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					24	Pengadaan lampu penerangan jalan di 15 titik RT. 09 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					25	Penambahan lampu penerangan jalan sebanyak 4 unit RT. 09 Perumahan Griya Arahim Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					26	Perbaikan jalan RT. 57 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					27	Realisasi pengadaan lampu jalan RT. 15 Lorong Syech Mahmud Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					28	Pengecoran jalan Perumahan Griya Rukun Sentosa 4 RT. 14 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					29	Perbaikan gorong-gorong RT. 14 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					30	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 14 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					31	Pengadaan tiang listrik RT. 14 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					32	Perbaikan drainase 100 meter RT. 59 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					33	Pengadaan lampu penerangan jalan beserta tiang lampu RT. 59 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					34	Kelanjutan pembangunan jalan Perumahan Graha Prastika sepanjang 210 meter RT. 07 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					35	Kelanjutan pembangunan jalan Lorong Seri Serumpun sepanjang 150 meter RT. 07 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					36	Pengadaan pos ronda RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					37	Pengawasan bantuan raskin yang penerimanya tidak sesuai sasaran RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
					38	Pengaspalan jalan RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					39	Pengadaan lampu penerangan jalan sebanyak 1 unit didepan Langgar Al-Mutaqin RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					40	Perbaikan drainase RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					41	Bantuan dana sebagai modal UKM ternak lele dumbo RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DTKK/DPKP	PRIORITAS 3	Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi
					42	Kelanjutan pengaspalan jalan Lorong Basamo sepanjang 200 meter RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					43	Pembuatan drainase Lorong Basamo RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					44	Pengadaan tiang listrik dan lampu jalan sebanyak 1 unit RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					45	Pengadaan lampu jalan di 3 titik RT. 39 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					46	Kelanjutan pengaspalan jalan yang sudah dicor RT. 13 sepanjang 200 meter RT. 54 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					47	Pembuatan drainase didepan Masjid Nurul Iman Simpang Rimbo sepanjang 70 meter, lebar 1 meter dan dalam 1,5 meter RT. 43 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					48	Pengaspalan jalan lingkungan pemukiman sepanjang 1500 meter RT. 58 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					49	Pengadaan lampu penerangan jalan di 15 titik RT. 58 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					50	Pengadaan tiang lampu jalan di 5 titik RT. 58 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					51	Pembuatan embung air RT. 58 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					52	Perbaikan parit Perumahan Permata Regency RT. 58 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					53	Pengaspalan jalan sepanjang 500 meter RT. 45 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					54	Pengadaan lampu penerangan jalan di 15 titik RT. 45 Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					55	Bantuan tenaga guru Tahfidz di Masjid Nur Hasanah RT. 45 Kelurahan Kenali Besar.	KESRA/ KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					56	Pembuatan drainase sepanjang 1000 meter RT. 45 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					57	Perbaikan jalan H. Satir yang digunakan 4 RT yaitu RT. 45, RT. 36, RT. 40 dan RT. 41 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					58	Pengadaan bantuan peralatan olahraga jaring lapangan, bola volley, net, tenis meja dan bulu tangkis RT. 45 Kelurahan Kenali Besar.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
					59	Pengadaan bantuan peralatan UMKM mesin jahit RT. 45 Kelurahan Kenali Besar.	DTKK/ DINSOS	PRIORITAS 3	Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi
					60	Pengaspalan jalan umum dan jalan lingkungan RT. 69 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					61	Perbaikan Jalan Kenali Jaya RT. 02, RT. 15, RT. 53, RT. 59 dan RT. 37 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					62	Perbaikan jalan masuk depan lorong SDN 205 RT. 15 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					63	Pengecoran jalan RT. 42 Kelurahan Kenali Besar RT. 15 Kelurahan Kenali Besar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					64	Pengadaan penerangan di pagar pemakaman Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					65	Pengadaan lampu penerangan di dalam pemakaman Kelurahan Kenali Besar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir	OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
12	HJ. HENDRIANI, S.Pd	2.6	DEMOKRAT	I	1 Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 38 Kelurahan Mayang Mangurai. 2 Perbaikan di Jalan Kebun Daging RT. 38 Lorong Slamet Kelurahan Mayang Mangurai. 3 Perbaikan jalan RT. 16 Kelurahan Beliung 4 Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 16 Kelurahan Beliung. 5 Perbaikan jalan Perumahan Rahman RT. 16 Kelurahan Mayang Mangurai. 6 Pengadaan lampu penerangan jalan Perumahan Rahman RT. 16 Kelurahan Mayang Mangurai.	DPRKP DPUPR DPUPR DPRKP DPUPR DPRKP	PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
13	H. NOVRIAL, SH	2.7	PAN	II	1 Pengaspalan Ulang di RT. 06 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo sepanjang 800 meter. dimana 200 meter merupakan lanjutan, Lrg. Bersama di depan saung purnama 200 meter, Lrg Kenari 200 meter, Lrg. Nuri 200 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
14	Muhammad Fahri	3.1	DEMOKRAT	II	1 Bantuan pengadaan tenda dan kursi untuk RT. 01, RT. 05 dan RT. 14 Kelurahan Pematang Sulur. 2 Penyaluran bantuan pengadaan keramba ikan yang bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi warga RT. 01 Kelurahan Teluk Kenali. 3 Penertiban hotel yang melakukan praktik penyimpangan asusila RT. 14 Kelurahan Pematang Sulur. 4 Perbaikan parit di RT. 14 Kelurahan Pematang Sulur. 5 Pengadaan mobil ambulance bantuan Kelurahan Pematang Sulur.	KECAMATAN DPKP DPMPTSP/ BPPRD DPUPR DINKES	PRIORITAS 5 PRIORITAS 3 PRIORITAS 4 PRIORITAS 1 PRIORITAS 2	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK 1. Memantapkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
15	Umar Paruk, A.Md	3.2	Gerindra	III	6	Pengadaan motor gerobak sampah RT. 01 Kelurahan Teluk Kenali.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					7	Pengadaan motor gerobak sampah RT. 01 dan 07 Kelurahan Pematang Sulur.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					1	Perbaikan drainase dibelakang gedung serbaguna sekitar Masjid miftahul Jannah	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Tempat pembuangan sampah yang tidak memadai di tempat pembuangan sampah dekat KUA Kecamatan Danau Teluk	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					3	Pengadaan dua unit kontainer sampah untuk Kelurahan Ulu Gedong dan pengangkutan sampahnya dilakukan secara rutin	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					4	Pembangunan jalan beton sepanjang dengan lebar 3 meter sepanjang 300 meter di RT. 03	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Pembangunan 3 jembatan beton di RT. 03 Kelurahan Ulu Gedong	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
16	Ir. M.A. Fauzi	3.3	PDI Perjuangan	II	6	Rehab total gedung SD 170 yang lantainya rusak dan tiang yang miring.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					1	Realisasi perbaikan dan pelebaran jalan lingkungan di RT. 01 Kelurahan Buluran Kenali sepanjang 350 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Koordinasi Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk pembangunan turab sepanjang 400 meter di Kelurahan Buluran Kenali.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Realisasi perbaikan jalan di RT. 18 Kelurahan Buluran Kenali.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Pengadaan pembangunan gedung baca perpustakaan untuk RT. 18 Kelurahan Buluran Kenali.	DKP	PRIORITAS 2	Mengembangkan minat baca masyarakat dan peningkatan pengelolaan kearsipan daerah
					5	Realisasi pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di RT. 18 Kelurahan Buluran Kenali sebanyak 4 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					6	Pendataan penerima bantuan program bedah rumah di RT. 07 Kelurahan Buluran Kenali.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					7	Koordinasi Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Provinsi untuk realisasi pembangunan jalan tembusan dari Kelurahan Buluran Kenali ke Angso Duo.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Perbaikan jalan lingkungan di RT. 06 Kelurahan Buluran Kenali.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Realisasi pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di RT. 06 Kelurahan Buluran Kenali sebanyak 5 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					10	Realisasi perbaikan jalan lingkungan di RT. 17 Kelurahan Buluran Kenali.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan pemasangan kembali tiang sebanyak 4 titik di RT. 17 Kelurahan Buluran Kenali.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					12	Pengkajian dan revisi ulang Peraturan Walikota terkait kebijakan yang menyebabkan harga jual tanah menjadi tidak wajar.	PEM/ BPPRD	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					13	Pembangunan jalan lingkungan di RT. 16 Kelurahan Buluran Kenali.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					14	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di RT. 16 Kelurahan Buluran Kenali.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					15	Pengadaan pembangunan gapura RT di Kelurahan Buluran Kenali.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					16	Realisasi pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan tiang di RT. 08 Kelurahan Buluran Kenali.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					17	Pengadaan pembangunan pos kamling di RT. 08 Kelurahan Buluran Kenali.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					18	Realisasi pembangunan jembatan di RT. 04 Kelurahan Buluran Kenali.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					19	Bantuan penimbunan tanah makam rawan banjir di RT. 04 Kelurahan Buluran Kenali.	DPUPR/ DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
									berkualitas dan SANITASI yang baik
17	Kemas Faried Alfarelly,	3.4	Golkar	IV	20	Pengadaan pemasangan lampu jalan dan kabel sebanyak 3 titik di RT. 04 Kelurahan Buluran Kenali.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					21	Pembangunan pengadaan turab di sungai Buluran.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					22	Penertipan dan pembersihan sampah yang hanyut dari danau sipin ke RT. 02 Kelurahan Buluran Kenali secara berkala.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					23	Penyaluran sambungan instalasi pipa air bersih PDAM di RT. 02 Kelurahan Buluran Kenali.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Pembangunan turap 27 meter RT. 04 Kelurahan Sungai Putri.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Pengadaan lampu penerangan jalan RT.04 Kelurahan Sungai Putri.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					3	Pembuatan tanda larangan buang sampah sembarangan dari Kelurahan Sungai Putri.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					4	Pengadaan bank sampah Kelurahan Sungai Putri.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					5	Sosialisasi pengenalan penggunaan e-planning Kelurahan Sungai Putri.	BAPPEDA	PRIORITAS 5	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
					6	Pengadaan lampu penerangan jalan di 2 titik RT.03 Kelurahan Sungai Putri Kampung Tengah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					10	Perbaikan Jalan Letnan Sari RT. 06 Kelurahan Sungai Putri.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Pengecoran jalan untuk akses 3 RT, RT. 06 Kelurahan Sungai Putri.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					12	Realisasi pembangunan turap RT. 06 Kelurahan Sungai Putri.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					13	Pengadaan lampu penerangan jalan sebanyak 4 titik RT. 06 Kelurahan Sungai Putri.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					14	Perbaikan jalan RT. 03 Kelurahan Sungai Putri.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Pengadaan lampu jalan RT. 03 Kelurahan Sungai Putri.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					16	Pengadaan tempat pembuangan sampah RT. 03 Kelurahan Sungai Putri.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					17	Pengadaan/penyediaan air bersih di RT. 03 Kelurahan Sungai Putri.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					18	Realisasi Program Kartu Bugar RT. 23 Kelurahan Sungai Putri.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					19	Pengadaan bank sampah RT. 23 Kampung Bantar Kelurahan Sungai Putri.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					20	Perbaikan jalan RT. 03 Kelurahan Sungai Putri tepi Danau Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					21	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 03 Kelurahan Sungai Putri tepi Danau Sipin.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					22	Pengadaan tempat pembuangan sampah RT. 03 Kelurahan Sungai Putri.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					23	Pemberdayaan warga sekitar objek wisata Danau Sipin sebagai tenaga kebersihan dan keamanan di objek wisata tersebut.	DPK	PRIORITAS 4	Mengembangkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
18	Absar Surwansyah,	3.5	Nasdem	I	1	Pembangunan drainase di 4 RT Kelurahan Solok Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar Meningkatkan system manajemen logistic kebencanaan Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					2	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan RT. 27 Kelurahan Selamat.	DISPORA	PRIORITAS 2	
					3	Perbaikan jalan setapak dan saluran air RT. 13 Kelurahan Solok Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					4	Perbaikan saluran air RT. 13 Kelurahan Solok Sipin.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					5	Pengadaan alat kesehatan untuk Pos Bindu Kelurahan Solok Sipin.	DINKES	PRIORITAS 2	
					6	Pembangunan pos Damkar di Kelurahan Solok Sipin.	DISDAMKAR	PRIORITAS 1	
					7	Realisasi pengadaan seragam forum RT Kelurahan Solok Sipin.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	
19	Kurniawansyah, SH	3.6	PKS	I	1	Pelebaran jalan RT. 21 Kelurahan Legok.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					2	Pendataan dan penyaluran bantuan sosial RT. 21 Kelurahan Legok.	DINSOS	PRIORITAS 3	
					3	Pengadaan pipa air bersih untuk mengganti pipa yang ukurannya terlalu kecil dan aliran airnya kurang lancar di RT. 21 Kelurahan Legok.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					4	Penambahan dan perbaikan lampu jalan RT. 36 Kelurahan Legok.	DPRKP	PRIORITAS 1	
					5	Kejelasan status SD Negeri 67, jika memang ditutup atau dimerger gedung bisa dialihfungsikan.	DISDIK	PRIORITAS 2	

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir	OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
20	Achmad Rasid	3.7	PAN	IV	1 Perbaikan jalan sepanjang 800 meter RT. 04 sampai dengan RT. 09 Kelurahan Legok. 2 Perbaikan jalan lingkungan RT. 11 Kelurahan Legok. 3 Pembuatan parit RT. 08 Kelurahan Legok. 4 Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 09 sampai dengan RT. 11 Kelurahan Legok. 5 Penyaluran bantuan pengadaan keramba ikan RT. 10 Kelurahan Legok. 6 Penyaluran bantuan pengadaan gerobak untuk berjualan Kelurahan Legok.	DPUPR DPUPR DPUPR DPRKP DPKP DINSOS	PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 PRIORITAS 3 PRIORITAS 3	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik 1. Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
21	H. Muhammad Nasir,	3.8	DEMOKRAT	IV	1 Pemberdayaan masyarakat Kota Jambi buruh tukang bangunan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur Kota Jambi. 2 Pelatihan, sertifikasi, dan bantuan peralatan untuk tukang bangunan sebagai bekal profesi. 3 Peningkatan fasilitas pendidikan, pemantauan, dan pemetaan antara zonasi sekolah dengan kepadatan penduduk. 4 Peningkatan fasilitas kesehatan di RS. Abd. Sayuti. 5 Peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik untuk sekolah-sekolah yang berada di Seberang Kota Jambi. 6 Perbaikan jalan lingkungan di RT. 07 Kelurahan Olak Kemang. 7 Perbaikan jalan lingkungan RT. 13 Kelurahan Buluran Kenali.	DTKK/ DINSOS DISDIK DINKES DISDIK DPUPR DPUPR	PRIORITAS 3 PRIORITAS 2 PRIORITAS 2 PRIORITAS 2 PRIORITAS 1 PRIORITAS 1	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
22	Abdullah Thaif, A.Md	4.1	DEMOKRAT	IV	1	Evaluasi dan validasi data pengguna BPJS Kelurahan Rajawali.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					2	Pendataan untuk Program Jaminan Kesehatan Jambi Bugar di RT. 19 Kelurahan Rajawali.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					3	Penambahan kuota untuk pengguna Program Jaminan Kesehatan Jambi Bugar.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					4	Realisasi program city gas di Kecamatan Jambi Timur sebanyak 2000 sambungan.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					5	Pengawasan, evaluasi dan penindakan terhadap pangkalan gas yang tidak mengikuti aturan di Kelurahan Rajawali.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					6	Pendataan dan penyaluran bantuan sosial untuk janda dan orang tidak mampu di Kelurahan Rajawali.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
23	M. Fuad Safari, S.Sos.I	4.1	DEMOKRAT	III	1	Koordinasi antara Pemerintah Kota Jambi dengan Provinsi Jambi terkait penanggulangan banjir RT. 19 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Bantuan untuk pengembangan sekolah kerajinan bank sampah, agar Kelurahan Payo Lebar menjadi sentral kerajinan khas jambi yang terbuat dari sampah.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					3	Pengadaan lampu penerangan jalan di 4 titik RT. 20 Kelurahan Payo Lebar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					4	Realisasi pelebaran drainase dan box culvert didepan Hotel Aini Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Pembenahan jalan bekas penggalian pipa PDAM di RT. 04 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					6	Pengadaan 2 unit tiang listrik dan lampu penerangan jalan di RT. 04 Kelurahan Payo Lebar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					7	Pembangunan jalan rabat beton di RT. 32 Kelurahan Payo Lebar yang masih jalan setapak.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Pembangunan jalan rabat beton di RT. 03 yang sudah rusak.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Perbaikan drainase RT. 32 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					10	Pengadaan lampu penerangan jalan di 2 titik RT. 32 Kelurahan Payo Lebar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					11	Perbaikan tempat pembuangan sampah yang sudah rusak di RT. 14 Kelurahan Payo Lebar.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					12	Pengadaan lampu penerangan jalan di RT. 30 Kelurahan Payo Lebar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					13	Pembangunan drainase di Lorong Teladan RT. 30 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					14	Perbaikan Jalan Amir Hamzah-Teratai RT. 08 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Perbaikan box culvert yang sudah rusak dan amblas RT. 08 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					16	Solusi untuk tempat pembuangan sampah yang rusak lagi setelah 2 bulan direnovasi di Jalan Teratai.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					17	Pengadaan lampu penerangan jalan di 1 titik RT. 21 Kelurahan Payo Lebar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					18	Pembangunan jalan lingkungan RT. 21 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					19	Pengaspalan jalan Lorong Swadaya sepanjang 60 meter RT. 18 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					20	Pengadaan lampu penerangan jalan di 2 titik RT. 18 Kelurahan Payo Lebar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
24	Abdul Rauf	4.11	DEMOKRAT	III	21	Pengadaan lampu penerangan jalan di 2 titik Jalan Buton RT. 36 Kelurahan Payo Lebar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					22	Pelebaran drainase di dekat jalan masuk Lorong Teratai RT. 14 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					23	Pengaspalan jalan di RT. 14 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					24	Perbaikan jalan setapak di RT. 14 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					25	Perbaikan jalan lingkungan RT. 32 dan RT. 03 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					26	Pembangunan jalan rabat beton RT. 32 Kelurahan Payo Lebar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					27	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 32 Kelurahan Payo Lebar.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					28	Kelengkapan fasilitas posyandu di RT. 01, 02,03,32. Kelurahan Payo Lebar.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					1	Perbaikan jalan di belakang pesantren Kelurahan Tahtul Yaman.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Realisasi pembangunan pagar makam di RT. 09 dan RT. 10 Kelurahan Tahtul Yaman.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					3	Pembangunan jalan lingkungan di RT. 03 Kelurahan Tahtul Yaman.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Pembangunan jalan di Jl .Kh. Majid Menuju Jl. Kh. Zuhdi RT. 06 Kelurahan Tahtul Yaman.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Pembangunan jalan di Jl. Usaha Pertanian di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
25	Sutiono, ST	4.5	PDI Perjuangan	II	6	Pembangunan jalan menuju tempat pemakaman umum RT. 07,08,09,10 Kelurahan Tahtul Yaman.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Evaluasi penyaluran bantuan sosial dan validasi data penerima program keluarga harapan, KIS, Jambi Bugar dan raskin agar koordinasi melibatkan Ketua RT setempat.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
					2	Pembangunan pengadaan instalasi pengolahan air limbah di RT. 13 Kelurahan Tanjung Pinang.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					3	Peningkatan mutu pelayanan administrasi jaminan kesehatan BPJS terkait koordinasi dengan Jasa Raharja.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					4	Pengawasan, tindak lanjut pangkalan gas dan penambahan kuota gas subsidi di Kelurahan Tanjung Pinang.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					5	Penyediaan sarana dan prasarana pengajian untuk anak-anak RT. 24,25,27 Kelurahan Tanjung Pinang.	KESRA	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					6	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan organisasi-organisasi yang berkembang di masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang.	BKBP	PRIORITAS 5	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta efektivitas fasilitasi orkemas dan parpol
26	Putra Absor Hasibuan,	4.2	Gerindra	I	7	Koordinasi Pemerintah Kota Jambi dengan pengurus-pengurus Masjid untuk penyaluran insentive guru PAMI di Kelurahan Tanjung Pinang.	KESRA/ KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					1	Bantuan pengadaan tenda untuk RT. 05 Kelurahan Kasang.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					2	Perbaikan pengaspalan jalan lingkungan RT. 15 Kelurahan Kasang.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Bantuan pembangunan renovasi Masjid Al-Amin RT. 15 Kelurahan Kasang.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
27	Eko Setiawan, SE	4.3	Gerindra	IV	4	Bantuan pengawasan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru untuk siswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					5	Pembangunan drainase di RT. 05 Kelurahan Kasang.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					6	Pembangunan drainase di RT. 15 Kelurahan Kasang.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Perbaikan normalisasi drainase RT. 55 Kelurahan Jelutung.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Perbaikan jalan lingkungan RT. 55 Kelurahan Jelutung.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 55 Kelurahan Jelutung.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					4	Penyaluran bantuan pengadaan benih dan kerambah ikan RT. 31 Kelurahan Jelutung.	DPKP	PRIORITAS 3	1.
					5	Sosialisasi program Smart City.	DISKOMINFO	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					6	Peningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.	DINKES/ DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
28	Frans Sugama	4.4	PDI Perjuangan	I	7	Solusi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sekolah madrasah di Kelurahan Jelutung.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					1	Pengawasan program Perkim untuk bedah rumah tahun 2020 untuk Kelurahan Talang Banjar yang sudah ketuk palu agar tidak digeser lagi.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					2	Perbaikan, pengerukan dan pendalaman parit RT. 30 Kelurahan Talang Banjar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Realisasi perbaikan jalan di lorong Langgar RT. 30 Kelurahan Talang Banjar.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
29	Saiful, SH	4.6	Golkar	II	4	Pendataan warga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan PKH RT. 30 Kelurahan Talang Banjar.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
					5	Pengadaan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba RT. 30 Kelurahan Talang Banjar.	BKBP	PRIORITAS 5	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta efektivitas fasilitasi orkemas dan parpol
					1	Pengecoran jalan RT. 06 Kelurahan Jelutung untuk solusi banjir.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Pemindahan tiang listrik yang berdiri di lokasi Masjid Kelurahan Kebun Handil yang mengganggu jamaah Masjid.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					3	Renovasi Masjid Miftahul Rahman Kelurahan Jelutung.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Pemindahan tiang listrik yang berdiri di lokasi Masjid Kelurahan Jelutung yang mengganggu jamaah Masjid.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
30	Maya Fitriah Siregar	4.7	Nasdem	II	5	Perbaikan jalan RT. 15 Kelurahan Cempaka Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					6	Pengaspalan Jl. Panca Mulyo 1 dan Jl. Panca Mulyo 2 RT. 07 dan RT. 08 Kelurahan Jelutung Sepanjang 430 Meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Perbaikan dan pembenahan drainase di RT. 04 Kelurahan Tanjung Sari.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Evaluasi dan validasi data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran di Kelurahan Tanjung Sari.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
					3	Fasilitasi pelatihan UKM dan industri rumahan untuk warga Kelurahan Tanjung Sari.	DTKK	PRIORITAS 3	Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi
					4	Bantuan bagi anak-anak putus sekolah untuk warga Kelurahan Tanjung Sari agar dapat mengikuti paket C tanpa dibebani biaya.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
31	H. Muhammad Zayadi,	4.8	PKS	IV	5	Penambahan kuota gas subsidi di Kelurahan Tanjung Sari.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					1	Pembangunan jalan primer ke lokasi persawahan kampung Kelurahan Tanjung Johor.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memfasilitasi pengajuan perbaikan turap Masjid Jami' Alkafy ke Balai Sungai Batanghari.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Pembebasan lapangan sepakbola Kelurahan Tanjung Johor.	PEM	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					4	Penimbunan tanah tempat pemakaman umum Kelurahan Tanjung Johor.	DPUPR/ DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					5	Koordinasi dengan PT. REMCO dan PT. Jambi Waras terkait dana CSR untuk warga setempat.	EKONOMI	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					6	Perbaikan SDN 44 Kelurahan Tanjung Johor yang sudah rusak.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					7	Solusi untuk jalan dibelakang dan samping PT. REMCO yang rawan kecelakaan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Penindakan terkait polusi udara yang disebabkan aktifitas pabrik PT. REMCO.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					9	Penindakan terkait jalanan yang tergenang air disekitar PT. REMCO yang disebabkan aktifitas pabrik PT. REMCO.			
					10	Pembuatan gorong-gorong di beberapa titik di Jalan K.H. Majid.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Pembangunan dan pelebaran jalan di tepi Sungai Batanghari Kelurahan Tanjung Johor.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
12	Pengadaan pembatas jalan di tepi Sungai BatanghariKelurahan Tanjung Johor.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
32	Sartono, SH, M.Hum	4.9	PAN	I	13	Pengadaan lampu penerangan jalan di tepi Sungai BatanghariKelurahan Tanjung Johor.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					1	Perbaikan jalan lingkungan RT. 09 Kelurahan Tanjung Pinang.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Pengadaan tiang listrik di lorong Andalas RT. 09 Kelurahan Tanjung Pinang.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					3	Pengadaan lampu penerangan jalan di lorong Andalas RT. 09 Kelurahan Tanjung Pinang.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					4	Bantuan pembangunan pengadaan mandi, cuci, kakus RT. 09 Kelurahan Tanjung Pinang.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
33	Kasiono	5.1	Gerindra	II	5	Penertiban warnet yang sering melakukan judi online dan menjadi tempat tongkrongan anak punk.	SATPOL PP/ DPMPTSP	PRIORITAS 5	Memperkuat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
					1	Pengadaan tempat pembuangan sampah atau kontainer bak sampah di Kelurahan Payo Selincah.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					2	Pengadaan tiang dan lampu jalan sebanyak 2 titik di RT. 01 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					3	Pengadaan pembangunan tutup parit sepanjang 600 meter di RT. 01 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Pengaspalan jalan di RT. 01 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Pengadaan pembangunan balai pertemuan RT Kelurahan Payo Selincah.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					6	Perbaikan parit saluran air di RT. 02 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Perbaikan jalan lorong di RT. 02 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					8	Perbaikan jalan di Jl. Sumedi RT. 03 Kelurahan Payo Selincih dengan lebar 4 meter sepanjang 400 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Pengadaan LPJU sebanyak 6 titik di RT. 03 Kelurahan Payo Selincih.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					10	Pengadaan pembangunan drainase sepanjang 200 meter di RT. 03 Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Pengadaan pembangunan drainase di RT. 04 Kampung Flores Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					12	Pengaspalan jalan RT. 04 Kampung Flores Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					13	Pengecoran jalan di Lr. Safa'at Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					14	Pengadaan LPJU sebanyak sebanyak 10 titik di Lr. Safa'at Kelurahan Payo Selincih.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					15	Pengadaan pembangunan parit plat deker Lr. Safa'at Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					16	Pengaspalan jalan gang Sederek Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					17	Pembangunan drainase 1,5 x 1,5 x 250 meter dan drainase tutup 60 x 60 x 230 meter di Jl. Majapahit RT. 05 Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					18	Pengadaan pemasangan lampu jalan sebanyak 3 titik di Lr. Sari RT. 06 Kelurahan Payo Selincih.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					19	Pemasangan tiang lampu jalan di Lr. Prihatin sebanyak 6 titik RT. 06 Kelurahan Payo Selincih.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					20	Pembangunan pembuatan parit jalan lingkungan di Lr. Pribadi sepanjang 200 meter di RT. 06 Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					21	Pengaspalan jalan di samping Masjid Nurul Iman As'ad sepanjang 400 meter Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					22	Pengadaan pemasangan LPJU di RT. 07 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					23	Bantuan pengadaan alat-alat olah raga di RT. 07 Kelurahan Payo Selincah.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
					24	Pengecoran jalan di Lr. Patah Tiga RT. 10 tembusan RT. 05 lebar 3 meter panjang 100 meter Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					25	Pengecoran dam sambungan drainase di Lr. Patah Tiga RT. 10 tembusan RT. 06 Lr. Prihatin lebar 125 cm panjang 150 meter Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					26	Pengecoran jalan Lr. Setapak RT. 10 tembusan RT. 06 lebar 150 cm panjang 300 meter Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					27	Pengecoran jalan Lr. Setapak RT. 10 tembusan RT. 11 lebar 150 cm panjang 100 meter Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					28	Pengaspalan jalan Lr. Kakak Tua RT. 10 tembusan RT. 11 Lebar 3 meter panjang 800 meter Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					29	Pengaspalan jalan Lr. Kakak Tua RT. 10 tembusan Lr. Patah Tiga lebar 4 meter panjang 700 meter Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					30	Pengadaan LPJU sebanyak 8 titik Lr. Perumahan RT. 10 tembusan Lr. Prihatin RT. 11 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					31	Pengadaan tiang dan lampu jalan di Lr. Patah Tiga RT. 10 Kelurahan Payo Selincah sebanyak 4 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					32	Pengadaan tiang dan lampu jalan umum sebanyak 10 titik. Di Lr. Langgar RT. 10 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					33	Pengecoran jalan di Lr. Kakak Tua RT. 10 Kelurahan Payo Selincah lebar 3 meter dan panjang 100 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					34	Penyambungan parit cor dengan lebar 125 cm panjang 125 meter di Lr. Pribadi RT. 10 dan RT. 06 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					35	Pengadaan tiang dan lampu jalan sebanyak 10 titik RT. 10 dan RT. 06 Lr. Pribadi kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					36	Normalisasi parit saluran air di RT. 13 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					37	Pengadaan pembangunan drainase di RT. 14 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					38	Pembangunan drainase dan gorong-gorong di Lr. Masjid Taqwa sepanjang 173 meter dengan lebar 125 c tinggi 120 cm di RT. 15 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					39	Pengadaan pembangunan tutup parit Lr. Masjid Taqwa di RT. 15 Kelurahan Payo Selincah lebar 60 cm panjang 41 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					40	Pengaspalan jalan sepanjang 90 meter dengan lebar 3 meter di RT. 16 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					41	Pengaspalan jalan gang sepanjang 30 meter lebar 2 meter di RT. 16 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					42	Pengadaan lampu jalan sebanyak 2 titik di RT. 16 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					43	Pengaspalan jalan di Lr. Masjid Taqwa RT. 17 Kelurahan Payo Selincah sepanjang 400 meter dengan lebar 3 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					44	Realisasi pengadaan lampu jalan 3 titik dan pengadaan tiang dan lampu sebanyak 4 titik di RT. 17 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					45	Pengaspalan Lr. Keluarga RT. 18 dan 19 Kelurahan Payo Selincah lebar 3 meter sepanjang 150 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					46	Pengadaan pembangunan jalan lingkungan di RT. 20 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					47	Lanjutan pembangunan drainase sepanjang 42 meter RT. 21 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					48	Pengadaan pembangunan parit beton kiri kanan sisi jalan sepanjang 200 meter di RT. 21 Kelurahan Pavo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					49	Pengadaan pembangunan jalan lingkungan Lr. Nagamas RT. 21 sepanjang 130 meter dengan lebar 3 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					50	Pengadaan LPJU di Lr. Sekuntang Dayo RT. 21 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					51	Pemindahan tiang listrik di RT. 21 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					52	Pengaspalan jalan lorong RT. 22 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					53	Perbaikan parit saluran air di Jl. Kenangan I RT. 21 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					54	Pengadaan tiang listrik di RT. 22 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					55	Penambahan bantuan tabung gas serta penambahan kuota gas subsidi.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					56	Pengaspalan jalan lorong langgar Miftahul Jannah di RT. 23 Payo Selincah lebar 2,6 meter sepanjang 60 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					57	Pengadaan pembangunan parit jalan mengarah MTS lebar 40 meter sepanjang 50 meter kiri 50 meter kanan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					58	Pengadaan pembangunan jalan setapak RT RT. 23 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					59	Pengadaan jalan tembusan PLN lebar 3 meter panjang 45 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					60	Pengecoran jalan tembusan RT. 24 ke RT 23 sepanjang 150 meter Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					61	Pengadaan LPJU sebanyak 2 titik di jalan arah PT. PLN.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					62	Perbaikan tiang listrik di RT. 24 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					63	Pengecoran jalan setapak sepanjang 100 meter di RT. 24 Kelurahan Payo Selincah..	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					64	Pengadaan LPJU di Jl. Berdikari arah Masjid Nurul Jannah sebanyak 2 titik Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					65	Pengecoran jalan, drainase lanjutan sepanjang 116 meter di Jl. Ipal RT. 26 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					66	Pengadaan LPJU sebanyak 2 titik di RT. 24 Jl. Ipal Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					67	Pengaspalan lanjutan di Lr. SMP 15 sepanjang 148 meter dan lanjutan pembangunan drainase sepanjang 100 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					68	Pengadaan LPJU di Lr. Famili RT. 26 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					69	Pembangunan drainase di Lr. Tower RT. 26 Kelurahan Payo Selincah sepanjang 110 meter .	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					70	Pengadaan pemasangan LPJU di RT. 25 Lr. Sriwijaya Kelurahan Payo Selincah sebanyak 2 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					71	Pengecoran dan pengaspalan jalan Lr. Hidayah RT. 27 Kelurahan Payo Selincah sepanjang 165 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					72	Pengadaan tiang dan lampu jalan di Lr. Hidayah sebanyak 3 titik di RT. 27 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					73	Penambahan kuota gas subsidi Kelurahan Payo Selincah.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					74	Pengadaan untuk penambahan tiang listrik di Lr. Sorub RT. 28 Kelurahan Payo Selincah.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					75	Penyambungan saluran air bersih PDAM di RT. 28 Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					76	Pengadaan cermin rambu lalu lintas di pertigaan RT. 28 Kelurahan Payo Selincih.	DISHUB	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					77	Bantuan pengadaan travo stabil listrik di RT. 29 Kelurahan Payo Selincih.			
					78	Pengadaan penambahan tiang dan lampu jalan di RT. 29 Kelurahan Payo Selincih.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					79	Pengecoran saluran air dari box sampai ke saluran besar di RT. 29 Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					80	Pengadaan tiang dan lampu jalan sebanyak 2 titik di RT. 30 Kelurahan Payo Selincih.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					81	Pengadaan pembangunan parit jalan sepanjang 100 meter di RT. 30 Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					82	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan lingkungan di RT. 31 Kelurahan Payo Selincih sebanyak 4 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					83	Penambahan pembangunan parit yang berbatasan dengan RT. 25 dan RT. 32 Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					84	Pembangunan pembuatan sarana olah raga gedung badminton di Kelurahan Payo Selincih.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
					85	Perbaikan jalan di Lr. Aman RT. 32 Kelurahan Payo Selincih sepanjang 150 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					86	Perbaikan jalan di Lr. Syukur Kelurahan Payo Selincih sepanjang 120 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					87	Pembangunan parit sepanjang 70 meter dan polongan sepanjang 5 meter yang menghubungkan RT. 32, RT. 01 dan RT. 30 di Lr. Perjuangan RT. 32 Kelurahan Payo Selincih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					88	Pengadaan tiang 5 titik dan lampu jalan 3 titik di Lr. Perjuangan RT. 32 Kelurahan Payo Selincih.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
34	Naim, SH	5.1	PAN	III	89	Pengecoran jalan sepanjang 300 meter di RT. 33 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					90	Pembangunan parit jalan sepanjang 200 meter di RT. 33 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					91	Perbaikan jalan dan parit jalan dari RT. 17, 37, 16 Menuju ke RT. 35 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					92	Pembangunan drainase di RT. 36 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					93	Pembangunan pengecoran jalan sepanjang 150 meter di RT. 36 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					94	Pengadaan pembangunan pos kamling serta perlengkapannya di RT. 36 Kelurahan Payo Selincah.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					95	Bantuan pengadaan pembangunan septitank untuk warga RT. 36 Kelurahan Payo Selincah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					96	Penyaluran bantuan modal untuk usaha bagi masyarakat RT. 36 Kelurahan Payo Selincah.	DTKK/ DINSOS	PRIORITAS 3	Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi
					1	Kelanjutan pembangunan jalan di lorong Mustika yang tembus ke lorong Pratusnadi (puskesmas) yang dilewati 5 RT yaitu RT. 22, RT. 23, RT. 24, RT. 45 dan RT. 37 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Pembangunan jalan di Simpang Acai yang meliputi RT. 25, RT. 26, RT. 46 dan RT. 47Kelurahan Lingkar Selatan merupakan pintu masuk perbatasan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Perbaikan jalan di Sekolah Dasar yang terletak di RT. 26 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
35	RR. Nully Kurniasih.K,	5.11	DEMOKRAT	IV	4	Pengadaan pangkalan gas untuk RT. 09 dan RT. 10 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					5	Memperketat pantauan di pangkalan gas.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					6	Pemasangan lampu jalan di 4 titik yaitu di RT. 25, RT. 26, RT. 46 dan RT. 47 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					7	Perbaikan jalan di RT. 50 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Perbaikan jalan di RT. 47 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Perbaikan drainase RT. 47 Kelurahan Lingkar Selatan yang rusak akibat dari pembuangan melalui drainase RT. 25 dan RT. 26 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					10	Pengadaan pangkalan gas di RT. 25, RT. 26, RT. 46 dan RT. 47 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					1	Pemanfaatan dan memfungsikan gedung SD N 137 yang tidak terpakai.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					2	Realisasi pembangunan Posyandu serta sarana dan prasarana menunjang kegiatan di RT. 06 Kelurahan Wijayapura.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					3	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di Jl. H.Kamil RT. 13, 14, 16, 17, 18 Kelurahan Wijayapura sebanyak 5 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					4	Pengaspalan Lr. Bukit Baling RT. 18 Kelurahan Wijayapura sepanjang 400 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
36	Darmawan, SE	5.2	Gerindra	I	5	Pengaspalan Jl. RT. 23 Lr. Arwana Kelurahan Wijayapura.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Mengembangkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
					6	Pengaspalan jalan Yayasan Unggul Sakti perbatasan jalan RT. 23 dan RT. 19 Kelurahan Wijayapura.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					7	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana alat kesenian kompangan di RT. 05 Kelurahan Wijayapura.	DPK	PRIORITAS 4	
					8	Penerimaan siswa berdasarkan zonasi sekolah SMA N 2 di prioritaskan warga RT. 06 Kelurahan Wijayapura.			Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di RT. 07 dan RT. 11 Kelurahan Wijayapura sebanyak 3 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	
					10	Perbaikan jalan dan pembangunan parit jalan di Jl. Batur depan SD N 137.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					1	Perbaikan Jalan lingkungan RT. 36 Kelurahan Paal Merah yang digunakan sebagai akses jalan menuju Masjid.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan 1.
					2	Pengadaan bantuan untuk pembenihan dan pembesaran kegiatan usaha kolam ikan RT. 36 Kelurahan Paal Merah.	DPKP	PRIORITAS 3	
					3	Pembangunan akses jalan di Perumahan Teratai RT. 23 dan RT. 24 Kelurahan Talang Bakung yang sudah pernah diajukan.	DPUPR	PRIORITAS 1	
					4	Pengadaan lampu lalu lintas di dekat Masjid Nurul Taqin RT. 23 dan RT. 24 Kelurahan Talang Bakung.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Pembuatan polisi tidur di dekat Masjid Nurul Taqin RT. 23 dan RT. 24 Kelurahan Talang Bakung.	DISHUB	PRIORITAS 1	
37	Junedi Singarimbun,	5.3	PDI Perjuangan	III	1	Perbaikan jalan lingkungan di Lr. Sepakat Kelurahan Lingkar Selatan sepanjang 300 meter dengan lebar 3 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					2	Pengadaan pemasangan tiang listrik Perumahan Umum di Lr. Pengadilan Kelurahan Lingkar Selatan.	DPRKP	PRIORITAS 1	

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					3	Peninjauan terhadap drainase yang berbatasan dengan daerah Muaro Jambi di Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Perbaikan jalan di Simpang Acai.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Pengadaan lampu penerangan jalan umum di Simpang Acai.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					6	Peninjauan kembali penyaluran gas subsidi di RT. 42 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					7	Peninjauan dan pendataan kembali penerima bantuan PKH di RT. 42 Kelurahan Lingkar Selatan.	DINSOS	PRIORITAS 3	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
					8	Perbaikan dan perawatan drainase di RT. 42 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Normalisasi parit di Simpang Semangka Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					10	Kelanjutan perbaikan jalan rusak di RT. 23 Jl. Mustika menuju Puskesmas.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					11	Pengadaan pemasangan satu unit lampu penerangan jalan umum di RT. 23 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					12	Peninjauan pembangunan perbaikan jalan yang belum sempurna pengerjaannya di lorong dan gang RT. 11 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					13	Bantuan pembangunan Sekolah Madrasah di Kelurahan Lingkar Selatan.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					14	Perbaikan jalan lingkungan di Sekitar SD Negeri 221 sepanjang 200 meter. Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Pelebaran saluran drainase di RT. 14 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
38	Muhilli Amin, SH	5.4	Golkar	I	16	Perbaikan Jalan Lorong Mulyo I RT. 39 dan RT. 40 Kelurahan Talang Bakung.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 07 Kelurahan Eka Jaya.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					2	Perbaikan drainase RT. 07 Kelurahan Eka Jaya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Pengadaan lampu penerangan jalan di gapura RT. 15 Kelurahan Sukarejo.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					4	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 34 Kelurahan Thehok.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					5	Perbaikan drainase RT. 34 Kelurahan Thehok.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					6	Pembangunan jalan Komplek Guru H. Agus Salim RT. 29 Kelurahan Thehok.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Pembangunan drainase Komplek Guru H. Agus Salim RT. 29 Kelurahan Thehok.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Pengusulan pembangunan dinding beton dengan relief lambang Provinsi Jambi, relief peta Provinsi Jambi dan petunjuk tempat wisata yang ada di Provinsi Jambi dari warga RT. 12, RT. 13 dan RT. 14 Komplek PU Kelurahan Pasir Putih.			
					9	Bantuan renovasi perluasan Masjid Al-Iman RT. 12, RT. 13 dan RT. 14 Komplek PU Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					10	Penambahan pengadaan pemasangan lampu jalan di RT. 48 Kelurahan Eka Jaya.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					11	Pembangunan sarana olahraga RT. 48 Kelurahan Eka Jaya.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
12	Pengadaan lampu penerangan jalan sebanyak 15 unit di Lorong Madrasah RT. 20 Kelurahan Thehok.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik					

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
39	Martua Muda Siregar,	5.5	Nasdem	III	13	Pengaspalan jalan di Gang Melati dan Lorong Anggrek RT. 20 Kelurahan Thehok masing-masing sepanjang 150-200 meter selebar 3-3,5 meter.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					14	Pembangunan drainase di Gang Melati dan Lorong Anggrek RT. 20 Kelurahan Thehok.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Perbaikan jalan gang depan Langgar Al-Muhajirin RT. 12 Kelurahan Thehok.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					16	Penambahan kuota KIS untuk warga kurang mampu RT. 21 Kelurahan Thehok.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					17	Perbaikan jalan H. Adam Malik RT. 21 Kelurahan Thehok.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					18	Perbaikan drainase jalan H. Adam Malik RT. 21 Kelurahan Thehok.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					19	Penyaluran dana bantuan untuk kegiatan usaha pemuda RT. 52 Kelurahan Lingkar Selatan.	DTKK/ DINSOS	PRIORITAS 3	Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi
					20	Kelanjutan pembangunan jalan Perumahan Alamanda Asri Kecamatan Paal Merah yang sudah masuk dalam e-planning tahun 2018.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					21	Penyaluran dana bantuan untuk kegiatan usaha pemuda RT. 37 Kelurahan Thehok.	DISPORA	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
					22	Pengawasan kualitas infrastruktur yang sudah dibangun di Kota Jambi.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Penambahan pangkalan gas bersubsidi di Kelurahan Eka Jaya.	DPP	PRIORITAS 3	Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
					2	Perbaikan pembangunan jalan di RT. 59 Kelurahan Eka Jaya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Pengadaan lampu penerangan jalan umum di RT. 45 Kelurahan Talang Bakung.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
40	Risko Elwindo Aljufri,	5.6	Persatuan Bintang	II	4	Pengadaan pembuatan tempat pembuangan sampah di RT. 45 Kelurahan Talang Bakung.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					5	Pengadaan lampu penerangan jalan umum di RT. 37 Kelurahan Talang Bakung.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					6	Perbaikan pengecoran Jalan di Jl. Kebun II, Jl. Komplek PU Pasir Putih, Jl. Kasuari Kelurahan Talang Bakung.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Pengadaan gedung Posyandu Kelurahan Talang Bakung.	DINKES	PRIORITAS 2	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					8	Pengadaan alat-alat kebersihan lingkungan, mesin rumput dan alat fooging di Kelurahan Talang Bakung.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					1	Perbaikan normalisasi drainase di RT. 21 Kelurahan Pasir Putih depan SMP N 6.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Perbaikan normalisasi dan perawatan berkala drainase per 3 bulan di Lrg. Makmur Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Renovasi pagar SMP N 6 untuk pelebaran jalan.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					4	Insentive atau upah untuk mendukung program bangkit berdaya.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					5	Pengadaan lampu penerangan jalan umum di RT. 21 Kelurahan Pasir Putih.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
					6	Perbaikan jembatan patah yang menghambat fungsi saluran air drainase di Komplek Dokter Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					7	Renovasi pemenggalan median jalan di Jl. Rb. Siagian untuk akses putar arah.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					8	Realisasi perbaikan pengaspalan jalan di Lrg. Sepakat Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Perbaikan pengecoran jalan dari Puskesmas Pasir Putih mengarah ke H. Kamil.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
					10	Pengadaan lampu penerangan jalan umum sebanyak 1 titik di depan Lorong dari arah PWK ke Jl. Rb. Siagian.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
					11	Pengawasan terhadap rumah Dinas Dokter karena yang menempati bukan Dokter sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan saat kondisi urgent.	DINKES	PRIORITAS 2	
					12	Perbaikan gorong-gorong pecah di Lrg. Sepakat Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					13	Pengadaan pembangunan gerbang selamat datang di RT. 12 Komplek PU Kelurahan Pasir Putih.	PEM	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					14	Pengadaan rambu lalu lintas traffic light di simpang bandara depan Komplek PU.	DISHUB	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					15	Pengangkutan sampah dari Lr. Donorejo RT. 25 Kelurahan Pasir Putih.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
					16	Pengadaan pembangunan drainase di Lr. Donorejo RT.25 Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					17	Pengaspalan jalan di Lr. Donorejo RT. 25 Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					18	Pengadaan drainase di Lr. Bersama menembus Lr. Kartini Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					19	Pengaspalan Lr. Bersama menembus Lr. Kartini Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					20	Pembangunan drainase dari SMK N 2 mengarah ke Perumahan Aproza.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					21	Pengawasan dan penindakan terhadap parkir liar di Pasar Kito.	DISHUB	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					22	Pengangkutan dan pembersihan sampah yang berserakan sepanjang 200 meter sekitar Lr. SMK N 2 dan pagar perumahan PU.	DLH	PRIORITAS 1	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021					
					23	Perbaikan jalan di RT. 11 Kelurahan Pasir Putih arah bandara menembus ke Bajuri.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					
					24	Pengecoran jalan di belakang Kantor Lurah dan Belakang Telkom Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					
					25	Pengadaan insentive untuk ibu-ibu PKK.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK					
					26	Peninjauan untuk penanggulangan banjir dan penimbunan jalan di RT. 21 Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					
					27	Pengadaan insentive ibu-ibu BKMT.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK					
					28	Pengadaan lampu penerangan jalan umum di Jl. Bangau II Tambak Sari RT. 11 2 titik dan RT. 12 2 titik.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik					
					29	Pengadaan pembangunan drainase di Lr. Rahayu RT. 15 Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					
					30	Pengadaan pembangunan gapura komplek PU dan pagar beton dengan relief sepanjang 75 meter di Kelurahan Pasir Putih.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK					
					31	Bantuan pembangunan perluasan Masjid Al-Imam Kelurahan Pasir Putih.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					
					32	Pengecoran jalan RT 16 gang siam Lorong Bersama Kelurahan Pasir Putih	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					
					33	Lrg. Salju, Jl. Zainir Haviz, RT. 18 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru (Sebelah Dinas Pariwisata)	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan					
					41	Hizbullah, S.Si	5.7	PKS	III	1	Pengadaan lampu penerangan jalan RT. 50 Kelurahan Eka Jaya.	DPRKP	PRIORITAS 1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
										2	Peninjauan izin pihak developer Perumahan Azawa terkait masalah saluran air Kelurahan Eka Jawa.	DPMP TSP	PRIORITAS 4	Memantapkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
42	Muhammad Redho	5.8	Persatuan Bintang	III	3	Koordinasi Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk pemekaran wilayah di RT. 50 Kelurahan Eka Jaya.	PEM	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					4	Bantuan dana untuk kegiatan sunatan masal dan lomba solawat untuk ibu-ibu yang biaya pelaksanaan sebelumnya berasal dari swadaya masyarakat.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					5	Bantuan dana untuk menunjang kegiatan ayo mengaji RT. 20 Kelurahan Eka Jaya.	DISDIK	PRIORITAS 2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
					6	Bantuan untuk seragam BKMT.	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					7	Pengadaan bantuan genset untuk Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Pasir Putih..	KECAMATAN	PRIORITAS 5	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
					8	Bantuan untuk pembangunan Masjid yang sedang berjalan di RT. 50 Kelurahan Eka Jaya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					9	Perbaikan jalan di depan Masjid RT. 50 sampai RT. 24 dan di tikungan dekat rumah Ketua RT. 24 Kelurahan Eka Jaya.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					1	Perbaikan pengaspalan jalan serta pemasangan polisi tidur di Jl. Bangau II Kelurahan Tambak Sari	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					2	Pembangunan pembuatan saluran air di sepanjang Jl. Bangau II kelurahan Tambak Sari.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					3	Perbaikan pengaspalan jalan Bangau III sepanjang 500 meter Kelurahan Tambak Sari.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					4	Perbaikan normalisasi parit sepanjang 500 meter jalan Bangau III Kelurahan Tambak Sari.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					5	Perbaikan normalisasi parit dalam lorong di Jl. Nuri sepanjang 50 meter Kelurahan Tambak Sari.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
					6	Perbaikan jalan setapak dalam lorong di Jl. Bangau III sepanjang 55 meter Kelurahan Tambak Sari.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

No	Nama Dewan	No Reg	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
43	Ambo Lau, BE	5.9	Persatuan Bintang	IV	1	Koordinasi pemerintah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi untuk perbaikan jalan dari simpang Marene di perbatasan Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.	DPUPR	PRIORITAS 1	Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan

5.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PANDEMI COVID-19 DI DAERAH

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah perlu mensinergikan 3 (tiga) kegiatan agar penanganan Covid-19 menjamin kelangsungan hidup masyarakat di daerah, yaitu:

1. Kebijakan untuk penyelenggaraan edukasi bahaya Covid-19 bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan asumsi masyarakat menengah ke atas mampu mengamankan dirinya, edukasi sosial sangat diperlukan masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan edukasi sosial yang tepat akan meminimalkan keresahan dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan edukasi sosial bahaya Covid-19 harus disusun secara sistematis tanpa menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat siap menghadapi bahaya Covid-19 secara cerdas dan bijak, seperti halnya menyiapkan masyarakat menyiapkan bencana alam. Dengan kebijakan edukasi sosial inilah pengendalian bidang dapat dilakukan, mengingat proporsi "*Protokol Carrier*" tersebut ada pada masyarakat menengah kebawah;
2. Kebijakan yang menguatkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan Covid-19. Upaya dan kesiapan pemerintah sebagai profesionalitas garda terdepan kesehatan, walaupun belum mampu menghentikan persebaran virus namun terbukti mampu menghambat dan melokalisasi persebaran. Fondasi penanganan Covid-19 perlu diperluas dan diperkuat, kesiapan profesionalitas dan kerelawanan para prajurit kesehatan harus diimbangi jaminan kesehatan dan keselamatan yang sama. Upaya meminimalkan resiko tertentu disertai kecukupan alat pelindung diri (APD) sesuai standar kesehatan serta peralatan medis yang mumpuni. Ketersediaan Rumah Sakit dan Kapasitas Penanganannya yang harus mampu menangani ledakan pasien di daerah;

3. Kebijakan nasional untuk memobilisasi dunia industri dalam memproduksi secara masal peralatan pencegahan, pemeriksaan dan penanganan Covid-19, diarahkan untuk mencukupi ketersediaan masker, sanitizer, APD serta bahan pangan bagi kalangan yang rentan terhadap kebutuhan primer ini.

5.3.1. STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN PENULARAN COVID-19

1. Penyiapan Protokol

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 maka Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 172 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Jambi, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan protokol sebagai berikut:

- a. Protokol Acara Resmi: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan rapat dan Koordinasi baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara virtual atau menggunakan *video conference*. Pemerintah Kota Jambi Menyediakan Cuci tangan dan *Hand Sanitizer* di lingkungan pemerintah, Selain itu Pemerintah Kota Jambi juga rutin melakukan penyemprotan di perkantoran dan tempat acara untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19.
- b. Protokol Tempat Publik: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan pembatasan di area publik dengan memberlakukan pembatasan waktu buka area publik dan mewajibkan menjaga jarak antar masyarakat di lingkungan publik. Pemerintah juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan di area publik.
- c. Protokol BTT: Pemerintah Kota Jambi akan tetap mengambil langkah taktis dan konkrit, sebagai upaya tanggap darurat pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19, serta melindungi masyarakat Kota Jambi, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Kebijakan anggaran dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan *re-focussing* APBD Pemerintah Kota Jambi

tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 terutama pada 3 aspek yang dipersiapkan yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.

- d. Protokol Pasar Rakyat: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan Penyemprotan rutin di area pasar tradisional yang ada di Kota Jambi, pemerintah juga menyediakan tempat cuci tangan untuk masyarakat yang berbelanja ke pasar.
- e. Selain Protokol diatas, Pemerintah Kota Jambi juga akan tetap melakukan penyemprotan disinfektan di 11 Kecamatan di Kota Jambi. Petugas penyemprotan terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan DAMKAR Kota Jambi. Penyemprotan dilakukan dengan pengawalan 12 Petugas pengawalan yang terdiri dari Komando Distrik Militer (KODIM), Polisi, Dinas Perhubungan dan POL PP. Adapun lokus yang dilakukan penyemprotan meliputi: sekolah, rumah ibadah, pasar, fasilitas umum lingkungan perumahan serta perkantoran.
- f. Untuk menghentikan penyebaran infeksi Covid-19 terutama pada tenaga medis yang memiliki resiko tinggi tertular infeksi virus maka ditetapkan prosedur dalam pemakaian alat-alat pelindung diri (APD) pada saat merawat pasien Covid-19 PDP/ODP dengan Co morbid di ruang isolasi.

2. Sosialisasi

Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan sosialisasi baik melalui media Sosial maupun media cetak terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19 adapun beberapa edaran/Instruksi yang telah dikeluarkan antara lain:

- a. Surat Edaran Walikota Jambi No.440/497/DINKES/2020 tanggal 2 maret 2020 kepada Pemilik Swalayan, Mall, Minimarket, Hotel dan Pemilik tempat-tempat umum tentang Himbauan Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan dengan Air Mengalir dan Sabun serta Hand Sanitizer bagi Pengunjung.
- b. Surat Edaran Walikota No. 443/498/DINKES/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Himbauan Walikota Kewaspadaan terhadap Corona Virus Diseases (Covid-19).

- c. Instruksi Walikota Jambi Nomor: 4/INS/IV/HKU/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perlindungan bagi pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di perusahaan di Kota Jambi, dimana salah satu isinya memberikan instruksi kepada pengusaha untuk menyediakan tempat cuci tangan dan peyediaan masker bagi pekerja.
- d. Instruksi Walikota Jambi Nomor: 08/INS/IV/HKU/2020 tanggal 23 April tentang Penggunaan masker untuk mencegah penularan Corona Virus Disease (Covid-19).

3. Identifikasi

Dalam melakukan identifikasi petugas medis di semua level dan semua tipe institusi medis harus segera mengisolasi dan menangani setiap kasus terduga Covid-19 diruangan terpisah (*single room*). Orang yang masih dianggap sebagai kasus terduga perlu melapor secara daring dalam dua jam. Harus dilakukan pengambilan spesimen dan tes asam nukleat nCoV-2019. Pasien suspek (*suspected patients*) harus dipindahkan ke rumah sakit rujukan secepatnya. Orang yang kontak dekat dengan pasien COVID-19 atau bahkan mereka dengan hasil positif untuk tes patogen pernapasan umum, dianjurkan untuk nantinya melakukan deteksi patogenik nCoV- 2019.

4. Testing

Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Jambi, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Jambi akan tetap melakukan rapid test terhadap orang dalam pengawasan di Kota Jambi. Sampai saat ini (Mei 2020) Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan rapid test sebanyak 1400 kali, baik itu hasil *tracking* dari jamaah tabligh akbar maupun hasil *tracking* pendatang lainnya.

5. Tracking

Kegiatan pengawasan dan penjagaan pos di 6 pintu masuk dan Keluar Kota Jambi juga dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Enam pos yang dalam pengawasan yaitu PAAL 10 dijaga 20 petugas, Simpang

Rimbo dijaga 18 petugas, Auduri I dijaga 18 petugas, Auduri II dijaga 15 petugas, Talang dijaga 10 petugas dan Angso duo dijaga 9 petugas. Personil yang melakukan pengawasan terdiri dari PM, KODIM, Polisi, Dinas Perhubungan, POL PP, Dinas Kesehatan dan Damkar. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dan *screening* awal pendatang. Selain itu tim Surveilans dari Dinas Kesehatan Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan masyarakat yang berstatus ODP di Kota Jambi.

6. Karantina

Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan tindakan karantina terhadap pasien maupun masyarakat di Kota Jambi antara lain dengan cara:

- a. Melakukan karantina mandiri bagi masyarakat Kota Jambi bila ada anggota keluarga atau saudara baru berpulang dari bepergian dari luar kota atau luar negeri, dengan cara:
 - Tetap dirumah selama 14 hari, tidak pergi keluar rumah, tetap diam didalam rumah dan lakukan *social distancing*.
 - Pelaku perjalanan melaporkan kepada penanggung jawab *surveillance* di wilayah tersebut dengan melampirkan nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi.
 - Selama 14 hari perilaku perjalanan akan dipantau via telpon atau WA oleh petugas (tenaga medis tidak datang kerumah).
 - Jika gejala mengarah ke penyakit Covid-19 maka dinkes setempat akan mendatangkan “Tim Khusus” dengan menggunakan APD lengkap untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
- b. Menyiapkan ruangan khusus di Rumah Sakit Rujukan bagi pasien yang PDP maupun Positif untuk menghindari kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi kepada orang lain.

7. Social dan Physical Distancing

Dalam percepatan pencegahan penanganan Covid-19 di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan beberapa aturan untuk mendukung kegiatan *social* dan *physical distancing* dengan tetap berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, antara lain:

- a. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi telah melakukan langkah antisipasi penularan COVID-19 dengan memberlakukan pembelajaran di rumah yang dimulai 17 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dengan surat Edaran Pelaksanaan Pembelajaran di rumah melalui:
 1. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1671/DINKES/2020 tanggal 22 Maret 2020
 2. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1672/DINKES/2020 tanggal 27 Maret 2020
 3. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1673/DINKES/2020 tanggal 3 April 2020
 4. Instruksi Walikota Nomor 188.5.5/1674/DINKES/2020 tanggal 19 April 2020
 5. Instruksi Walikota Nomor 188.5.5/1675/DINKES/2020 tanggal 3 Mei 2020
 6. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/659/DISDIK/2020
 7. Surat Dinas Pendidikan Nomor 800/740/DISDIK/2020 Tanggal 30 Maret 2020
 8. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/777/DISDIK/2020 Tanggal 03 April 2020
 9. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/895/DISDIK/2020 Tanggal 3 Mei 2020

Keputusan libur sekolah mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), selama di rumah kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa dilakukan dengan pembelajaran sistem *online*.

- b. Pemerintah Kota Jambi memberlakukan *work from home* (WFH) atau bekerja di rumah bagi ASN dan TTK, Eselon IV kebawah dengan komposisi 50% bekerja di rumah dan 50% bekerja di kantor secara bergantian sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Mei 2020. Hal ini dilakukan berdasarkan:
1. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/343/2020 tanggal 20 Maret 2020
 2. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/378/2020 tanggal 31 Maret 2020
 3. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/430/2020 tanggal 20 April 2020
 4. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/456/2020 tanggal 4 Mei 2020
 5. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/486/2020 tanggal 13 Mei 2020

Mulai bulan Juni Tahun 2020 direncanakan akan kembali memberlakukan Jam Kerja seperti biasa (tanpa WFH) dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penanganan Covid-19, sampai dengan kebijakan lagi terkait Covid-19 yang ditentukan kemudian.

- c. Sebagaimana **Instruksi Walikota Jambi No. 03/INS/2I/HKU/2020 tanggal 31 Maret 2020** Pemerintah Kota Jambi tetap memberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan masyarakat di luar rumah. Adapun petugas yang dibutuhkan untuk patroli jam malam sebanyak 320 personil. Patroli diberlakukan di 11 kecamatan di Kota Jambi dengan petugas patroli terdiri dari KODIM, Polisi, Dinas Perhubungan, POL PP, DAMKAR dan petugas dari setiap kecamatan. Pemberlakuan jam malam ini sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan mengurangi tindak kriminal yang semakin meningkat.
- d. Dalam hal kegiatan keagamaan dengan memperhatikan **Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19**. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan keputusan:

1. Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Pemerintah Kota Jambi dengan Ketua DPRD Kota Jambi, FORKOPIMDA, Kepala Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, FKUB Kota Jambi, Pengurus Cabang Muhammadiyah, Pengurus Cabang NU dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Jambi, menghasilkan keputusan ibadah atau ritual keagamaan dijalankan di rumah masing-masing untuk sementara waktu, begitu pula menunda semua kegiatan majelis taklim rutin dan tidak rutin serta peringatan hari besar keagamaan baik di tempat ibadah dan tempat lainnya dalam bentuk:
2. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Ketua DPRD, Kejaksaan Negeri, Polisi Resort Kota, Komando Distrik Militer 0415 Batang Hari, Pengadilan Negeri, Detasemen Polisi Militer, Kementerian Agama Kota, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi tentang Upaya atau Langkah-Langkah Pencegahan Terhadap Penyebaran Covid-19 di Kota Jambi Nomor 451/740.a/2020, Nomor 01/DPRD/2020, Nomor B.1465/1.5.10/CP.2/04/2020, Nomor B/318/IV/2020, Nomor WS.NI/1219/KP.01.1/4/2020, Nomor 164/IV/2020, Nomor B.440/KK.5.6/1/4/2020, Nomor 07/MUI/2020, Nomor R.03/FKub.165.JB/2020, Nomor 19/PD.DMI/IV/2020 Tentang Upaya atau Langkah-Langkah Pencegahan terhadap Penyebaran Covid-19 di Kota Jambi, dengan isi kesepakatan antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Sholat Jum'at agar jarak makmun 1-2 meter dan lebih diutamakan sholat zuhur dirumah masing-masing.
 - 2) Pembatasan dan pemberlakuan jam malam bagi masyarakat dan pelaku usaha tetap diberlakukan sampai jam 21.00 WIB.
 - 3) Para Ketua RT agar mengaktifkan kembali Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan).

- e. Pemerintah Kota Jambi telah membuat keputusan melalui **Instruksi Walikota Jambi No.3/INS/III/HKU/2020 tentang penetapan pemberlakuan jam malam bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya antisipasi dan penanganan terhadap penularan infeksi virus corona (Covid-19) di Kota Jambi.**
- f. Selain itu pemerintah Kota Jambi memberlakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha Club malam, diskotik, Pub/musik hidup, karaoke keluarga, Karaoke eksekutive, cafe, spa, bioskop, tempat permainan anak-anak, kolam renang, arena permainan ketangkasan manual / mekanik / elektronik untuk orang dewasa, warnet, fitness dan senam serta kegiatan usaha pariwisata lainnya. Penutupan sementara tersebut diatas diatur dalam:
 - 1. Instruksi Walikota Jambi Nomor 02/INS/III/HKU/2020 Tanggal 23 Maret 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 24 Maret s/d 06 April 2020)
 - 2. Instruksi Walikota Nomor 05/INS/IV/HKU/2020 tanggal 06 April 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 07 April s/d 23 April 2020)
 - 3. Instruksi Walikota Nomor 07/INS/IV/HKU/2020 tanggal 23 April 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 24 April s/d 29 Mei 2020).
- g. Pencegahan penularan Covid-19 melalui pembatasan moda transportasi dinilai tidak cukup jika hanya dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Hal yang juga penting adalah memastikan kesehatan penumpang, pengemudi, dan awak alat transportasi. **Dinas Perhubungan Kota Jambi mengeluarkan 551/576/DISHUB/2020 tanggal 3 April 2020 mengenai pembatasan penumpang moda transportasi Koja Trans dan Ketek untuk menjaga jarak (physical distancing).** Selanjutnya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui manusia, Pemerintah Kota Jambi memandang perlu melakukan pengetatan masyarakat yang akan masuk ke Kota Jambi maka dari itu diterbitkan **Keputusan Walikota Jambi No.173 tahun 2020 tentang operasi pembatasan masuk ke wilayah Kota Jambi.** Waktu kegiatan operasi selama 24

jam nonstop mulai tanggal 02 April s/d 29 Mei 2020 (atau sesuai perubahan yang ditentukan kemudian).

5.3.2. PENINGKATAN SISTEM KEKEBALAN TUBUH

Dalam rangka peningkatan kekebalan tubuh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jambi diminta untuk melakukan gerakan berjemur pada jam 10 pagi selama 10-15 menit dengan tetap menjaga jarak hal ini dilakukan mengingat besarnya manfaat berjemur dibawah matahari pada jam 10 tersebut, diantaranya: meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperkuat tulang, mengurangi depresi ringan dan meningkatkan kualitas tidur. Selain itu melalui akun resmi media sosial Pemerintah Kota Jambi selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga, berjemur dan makan makanan bergizi dan seimbang seperti daging, ayam, susu, sayuran dan buah-buahan untuk memperkuat imun tubuh. Pemerintah Kota Jambi telah memberikan suntikan Vitamin C ke petugas posko batas, baik untuk tenaga medis maupun non medis.

5.3.3. PENINGKATAN KAPASITAS KESEHATAN

1. Peningkatan Tenaga Medis

Untuk memastikan kinerja para petugas medis dan non medis dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 Pemerintah Kota Jambi melalui anggaran biaya tidak terduga akan tetap menyiapkan dana insentif yang diberikan kepada dokter, perawat dan petugas lainnya. Selain itu juga menyiapkan rumah singgah sebagai tempat istirahat bagi petugas medis. Pemerintah Kota Jambi telah merekrut relawan tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat 34 orang, laboratorium 4 orang dan non kesehatan Covid-19 yang terdiri tenaga pemulasaran dan penyelenggara pemakaman jenazah 18 orang.

Persiapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang terjadi di Kota Jambi, jika wabah Covid-19 terjadi eskalasi dan menimbulkan korban jiwa. Relawan tenaga kesehatan dan petugas pemakaman jenazah Covid-19 diberikan pelatihan pemandian dan pemakaman jenazah Covid-19 bertempat di Posko Gugus Tugas Covid-19 Mako Damkar Kota

Jambi. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk melatih kesiapan dan kesiapan petugas dalam skenario terburuk menangani penyelenggaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 di Kota Jambi.

2. Peningkatan Sarana Pendukung Kesehatan

Langkah antisipasi penanganan Covid-19 bagi layanan kesehatan dilakukan dengan menyiapkan mobil Ambulance bagi pasien Covid-19 serta juga menyiapkan petugas pendukung lain seperti tenaga sanitasi/kesling, laboratorium dan pemakaman, selain itu juga perlengkapan paska wafat seperti kantong mayat plastik dan plastik pembungkus jenazah telah disiapkan. Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pusara Agung milik Pemerintah Kota Jambi yang berada di jalan Lingkar Barat Alam Barajo yang dipersiapkan khusus jika terjadi kemungkinan terburuk, jatuhnya korban meninggal akibat wabah Covid-19 di Kota Jambi.

3. Peningkatan Ruang Perawatan

Dalam rangka pelayanan pasien Covid-19 Pemerintah Kota Jambi berusaha menambah fasilitas perawatan yang berada di Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi seperti terdapat ditabel berikut:

Tabel 5.3
Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Covid-19

No	PENYEDIAAN SARANA FASILITAS KESEHATAN	Jumlah	Satuan
1	Gedung untuk perawatan khusus covid 19	1	Unit
2	tempat tidur pasien	11	Unit
3	Ventilator	1	Unit
4	Peralatan untuk tes lengkap covid 19	2	Unit
5	Pasien monitor	10	Unit
6	Oxymetri	10	Unit
7	Termoscan	50	Unit
8	PCR	1	Pcs
9	Tenda Isolasi	1	Pcs
10	Branker	2	Pcs

Selain sarana fasilitas kesehatan yang sudah ada untuk penanganan Covid-19 di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan secara khusus gedung baru RSUD. H. Abdul Manap sebagai Ruang Isolasi penanganan Pasien Covid-19 di Kota Jambi. Kemudian untuk para pedagang yang reaktif hasil rapid tes-nya dilakukan isolasi di Graha Lansia fasilitas milik Pemerintah Kota Jambi.

4. Penguatan Sistem

Dalam rangka pengendalian COVID-19 Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan SK Gugus Tugas No. 172 Tahun 2020 dan menjadikan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi sebagai POSKO Gugus Tugas guna mempermudah komunikasi di masing-masing tim. Selain itu demi mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan media informasi dan juga system informasi geografis melalui website <https://covid19.jambikota.go.id> dan juga tentunya melalui akun resmi di beberapa media social seperti Instagram dan facebook.

5.3.4. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN INDUSTRI ALAT KESEHATAN

1. Peningkatan Alat Kesehatan dan APD

Untuk mendukung tenaga kesehatan Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan anggaran dibidang kesehatan untuk peningkatan alat kesehatan dan APD medis.

Pemerintah Kota Jambi mendapatkan bantuan dari pemerintah Singapura berupa 2.500 liter konsentrat hand sanitizer yang dapat diolah menjadi 250.000 liter hand sanitizer, Intermediate bulk Container kapasitas 1000 liter sebanyak 35 pcs, Drum kapasitas 100 liter sebanyak 350 pcs RNA Exraction Kits (alat tes Covid-19) sebanyak 10.368 kali tes dan 50 unit Mixers Fortitude Kit. Bantuan bernilai SGD 125.258 tersebut, memang ditujukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Jambi dan Provinsi Jambi dan telah diterima pada tanggal 22 Mei 2020.

2. Mengawal Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok

Pemerintah Kota Jambi berusaha menjamin kebutuhan pangan masyarakat melalui tim satgas pangan Kota Jambi yang selalu rutin berkoordinasi dengan BULOG untuk kepastian penyediaan bahan pangan masyarakat Kota Jambi. Selain itu untuk membantu masyarakat pemerintah Kota Jambi juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak.

3. Peningkatan Produksi Kebutuhan Medis

Dalam rangka mendukung kebutuhan medis Pemerintah Kota Jambi melakukan Produksi APD Hazmat dengan merangkul UMKM yang bekerjasama dengan 25 perajin. Selain itu pemerintah Kota Jambi juga menginisiasi pembuatan masker yang dibagikan gratis kepada masyarakat. Pada tahap pertama sudah dibagikan sebanyak 20.000 masker dengan sasaran masyarakat yang berada di beberapa pasar dan persimpangan jalan utama Kota Jambi. Pembagian tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Walikota Jambi.

5.3.5. MEMPERKUAT JARING PENGAMAN SOSIAL NASIONAL (*SOCIAL SAFETY NET*)

1. Stimulus Ekonomi

Dalam penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Jambi telah membuat beberapa kebijakan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat dan pengusaha antara lain:

- a. Kebijakan pembebasan tagihan air minum Perumda Tirta Mayang dalam bentuk menggratiskan tagihan air minum bagi pelanggan golongan sosial (1.045 sambungan) dan rumah tanggal 1 (26.383 sambungan) Menggratiskan pemakaian bulan April dan Mei 2020 (pembayaran bulan Mei dan Juni 2020), pemakaian maksimum 20 M³/ setara Rp. 80.000/Bulan.
- b. Membebaskan kewajiban 4 jenis pajak dari pelaku usaha. Jenis pajak tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah.
- c. Memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga 31 Desember, diakhir tahun mendatang.

2. Bantuan Langsung Kepada Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga masyarakat Kota Jambi yang sangat terdampak akibat wabah pandemi Covid-19 baik melalui APBD maupun bantuan dari berbagai pihak.

5.3.6. KEBIJAKAN NON ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 KOTA JAMBI

Kebijakan non anggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi antara lain:

1. Pemerintah Kota Jambi memiliki rekening **“Kota Jambi Peduli”** yang merupakan donasi dalam bentuk uang dan barang. Donasi dalam bentuk barang bersumber dari pelaku usaha, komunitas dan perorangan berupa APD, Masker, Suplemen, Makanan, Minuman, Cairan, Disinfektan, Wastafel cuci tangan, Pompa penyemprot dan galon air.
2. Kebijakan pembagian nasi bungkus kepada pekerja informal (ojek online dan supir angkutan umum) diprioritaskan bagi pekerja informal gaji harian seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, angkutan umum, pengemudi angkot, juru parkir dan petugas kebersihan.
3. Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam mengurangi kegiatan masyarakat diluar rumah, Pemerintah Kota Jambi menginisiasi sistem berbelanja secara online menggunakan aplikasi **“SANGKEK”** di beberapa pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Kota Jambi, pasar modern atau tradisional lainnya. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah.
4. Untuk mendukung gerakan *#dirumahnya*, Pemerintah Kota Jambi menginisiasi sistem belanja secara online di pasar-pasar tradisional antara lain Pasar Baru Talang Banjar, Pasar Auduri, Pasar Kasang, Pasar TAC, Pasar Angsoduo dan juga retail besar, swalayan bekerjasama dengan Ojek Online (Grab, Gojek dan Maxim) dan Pangkalan Ojek untuk melayani pengantaran pesanan masyarakat.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Capaian IKU Kota Jambi sampai dengan tahun 2021 dijabarkan berdasarkan Visi dan Misi Kota Jambi yang tertuang di dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1.
Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi

NO	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,44	2,85	2,55	2,66
2	Indeks Profesionalitas ASN	56	56.2	57.5	59
3	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB
4	Indeks survey persepsi Korupsi	3,65	3,35	3,69	3,73
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5%	82,15	86%	87%
6	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82%	100%	80%	75%
7	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%
8	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%	20%
9	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%
10	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	53,07	59,16	60,77	70,61
11	Indeks Kualitas Air	37.75	38,27	38.3	38.5
12	Indeks Kualitas Udara	80.7	76,84	80.72	80.74
13	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,30	44,81	41,70	42,00
14	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	36	63,34	52	68

NO	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
15	Skor Pola Pangan Harapan	90,59	90,70	91	91,5
16	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,37%	2,38%	2,38%	2,39%
17	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%	16%	9%	9%
18	Realisasi Investasi	430,5 M	1,055 T	430,5 M	474,62 M
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65%	65,79%	65,25%	65,50%
20	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8,08%	8,08%	8,54%	9,01%
21	Persentase Daya Saing Produk IKM	4.3%	19.30%	5.35%	6.5%
22	Persentase Koperasi berkualitas	16.06%	16.50%	19.27%	23.85%
23	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,35	73,20%	72,35	72,36
24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,60	14,62%	14.61	14.62
25	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,30%	17,32	12,32
26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68%	10,69	10,70
27	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05	1,05	1,05	1,03
28	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,23%	96%	96,46%	96,69%
29	Indeks Pembangunan Gender	94,90	94,46	94,91	94,93
30	Indeks Pemberdayaan Gender	68,10	69,83	68,20	68,30
31	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	70%	70%	80%	90%
32	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	70,96	61,43	63
33	Indeks Pembangunan Pemuda	50	Data belum dikeluarkan Bappenas	50,5	51
34	Persentase PMKS yang tertangani	65	62%	70	75

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Utama Kota Jambi Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	Data belum dikeluarkan oleh KEMENPAN RB	BB	A
2	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	Persen	9%	24.66%	6%	5
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	5.1	7.22	5.67	6,0
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	52.06	52.46	52.39	52,57
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,28%	5,33%	5,39	5,50
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.56	6.72	6.42	6,28
7	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	8%	16%	9%	9
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77.14	78.26	77.54	77,94

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Tahun 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	4
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,81
1.02	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,08
1.03	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,39
1.04	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9
1.05	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,50
1.06	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,54
1.07	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,29
1.08	Indeks Gini	Poin	0,36
1.09	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87
1.1	Opini BPK	Tahun	WTP
1.11	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91,5
Kesejahteraan Sosial			
1	Pendidikan		
1.01	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,62
1.02	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,70
1.03	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	Tahun	12,32
1.04	Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	Persen	96,69
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan		
1.02	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	Tahun	APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%
1.03	Angka partisipasi kasar (APK) SD	Persen	114,6
1.04	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	98
1.05	Angka Partisipasi SD	Persen	100,80
1.06	Rerata UAS SD	Persen	60,73
1.07	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Persen	99,5
1.08	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	72,5
1.09	Angka Partisipasi SMP	Persen	84
1.1	Rerata UN SMP	Persen	51,50

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	4
1.11	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Persen	
2	Kesehatan		
2.01	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,36
2.02	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	Tahun	6 Puskesmas Utama
2.03	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan puskesmas sesuai standar minimal 85%	Persen	40
2.04	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100
2.05	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100
2.06	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	Indeks	A
2.07	Cakupan pelayanan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100
2.08	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang terakreditasi	Persen	100
2.09	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100
2.10	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	Persen	100
2.11	Persentase pelayanan gizi masyarakat	Persen	100
2.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100
2.13	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	100
2.14	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Persen	100
2.15	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	Persen	85
2.16	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	Persen	75
2.17	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	Persen	100
2.18	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	Persen	100
2.19	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	Persen	100
2.20	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	Orang	30.000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.01	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	6
3.02	Ratio titik genangan	titik	18
3.03	Ratio ketaatan RTRW	Persen	95,50
3.04	Rasio jalan status kota dalam Kondisi Baik	Persen	94,53
3.05	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	71,39
3.06	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	Persen	2,16
3.07	Rasio Bangunan dalam kondisi baik	Persen	69,54
3.09	Rasio Kesesuaian Ruang	Persen	95,5
3.08	Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	97,3
3.09	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	47,37
3.1	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	Persen	90
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
4.01	Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang	Persen	60

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	4
	layak huni		
4.02	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	Persen	87
4.03	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	Persen	50
4.04	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	Persen	88
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5.01	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	Tahun	75
5.02	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	Persen	100
5.03	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	Persen	79
5.04	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Persen	90
5.05	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	Persen	79
5.06	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	Persen	100
5.07	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	Persen	100
5.08	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	Persen	20
5.09	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	Persen	20
5.1	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	Persen	100
5.11	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	Persen	100
6	Sosial		
6.01	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	75
6.02	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	100
6.03	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100
6.04	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	Persen	100
6.05	Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin	Persen	100
Pelayanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja		
1.01	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
1.02	Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	Persen	57
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.01	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,93
2.02	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	68,30
2.03	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	Persen	90

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	4
2.04	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persen	63
2.05	Penurunan Ratio KDRT	Persen	0,02
2.06	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	Persen	0,0217
2.07	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Persen	85
3	Pangan		
3.01	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	Skor	3.08
3.02	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	96,40
3.03	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	Tahun	5
4	PERTANAHAN		
4.01	Persentase luas lahan yang bersertifikat		
5	Lingkungan Hidup		
5.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67.02
5.02	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	Persen	76,00
5.03	Indeks Kualitas Air	Indeks	38,50
5.04	Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,74
5.05	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,00
5.06	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	Persen	77,66
5.07	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	Persen	24
5.08	Indeks pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks	64,90
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.01	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	99
6.02	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	91
6.03	Validitas Database Kependudukan	Persen	91
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.01	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persen	63
7.02	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	Persen	79
7.03	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	Persen	67
7.04	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	Persen	80
7.05	Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	Persen	95
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.01	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	1,03
8.02	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	Persen	96,69
8.03	Persentase PUS peserta KB yang ber KB		

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	4
8.04	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera		
9	Perhubungan		
9.01	Cakupan pelayanan transportasi	Persen	77,09
9.02	Persentase Pelayanan Perparkiran	Persen	88,99
9.03	Cakupan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Darat	Persen	84
9.04	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	Persen	84
9.05	Cakupan yang terlayani angkutan umum	Persen	70,19
9.06	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	Titik	28 Titik
10	Komunikasi dan Informatika		
10.01	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,55
10.02	Rasio Aplikasi Pemerintah Kota Jambi	Persen	77
10.03	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	Persen	60
10.04	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	Persen	70
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
11.01	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	Persen	9,01
11.02	Persentase Daya Saing Produk IKM	Persen	5,35
11.03	Persentase koperasi berkualitas	Persen	23,85
12	Penanaman Modal		
12.01	Realisasi Investasi	Rp	474.62 M
13	Kepemudaan dan Olahraga		
13.01	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	51
13.02	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	Persen	60
13.03	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	Persen	75,56
14	Statistik		
14.01	Persentase Data / Informasi / Statistik Daerah Yang Dihasilkan	Persen	39
15	Persandian		
15.01	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	Persen	50
16	Kebudayaan		
16.01	Jumlah penyelenggaraan even seni budaya	Unit	6
17	Perpustakaan		

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	4
17.01	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	Orang	42.836
18	Kearsipan		
18.01	Jumlah arsip yang terselamatkan	Dokumen	1.200
18.02	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	36
Pelayanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata		
1.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	600.000
1.02	PAD Sektor Pariwisata	Rp	47 M
1.03	Lama Kunjungan wisata	Hari	3
2	Pertanian		
2.01	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Energi/Protein)	(gram/ kapita/ hari)	3.08
			82
3	Perdagangan		
3.01	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persen	68
3.02	Cakupan Bina Perdagangan	Persen	95,25
6	Perindustrian		
6.01	Persentase Daya Saing Produk IKM	Persen	6,5
6.02	Cakupan Bina IKM	Persen	6,5
Penunjang Urusan			
1	Perencanaan Pembangunan		
1.01	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100
2	Keuangan		
2.01	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9
2.02	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	PD	37
2.03	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	Persen	85
2.04	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	PD dan BLUD	40 dan 21
2.05	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	PD	30
2.06	Jumlah Implementasi Peraturan Pajak dan Perencanaan serta Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah yang diselesaikan	Dokumen	3 Dokumen peraturan pajak, 3 Dokumen perencanaan, 12 kali evaluasi pajak dan retribusi daerah
2.07	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	Persen	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	4
2.08	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	Persen	65%
2.09	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	Persen	20
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3.01	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	59
3.02	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	Persen	97
3.03	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Persen	91
3.04	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	Persen	88
3.05	Persentase Penilaian Kinerja ASN	Persen	87
3.06	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	Persen	53
3.07	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN	Persen	52
5	Penelitian Dan Pengembangan		
5.01	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	Persen	100
6	Pengawasan		
6.01	Indeks persepsi anti Korupsi	Indeks	3,73
6.02	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Persen	100
7	Sekretariat Dewan		
7.01	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Dokumen	6
7.02	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD	Dokumen	9
8	Sekretariat Daerah		
8.01	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	Persen	90
8.02	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	Telaah/ rekomendasi	3
8.03	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	Persen	17,07
8.04	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	Persen	74
8.05	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	Persen	20
8.06	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan	9
8.07	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	Persen	20
8.08	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dan Daerah Lainnya	Persen	100
8.09	Persentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	Persen	27,27
8.1	Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	Persen	30,44
8.11	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	Persen	85,71
8.12	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi,	Persen	75

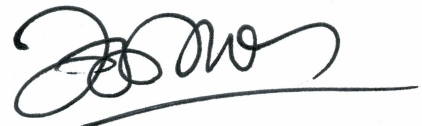
No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	4
	fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian		
8.13	Rata-rata indeks pelayanan publik	Indeks	20
8.14	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	50
8.15	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	Persen	59
8.16	Rata-rata indeks pelayanan publik	Indeks	A
8.17	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Persen	80
8.18	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persen	73,68
8.19	Persentase tertib administrasi pembangunan	Persen	80
8.2	Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	Persen	30,44
9	Pemerintahan Umum		
9.01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	Indeks	92
9.02	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	Persen	80
9.03	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	Persen	60
9.04	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditigkat kelurahan	Persen	60
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
Kemampuan Ekonomi			
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1.01	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A
1.02	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,55
1.03	Nilai SAKIP	Nilai	A
2	Pertanian		
2.01	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Energi	gram/ kapita/ hari	3.08
	Protein		82

BAB VII PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2021 merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang bertema **PENINGKATAN AKSES MUTU LAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMULIHAN EKONOMI**.

Program dan kegiatan prioritas pada RKPD tahun 2021 disusun mengikuti prinsip *money follow programs* dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Penyusunan RKPD tahun 2021 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jambi. Selanjutnya RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2021.

WALIKOTA JAMBI



DR. H. SYARIF FASHA, ME

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
	Meningkatkan Akseibilitas Pendidikan		BIDANG URUSAN PENDIDIKAN																
			<i>Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan</i>	<i>Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan</i>		146,574,478,000		104,575,742,135		118,123,994,980			-						
			Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan PNF	Meningkatnya sekolah yang terakreditasi		58,757,000		26,632,500		16,275,000			-			26,632,500		45.33%	
			Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan PNF	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta peserta PAUD dan DIKMAS		260,000,000		97,248,000		101,753,000			-			97,248,000		37.40%	
			Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan DIKMAS	Meningkatnya Mutu dan Layanan di Lembaga PAUD dan DIKMAS		2,143,449,000		824,451,964		894,768,000			-			824,451,964		38.46%	
			Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD	Meningkatnya Layanan PAUD dan Kinerja PTK PAUD		2,001,037,000		1,250,641,600		1,426,609,000			-			1,250,641,600		62.50%	
			Peningkatan Minat Bakat Peserta didik PAUD dan PNF	Terpilihnya Peserta didik PAUD dan DIKMAS Berprestasi		496,066,000		309,860,000		372,444,000			-			309,860,000		62.46%	
			Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan PNF	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik		269,212,000		148,917,000		142,713,000			-			148,917,000		55.32%	
			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Terciptanya sarana prasarana yang aman dan nyaman sesuai SPM SD		619,787,000		246,313,500		433,305,000			-			246,313,500		39.74%	
			Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	Tercapainya kelembagaan sesuai dengan SPM		425,000,000		167,366,917		373,470,000			-			167,366,917		39.38%	
			Penyelenggaraan Akreditasi SD	Meningkatnya kesejahteraan melalui BOS Transper Daerah dan BOSDA		37,865,000		24,502,500		27,185,000			-			24,502,500		64.71%	
			Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SD	Meningkatnya Anak Berprestasi dan Berkreativitas		143,893,000		86,781,000		44,200,000			-			86,781,000		60.31%	
			Peningkatan Sarana Prasarana SD	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Kelulusan Ujian Sekolah/Nasional		25,965,197,000		6,953,513,195		19,819,133,980			-			6,953,513,195		26.78%	
			Pengembangan Kelembagaan SD	Meningkatnya Peserta didik Berprestasi Tingkat Nasional		144,377,000		98,612,000		107,164,500			-			98,612,000		68.30%	
			Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD	Meningkatnya Kompetensi Guru dalam Penguasaan K13		62,231,000,000		53,827,198,000		59,376,430,000			-			53,827,198,000		86.50%	
			Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SD	Terciptanya sarana prasarana yang aman dan nyaman sesuai SPM SMP		493,499,000		277,036,800		368,758,000			-			277,036,800		56.14%	
			Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD	Meningkatnya Sekolah efektif, sekolah adiwiyata dan sekolah beringritas/berakuntabilitas		349,277,000		234,726,000		261,667,000		50,875,000	50,875,000			285,601,000		81.77%	
			Penyelenggaraan Akreditasi SMP	Meningkatnya kesejahteraan melalui BOS Transper Daerah dan BOSDA		-		-		80,825,000		16,000,000	16,000,000			16,000,000			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SMP	Meningkatnya Anak Berprestasi dan Berkreativitas		225,000,000		72,315,000		6,649,300,000			-			72,315,000		32.14%	
			Peningkatan Sarana Prasarana SMP	Penerimaan PPDB SMP Secara Transparan Dinas Pendidikan		18,643,276,000		14,700,678,800		119,325,000			-			14,700,678,800		78.85%	
			Pengembangan Kelembagaan SMP	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Kelulusan Ujian Sekolah/Nasional		162,856,000		101,575,000		25,538,880,000			-			101,575,000		62.37%	
			Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP	Meningkatnya Sekolah yang terakreditasi		27,450,000,000		23,794,972,000		512,875,000		31,450,000	31,450,000			23,826,422,000		86.80%	
			Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SMP	Meningkatnya Masyarakat Yang Dapat Menamatkan Pendidikan Setara SD, SMP, SMA/SMK		688,228,000		442,269,659		77,750,000			-			442,269,659		64.26%	
			Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP	Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD dan Instruktur Kursus		71,060,000		38,785,000		202,080,000			-			38,785,000		54.58%	
			Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru	Meningkatnya Layanan Lembaga PAUD dan DIKMAS		270,300,000		137,119,000		296,058,000			-			137,119,000		50.73%	
			Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Peserta Didik Berprestasi Tingkat Nasional	Meningkatnya Mutu layanan Lembaga PAUD dan DIKMAS		394,520,000		126,867,500		316,636,000			-			126,867,500		32.16%	
			Orientasi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas	Meningkatnya kompetensi kepala sekolah SD		1,597,200,000		-		31,105,000			-			-		0.00%	
			Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF	Meningkatnya Guru Yang Mempunyai Sertifikat Pendidik		226,474,000		133,185,000		36,157,000			-			133,185,000		58.81%	
			Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah dan Tenaga Perpustakaan SD	Meningkatnya Guru Yang Mempunyai Sertifikat Pendidik		122,781,000		82,361,500		54,217,500			-			82,361,500		67.08%	
			Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Laboratorium SMP	Meningkatnya Perencanaan Pendidikan Berbasis Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi Pendidikan		263,490,000		-		214,815,000			-			-		0.00%	
			Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional	Terpilainya Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang berprestasi tingkat Nasional		288,892,000		126,867,500		46,326,000			-			126,867,500		43.92%	
			Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru	Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan		75,566,000		51,613,200		71,225,000			-			51,613,200		68.30%	
			Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS	Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		96,040,000		62,972,000		110,545,000			-			62,972,000		65.57%	
			Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Meingkatkan Layanan Pendidikan Bagi Anak/Masyarakat Putus Sekolah		360,389,000		130,360,000					-			130,360,000		36.17%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN KESEHATAN																DINKES
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Status Puskesmas yang reakreditasi	100%	117,439,487,434			8 PKM Utama	98,446,036,450									
			Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Puskesmas yang reakreditasi	7pkm	2,100,000,000	100.00	1,624,093,800	7pkm	1,928,470,500	24.99	-	24.99	-		0		-	
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang terakreditasi		300,000,000	100.00	13,910,776,600		1,400,000,000	24.99	5,600,000	24.99	5,600,000		5,600,000		1,120,000	
				Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang terakreditasi	2 RS				2 RS										
				Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang dibina	2 RS				2 RS										
				Jumlah Rumah Sakit Swasta yang dibina	14 RS				14 RS										
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas yang menjalankan kesehatan tradisional		225,000,000	100.00	79,887,860	20 PKM	150,000,000	24.99	13,000,000	24.99	13,000,000		13,000,000		2,600,000	
			Kemitraan Asuransi Kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat asuransi jaminan pelayanan kesehatan	82,000 Jiwa	9,000,000,000	100.00	7,934,644,374	30,000 Jiwa	8,700,000,000	24.99	81,121,800	24.99	81,121,800		81,121,800		16,224,360	
				Jumlah Pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat					50 org										
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan					B										
			Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Capaian Penggunaan SIMRS dalam Pelayanan Publik	100%	57,500,000			70%	141,000,000									
			Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	5,000,000			B	5,000,000									
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Pendapatan Badan Layanan Umum daerah (BLUD)	Persentase Capaian Target Pendapatan, Bisnis dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Semakin Meningkat	100%	29,110,270,000			70%	28,980,760,000									
			Terwujudnya Peningkatan Status Penilaian Role Model Pelayanan Publik Rumah Sakit	Meningkatnya Status Penilaian Role Model Pelayanan Publik dari nilai B - (Baik dengan Catatan menjadi Nilai A+ (Sangat Baik)	A	376,552,000			B-	450,000,000									
			Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Rumah Sakit	Persentase Capaian Penyusunan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit, yang Tepat Waktu, dan Sesuai Aturan	90%	16,000,000			60%	10,000,000									
			Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Rujukan di Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100%	90,000,000			70%	60,000,000									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sakit yang berfokus pada Keselamatan Pasien.	Meningkatnya Status Akreditasi Rumah Sakit dan "Utama" Menjadi "Paripurna"	Paripurna	418,962,500			Utama	254,850,000									
			Peningkatan dan Pengembangan Sarana, Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit yang Memadai dan Memenuhi Standar.	Tersedianya Sarana, Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit yang Memadai dan Memenuhi Standar.	100%	9,651,280,400			70%	9,467,514,000									
			Peningkatan dan Pengembangan Mutu Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK) Rumah Sakit Yang Memadai dan Memenuhi Standar	Persentase Capaian Standar Mutu Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK) di Rumah Sakit	100%	2,375,000,000			70%	1,828,500,000									
			Peningkatan dan Pengembangan Ketersediaan Farmasi Rumah Sakit yang memadai dan memenuhi standar	Terpenuhinya Ketersediaan Farmasi Rumah Sakit yang memadai dan memenuhi standar	100%	22,000,000,000			70%	15,000,000,000									
			Peningkatan dan Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit yang Memadai dan Memenuhi Standar	Persentase Capaian Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit yang Memadai dan Memenuhi Standar	90%	65,000,000			60%	450,000,000									
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.					30										
			Pengadaan sarana Prasarana puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar SPAK		1,500,000,000	100.00	2,207,884,280	6 PKM	2,000,000,000	24.99	-	24.99	-		0		-	
			Pembangunan /rehab Puskesmas /pustu	Jumlah Puskesmas/pustu yang direhab serta peningkatan pustu menjadi puskesmas		5,000,000,000	100.00	932,665,500	1 Peningkatan Pustu jadi Pkm	1,500,000,000	24.99	-	24.99	-		0		-	
			Operasional Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti	Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi standar SPAK minimal 85%	85%	15,457,910,626			60%	14,000,000,000	24.99	74,974,399	24.99	74,974,399		74,974,399		14,994,880	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	Persentase tersedianya obat yang sesuai dengan kebutuhan dan terlaksananya pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar.	100%	400,000,000	100.00	74,518,000	100%	250,000,000	24.99	-	24.99	-		0		-	
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	97	6,500,000,000	100.00	3,189,104,494	96	5,000,000,000	24.99	-	24.99	-		0		-	
				Persentase pelaksanaan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai dengan standar di instalasi farmasi	85	450,000,000			80	350,000,000	24.99	-	24.99	-				-	
			Pendidikan dan pengembangan mutu tenaga kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang akan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	75 Orang	600,000,000			60. Orang	450,000,000	24.99	-	24.99	-				-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	100%				100%										-
			Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak, remaja, lansia dan keluarga berencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100%	1,622,900,000	100.00	600,201,300		645,942,950	24.99	-	24.99	-		0		-	-
				Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil	13,551					10,181								-	-
				Jumlah Puskesmas yang melakukan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	20					20								-	-
				Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan ANC (K4)	13,551					10,181								-	-
				Jumlah Ibu Nifas yang mendapat pelayanan nifas 3x (KF 3)	15,845					11,905								-	-
				Jumlah Penanganan Komplikasi Obstetri	1,521					1,868								-	-
				Jumlah Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	11,489					9,856								-	-
				Jumlah Puskesmas yang menjalankan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang	20 Pkm					20 Pkm								-	-
			Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian sadar gizi			478,612,000	100.00	97,598,000		239,306,000	24.99	39,779,000	24.99	39,779,000		39,779,000		7,955,800	-
				Jumlah Ibu Hamil yang mendapat PMT	16,093					12,091								-	-
				Jumlah Ibu hamil yang mendapat tablet Tambah darah	16,093					12,091								-	-
				Jumlah Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah darah	64,755					48,651								-	-
				Jumlah bayi yang baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	16,169					12,148								-	-
				Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	8,471					6,364								-	-
				Jumlah Balita yang mendapat PMT	6,465					4,857								-	-
			Penyuluhan, Pengembangan Media Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1,300,000,000	100.00	237,392,000		1,000,000,000	24.99	10,665,000	24.99	10,665,000		10,665,000		2,133,000	-
				Jumlah Rumah Tangga yang ber-PHBS						9,735								-	-
				Strata Posyandu Purnama dan Mandiri						350								-	-
			Penyehatan lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM		380,600,000	100.00	181,966,970		375,300,000	24.99	-	24.99	-		0		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peningkatan Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga			163,000,000	100.00	57,449,970		159,300,000	24.99	-	24.99	-		0		-	
			Jumlah Pos UKK yang terbentuk di Puskesmas		50				15									-	
			Jumlah Kelompok olah raga yang dibina diwilyah puskesmas		50				40									-	
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Penyakit menular dan tidak menular	100				100									-	
			Pencegahan Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) serta surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah			608,025,000	100.00	412,594,500		457,625,000	24.99	-	24.99	-		0		-	
			Jumlah bayi yang di imunisasi dasar lengkap						11,234									-	
			Jumlah bayi di bawah dua tahun yang mendapat Imunisasi lanjutan						7,690									-	
			Jumlah anak sekolah yang diimunisasi						28,741									-	
			Jumlah Puskesmas yang melaporkan kasus tepat waktu		20 pkm				20 pkm									-	
			Persentase penanganan kasus kurang dari 24 jam		100%				100%									-	
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular			1,187,874,908	100.00	774,407,566		892,468,000	24.99	67,253,000	24.99	67,253,000		67,253,000		13,450,600	
			Pelaksanaan fogging fokus		117				110									-	
			Pelaksanaan fogging sekolah		120				100									-	
			Persentase penderita malaria positif yang diobati standar		100%				100%									-	
			Persentase penderita klinis malaria yang diperiksa mikroskopis		100%				100%									-	
			Persentase penderita gigitan Hewan penular rabies diberi VAR sesuai SOP		100%				100%									-	
			Angka penemuan kasus TB Paru		4,052				3,044									-	
			Jumlah sasaran yang diperiksa HIV		63,014				47,343									-	
			Jumlah ODHA yang diobati		1,530				1,445									-	
			Jumlah ODHA yang dioabati supresi Viral load		1,377				1,229									-	
			Jumlah Pneumoni yang diobati		3,142				2,361									-	
			Jumlah skrining Hepatitis B pada Bumil		7,900				7,600									-	
			Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa			3,000,000,000	100.00	465,536,995		1,150,000,000	24.99	56,705,000	24.99	56,705,000		56,705,000		11,341,000	
			Jumlah pengunjung usia produktif yang mendapatkan pelayanan screening kesehatan		126,701	600,000,000			79,188	300,000,000								-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Kota Yang Terpadu Dan Berkelanjutan			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	Jumlah penderita hiortensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	63,860	500,000,000			31,930	150,000,000									-	DPUPR
				Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	19,667	400,000,000			10,590	150,000,000									-	
				Jumlah penderita gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	16,899	500,000,000			7,682	150,000,000									-	
				Jumlah WUS yang mendapatkan Pelayanan IVA sesuai dengan standar	20,317	500,000,000			9,235	150,000,000									-	
				Jumlah anak remaja dideteksi CO	7,095	500,000,000			2,838	250,000,000									-	
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/ Sungai	Rasio sistem jaringan drainase/sungai dalam kondisi baik	68.42%	188,165,682,000.00	93.97	25,523,328,103.00	15,79	30,108,210,000			0.84	254,032,920	13.70	25,777,361,023.00		13.70		
				- Pembangunan Saluran Drainase	42,1km2 31012 m	188,165,682,000.00	93,97	25,523,328,103.00	9,70 4383	30,108,210,000	29	8,558,995,000	0.84	254,032,920	13.70	25,777,361,023		13.70		
				- Pembangunan Box Culvert - Pemeliharaan dan Normalisasi Sungai Kota Jambi	55 unit 224197 m				11 57250											
			Program Pembangunan Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	1. Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	75.39%	992,304,197,986.00	17.27	96,206,923,400.00	69,39	525,813,660,600			0.04	230,291,730	9.72	96,437,215,130		9.72		
					82412 SR				80,058											
			Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum	- Pembangunan jaringan pipa - Pemasangan SR Air Bersih - Pembuatan Sumur Bor - Pengawasan Jasa konsultasi	56079 m	18,953,999,670.50	58,43	5,862,769,500.00	6 300 7 6	55,715,344,000	19	10,519,700,000	0.01	5,338,500	30.96	5,868,108,000		30.96		
				- Peremajaan Pipa PDAM					1											
				2. Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	3.38% 3941 SR				1,56 1,826											
			Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Permukiman Penduduk	- Pembangunan SR Sanitasi - Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah - Pengawasan	3941 SR	106,662,664,300.00	87,18	24,402,371,900.00	11 1	8,524,548,000	30	2,532,956,000	0.35	30,164,500	22.91	24,432,536,400		22.91		
				3. Rasio Bangunan dalam kondisi baik	85.18%				1											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembangunan dan Pemeliharaan gedung/ utilitas pemerintah	- Pembangunan Gedung	316 unit	832,345,854,900.00	96.75	64,603,825,650.00	1) 12 Paket Pembangunan Gedung, 3 Paket Pembangunan Gedung (hibah), 10 Paket Pembangunan Gedung (Pinjaman Dana)	459,689,868,600	86	397,483,921,600	0.01	62,884,730	7.77	64,666,710,380		7.77	
				- Rehabilitasi Gedung					2) 24 Paket Rehabilitasi Gedung, 9 Paket Rehabilitasi Gedung (Hibah)										
				- Pedestrian Jalan					3) 3 Paket Pedestrian Jalan (Hibah), 1 Paket Pedestrian (Pinjaman Dana)										
				- Pengawasan					4) 26 Paket Pengawasan, 8 Paket Pengawasan (hibah)										
				- Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Utilitas					5) Pemeliharaan Rutin 1 Tahun										
			Peningkatan kinerja pengelolaan angkutan	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana angkutan persampahan			100.00	99,857,450.00											
			Peningkatan operasional TPA	terlaksananya sarana dan prasarana pengelolaan TPA			84.99	2,597,760,050.00											
			Peningkatan Operasional SPAL D	- Operasional SPAL D	1 tahun	28,472,080,616.00	69.07	1,337,956,350.00	1	1,883,900,000	58	1,082,665,000	7.00	131,904,000	5.16	1,469,860,350		5.16	
				- Renovasi Kolam SSC															
			Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Rasio jalan status kota dalam Kondisi Baik	100%	596,351,245,761.00			91.79	115,028,058,000			3.43	3,942,385,625	0.66	3,942,385,625		13.85	
				2. Rasio jembatan dalam Kondisi Baik	510 km				469										
					100%				97.30										
					654 km				646										
			Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan status kota	- Jumlah Ruas Jalan Status Kota yang ditangani	510 km	222,217,471,400.00	98.09	127,409,420,530.00	13.96	47,739,190,000	54	25,954,964,000	6.25	2,984,714,700	58.68	130,394,135,230		58.68	
				- Pemeliharaan Rutin Jalan	26500 m2				4000										
			Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Non Status Kota (Jalan Lingkungan)	- Penambahan panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik (km)	419 km	322,489,579,191.68	-	0.00	40	63,683,631,000	37	23,823,215,000	1.27	808,625,965	0.25	808,625,965		1.73	
			Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan	- Penambahan jumlah pembuatan jembatan baru, perbaikan dan pemeliharaan jembatan (m)	654 m	46,691,961,946.88	59.53	10,165,167,450.00	6	2,572,125,000	53	1,369,400,000	2.31	59,387,700	21.90	10,224,555,150		21.90	
				- Peningkatan Jembatan untuk mengurangi dampak banjir (unit)	9 unit				2										
			Peningkatan Operasional Peralatan dan Pertbekalan	- Jumlah alat berat yang kondisinya baik	-	4,952,233,222.50	69.63	1,998,778,720.00	4 unit	1,033,112,000	51	521,006,000	8.68	89,657,260	42.17	2,088,435,980		42.17	
				- Jumlah alat transport yang kondisinya baik	-				5 unit										
				- Jumlah alat bantu yang kondisinya baik	-				4 unit										
			Program Perencanaan Teknis Ke-Pu an	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	100%	30,965,385,100.00	90.34	1,063,062,300.00	84 %	9,205,601,000			1.28	117,451,240	3.43	1,063,062,300		3.83	
					51 dokumen				43 Dokumen										
			Perencanaan dan Koordinasi Bidang Ke-PU an	- Meningkatnya Dokumen Perencanaan ke-PU-an	83 dokumen	27,778,725,100.00	81.39	979,463,750.00	1) 10 Dokumen Perencanaan	8,349,826,000	49	4,115,584,000	0.81	67,750,240	3.77	1,047,213,990		3.77	
				- Dokumen Lingkungan					2) 32 Dokumen Lingkungan										
				- Dokumen Feasibility Study (FS)					3) 9 Dokumen Feasibility Study										
				- Penyusunan Dokumen RKA/DPA	2 dokumen				4) 2 Dokumen										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Terkendalinya Pemanfaatan Lahan			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- SOP Perencanaan dan Penyusunan Program - Database Produk Perencanaan					5). 1 Dokumen SOP 6). 1 Database										
				- Laporan Capaian Kinerja ke-PU-an - Laporan Dokumen Harga Satuan Barang	3 dokumen	432,010,000.00	99.29	83,598,550.00	1). 1 Dokumen 2). 1 Dokumen	87,200,000	50	43,400,000	16.96	14,788,500	22.77	98,387,050	22.77	0.00	
			Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	- Jumlah Tenaga Kerja Terampil yang bersertifikasi di Bidang jasa Konstruksi - Rekomendasi IUJK - Honorarium TABG	530 Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Terampil 1 tahun	2,754,650,000.00	-	0.00	1). 120 Tenaga Terampil Konstruksi Bersertifikat 2). 1 Tahun 3). 1 Tahun	768,575,000	83	638,545,000	4.54	34,912,500	1.27	34,912,500	1.27		
			Program Fasilitas, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	Rasio Kesesuaian Ruang	95.9%	8,501,128,150.00	66.57	502,666,200.00	95.20	1,640,062,000		5.70	93,519,670	7.01	596,185,870	10.80			
			Penataan Ruang Kota	- Perda RDTR - Draft Revisi RTRW	1 Perda RDTR, 1 Perda RTBL	5,521,562,000.00	74.95	326,552,500.00	1 Perda RDTR	1,415,562,000	48	678,351,000	3.37	47,686,570	10.94	374,239,070	6.78		
			Pengawasan pemanfaatan ruang	- Laporan Pemanfaatan Tata Ruang Kota Jambi	1250 bangunan	2,979,566,150.00	74.95	176,113,700.00	50 bangunan	224,500,000	51	114,100,000	20.42	45,833,100	7.45	221,946,800	7.45		
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN																
			Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Meningkatnya Kualitas lingkungan dan Permukiman Berbasis Kawasan	87%	17,342,971,400	-	3,038,132,810	19%	1,635,144,400	0%	60,844,250	0	60,844,250	-	3,098,977,060	0.00%	17.87%	
			Penyelenggaraan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Unit) Pelaksanaan Peningkatan Permukiman kumuh Berbasis Kawasan (Ha) Perencanaan Kawasan Kumuh (Ha)	5,310 388.50 209.54	17,342,971,400	201 - 7.00	3,038,132,810	38 3.41 7.29	1,635,144,400 0 0	0 0 0	60,844,250 0 0	0 0 0	60,844,250 - -	201 - 7	3,098,977,060 - -	3.79% 0.00% 3.34%	17.87% #DIV/0! #DIV/0!	
			Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah Bagi IMBR dan Peningkatan PSU Perumahan yang dilakukan Penanganan dan Diserahkan ke PEMDA	100%	25,641,726,600	-	734,944,605	30%	1,476,799,600	0%	38,017,950	0	38,017,950	-	772,962,555	0.00%	3.01%	
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni			Penyelenggaraan, Penyediaan dan Penataan Perumahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan PSU Perumahan (Dokumen) Tersedianya Rumah Bagi MBR (Unit Rumah) Terlaksananya Serah Terima PSU Perumahan (Lokasi Perumahan) Tertanganinya PSU Perumahan (Lokasi Perumahan)	26 12900 60 55	25,641,726,600	3 3,574 13 -	734,944,605	1 2000 15 1	1,476,799,600 0 6 0	0 0 6 0	38,017,950 0 0 0	0 0 0 0	38,017,950 - - -	3 3,574 19 -	772,962,555	11.54% 27.71% 31.67% 0.00%	3.01%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perumahan (Lokasi Perumahan)	341		159		50		18		18		177		51.91%		
				Terkelolanya Rumah Susun (Lokasi)	2		-		1		0		0		-		0.00%		
				Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	87%	126,446,308,100	-	27,893,672,017	19%	24,964,642,100	0%	4,230,081,875	0	4,230,081,875	-	32,123,753,892	0.00%	25.41%	
				Pembangunan, Pemeliharaan dan Penataan Penerangan Jalan	8,879	115,781,808,600	4,079	25,266,225,537	1,200	22,955,142,600	0	3,985,170,612	0	3,985,170,612	4,079	29,251,396,149	45.94%	25.26%	
				Pemeliharaan lampu (Titik)	21,432		16,652		13,500		13,500		13,500		30,152		140.69%	#DIV/0!	
				Peningkatan Pelayanan Pemakaman dan Penataan TPU	54	10,664,499,500	10	2,627,446,480	13	2,009,499,500	0	244,911,263	0	244,911,263	10	2,872,357,743	18.52%	26.93%	
				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
				URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				Program Penyelenggaraan Trantibum, serta Penegakan Regulasi Daerah			5,009,828,000		100%	5,230,918,400		836,981,000		836,981,000					
				2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi					100%										
				1. Sosialisasi Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah		3,265,000,000	97.90%	4,445,280,000	Razia Yustisi Skala(Kecil,Sedang,Besar= 87 Kali), Tipiring= 27 Kali, Penyidikan dan Penyeldikan= 87 Kali, Gelar Perkara= 27 Kali	4,620,918,400	16%	743,716,000	16.09%	743,716,000				0.00	
				2. Pengaman, Pengawasan Dan Penerbitan Serta Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibum dan Tranmas		3,532,186,000	92.70%	564,548,000	Penerbitan Skala(Kecil,Sedang,Besar=100 Kali), Pamwalkat=10 Kali, Pamwal=10 kali, Piket Jaga Rumdis=12 Bulan, Pam Hari Besar dan Keagamaan Acara penda=25 kali, Pam Piket Mako= 12 Kali, Piket Jaga Portal=60 Kali, Pengawasan dan Pembinaan Trantibum Kelurahan dan Kecamatan=40 Kali,Senergisitas Antar Leading Sektor Terhadap Gakda=12 bulan, Operasi Cipta Kondisi Praja Wibawa=12 Kali	610,000,000	15%	93,265,000	15.29%	93,265,000				0.00	
				Program Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat			765,984,800			778,718,800		21,379,500		21,379,500					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			1. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penitran Satuan Polisi Pamong Praja	Outcome : Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penitran Satuan Polisi Pamong Praja, Output : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penitran Satuan Polisi Pamong Praja	Gelar Pasukan Praja Wibawa= 1 Kali, Pembinaan Fisik dan Mental=22 Kali , Was Internal Dan Gak Lin= 27 kali, Piket Jaga Gar lin= 15 Kali, Korsik=22 Kali	313,802,200	99.31%	193,650,000	Gelar Pasukan Praja Wibawa= 1 Kali, Pembinaan Fisik dan Mental=22 Kali , Was Internal Dan Gak Lin= 22 kali, Piket Jaga Gar lin= 10 Kali, Korsik=11 kali	200,000,000	3%	5,040,000	2.52%	5,040,000				0.00	
			2. Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Outcome : Meningkatnya Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat, Output : Terlaksananya Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Pos Kamling=27 Kali, Pekat=15 Kali, P2WKSS=7 Hari, Pencegahan Konflik Sosial=15 Kali, Rakor Pembentukan Satlinmas=1 Kali	633,718,800	98.90%	572,334,800	Pos Kamling=27 Kali, Pekat=15 Kali, P2WKSS=7 Hari, Pencegahan Konflik Sosial=15 Kali, Rakor Pembentukan Satlinmas=1 Kali, Pembekalan Satlinmas TPS PILGUB=5 Hari	578,718,800	3%	16,339,500	2.82%	16,339,500				0.00	
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
			URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
			Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan		100%	37,004,772,000	100%	4,492,624,850	100%	8,154,513,000	17%	593,036,400	17%	593,036,400.00	24%	5,085,661,250.00	24%	9%	
			Bimbingan Teknis, Diklat dan Sosialisasi Penanganan Bencana	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja bahan percontohan, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, Belanja Cetak, Belanja makanan dan minuman, Belanja pakaian olahraga, minuman Peserta dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS)	100%	1,805,210,000	4.52%	81,638,250	100%	92,670,000	16%	14,505,000	16%	14,505,000.00	20%	96,143,250.00	20%	5%	
			Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan kebakaran	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak	100%	303,002,500	5.43%	16,467,100	100%	16,500,000	85%	13,955,400	85%	13,955,400.00	90%	30,422,500.00	90%	10%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, Belanja Peralatan Kantor, Belanja bahan kimia, Belanja Accesoris dan Perlengkapan Kendaraan, Belanja Penggandaan, Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja modal Pengadaan crane, Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam, Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie), Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	100%	12,437,534,200	1.96%	243,926,150	100%	3,761,115,000	0%	-	0%	0.00	2%	243,926,150.00	2%	2%	
			Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja makanan dan minuman Peserta dan Panitia	100%	228,200,000	0.00%		100%	20,315,000	0%	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%	
			Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor	100%	2,087,316,100	11.92%	248,900,000	100%	334,100,000	8%	27,800,000	8%	27,800,000.00	20%	276,700,000.00	20%	13%	
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan	100%	767,025,000	0.30%	2,298,250	100%	2,570,000	0%	-	0%	0.00	0%	2,298,250.00	0%	0%	
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja bahan percontohan, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja makanan dan minuman Peserta dan Panitia, Belanja makanan dan minuman pasien dan petugas jaga, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS)	100%	3,458,806,000	13.28%	459,197,400	100%	454,175,000	0%	-	0%	0.00	13%	459,197,400.00	13%	13%	
			Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja	100%	827,738,200	3.37%	27,900,000	100%	27,900,000	0%	-	0%	0.00	3%	27,900,000.00	3%	3%	
			Rekrutmen Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Tenaga Kebakaran	100%	12,972,100,000	23.89%	3,099,525,000	100%	3,204,047,000	16%	522,223,000	16%	522,223,000.00	40%	3,621,748,000.00	40%	28%	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebencanaan	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan, Belanja Penggandaan	100%	1,080,000,000	27.64%	298,476,900	100%	200,750,000	0%	-	0%	0.00	28%	298,476,900.00	28%	28%	
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja makanan dan minuman Peserta dan Panitia	100%	353,840,000	0.00%		100%	9,721,000	0%	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan masyarakat		Penyusunan Norma, Strandar, Pedoman dan Manual Kebencanaan	Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja bahan percetakan, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, Belanja Penggandaan, Belanja makanan dan minuman Peserta dan Panitia	100%	558,000,000	2.56%	14,295,800	100%	14,650,000	0%	-	0%	0.00	3%	14,295,800.00	3%	3%	BADAN KESBANGPOL
			Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Belanja Publikasi, Belanja Cetak	100%	126,000,000	0.00%		100%	16,000,000	91%	14,553,000	91%	14,553,000.00	91%	14,553,000.00	91%	12%	
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
			Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	100%	563,819,000	100%	551,563,000					-			551,563,000		97.8	
			Fasilitasi, pemantauan dan pengendalian keamanan	Terwujudnya keamanan lingkungan yang kondusif dan pencegahan dini konflik	12 kali rapat, 6 kali survey	86,529,000		124,644,000	-	-			-	-		124,644,000		144.0	
			Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Terwujudnya keamanan dalam beribadah	14 kali rapat, 10 IMB	141,750,000		132,300,000	-	-			-	-		132,300,000		93.3	
			Pembinaan dan pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan	Lingkungan yang aman dan nyaman yang dilandasi rasa persatuan dan kesatuan serta semangat untuk tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat secara terpadu	150 orang peserta Silaturahmi, 100 orang orang peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan, 200 orang peserta test urine	266,610,000		243,419,000	-	-			-	-		243,419,000		91.3	
			Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Terwujudnya kesamaan persepsi dalam mengantisipasi gejolak sosial dan politik masyarakat	3 kali rapat	68,930,000		51,200,000	-	-			-	-		51,200,000		74.3	
			Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi Bagi Orkemas dan Parpol	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	273,848,000	93.01%	232,425,000	-	-			-	-		232,425,000		84.9	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Kota Jambi	10 kali rapat, 1 kali sosialisasi	204,498,000	1 kali pendidikan politik (80 orang) peserta, 1 kali sosialisasi (120 orang) peserta	161,150,000	-	-	K	Rp	-	-	-	161,150,000	78.8		
			Pembinaan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Terwujudnya tertib administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	2 kali rapat, 1 kali sosialisasi	25,425,000	2 kali rapat, 1 kali sosialisasi	27,350,000	-	-	-	-	-	-	-	27,350,000	107.6		
			Pemantauan Orkemas	Terwujudnya perantara organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan daerah	2 kali rapat, 10 kali pemantauan	43,925,000	2 kali rapat, 10 kali pemantauan	43,925,000	-	-	-	-	-	-	-	43,925,000	100.0		
			Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	100%	2,928,540,000	-	-	100%	700,000,000	20,582,500	20,582,500	20,582,500	20,582,500	20,582,500	20,582,500	0.7		
			Fasilitasi, pemantauan dan pengendalian keamanan	Terwujudnya keamanan lingkungan yang kondusif dan pencegahan dini konflik	52 kali rapat, 116 kali monitoring dan 4 kali sosialisasi terorisme dan radikalisme	410,000,000	-	-	14 kali rapat, 20 orang monitoring, 45 laporan	100,000,000	2 kali rapat	4,832,500	4,832,500	4,832,500	4,832,500	4,832,500	1.2		
			Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Terwujudnya keamanan dalam beribadah	56 kali rapat	420,000,000	-	-	14 kali rapat, 8 kali pemantauan	100,000,000	4 kali rapat, 3 kali pemantauan	-	-	-	-	-	0.0		
			Pembinaan dan pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan	Lingkungan yang aman dan nyaman yang dilandasi rasa persatuan dan kesatuan serta semangat untuk tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat secara terpadu	Melaksanakan 41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPWK (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	1,131,420,000	-	-	10 kali rapat, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang), pendidikan wawasan kebangsaan (200 orang), pembinaan Ideologi Pancasila (200 orang)	268,230,000	2 kali rapat	15,750,000	15,750,000	15,750,000	15,750,000	15,750,000	1.4		
			Pembinaan karakter dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbentuknya karakter masyarakat dalam kerangka kebhinnekaan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI	Melaksanakan 10 kali rapat, 8 kali tes urine narkoba (1.475 orang) dan 4 kali sosialisasi narkoba (950 orang)	967,120,000	-	-	11 kali rapat, 350 peserta tes urine, 200 peserta sosialisasi narkoba, 40 peserta rapat forkompinda, 21 peserta bela negara	231,770,000	1 kali rapat	-	-	-	-	-	0.0		
			Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi Bagi Orkemas dan Parpol	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	2,091,363,500	-	-	499,999,500	499,999,500	-	-	-	-	-	-	0.0		
			Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam berpolitik dan berdemokrasi	Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu	728,364,500	-	-	4 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey	168,364,500	1 kali survey	10,815,000	10,815,000	10,815,000	10,815,000	10,815,000	1.5		
			Pembinaan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Terwujudnya tertib administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan	181,635,000	-	-	13 parpol, 26 peserta	31,635,000	-	-	-	-	-	-	0.0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.Terpuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lansia Terantar Serta Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti 2.Terpuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial			Pemantauan Orkemas	Terwujudnya orkemas yang baik dan sehat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Rapat 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	1,181,364,000	-	-	4 kali rapat, 1 kali sharing, 6 kali pemantauan, 1 kali pembinaan	300,000,000	1 kali pembinaan	69,595,500		69,595,500		69,595,500		5.9	DINSOS
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN SOSIAL																
			Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Tertangani Per Tahun		5,813,732,000		2,778,678,161		3,100,000,000		198,682,400		198,682,400		2,977,360,561		51.21	
			Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat	Meningkatnya Penanganan dan Penanggulangan, serta pendistribusian bantuan Korban Bencana	200 kk	900,000,000		550,998,950	100 kk	600,000,000	37%	220,895,000	100 kk	220,895,000		771,893,950		85.77	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kota Jambi	450 Orang	1,200,000,000		1,081,870,000	300 orang	750,000,000	12%	87,000,000	300 orang	87,000,000		1,168,870,000		97.41	
			Pemberdayaan dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Pengurus LKS, K3S, PSM, TKS & Karang Taruna Kota Jambi	78 Orang	400,000,000		179,757,100	48 Orang	250,000,000	1%	2,560,000	48 Orang	2,560,000		182,317,100		45.58	
			Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Orang Terantar	Meningkatnya layanan dalam menangani bagi orang yang terantar dalam Menurunkan Perjalanan	225 Orang	150,000,000		163,210,000	225 Orang	150,000,000	26%	39,202,400	225 Orang	39,202,400		202,412,400		134.94	
			Pelayanan dan Pembinaan Sosial bagi Anak yang Bermasalah sosial dan Lansia	meningkatkan layanan dan binaan bagi anak yang bermasalah sosial, Pengangkatan Anak Terantar, Lansia Terantar dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	750 Anak dan 275 Lansia Terantar	600,000,000		285,709,661	300 Anak 110 Lansia Terantar	425,000,000	1%	5,700,000	300 Anak 110 Lansia Terantar	5,700,000		291,409,661		48.57	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Meningkatnya Pelayanan Dan Rehabilitasi Bagi Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan tuna Wisma	20%	600,000,000		382,836,300	20%	400,000,000	3%	10,890,000	20%	10,890,000		393,726,300		65.62	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Korban Napza	meningkatkan layanan rehabilitasi penyandang disabilitas korban napza dan ODHA	20%	350,000,000		58,250,000	20%	200,000,000	0%	-	20%	0		58,250,000		16.64	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya produktivitas dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis			Pelayanan dan Pembinaan Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiausahaan Sosial	Terlestarikannya nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiausahaan sosial sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial kepada masyarakat	300 Orang	300,000,000		188,919,700	150 Orang	175,000,000	0%	-	150 Orang	0		188,919,700		62.97	DTKK,UKM
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial	Peningkatan Pengetahuan Tentang Izin Pengumpulan Uang di Kota Jambi	115 Orang	74,400,000		48,618,000	85 Orang	50,000,000	0%	-	85 Orang	0		48,618,000		65.35	
			Pendataan dan Informasi Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data Sistem Informasi Terpadu Bagi Keluarga Miskin di Kota Jambi	7,000 KK	250,000,000		93,476,000	10,000 KK	165,000,000	15%	24,000,000	10,000 KK	24,000,000		117,476,000		46.99	
			Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Meningkatnya Pengetahuan Ketrampilan Berusaha membuat Kuliner Bagi Keluarga Miskin, Wanita rawan Sosial Ekonomi dan KUBE Fakir Miskin melalui Bantuan Peralatan	250 Orang	869,332,000		225,341,400	100 Orang	450,000,000	0%	-	100 Orang	0		225,341,400		25.92	
			Pembinaan dan Pelayanan Sosial Fakir Miskin	Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Bagi Fakir Miskin di Kota Jambi	8 E-warong	120,000,000		70,690,000	8 E-warong	85,000,000	35%	29,330,000	8 E-warong	29,330,000		100,020,000		83.35	
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
			URUSAN TENAGA KERJA																
			Peningkatan Kualitas Perlindungan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator 1 : Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	35%	1,731,385,000	7%	648,035,500	14%	850,130,000	5%	256,700,000	5%	256,700,000	12%	904,735,500	52.26%	52.26%	
			Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	330 orang	3,945,000	140 orang	430,225,250	180 orang	560,000,000	115 orang	256,700,000	115 orang	256,700,000	255 orang	686,925,250	77.27%	17412.55%	
			Penyusunan Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja	- Jumlah informasi pasar kerja - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan layanan antar kerja	80 Perusahaan	1,727,440,000	20 Perusahaan	217,810,250	20 Perusahaan 40%	290,130,000	-	-	-	-	20 Perusahaan	217,810,250	25.00%	12.61%	
				Indikator 2 : Persentase penyelesaian perselisihan HI dengan perjanjian bersama	60%	1,940,000,000	56.00%	148,696,000	57%	470,000,000		72,237,650		72,237,650		220,933,650	11.39%	11.39%	
			Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hub Industrial	Jumlah penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama	60%	830,000,000	56%	108,250,000	57%	366,450,000	9 Kasus	68,238,500	9 Kasus	68,238,500		176,488,500	21.26%	21.26%	
			Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan dan pekerja yang mendapatkan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan	150 Perusahaan	1,110,000,000	30 Perusahaan	40,446,000	60 perusahaan	103,550,000	-	3,999,150	-	3,999,150	30 Perusahaan	44,445,150	20.00%	4.00%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tercapainya Standar Kota Layak Anak		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																DPMPPA
			Program Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Ratio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0.0197		0.016		0.0227										
			Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Tercapainya Persentase Standar KLA	100%	674,212,559	70%	425,995,000	80%	522,000,000	10%	157,625,000	10%	157,625,000	110%	583,620,000	110	87	
				Persentase Kelurahan Layak Anak	100%		100%		100%		10%		10%		110%		110		
				Persentase Kecamatan Layak Anak	100%		100%		100%		10%		10%		110%		110		
				Jumlah Sosialisasi GN AKSA, PATBM dan Konvensi Hak Anak	8		6		5		5		500%		13		162.5		
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perempuan			Jumlah Anak yang ikut organisasi anak (FAD)	100		94		90		90		9000%		190		190		DPKP
			Program Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	90%		94.29%		82%										
			Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tersedianya Data Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Tidak Ada	1,181,842,500	Tidak Ada	870,919,844	70%	1,032,570,000	0%	-	0%	-	0%	870,919,844	0	73.69	
				Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PG	60%		0%		30%		0%		0%		60%		100		
				Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	60%		22.50%		30%		0%		0%		60%		100		
				Jumlah Organisasi Perempuan yang Terbina	8		4		5		0%		0%		8		100		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Persentase Jumlah TP PKK Aktif	100%	2,185,454,000	100%	1,896,204,856	100%	1,993,858,550	6.41%	255,891,200	6%	-	106%	1,896,204,856	106.41	86.76	
				Persentase Kelurahan Dasa Wisma yang Berprestasi di Wilayah P2WKSS	100%		100%		100%		6.41%		0%		100%		100		
	Meningkatnya Perlindungan		Program Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Penurunan Ratio KDRT	0.017		0.021		0.020										
			UPTD Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pelayanan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Dilayani	100%	163,378,600	100%	256,090,000	100%	125,000,000	14.35%	35,875,000	14%	-	114.35%	256,090,000	114.35	156.75	
				Persentase Kasus Kekerasan	100%		100%		100%		14.35%		14%		114.35%		114.35		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
a. Terpenuhiya ketersediaan pangan b. Meningkatnya keamanan pangan			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PANGAN	Dalam Rumah Tangga Yang Ditangani															DPKP	
				Program: peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan tani	Indikator Program: Peningkatan difersifikasi pola konsumsi pangan masyarakat	100%	1,627,000,000	20%	328,948,400	20%	422,500,000	-	35,864,000	-	35,864,000	20%	364,812,400	20		22
				Indikator Kegiatan:	Indikator Kegiatan:															
				1. Kegiatan: Pengembangan diversifikasi dan keamanan pangan	1. Jumlah Pangan Segar Yang Diuji	80 Sampel		80 Sampel	61,598,000	80 Sampel		24 Sampel		24 Sampel	104	97,462,000	130	6.0		
					2. pemenuhan pangan masyarakat yang B2SA	AKE 2100 Kkal		AKE 2188 Kkal	100,573,000	AKE 2150 Kkal		AKE 2190 Kkal		AKE 2190 Kkal	2190	136,437,000	101.9	8.39		
						AKP 57 Gram		AKP 64,3 Gram		AKP 57 Gram		AKP 64,7 gram		AKP 64,7 gram	64.7		113.5			
					3. Pembinaan jumlah rumah tangga anggota kelompok wanita tani yang memanfaatkan lahan pekarangan	55 KWT		11 KWT	166,777,400	11 KWT		11 kali Sosialisasi		11 kali Sosialisasi 11 kali pembinaan KWT	22	11	202,641,400	20		12.45
				2. Kegiatan: Pengembangan cadangan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Indikator Program: Persentase peningkatan pengentasan daerah rawan pangan	30%	1,477,000,000	6%	265,452,660	6%	315,600,000	-	33,054,000	-	33,054,000	6%	298,506,660	20		20.21
					Indikator Kegiatan:															
					1. Peningkatan cadangan pangan daerah	40 ton		3,996 Ton	119,283,460	4,5 Ton		-		-	3,996 ton	152,337,460	9.9	10.31		
Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	2. Persentase Penurunan daerah rentan rawan pangan	20 Kelurahan		4 Kelurahan	109,799,200	4 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan	6 kelurahan	142,853,200	30	9.67			
				3. Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	5 Toko Tani		-	36,370,000	1 Toko Tani		-		-	-	69,424,000	0	4.70			
				3. Kegiatan: Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluh	Indikator Kegiatan: Peningkatan jumlah kelompok tani	394 Klpk	400,000,000	245 Klpk	-	361 Klpk	100,000,000	8 Klpk	1,200,000	8 Klpk	1,200,000	253 Klpk	1,200,000	64.2	0.30	
				Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan usaha yang sudah mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan	180	2,268,204,000		2,561,436,171		2,532,825,000		130,227,250		130,227,250		2,691,663,421		119	
				Kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan	Terinventarisasi sumber pencemar air sungai dan danau	1 danau	710,000,000	1 laporan	631,679,147	2 sungai	625,500,000	-	3,600,000	-	3,600,000		635,279,147		89.48	
					jumlah pembinaan dunia usaha	55 dunia usaha		100%		40 dunia usaha		8 dunia usaha		8 dunia usaha						
	terlaksananya uji emisi kendaraan roda 4	1500 kendaraan		1500		1500		-		-										
				terinventarisasi lahan kritis	1 lokasi															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	· Status kerusakan tanah akibat produksi biomassa Jumlah sampel yang di uji	450 sampel, air 6 parameter	778,204,000	250 sampel, 91 titik	1,338,350,278	300 sampel	975,000,000	82 sampel	119,316,250	82 sampel	119,316,250		1,457,666,528		187	
			Penambahan ruang lingkup parameter pengujian	· Terakreditasi parameter	Logam berat 6 parameter				Udara 6 parameter		-	-	-	-					
			Kegiatan pengkajian dampak lingkungan	· Terlaksananya koordinasi dalam penyusunan Amdal, UKL-UPL dan SPPL serta pembinaan usaha-usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL serta pembinaan usaha-usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL · Jumlah kajian lingkungan hidup	50 dokumen	620,000,000	50 dokumen	484,384,746	50 dokumen	739,325,000	234 dokumen	375,000	234 dokumen	375,000		484,759,746		78.19	
			Kegiatan penegakan hukum lingkungan	· Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	1 kajian KLHS				1 kajian RPPLH		-	-	-	-					
			Kegiatan penegakan hukum lingkungan	· Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	1 dokumen		5 buku		1 kajian KLHS RDTR Review		-	-	-	-					
			Kegiatan penegakan hukum lingkungan	· Pengawasan terhadap penataan peraturan perundangan bidang lingkungan hidup	100 perusahaan	160,000,000	96 perusahaan	107,022,000	100 perusahaan	193,000,000	25 perusahaan	6,936,000	25 perusahaan	6,936,000		113,958,000		71.22	
			Kegiatan penegakan hukum lingkungan	· Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100% penanganan kasus		100%		100% penanganan kasus		100% (4 kasus)		100% (4 kasus)						
			Kegiatan penegakan hukum lingkungan	· Persentase penegakan hukum lingkungan hidup	100%				100%		100% (9 sanksi)		100% (9 sanksi)						
			Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	Persentase kecukupan ruang terbuka hijau publik	IKTL 42.50	11,995,596,000	20%	10,534,458,586	IKTL 41.70	10,068,318,000		918,331,100		918,331,100		11,452,789,686		95.47495336	
			Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah siswa yang mengikuti duta lingkungan	50	447,000,000		305,975,000	50	550,000,000	-	-	-	-		305,975,000		68	
			Kegiatan pengelolaan hutan kota	Jumlah kampung iklim dan penyuluhan proklam	7		5 lokasi		2		-	-	-	-					
			Kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Jumlah dokumen inventarisasi keanekaragaman hayati	1 dokumen				1 dokumen		-	-	-	-					
			Kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	· Luas taman	13,77 ha	9,775,000,000		8,979,825,036	13,77 ha	8,018,318,000	-	800,120,500	-	800,120,500		9,779,945,536		100	
			Kegiatan pengelolaan hutan kota	· Jumlah sekolah adiwiyata	30 sekolah				30 sekolah		-	-	-	-					
			Kegiatan pengelolaan hutan kota	· Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan taman hutan kota	3 lokasi	1,773,596,000	3 lokasi	1,248,658,550	3 lokasi	1,500,000,000	-	118,210,600	-	118,210,600		1,366,869,150		77.07	
			Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	M. Sahki. Rataan Peta dan Hutan	77,1 ha				77,1 ha		-	-	-	-					
			Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah pengurangan sampah di tingkat sumber	14.23%	45,262,650,867		28,930,553,019	12.73%	41,652,722,650	-	4,731,079,450	-	4,731,079,450		33,661,632,469		74.37	
			Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang ditangani	76.66%				76.16%		-	-	-	-					
			Kegiatan pengurangan sampah dan peningkatan kinerja bank sampah	· Tonase sampah terpilah	20 ton/bulan	1,053,651,999	10 ton/tahun	220,040,000	10 ton/bulan	2,058,007,500	-	87,852,750	-	87,852,750		307,892,750		29.22	
			Kegiatan pengurangan sampah dan peningkatan kinerja bank sampah	· Jumlah KK terlayani TPS 3R	16.000 KK				7.500 KK		-	-	-	-					
			Kegiatan peningkatan kinerja penanganan sampah	· Jumlah peserta sosialisasi pengolahan sampah berbasis peran serta masyarakat	3.500 orang				3.500 orang		-	-	-	-					
			Kegiatan peningkatan kinerja penanganan sampah	· Persentase jalan yang terlayani penyapuan	80%	17,251,254,742		28,710,513,019	72%	15,083,239,750	-	2,173,523,750	-	2,173,523,750		30,884,036,769		179	
			Kegiatan peningkatan kinerja penanganan sampah	· Melakukan pengukuran komposisi dan densitas sampah	1 dokumen				1 dokumen		-	-	-	-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Kualitas dan jangkauan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Kegiatan peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3	· Tersosialisasinya pemilahan sampah ditingkat sumber	500 orang				500 orang	-	-								
				· Penanganan limbah B3 pada kegiatan usaha	50 usaha	400,000,000			50 usaha	192,850,000	8	2,700,000	8	2,700,000		2,700,000		0.68	
				· Penanganan limbah B3 pada fasilitas kesehatan	40 fasilitas kesehatan				40 fasilitas kesehatan	0	0								
					72%	19,196,337,437				14,733,151,000		2,135,664,200		2,135,664,200		2,135,664,200		11.13	
				Kegiatan peningkatan pengelolaan angkutan dan mobilisasi	Persentase jumlah sampah yang di tangani				78%	-	-								
				Kegiatan peningkatan kinerja operasional TPA Talang Gulo	· Terbentuknya zona penataan sampah	1 dokumen	7,361,406,689		60%	9,585,474,400	-	331,338,750	-	331,338,750		331,338,750		4.50	
				· Baku mutu air leacheat/lindi	10 ton/hari				1 dokumen	-	-								
				· Tonase sampah organik terolah menjadi kompos	60 KK				10 ton/hari	-	-								
				· Pemanfaatan gas methan sebagai energi terbarukan	60 KK				60 KK	-	-								
				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR															
				URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
				Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	100%		94.40%	96%						95.20%				
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	14,729,067,000	83.84%	2,442,807,651	86.50%	3,644,199,000				86.38%	2,452,549,171			
					Validitas Database Kependudukan	95%		86.68%	89%						86.68%				
				Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Kependudukan	meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KK)	100%	3,808,311,000	94.40%	794,124,000	96%	147,715,000	0.80%	1,500,000	0.80%	1,500,000	95.20%	795,624,000	95.20%	1.00
				Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Pencatatan Sipil	meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian)	100%	435,500,000	83.84%	86,465,000	86.5%	114,845,000	2.54%	-	2.54%	-	86.38%	86,465,000	86.38%	1.00
				Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	750,000,000	26.80%	163,275,000	33.30%	166,815,000	3.20%	-	3.20%	-	30.00%	163,275,000	30.00%	1.00
				Pemutakhiran Data Kependudukan	meningkatnya Validitas Database Kependudukan	95%	1,900,000,000	86.68%	-	89%	795,100,000	0.00%	270,000	0.00%	270,000	86.68%	270,000	91.24%	0.00
				Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta validitas database kependudukan	100%	1,150,000,000	0	-	100%	229,000,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	0.00
				Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Operator SIAK	100%	342,000,000	0	-	100%	69,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00
				Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK)	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta validitas database kependudukan	100%	6,343,256,000	100%	1,398,943,651	100%	2,121,524,000	35.00%	7,971,520	35.00%	7,971,520	135.00%	1,406,915,171	135.00%	0.22

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
			URUSAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	Tercapainya Persentase Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif	70%		65.25%		66%										
			Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase KPM Aktif di Kecamatan	100%	2,294,238,686	100%	2,460,788,675	85%	367,550,000	12.51%	54,100,000	12.51%	54,100,000	112.51%	2,514,888,675	112.51	110	
				Jumlah LPM Berprestasi	24		0		6		0		0		0		0		
			Pelaksanaan BBGRM	Persentase Kelurahan Aktif yang Mengikuti Program BBGRM	89%	308,149,014.00	100%	127,195,000	53%	120,050,000	0	-	0	-	100%	127,195,000	112.36	41.28	
	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	97%		95%		94%										
				Persentase Kelompok UEM yang Aktif	83%		87%		77%										
				Persentase Pemanfaatan Alat TTG	85%		100%		77%										
			Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	Jumlah RT yang mengikuti Program Kampung Bantar	1368	2,076,181,300	502	1,550,227,000	718	1,787,000,000	0	-	0	-	1368	1,550,227,000	100	75	
				Persentase Monev Sarana Prasarana Kelurahan	82%		81.42%		79%		0%		0%		82%		100		
			Pengembangan Data Informasi dan Inovasi	Persentase kualitas dan kuantitas data profil kelurahan	70%	155,483,000	70.96%	98,900,000	55%	54,880,000	5.61%	5,600,000	5.61%	5,600,000	75.61%	104,500,000	108.014	67	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Wartek dan Posyantek Aktif	20	218,545,000	11	181,008,000	12	200,000,000	0	6,700,000	0	6,700,000	20	187,708,000	100	86	
				Jumlah Badan Lembaga (Posyantek) yang Menjalin Kemitraan	6		1		3		0		0		6		100		
				Jumlah KUBE yang berbadan Hukum	38		38		35		0		0		38		100		
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
			URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera																		DPPKB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Laju Pertumbuhan Penduduk serta Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera					(1,05) ; (96,46%)				(1,05) ; (96,46%)		(1,05) ; (96,46%)				
			Pembinaan dan Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan KB	100,00%	700,000,000	96.53%	647,395,800	1 Tahun, 17 Keg	197,180,000		11,726,000	1 Tahun, 17 Keg	11,726,000		659,121,800		94.16%	
			Kegiatan Institusi dan Partisipasi Masyarakat serta KIE	Persentase Penyuluhan Kesertaan Ber KB Oleh PKB Dan IMP	100,00%	922,100,000	99.66%	919,020,000	1 Tahun, 5 Keg	164,126,250		-	1 Tahun, 5 Keg	-		919,020,000		99.67%	
			Bantuan Operasional KB	Persentase Peningkatan Dukungan Program KB	91,00%	2,393,933,000	93.02%	2,227,007,055	1 Tahun, 11 kecamatan, 12 kampung KB	2,982,682,000		341,381,513	1 Tahun, 11 kecamatan, 12 kampung KB	341,381,513		2,568,388,568		107.29%	
			Pembinaan dan Operasional Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	65,00%	436,960,000	94.58%	403,860,000	1 Tahun, 11 Keg	285,270,000		13,170,000	1 Tahun, 11 Keg	13,170,000		417,030,000		95.44%	
			Pengendalian Penduduk Dan Pengembangan Data/Informasi	Persentase Kebijakan Pengendalian Penduduk Dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk		-			1 Tahun, 9 Keg	301,018,000		30,030,500	1 Tahun, 9 Keg	30,030,500		1 Tahun, 9 Keg		30,030,500	
			Pengadaan Barang & Jasa/Konstruksi (DAK)	Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa/Konstruksi		-		-	1 Tahun, 9 Keg. DAK	1,296,200,000		-	1 Tahun, 9 Keg. DAK	-		1 Tahun, 9 Keg. DAK		-	
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
			URUSAN PERHUBUNGAN																
	Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Lalulintas & Angkutan Perhubungan Darat		Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	100%	27,910,000,000	65%	8,820,489,560	67%	7,560,474,000	2.10%	159,043,918	2.10%	159,043,918		67.10%	8,979,533,478		32.17%
				Cakupan yang terlayani angkutan umum	100%		38%		52%										
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	9,000,000,000	56%	4,488,840,023	67%	3,791,882,000		-	0.00%	-		56.00%	4,488,840,023	56.00%	49.9%
				Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	100%				80%					0.00%					
			Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Angkutan yang melaksanakan uji kendaraan	23000 unit	17,810,000,000	26.633 unit	3,678,194,437	17000 unit	3,565,092,000	4.46%	159,043,918	4.46%	159,043,918		3,837,238,355		21.5%	
				Tingkat Ketersediaan pengembangan PKB berbasis teknologi	14 unit		3 unit		7 unit										
				Persentase Layanan Angkutan Darat	100 unit		20 unit		50 unit										
				Persentase Sarana prasarana Terminal layk Fungsi	100%		30%		45%										
			Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	Persentase Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	5 dok	1,100,000,000	2 dok	653,455,100	5 dok	203,500,000		-	0.00%	-		653,455,100		59.4%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Peningkatan Penataan & Pelayanan Perparkiran	Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Ber Lalu Lintas	Persentase Penurunan Jumlah Titik Kemacetan	100%	1,200,000,000	31%	752,437,000	36%	2,089,850,000	7.81%	163,275,100	7.81%	163,275,100		915,712,100		76.3%		DISKOMINFO
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan	Penurunan Jumlah Titik Kemacetan	100%	1,200,000,000	31%	752,437,000		-	0.00%	-		752,437,000		62.7%			
			Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Jumlah Titik Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas	0 titik	200,000,000	-	-	36 titik	1,203,432,000	11.51%	138,461,000	11.51%	138,461,000		69.2%			
				Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada hari - hari tertentu	95 kali		-	-	95 kali										
			Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan dan Angkutan Jalan	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang	40 kali	750,000,000	-	-	40 kali	652,418,000	3.80%	24,814,100	3.80%	24,814,100		3.3%			
			Sosialisasi dan Bimbingan Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah pelaksanaan bimbingan peraturan LLAJ	40 kali	250,000,000	-	-	40 kali	234,000,000	0.00%	-	0.00%	-		0.0%			
Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Berkualitas	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase Peningkatan Pelayanan Perparkiran	100%	6,100,000,000	74,76%	2,239,420,231	80,74%	3,694,018,000	8.33%	307,646,499	8.33%	307,646,499		2,547,066,730		41.8%		
		Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	Jumlah Persentase Peningkatan PAD Parkir	100%	4,000,000,000	86%	1,716,324,059	92%	784,000,000	10.40%	81,500,000	10.40%	81,500,000		1,797,824,059		44.9%		
		Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Parkir	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana parkir	17 unit	1,500,000,000	9	221,671,272	11 unit	1,215,920,000	0.00%	-	0.00%	-		221,671,272		14.8%		
		Penertiban dan Penataan Parkir	Jumlah titik parkir yang tertata	600 titik	600,000,000	512	301,424,900	513 titik	1,694,098,000	13.35%	226,146,499	13.35%	226,146,499		527,571,399		87.9%		
		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	1. Cakupan Akses dan Kualitas Informasi Publik	90%	12,458,407,000	100%		60%	7,423,479,000		396,824,500		396,824,500		396,824,500		79,364,900		
			2. Persentase Peningkatan Ekosistem TIK	80%				45%											
		1. Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	cakupan akses informasi publik	90%	9,844,428,000	100%	3,021,563,071	60%	3,147,912,000	90%	217,275,500	62%	217,275,500		3,238,838,571		647,767,714		
		2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan kualitas informasi publik	90%	1,960,541,000	100%	551,787,500	60%	623,046,000	90%	130,124,000	44%	130,124,000		681,911,500		136,382,300		
		3. Kegiatan Tata Kelola Teknologi Informatika dan Komunikasi	Persentase peningkatan ekosistem TIK	80%	653,438,000	100%	370,368,884	45%	289,430,000	25%	49,425,000	38%	49,425,000		419,793,884		83,958,777		
		Program Manajemen Data/Informasi/Statistik Daerah	Tingkat ketersediaan data/Informasi/Statistik sektoral daerah	50%	200,000,000			10%	40,750,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		300,000		

DISKOMINFO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pengkoordinasian pelaksanaan surveyan, verifikasi, kompilasi, dan diseminasi data statistik	Persentase ketersediaan data/informasi/statistik daerah	50%		50%	5,000,000				1,500,000	25%	1,500,000					
			Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rasio jumlah informasi milik Pemerintah yang diamankan	65%	608,350,000			20%	74,124,000		-	-	-					
			Kegiatan Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	Rasio Jumlah Informasi milik Pemerintah yang diamankan	65%		90,09%	85,717,500				-	-	-		85,717,500		17,143,500	
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
			URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil menengah		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	98.62%	2,620,630,000	48.16%	369,638,250	57.33%	699,000,000	16.05%	18,938,500	16.05%	18,938,500		388,576,750	14.83%	14.83%	
			Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	200 kop	2,466,630,000	140 Koperasi	333,170,250	180 Koperasi	662,000,000	15 Koperasi	15,518,500	15 Koperasi	15,518,500	155 Koperasi	348,688,750	77.50%	14.14%	
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil menengah		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya peningkatan kualitas SDM koperasi	200 kop	154,000,000	150 Koperasi	36,468,000	160 Koperasi	37,000,000	15 Koperasi	3,420,000	15 Koperasi	3,420,000	165 Koperasi	39,888,000	82.50%	25.90%	
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	51.76%	3,700,860,000	49.00%	859,445,250	49.69%	808,454,750		30,019,150		30,019,150		889,464,400	24.03%	24.03%	
			Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	Jumlah UKM anggota koperasi yang dapat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya	500 UMKM	797,679,000	871 UMKM	140,400,000	300 UMKM	165,954,750		12,654,750		12,654,750		153,054,750	19.19%	19.19%	
			Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan untuk mengembangkan usaha	938 UMKM	1,081,138,000	835 UMKM	270,284,500	835 UMKM	250,000,000	120 UMKM	17,364,400	120 UMKM	17,364,400	955 UMKM	287,648,900	101.81%	26.61%	
			Penguatan Pemasaran Bagi Produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah peningkatan pemasaran produk UKM melalui kegiatan promosi	95 UMKM	1,822,043,000	175 UMKM	448,760,750	75 UKM	392,500,000	0	-	0	-	175 UMKM	448,760,750	184.21%	24.63%	
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
	Meningkatnya Realisasi Investasi		URUSAN PENANAMAN MODAL																
	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan Non Perizinan		Peningkatan Realisasi Investasi	Indikator 1 : Jumlah Investor PMA/PMDN berskala Nasional	523,37m	740,508,000	430,5m	269,955,500	430,5m	569,024,000	430,5m	4,270,000	430,5m	2,740,000	0.00%	272,695,500	36.83%	36.83%	
			Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terlaksananya Promosi Investasi luaran dalam daerah, tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	4 kali	290,000,000	2 kali 1 buku	199,697,000	4 kali	163,844,000	4 kali	2,740,000	4 kali	2,740,000	4 kali	202,437,000	77.27%	69.81%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Rencana Penanaman Modal	Terlaksananya Peraturan Tentang Rencana Penanaman Modal Daerah, penyusunan buku peluang dan potensi investasi	2 dokumen dan 2 bidang sektor unggulan	85,000,000	1 kali	39,843,500	2 dokumen dan 2 bidang sektor unggulan	123,055,000	2 dokumen dan 2 bidang sektor unggulan	-	-	-	2 dokumen dan 2 bidang sektor unggulan	39,843,500	25.00%	46.87%	
			Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	Bintek tata cara pengisian LKPM online, Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kali/Perusahaan, 15 kali	80,508,000	12 kali	27,465,000	1 Kali/Perusahaan, 15 kali	96,525,000	1 Kali/Perusahaan, 15 kali	1,530,000	1,530,000		28,995,000	36.02%	36.02%		
			Pengelolaan Sistem pelayanan penanaman Modal dan perizinan secara elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan secara Elektronik	100%	285,000,000	12 bulan	2,950,000	100%	185,600,000	100%	-	100%	-	2,950,000	1.04%	1.04%		
			Penigkatan Kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Indikator 2 : Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non perizinan	88.50%	865,694,000	85.50%	673,760,000	86.00%	648,367,000	86.00%	126,406,000	86.00%	126,406,000	800,166,000	92.43%	92.43%		
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang perekonomian dan Kesos	Terlaksananya publikasi pelayanan perizinan, Forum konsultasi publik, Rakor PTSP	8 kali, 1 kali 1 kali	287,500,000	2 kali dan 8 kali publikasi	275,480,000	8 kali, 1 kali 1 kali	267,940,000	-	-	-	-	275,480,000	95.82%	95.82%		
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	Terlaksananya penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan	8 kali, 1 kali 1 kali	287,500,000	0	-	8 kali, 1 kali 1 kali	266,100,000	8 kali, 1 kali 1 kali	108,450,000	8 kali, 1 kali 1 kali	108,450,000	108,450,000	101.81%	37.72%		
			Pengelolaan Data dan Penataan Arsip	Terkelolanya data dan Arsip Perizinan, data spasial IMBR	12 bulan	65,694,000	Jumlah pemohon	38,415,000	12 bulan	48,415,000	12 bulan	-	12 bulan	-	38,415,000	101.81%	58.48%		
			Monitoring,Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	Tersedianya Informasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Terlaksananya tindak lanjut Pengaduan Perizinan	1 buku laporan	225,000,000	1 buku laporan	162,122,000	1 buku laporan	65,912,000	buku laporan	17,956,000	0	17,956,000	180,078,000	101.81%	80.03%		
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA																DISPORA
			Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100%	2,335,490,000		4,500,960,000		7,178,703,120	3%	182,116,050	3%	182,116,050	4,683,076,050		94.00		
			Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Organisasi	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi	100%	1,500,000,000		1,000,000,000	8 Kegiatan	1,213,458,250	5%	56,847,250	5%	56,847,250	1,056,847,250		21.00		
			Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	60 kali	1,500,000,000	-	-	33 Cabang olahraga	908,301,500	4%	32,110,000	4%	32,110,000	32,110,000		64.00		
			Kegiatan Pemassalan Olahraga	Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi		4,415,989,021	-	-	13 Kegiatan	4,651,506,920	2%	93,158,800	2%	93,158,800	93,158,800		19.00		
			Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	1.Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan 2.Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi	60 kali	23,000,000		141,050,000	2 dok	7,750,000	-	-	-	-	141,050,000		29.00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Jumlah penyelenggaraan even seni budaya		Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sapras Olahraga dan Pemuda	Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi	90%	1,500,000,000		500,000,000	4 Paket	397,686,450	-	-	-	-		500,000,000		1.00	DPK
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
			URUSAN KEBUDAYAAN																
			Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan			1,639,090,000		928,639,700		1,408,750,000				219,301,500		1,147,941,200		70.04%	
			Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	Jumlah penyelenggaraan even seni dan budaya, jumlah pelatihan tium kesenian, jumlah promosi seni budaya keluar daerah		1,564,090,000		928,639,700	Even 4 X, Pelatihan 15 X, Penyambutan 30 X, Promosi ke Luar Daerah 4 X	1,343,750,000		219,301,500		219,301,500		1,147,941,200		73.39%	
			Penyusunan Profil Seni Budaya	Penyusunan profil seni budaya Kota Jambi		75,000,000		-	1 Dokumen	65,000,000		-		-		-		0.00%	
	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																DKP
			URUSAN PERPUSTAKAAN																
			program peningkatan Mutu dan Pelayanan perpustakaan	Jumlah Rata-Rata pengunjung perpustakaan pertahun	52836	794,000,000	32423	1,004,829,033	37836	626,863,700	7261	25,974,000	7261	25,974,000	7261	1,030,803,033	13.74%	130%	
			1. Pengembangan Koleksi perpustakaan, Layanan dan pelestarian bahan Pustaka	bertambah nya Jumlah Buku Karya cetak	2500		5605		500		0		0		5605		224.20%		
				bertambahnya Jumlah e-book	576		636		110		0		0		636		110.42%		
				Jumlah pengunjung	55336		32423		40336		7261		7261		39684		71.71%		
				Jumlah Transaksi peminjaman	6250	794,000,000	5406	1,004,829,033	3553	626,863,700	386	25,974,000	386	25,974,000	5792	1,030,803,033	92.67%	129.82%	
				jumlah Bahan pustaka yang Dilestarkan	500		100		100		25		25		125		25.00%		
			2. Pembinaan Pengembangan perpustakaan, kerjasama dan pembudayaan Gemar membaca	jumlah Tenaga pengelolaan perpustakaan Yang mengikuti Bimtek	40		40		3		0		0		40		100.00%		
				kerjasama antar perpustakaan dan Pihak ketiga/Stake Holder	15		5		15		0		0		5		33.33%		
				Expose perpustakaan	5	374,051,000	4	229,025,500	5	323,765,400	0	17,445,000	0	17,445,000	4	246,470,500	80.00%	65.89%	
				Jumlah pojok baca yang edata	208		59		76		0		0		59		28.37%		
				monitoring dan Evaluasi perpustakaan/pojok baca	379		171		59		0		0		171		45.12%		
	Meningkatnya Kepatuhan PD Terhadap Penyelenggaraan Kearsipan		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																DKP
			URUSAN KEARSIPAN																
			Pengolahan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	Jumlah Arsip yang terselamatkan	52019	681,098,000	1200	396,949,700	1200	1,687,054,075	3059	47,633,375	3059	47,633,375	4259	444,583,075	818.74%	65.27%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Daerah	Peningkatan SDM Pengelolaan Arsip	164		20		36		-----				20				
			1. Akuisisi Pengolahan dan Layann Kearsipan Kota Jambi	Jumlah Perwal Tentang Perpustakaan Arsip	21	681,098,000	5	396,949,700	4	1,687,054,075	0	47,633,375	0	47,633,375	5	444,583,075	23.81%	65.27%	
				Jumlah Storyline Sejarah	3		1		1		0		0		1		33.33%		
				Jumlah Arsip Yang Diolah	6000		1200		1200		3059		3059		4259		70.98%		
				Jumlah Arsip Yang Terakuisisi Pada LKD	3		0		1		0		0		0		0.00%		
				Jumlah Preservasi Arsip Statis Pada LKD	3		0		0		0		0		0		0.00%		
				Jumlah Dokumen SOP Layanan Kearsipan Pada LKD	3		0		0		0		0		0		0.00%		
				Jumlah Pegawai/LKD Yang Dikutuk Inhouse Training Oleh Tim ANRI	33		0		30		0		0		0		0.00%		
				Jumlah PD Yang Mendapatkan Pendampingan Teknis Implementasi SIKD	4		0		1		0		0		0		0.00%		
				Jumlah PD Yang Dievaluasi Pelaksanaan SIKD	4		0		1		0		0		0		0.00%		
				penyusunan naskah sumber	1		0		0		0		0		0		0.00%		
				penerbitan naskah sumber	1		0		0		0		0		0		0.00%		
				fumigasi	1		0		0		0		0		0		0.00%		
				alih media arsip	4		0		1		0		0		0		0.00%		
				pameran arsip	1		0		0		0		0		0		0.00%		
				kontens diorama kearsipan	1		0		0		0		0		0		0.00%		
				pernusaan arsip	1		0		1		0		0		0		0.00%		
				pendataan arsip vital	1		0		0		0		0		0		0.00%		
			2. pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah Asistensi pembinaan PD, Bagian pada Sekertariat Daerah dan Kelurahan	111	681,098,000	23	274,598,200	22	297,086,000	0	32,475,000	0	32,475,000	23	307,073,200	20.72%	45.09%	
				Jumlah Asistensi pembinaan Ormas/Orpol, Perusahaan	89		13		19		19		19		32		35.96%		
				Jumlah PD, Bagian dan kecamatan yang mendapat Audit dan Monitoring kearsipan	74		16		20		0		0		16		21.62%		
				pendataan Ormas/Orpol dan Perusahaan	60		0		10		0		0		0		0.00%		
				Gerakan Nasional Sadar Arsip	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				Jumlah Pegawai yang mengikuti Coaching clinic Pra lomba kearsipan internal bagi PD	240		0		60		0		0		0		0.00%		
				Jumlah pegawai yang mengikuti Workshop Penyusutan Arsip	240		0		60		0		0		0		0.00%		
				Jumlah pegawai yang Mengikuti Sosialisasi peraturan Perundang- undangan kearsipan	240		0		60		0		0		0		0.00%		
				Jumlah Pegawai yang mengikuti Coaching Clinic dasara kearsipan bagi PD	180		0		0		0		0		0		0.00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah pegawai yang mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi PD	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				Jumlah Pegawai yang mengikuti Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Aktif Bagi PD	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				Jumlah pegawai yang mengikuti coaching clinic pengelolaan arsip in aktif bagi PD	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				Jumlah pegawai workshop pengelolaan arsip vital Bagi PD	240		0		60		0		0		0		0.00%		
				jumlah pegawai yang mengikuti coaching pengelolaan arsip statis Bagi PD	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				Jumlah pegawai yang mengikuti Coaching Clinic Pemberkasan Arsip Bagi PD	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				Jumlah pegawai yang mengikuti coaching clinic Dasar -dasar kearsipan Bagi Ormas/Orpol dan perusahaan	240		0		60		0		0		0		0.00%		
				jumlah pegawai yang mengikuti workshop pengelolaan Arsip Dinamis Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				jumlah pegawai yang mengikuti Coaching Clinic pengelolaan Arsip Aktif Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				jumlah pegawai yang mengikuti workshop pengelolaan Arsip in Aktif Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				jumlah pegawai yang mengikuti workshop pengelolaan Arsip Vital Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				jumlah pegawai yang mengikuti coaching clinic pengelolaan Arsip Statis Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				jumlah pegawai yang mengikuti coaching clinic pemberkasan Arsip Statis Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0		0		0		0		0		0.00%		
				Lomba kearsipan untuk Tingkat PD dan pengelola kearsipan	3		0		0		0		0		0		0.00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dari sektor Pariwisata			URUSAN PILIHAN URUSAN PARIWISATA	Lomba kearsipan untuk Tingkat kelurahan dan pengelola kearsipan	2		0		0		0		0		0		0.00%		DPK	
				Lomba kearsipan untuk Tingkat SD, SMP dan pengelola kearsipan	1		0		0		0		0		0		0.00%			
				Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Pariwisata		3,213,454,000		1,397,588,920		5,491,450,000				19,511,500		19,511,500		0		
				Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah		925,000,000		542,604,500	Haul 2 X, Lomba perahu 1 X, Lomba Ketek Hias 1 X, Reko mendasi TDUP 80X Sosialisasi sadar wisata 1X	4,131,835,000		11,446,500		11,446,500		22,893,000		60		
				Pengembangan, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah		2,033,454,000		854,984,420	Ke Luar Daerah 3X, Pemilihan BG 1X, Penampilan 10X, Camaval 1 X, Festival Kuliner 1X, Analisa pasar 1 Dok Pengembangan kemitraan 1X	1,118,000,000		8,065,000		8,065,000		16,130,000		42,4		
				Monitoring dan Evaluasi Kepariwisata		85,000,000		-	26 kali	35,000,000		-		-		-		-		
				Perencanaan, Pengembangan Pariwisata Daerah		170,000,000		-	1 Dokumen	206,615,000		-		-		-		0		
				URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN DAN PERIKANAN																
				Program: Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	Indikator Program: Persentase produktifitas tanaman pangan	10%	850,000,000	2%	307,819,000	2%	548,000,000	3.56%	19,525,500	3.56%	19,525,500	5.56%	327,344,500	55.6		38.51
				Kegiatan: Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan Hortikultura	Indikator Kegiatan: 1. Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil pertanian 2. Luasan pengenalan dan penggunaan varietas unggul bermutu dan pengendalian hama terpadu 3. Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	200 org 5 Ha 5.5 ton/ha		120 org 5 Ha 5.1 ton/ha	180 org 5 Ha 5.2 ton/ha		- - 5.2 ton/ha		- - 5.2 ton/ha		120 org 5 Ha 5.2 ton/ha		327,344,500	60 100 100		38.51
Kegiatan: Peningkatan jumlah bibit buah bersertifikat	Indikator Kegiatan: Jumlah produksi bibit unggul bersertifikasi	7.500 btg	450,000,000	2.650 btg	307,819,000	5.000 btg	237,000,000	750 btg	0	750 btg	0	3.400 btg	307,819,000	45.3	68.40					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan: Pengembangan agribisnis peternakan	Indikator Program: Persentase peningkatan mutu ternak dan optimalisasi pengolahan produk ternak Indikator Kegiatan: 1. Peningkatan Mutu dan Jumlah Ternak Sapi melalui IB 2. - Jumlah Sampel PAH yang diperiksa - Jumlah pemeriksaan hewan yang berpotensi penular rabies 3. - Optimalisasi pengolahan produk hasil ternak - Optimalisasi pelaku usaha peternakan	100%	750,000,000	20%	432,057,350	20%	288,798,750	14.20%	34,831,000	14.20%	34,831,000	34.20%	466,888,350	34.2	62.25	
			Kegiatan: Pengembangan pelayanan kesehatan hewan	Indikator Kegiatan: persentase pelayanan kesehatan hewan - Jumlah hewan di vaksin - Jumlah hewan yang diperiksa dan diberi obat a. Hewan ternak unggas b. Hewan ternak non unggas c. Hewan peliharaan	300 ekor		60 ekor	165,771,000	60 ekor		25 ekor		25 ekor		85 ekor	200,602,000	28.3	26.75	
			Kegiatan: Pengembangan rumah potong hewan	Indikator Kegiatan: jumlah pemotongan hewan sapi, kerbau dan babi	400 sampel		80 sampel	142,285,350	80 ekor		0		0		80 Sampel	177,116,350	26.7	23.62	
			Kegiatan: Pengembangan agribisnis perikanan	Indikator Program: Persentase produktivitas perikanan Indikator Kegiatan: 1. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya 2. Peningkatan produktivitas hasil perikanan bernilai tambah dan konsumsi ikan - Peningkatan nilai tambah produk perikanan - peningkatan konsumsi ikan (Kg/Kap/Th) 3. Peningkatan produktivitas perikanan perairan umum	4,000 ekor		800 ekor		800 ekor		200 ekor		200 ekor		1,000 ekor		25		
			Kegiatan: Pengembangan perbenihan ikan	Indikator Kegiatan: Jumlah peningkatan produksi benih	6,500 kg		5,300 kg	124,001,000	5,600 kg		300 kg		300 kg		5,600 ekor	158,832,000	86.2	21.18	
			Kegiatan: Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	Indikator Kegiatan: 1. Peningkatan Jumlah Kelompok tani yang memanfaatkan irigasi dan sumber air pertanian 2. Peningkatan jumlah kelompok tani yang memanfaatkan alsintan dan pupuk	1,500 org		300 org		300 org		0		0		300 org		20		
					10%	353,134,000	-	-	2%	100,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	1.13	
					3,000 ekor		-	-	600 ekor		243 ekor		243 ekor		243 ekor		8.1		
					58,000 ekor		-	-	10,000 ekor		3,000 ekor		3,000 ekor		3,000 ekor		5.17		
					2,900 ekor		-	-	500 ekor		219 ekor		219 ekor		219 ekor		7.6		
					2,900 ekor		-	-	500 ekor		168 ekor		168 ekor		168 ekor		5.8		
					30,000 ekor	700,000,000	5,252 ekor	527,846,000	5,100 ekor	180,400,000	1,172 ekor	44,384,000	1,172 ekor	44,384,000	6,424 ekor	572,230,000	21.4	81.75	
					2.50%	700,000,000	7.50%	3,109,371,777	2.50%	415,000,000	0.77%	14,783,500	0.77%	14,783,500		3,124,155,277	0	446.31	
					317,000 ekor		3,566.39 ton /	1,764,371,554	290,000 ekor		1,240 ton /		1,240 ton /		4,806.39 ton /	1,779,155,054	100	254.17	
							80,344.300 ekor				16,064.540 ekor		16,064.540 ekor		96,408.840 ekor				
					2,144 ton		2,003.28 ton	87,285,400	2,060 ton		370 ton		370 ton		2,373.28		110.7	14.58	
					34.2		33.6		33.3		8.1		8.1		41.7		121.9	14.58	
					0.79		0.71	1,257,714,826	0.73		0.17		0.17		0.88	1,272,498,326	111.4	181.79	
					1,440,000 ekor	450,000,000	1,060,500 ekor	216,052,450	1,410,000 ekor	1,616,010,000	146,210 ekor	82,188,275	146,210 ekor	82,188,275	1,206,710 ekor	298,240,725	83.8	66.28	
					70%	450,000,000	-	-	20%	323,000,000	0	5,277,500	0	5,277,500	0	5,277,500	0	1.17	
					45 Klpk		37 Klpk	126,071,000	35 Klpk		0		0		37 Klpk	131,348,500	82.2	29.19	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan		URUSAN PILIHAN URUSAN PERDAGANGAN	3. Jumlah Kelompok tani yang naik kelas	298 Klpk		18 Klpk	153,131,300	54 Klpk		0		0		18 Klpk	158,408,800	6.04	35.20	DPP
			Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan	Cakupan bina perdagangan	100%	9,853,187,500	90%	3,072,578,500	92,25%	1,912,897,500	0%	66,833,250	0	66,832,250	92,75%	3,139,410,750	92,75 %	31.86%	
			Peningkatan pengalihan dan penerimaan retribusi pasar	Realisasi penerimaan retribusi pasar	23.500 M	486,000,000	4,186 M	277,249,750	4,675 M	100,000,000	1,875 M	61,333,250	1,875 M	61,332,250	6,061 M	338,582,000	25.79 %	69.67%	
			Penyelenggaraan pendataan objek retribusi Pasar	Jumlah perizinan perpasaran yang diterbitkan	3000 izin	355,000,000	0	0	750 izin	80,000,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0%	1.55%	
			Peningkatan pelayanan kebersihan pasar	Jumlah pasar milik pemerintah daerah yang bersih	20 unit pasar	61,187,500	8 unit pasar	0	11 unit pasar	12,237,500	0	-	0	0	8 unit pasar	0	40%	0%	
			Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dari PKL di lingkungan pasar	Jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban	20 unit pasar	1,151,000,000	8 unit pasar	922,774,600	11 unit pasar	370,000,000	0	-	0	0	8 unit pasar	922,774,600	40%	80.17%	
			Pemantauan distribusi barang	Jumlah pelaku usaha formal distribusi barang	162 pelaku usaha	1,690,000,000	0	0	50 pelaku usaha	416,425,000	0	-	0	0	0	0	0%	0%	
			Pembinaan pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal	Jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan	1067 pelaku usaha	480,000,000	122 pelaku usaha	15,471,500	200 pelaku usaha	41,335,000	0	-	0	0	122 pelaku usaha	15,471,500	11.43%	3.22%	
			Penyuluhan dan pemberdayaan konsumen	Jumlah pelaku usaha formal yang diberdayakan	689 pelaku usaha	235,000,000	0	0	125 pelaku usaha	23,500,000	0	-	0	0	0	0	0%	0%	
			Tera/Tera Ulang dan pengawasan kemetrolagian	Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang	3000 unit UTTP	1,690,000,000	5729 unit UTTP	143,669,150	1620 unit UTTP	67,400,000	0	-	0	0	5729 unit UTTP	143,669,150	190.96 %	8.50%	
			Pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan	Jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan	712 pelaku usaha	890,000,000	135 pelaku usaha	146,760,000	130 pelaku usaha	152,000,000	0	-	0	0	135 pelaku usaha	146,760,000	18.96 %	16.49%	
			Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan akses pasar	149 pelaku usaha	240,000,000	0	0	26 pelaku usaha	50,000,000	0	-	0	0	0	0	0%	0%	
			Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan	100%	2,575,000,000	100%	1,566,653,500	100%	600,000,000	0	-	0	0	100%	1,566,653,500	100%	60.84%	
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kemitraan Industri Kecil dan Menengah		URUSAN PILIHAN URUSAN PERINDUSTRIAN																DPP
			Program Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina IKM	8,3%	10,695,000,000	4,3%	1,816,549,220	5,35 %	2,533,390,000	0%	116,939,500	0	116,949,500	5,35 %	1,933,498,720	64,45 %	18.08%	
			Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro dan hasil hutan	Jumlah IKM industri IKHH yang dibina	663 unit IKM	650,000,000	50 unit IKM	34,630,000	120 unit IKM	125,000,000	0	-	0	0	50 unit IKM	34,630,000	7.54%	5.33%	
			Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan	Jumlah IKM industri Ilmea yang dibina	223 unit IKM	490,000,000	11 unit IKM	24,842,500	38 unit IKM	72,100,000	0	-	0	0	11 unit IKM	24,842,500	4.93 %	5.07%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD			Peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang SDM dikembangkan	676 unit IKM	490,000,000	30 unit IKM	21,030,000	80 unit IKM	99,100,000	0	-	0	0	30 unit IKM	21,030,000	4,43 %	4,29%	INSPEKTORAT
			Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM	Jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan	448 unit IKM	590,000,000	258 unit IKM	66,165,220	80 unit IKM	117,500,000	0	-	0	0	258 unit IKM	66,165,220	57,58 %	11,21%	
			Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha menengah dengan swasta	443 unit IKM	6,325,000,000	58 unit IKM	1,366,980,800	80 unit IKM	1,500,000,000	0	35,480,000	0	35,490,000	58 unit IKM	1,402,470,800	13,09 %	22,17%	
			Promosi/pameran produk Jambi	Jumlah IKM yang ikut dalam promosi	110 unit IKM	2,150,000,000	11 unit IKM	302,900,700	16 unit IKM	619,690,000	0	81,459,500	0	81,459,500	11 unit IKM	384,360,200	10%	17,88%	
			URUSAN PENUNJANG INSPEKTORAT																
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	100%	14,533,781,000	94%	2,449,529,200	100%	2,867,345,000	20%	492,563,000	31%	492,563,000	60%	2,942,092,200	60%	20%	
			Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal	Jumlah Pengawasan Internal Secara Berkala Sesuai PKPT	2305 Laporan	7,504,450,000	430 Laporan	1,480,050,000	461 Laporan	1,461,595,000	18 Laporan	246,500,000	18 Laporan	246,500,000	448 laporan	1,726,550,000	19%	23%	
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	122 Kasus	1,310,375,000	25 kasus	237,575,000	25 Kasus	250,000,000	12 Kasus	47,675,000	12 Kasus	47,675,000	37 kasus	285,250,000	30%	22%	
			Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terselenggaranya Rapat Pengawasan Daerah	5 Kali	42,365,000	1 Kali	7,870,500	0	-	0	-	0	-	1 kali	7,870,500	20%	19%	
			Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LKJ dan Review LKPD secara Tepat Waktu	415 Laporan	1,166,011,000	83 Laporan	101,050,000	83 Laporan	225,000,000	43 Laporan	48,800,000	43 Laporan	48,800,000	126 laporan	149,850,000	30%	13%	
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan			Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintah	- Terselenggaranya FGD SPIP di OPD; - Terselenggaranya kegiatan pengawasan pungli	80 Laporan	1,230,005,000	16 Laporan	175,515,000	16 Laporan	356,755,000	3 Laporan	44,488,000	3 Laporan	44,488,000	19 laporan	220,003,000	24%	18%	BAPPEDA
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1190 Temuan	1,972,650,000	265 Temuan	345,075,000	230 Temuan	399,250,000	40 Temuan	105,100,000	40 Temuan	105,100,000	305 temuan	450,175,000	26%	23%	
			Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi	- Terlaksananya Evaluasi PMPRB; - Terselenggaranya Survey Penilaian Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi; - Jumlah Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Zona Integritas (ZI) dan Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	- 5 kali - 5 kali - 5 PD	1,307,925,000	- 1 kali - 1 kali - 0 PD	102,393,700	- 1 kali - 1 kali - 1 PD	174,745,000	0	-	0	-	- 1 kali - 1 kali - 0 PD	102,393,700	20%	8%	
			URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	21,294,680,000	100%	2,683,705,800	100%	1,978,975,000	4.05%	80,220,000	4.05%	80,220,000	104.05%	2,763,925,800	12.98%	12.98%	
	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen	7 dokumen	11,301,000,000	7 Dokumen	1,435,746,300	6 dokumen	928,500,000	-	12,000,000	-	12,000,000		1,447,746,300	12.81%	12.81%	
			Monitoring dan Evaluasi	Rapat koordinasi dan jumlah laporan	10 kali dan 3 laporan	2,294,900,000	-	-	10 kali dan 3 laporan	245,000,000	1 laporan	18,750,000	1 laporan	18,750,000	1 laporan	18,750,000	0.82%	0.82%	
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	- Terlaksananya Koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintah provinsi/pusat sub bidang infrastruktur, LH dan SDA - jumlah laporan	11 urusan dan 1 laporan	3,069,800,000	10 urusan dan 4 dokumen	551,634,500	11 urusan dan 1 laporan	251,400,000		29,450,000		29,450,000		581,084,500	18.93%	18.93%	
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Terlaksananya Koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintah provinsi/pusat sub bidang perekonomian - jumlah laporan	7 urusan, 1 laporan dan 1 dokumen	2,519,900,000	10 urusan dan 6 dokumen	410,797,000	7 urusan, 1 laporan dan 1 dokumen	176,000,000		6,000,000		6,000,000		416,797,000	16.54%	16.54%	
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Rapat koordinasi -Supervisi mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - jumlah kajian	12 kali, 2 kali dan 2 dokumen	2,109,080,000	15 urusan dan 3 dokumen	285,528,000	12 kali, 2 kali dan 2 dokumen	378,075,000		14,020,000		14,020,000		299,548,000	14.20%	14.20%	
	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	2,812,160,000	0%	-	100%	680,165,000	2.42%	16,450,000	2.42%	16,450,000	2.42%	16,450,000	0.58%	0.58%	
			Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya	- Rapat koordinasi penelitian dan pengembangan - Jumlah Kajian	10 kali dan 4 dokumen	2,354,660,000	-	-	10 kali dan 4 dokumen	588,665,000		7,650,000		7,650,000		7,650,000	0.32%	0.32%	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Rapat Koordinasi - Sosialisasi	10 kali dan 2 kali	457,500,000	-	-	10 kali dan 2 kali	91,500,000		8,800,000		8,800,000		8,800,000	1.92%	1.92%	
	Meningkatnya Kualitas dan Kelepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		URUSAN PENUNJANG KEUANGAN																BPKAD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	1. Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan 2. Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja 3. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu 4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	1. 33 OPD 2. 75% 3. 20 OPD 4. 37 OPD	2,922,041,150	40 OPD	2,359,437,536	-	-	-	-	-	-	40 OPD	2,359,437,536	100%	80.75	
				Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD		40 OPD		-	-	-	-	-	-	40 OPD	-	100%	#DIV/0!	
			Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Laporan Implementasi Peraturan Walikota Analisa Standar Belanja pada SKPD, Laporan Implementasi Peraturan Walikota Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pada SKPD	2 Laporan	81,185,250	2 Laporan	48,298,000.00	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	48,298,000	100%	59.49	
			Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Keputusan Walikota Tentang Standar harga Barang/jasa	1 Keputusan Walikota	57,727,250	1 Keputusan Walikota	51,054,500.00	-	-	-	-	-	-	1 Keputusan Walikota	51,054,500	100%	88.44	
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Peraturan Daerah	69,990,000	1 Peraturan Daerah	68,887,000.00	-	-	-	-	-	-	1 Peraturan Daerah	68,887,000	100%	98.42	
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Peraturan Kepala Daerah	135,812,000	1 Peraturan Kepala Daerah	104,371,500.00	-	-	-	-	-	-	1 Peraturan Kepala Daerah	104,371,500	100%	76.85	
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Peraturan Daerah	86,490,000	1 Peraturan Daerah	85,952,000.00	-	-	-	-	-	-	1 Peraturan Daerah	85,952,000	100%	99.38	
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Peraturan Kepala Daerah	156,081,500	1 Peraturan Kepala Daerah	127,194,350.00	-	-	-	-	-	-	1 Peraturan Kepala Daerah	127,194,350	100%	81.49	
			Pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan regional SIKD	Jumlah Sistem Keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, Pemeliharaan Aplikasi Pengelola Administrasi Keuangan	3 Aplikasi , 3 kali Pemeliharaan	358,800,000	Pendampingan 1 Tahun	209,937,050.00	-	-	-	-	-	-	Pendampingan 1 Tahun	209,937,050	100%	58.51	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah dan Laporan Hasil Evaluasi Pendapatan Daerah	4 Laporan	58,301,750	4 Laporan	30,641,100.00	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	30,641,100	100%	52.56	
				2.Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	-	75%	0	-	-	-	-	-	-	75%	-	100%	#DIV/0!	
			Pengelolaan dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah	Jumlah Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM OPD, Dokumen register Pengeluaran Keuangan Daerah	4500 Dokumen SP2D, 40 register SPP, SPM dan SP2D	155,683,000	5.808 Dokumen SP2D, 40 register SPP, SPM dan SP2D	133,726,100.00	-	-	-	-	-	-	5.808 Dokumen SP2D, 40 register SPP, SPM dan SP2D	133,726,100	100%	85.90	
			Operasional Majelis Pertimbangan TPTGR	Jumlah Penyelesaian Pembebanan kasus TPTGR	20 SK, 20 Surat Pembebanan	107,562,750	20 SK, 20 Surat Pembebanan	103,461,600.00	-	-	-	-	-	-	20 SK, 20 Surat Pembebanan	103,461,600	100%	96.19	
			Pembinaan administrasi Gaji PNSD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Gaji Perangkat Daerah yang tertib dan akurat	41 Dokumen	115,850,000	41 Dokumen	112,844,500.00	-	-	-	-	-	-	41 Dokumen	112,844,500	100%	97.41	
			Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan Penatusahaan Pengelolaa Keuangan daerah pada OPD, Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD	2 Kali Pembinaan untuk 40 OPD, 2 Dokumen	110,670,000	2 Kali Pembinaan untuk 40 OPD, 2 Dokumen	105,494,750.00	-	-	-	-	-	-	2 Kali Pembinaan untuk 40 OPD, 2 Dokumen	105,494,750	100%	95.32	
			Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah	Jumlah Terbitnya berita acara rekonsiliasi, Surat Keputusan dan Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran	144 Dokumen Berita Acara Penerimaan, 1008 Dokumen Berita Acara Pengeluaran, 17 SK	68,360,150	144 Dokumen Berita Acara Penerimaan, 1008 Dokumen Berita Acara Pengeluaran, 38 SK	68,360,000.00	-	-	-	-	-	-	144 Dokumen Berita Acara Penerimaan, 1008 Dokumen Berita Acara Pengeluaran, 38 SK	68,360,000	100%	100.00	
				3. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 OPD		20 OPD		-	-	-	-	-	-	20 OPD	-	100%	#DIV/0!	
			Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dari Penilai Brang Milik Daerah	2 Jenis Dokumen (Dokumen PM dan GB)	109,578,000	2 Jenis Dokumen (Dokumen PM dan GB)	53,869,500.00	-	-	-	-	-	-	2 Jenis Dokumen (Dokumen PM dan GB)	53,869,500	100%	49.16	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi barang Milik Daerah, Terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi Aset OPD di Lingkup Pemerintah Kota Jambi, Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Aset	1 Sosialisasi, 40 Berita Acara, 1 Kali Pemeliharaan	279,265,000	38 Berita Acara, 1 Sosialisasi, segera dilaksanakan 38 Berita Acara telah disampaikan 2 Berita Acara belum disampaikan dari awal bulan, 1 kali Pemeliharaan Aplikasi	253,185,900.00	-	-	-	-	-	-	38 Berita Acara, 1 Sosialisasi, segera dilaksanakan 38 Berita Acara telah disampaikan 2 Berita Acara belum disampaikan dari awal bulan, 1 kali Pemeliharaan Aplikasi	253,185,900	100%	90.66	
			Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Terlaksananya Penertiban Aset yang Tidak Digunakan dan Difungsikan lagi di OPD melalui Pemindahtanganan dan penghapusan BMD	10 OPD	122,910,000	11 OPD (8 OPD yang telah dilelang dan 3 OPD yang telah ditibahkan)	79,997,500.00	-	-	-	-	-	-	11 OPD (8 OPD yang telah dilelang dan 3 OPD yang telah ditibahkan)	79,997,500	100%	65.09	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Terbitnya SK Penetapan Status Barang Milik Daerah di setiap OPD Tahun, Pemasangan Plang/Papan Balas Tanah Pemerintah Kota, Terbitnya pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	40 OPD, 20 Papan Plang, 20 Sertifikat	235,835,000	7 OPD Penetapan Status, 25 Papan/Plang, 10 Sertifikat	136,133,420.00	-	-	-	-	-	-	7 OPD Penetapan Status, 25 Papan/Plang, 10 Sertifikat	136,133,420	100%	57.72	
				4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD				-	-	-	-	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperda	114,828,500	1 Ranperda	111,328,500.00	-	-	-	-	-	-	1 Ranperda	111,328,500	100%	96.95	
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperkada	87,170,000	1 Ranperkada	87,154,100.00	-	-	-	-	-	-	1 Ranperkada	87,154,100	100%	99.98	
			Koordinasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	4 Laporan Triwulan	20,420,000	4 Laporan Triwulan	18,060,750.00	-	-	-	-	-	-	4 Laporan Triwulan	18,060,750	100%	88.45	
			Penyusunan laporan realisasi penerimaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Jambi	12 Laporan Bulanan	15,700,000	12 Laporan Bulanan	15,668,450.00	-	-	-	-	-	-	12 Laporan Bulanan	15,668,450	100%	99.80	
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan Semesteran, 1 LKPD, 12 LRA Pemerintah Daerah, 12 LO	87,589,000	2 Laporan Semesteran, 1 LKPD, 12 LRA Pemerintah Daerah, 12 LO	76,716,266.00	-	-	-	-	-	-	2 Laporan Semesteran, 1 LKPD, 12 LRA Pemerintah Daerah, 12 LO	76,716,266	100%	87.59	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Aset ke OPD, Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	3 kali Pembinaan untuk 40 OPD, 1 Kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 37 Neraca OPD	250,182,000	3 kali Pembinaan untuk 40 OPD, 1 Kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 37 Neraca OPD, 1 Aplikasi	241,429,200.00	-	-	-	-	-	-	3 kali Pembinaan untuk 40 OPD, 1 Kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 37 Neraca OPD, 1 Aplikasi	241,429,200	100%	96.50	
			Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Pendapatan dan Belanja ke OPD, LRA, LO SKPD, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	1 kali pembinaan untuk 40 OPD, 1 Kali Pembinaan untuk 25 SMP, 42 LRA OPD, 37 LO OPD	36,050,000	1 kali pembinaan untuk 40 OPD, 1 kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 1 Kali Pembinaan untuk 25 SMP, 42 LRA OPD, 38 LO OPD	35,671,500.00	-	-	-	-	-	-	1 kali pembinaan untuk 40 OPD, 1 kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 1 Kali Pembinaan untuk 25 SMP, 42 LRA OPD, 38 LO OPD	35,671,500	100%	98.95	
			Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	1. Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan 2. Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja 3. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu 4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	1. 40 OPD 2. 100% 3. 40 OPD 4. 40 OPD dan 22 BLUD	15,059,243,000	-	-	1. 35 OPD 2. 80% 3. 20 OPD 4. 40 OPD dan 11 BLUD	7,940,881,550	1. 35 OPD 2. 80% 3. 20 OPD 4. 40 OPD dan 11 BLUD	222,047,500	1. 35 OPD 2. 80% 3. 20 OPD 4. 40 OPD dan 11 BLUD	222,047,500	1. 35 OPD 2. 80% 3. 20 OPD 4. 40 OPD dan 11 BLUD	222,047,500	25%	1.47	
				1. Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	40 OPD		-	-	35 OPD		10 OPD				10 OPD	-	25%	#DIV/0!	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Regional	Jumlah Peraturan Walikota Analisis Standar Belanja dan Laporan implementasi pada Perangkat Daerah, Laporan Implementasi Peraturan Walikota Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pada Perangkat Daerah.Keputusan Walikota tentang Penetapan Standar Harga Barang/Jasa Pemkot Jambi	2 Laporan dan 1 keputusan Walikota	1,157,650,000	-	-	- 1 Perwal ASB, - 1 Laporan - 1 Keputusan Walikota	267,816,875	- 1 Perwal ASB,	55,655,500		55,655,500	- 1 Perwal ASB,	55,655,500	25%	4.81	
			Penyusunan Ranperda dan Ranperkada APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Perda , 1 Perkada	871,208,000	-	-	- 1 Perda , - 1 Perkada APBD	1,706,911,900	-	39,448,000		39,448,000	-	39,448,000	25%	4.53	
			Penyusunan Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda, 1 perkada Perubahan APBD	970,286,000	-	-	- 1 Perda, - 1 perkada Perubahan APBD	230,442,925	-	-		-	-	-	25%	0.00	
			Monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah dan Laporan Hasil Evaluasi Pendapatan Daerah	4 laporan	353,207,000	-	-	4 Laporan	3,083,886,600	1 Laporan	-		-	1 Laporan	-	25%	0.00	
			Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatusahaan dan pertanggungjawaban APBD.	1 Aplikasi	1,643,200,000	-	-	1 Aplikasi	295,260,000	-	-		-	-	-	25%	0.00	
				2. Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatusahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	100%		-	-	80%		20%				20%	-	25%	#DIV/0!	
			Pengelolaan dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah	Jumlah Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM OPD, Dokumen register Pengeluaran Keuangan Daerah	4500 Dokumen SP2D, 480 Register SPP, SPM, SP2D	736,000,000	-	-	- 4500 Dokumen SP2D, - 480 Register SPP, SPM, SP2D	189,050,000	- 525 Dokumen SP2D, - 120 Register SPP, SPM, SP2D	41,150,000		41,150,000	- 525 Dokumen SP2D, - 120 Register SPP, SPM, SP2D	41,150,000	25%	5.59	
			Operasional Majelis Pertimbangan TGR	Jumlah Penyelesaian Pembebanan kasus TGR Jumlah Surat Keputusan	25 Kasus TGR, 25 Surat Pembebanan	591,750,000	-	-	- 22 Kasus - 22 SK	121,362,500	- 5 Kasus - 5 SK	-		-	- 5 Kasus - 5 SK	-	25%	0.00	
			Pembinaan Penatusahaan Bendahara	Jumlah Pembinaan Penatusahaan Keuangan Daerah, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	2 Kali Pembinaan, 40 OPD, 2 Dokumen Laporan	976,329,000	-	-	- 2 Kali - 2 Dokumen	187,644,000	-	32,800,000		32,800,000	-	32,800,000	25%	3.36	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah	Jumlah Terbitnya berita acara rekonsiliasi, Surat Keputusan dan Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran	144 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan, 480 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi DTHIRTH, 480 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi SP2D, 17 Surat Keputusan	396,000,000	-	-	- 144 Dokumen - 480 Dokumen - 480 Dokumen - 17 SK	82,887,500	- 36 Dokumen - 120 Dokumen - 120 Dokumen - 10 SK	-	-	-	- 36 Dokumen - 120 Dokumen - 120 Dokumen - 10 SK	-	25%	0.00	
			Penatausahaan Barang Milik daerah	3. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	40 OPD		-	-	20 OPD		5 OPD				5 OPD	-	25%	#DIV/0!	
			Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan barang Milik Daerah, Terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi Aset 40 OPD di Lingkup Pemerintah Kota Jambi tepat waktu (akhir Februari Selesai), Laporan Aset LBMD dan DBMD OPD telah berbasis Aplikasi, Pembinaan Terhadap Pengurus Barang Sekolah SD dan SMP untuk Laporan Aset yang bersumber dari Dan BOS dan Pengurus Barang BLUD	1 Kali sosialisasi ,40 Berita Acara	1,833,613,000	-	-	- 1 Kali sosialisasi , - 40 Berita Acara, - Laporan aset LBMD dan DBMD 40 OPD , - Pembinaan Pelaporan aset untuk SD dan SMP dan Puskesmas	314,800,000	- 40 Berita Acara, - Laporan aset LBMD dan DBMD 40 OPD , - Pembinaan Pelaporan aset untuk SD dan SMP dan Puskesmas	-	-	-	- 40 Berita Acara, - Laporan aset LBMD dan DBMD 40 OPD , - Pembinaan Pelaporan aset untuk SD dan SMP dan Puskesmas	-	25%	0.00	
			Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Terlaksananya Penertiban Aset yang Tidak Digunakan dan Difungsikan lagi di OPD melalui Pemindahtanganan (Hibah, Penjualan, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal) dan Penghapusan BMD, Terbitnya Perda/Perwal/SOP tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, Buku Hasil Penilaian BMD, Melaksanakan Pemusnahan untuk Aset Peralatan dan Mesin	10 OPD untuk Penertiban Aset , Penerbitan Buku Hasil Penilaian Tanah, PM, GB dan JIJ, Pemusnahan PM untuk 10 OPD dan 5 Puskesmas	1,000,000,000	-	-	- 10 OPD untuk Penertiban Aset , - Penerbitan Buku Hasil Penilaian Tanah, PM, GB dan JIJ, Pemusnahan PM untuk 10 OPD dan 5 Puskesmas	197,542,250	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	25%	0.25		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Terbitnya SK Penetapan Status Barang Milik Daerah disetiap OPD pertahun, Pemsangan Plang/papan Batas tanah Pemerintah Daerah, Terbentuknya Database Tanah dengan Spesifikasi Aamat, Luas, Penggunaan dan Status Sertifikatnya sesuai Aplikasi, Sosialisasi Aplikasi Tanah dapat Terlaksana	Penerbitan SK Penetapan Status Pengguna 40 OPD, Pemsangan 50 Papan Plang, Penerbitan 80 Sertifikat ,	900,000,000	-	-	- Penerbitan SK Penetapan Status Pengguna 40 OPD, - Pemsangan 50 Papan Plang, Penerbitan 80 Sertifikat , - Terciptanya Aplikasi Database Tanah, Tersosialisasinya Aplikasi Tanah	493,750,000	-	29,194,000	-	29,194,000	-	29,194,000	-	29,194,000	-	25%	3.24	
				4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	40 OPD dan 22 BLUD		-	-	4. 40 OPD dan 11 BLUD		4. 40 OPD dan 11 BLUD				4. 40 OPD dan 11 BLUD		-	25%	#DIV/0!			
			Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan KDH, dan Peraturan KDH.	1 Ranperda, 1 Perda, 1 Ranperkada, 1 Perkada	920,000,000	-	-	1) 1 Ranperda, 2) 1 Perda, 3) 1 Ranperkada, dan 4) 1 Perkada.	199,500,000	-	-	-	-	-	-	-	25%	0.00			
			Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Kota Jambi.	1) 1 LKPD (Un Reviu, Un Audited, Audited), 2) 12 LRA Bulanan, 2 LRA Triwulanan dan 2 LRA Semesteran, 3) 24 Laporan Simpatik (Posisi Kas dan Rencana Belanja) Bulanan, 4) 180 Laporan DAK Fisik 3 Tahap, 5) 10 Laporan DAK Non Fisik Semesteran dan Tahunan, 6) 2 Laporan DID 2 Tahap, 7) 4 Laporan DAU Tambahan Tahapan dan Semesteran, 8) 12 LKT Bulanan, 9) 4 LRT Triwulanan, dan 10) 1 Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	985,000,000	-	-	1) 1 LKPD (Un Reviu, Un Audited, Audited), 2) 12 LRA Bulanan, 2 LRA Triwulanan dan 2 LRA Semesteran, 3) 24 Laporan Simpatik (Posisi Kas dan Rencana Belanja) Bulanan, 4) 180 Laporan DAK Fisik 3 Tahap, 5) 10 Laporan DAK Non Fisik Semesteran dan Tahunan, 6) 2 Laporan DID 2 Tahap, 7) 4 Laporan DAU Tambahan Tahapan dan Semesteran, 8) 12 LKT Bulanan, 9) 4 LRT Triwulanan, dan 10) 1 Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	186,066,750	3 LRA Bulanan, 1 LRA Triwulana	1,950,000	1,950,000	3 LRA Bulanan, 1 LRA Triwulan	1,950,000.00	25%	0.20					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah			Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Aset ke OPD, Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	3 kali Pembinaan untuk 40 OPD , 1 Kali Pembinaan untuk 22 BLUD, Pembinaan Penerapan Aplikasi Persediaan.	1,175,000,000	-	-	- 3 kali pembinaan untuk 40 OPD 1 Kali Pembinaan untuk 21 BLUD, - 40 Penyusutan Aset tetap dan Amortisasi OPD, 2 Kali Supervisi Pendampingan Penyusunan Neraca OPD, Pemeliharaan Aplikasi e-SILOLA	278,924,350	- 1 kali pembinaa n untuk 40 OPD 1 Kali Pembinaa n untuk 21 BLUD, - 40 Penyusuta n Aset tetap dan Amortisasi OPD,	9,600,000		9,600,000	- 1 kali pembinaan untuk 40 OPD 1 Kali Pembinaan untuk 21 BLUD, - 40 Penyusutan Aset tetap dan Amortisasi OPD,	-	25%	0%	BPPRD	
			Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Pendapatan dan Belanja ke OPD, LRA, LO SKPD, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan Realisasi Dana BOS, dan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Bulanan.	1 kali pembinaan untuk 42 OPD, 1 Kali Pembinaan untuk 22 BLUD, 1 kali Pembinaan untuk 37 SD, 42 LRA OPD, 42 LO OPD, 22 Laporan Keuangan BLUD sesuai SAK, 42Rekon Pengeluaran Definitif Bulanan,	550,000,000	-	-	1) 1 Kali 2) 1 Kali 3) 1 Kali 4) 42 Laporan 5) 42 Laporan 6) 11 Laporan 7) 42 Berita Acara Rekon	105,035,900	1) 1 Kali 2) 1 Kali 3) 1 Kali 4) 42 Laporan 5) 42 Laporan 6) 11 Laporan 7) 42 Berita Acara Rekon	9,750,000		9,750,000	1) 1 Kali 2) 1 Kali 3) 1 Kali 4) 42 Laporan 5) 42 Laporan 6) 11 Laporan 7) 42 Berita Acara Rekon	-	25%	0%		
			URUSAN PENUNJANG KEUANGAN																	
			Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	9%	17,127,028	11.20%	2,120,188	9%	3,256,735	3.30%	136,894	3.3%	#REF!	14.50%	2,257,082	80.56%	13.2%		
				Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%		105.70%		100%		22.80%		22.8%		128.50%		64.25%			
				Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	70%		62%		63%				0.0%		62.00%		88.57%			
				Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	30%		6%		15%				0.0%		6.00%		20.00%			
				Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi Pajak Daerah,	30 Jenis	3,496,500	6	667,476.3	6	680,000	1	18,216	1	18,216	7	685,692.30	23.33%		19.61%
				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan dan penilaian pajak daerah, Jumlah	15 Dokumen 2000 Kali 40000 Berkas	2,452,880	3 400 8000	1,065,967	3 400 8000	1,188,410	0 100 2698	11,100	0 100 2698	11,100	500 10698	1,077,067.00	25.00%		43.91%
				Pengembangan sistem informasi pajak daerah	Penyediaan paket pengembangan dan pemeliharaan sistem informas pajak daerah	12 Paket	2,873,500	2	386,745	2	287,000		47,965	0	47,965	2	434,710.00	16.67%		15.13%
			Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan pajak dan retribusi daerah serta statistik	96 Laporan 4 Dokumen	366,000		0	24 1	72,250	6 0	2,250	6 0	2,250	6 0	2,250.00	6.25%	0.61%		
			Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Evaluasi Penerimaan Pajak serta evaluasi	48 Kali 4 Dokumen	845,148		0	12 1	42,200	4 0	288	4 0	288	4 0	287.50	8.33%	0.03%		
			Pengendalian dan Penagihan	1.Terlaksananya pemeriksaan,	640 Kali	7,093,000			160		40	40	57,075	40	57,075.00	6.25%	0.80%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pajak Daerah	penertiban, Penindakan serta pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	1200 Berkas Keputusan 4000 Surat Tagihan				300 1000	986.875	15 750	57,075	15 750		15 750		1,25% 18,75%		
	Meningkatnya kualitas penataan Aparatur Sipil Negara		URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan			98.64%	349,534,084											
				Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan			98.64%	349,534,084											
			Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kompetensi jabatan			2	325,960,584											
				Terpenuhinya kebutuhan jabatan administrasi sesuai dengan kompetensi jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Jambi			1												
	Terciptanya pelayanan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu		Seleksi Penerimaan CPNS	Penyusunan Formasi dan Seleksi Penerimaan CPNS			146	23,573,500											
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu			98.56%	100,760,000											
			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu			98.56%	100,760,000											
			Pelayanan dan Pembinaan CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak	Persentase Administrasi Pangkat PNS selesai tepat waktu			95.90%	100,760,000											
				Persentase ASN yang memperoleh SK Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu			100%												
				Persentase Administrasi Pensiun PNS selesai tepat waktu			99.77%												
	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara			Persentase Penurunan Hukuman Disiplin			0.56%	196,000,000											
				Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mendapatkan Nilai Baik			98.46%	155,420,100											
			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan			35%	196,000,000											
			Pembinaan Korpri dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah ASN Kota Jambi yang menjadi duta atlit Korpri			0	196,000,000											
				Jumlah ASN yang diambil sumpah/ Janji PNS			209												
				Jumlah ASN yang konseling			20												
				Jumlah ASN yang dilakukan Pembinaan Mental			200												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah ASN yang mengikuti workshop pembekalan ASN yang akan memasuki usia pensiun			40												
			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penilaian Kinerja ASN			67.91%	155,420,100											
			Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS dan Pemberian penghargaan satyalencana karya satya dan masa kerja pegawai serta Pemantauan Evaluasi SKP	Terlaksananya Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin			35%	155,420,100											
				Terlaksananya Penegakan atas pelanggaran kode etik/ perilaku ASN			4												
				Terlaksananya penyampaian laporan kinerja ASN			69.71%												
				Terlaksananya Pemberian penghargaan satya lencana karya satya			405												
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pembinaan disiplin ASN			40												
				Persentase Pengembangan Kompetensi			45.08%	2,607,615,100											
			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi			45.08%	2,607,615,100											
			Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi daerah	persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional			29.91%	183,903,500											
			Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			60.25%	2,423,711,600											
				persentase CPNS yang telah mengikuti diklat Prajabatan			100%												
				Persentase Pendidikan Formal Terakhir yang telah dicapai			12.36%	-											
			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN			12.36%	-											
			Pendidikan dan pelatihan pengkaderan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0	-											
				Jumlah ASN yang memperoleh tugas belajar			4												
				Jumlah ASN yang memperoleh izin belajar			147												
	Meningkatnya kualitas penataan Aparatur Sipil Negara						98.54%	349,534,084	96%		98.20%								
			Program : Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	100%	3,800,000,000			96%	1,578,520,000	98.20%	527,610,160	98.20%	#REF!	98.20%	#REF!	98%	#REF!	
			Penyusunan Kebutuhan dan Seleksi Penerimaan Calon ASN	Formasi ASN yang terisi berdasarkan formasi yang ditetapkan	100%	1,000,000,000			100%	1,037,400,000	70%	527,610,160	70%	#REF!	70%	#REF!	70%	#REF!	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Terciptanya pelayanan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu			Pembinaan Karir ASN	Seleksi Formasi ASN yang terisi berdasarkan formasi yang ditetapkan	5 Kali				1 Kali		70%		70%		70%		70%		
				Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kompetensi jabatan	100%	2,800,000,000			100%	541,120,000	88%		88%	#REF!	88.00%	#REF!	88%	#REF!	
				Jumlah Jabatan Administrasi sesuai dengan kompetensi jabatan	100%				100%		98%		98%		98.00%		98%		
				Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan dan kompetensi	100%				100%		33%		33%		33.00%		33%		
							98.56%	100,760,000	89%		5.9%		5.9%	#REF!	104.46%	#REF!			
			Program : Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	95%	3,917,440,000			89%	283,105,500	5.90%	-	5.9%	#REF!	5.90%	#REF!	6%	#REF!	
				Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS	600 orang	210,000,000			150 orang	48,505,000	0%		0%	#REF!	0.00%	#REF!	0%	#REF!	
				Pelayanan Administrasi pangkat PNS	95%	140,000,000			89%	60,565,500	0%		0.0%	#REF!	0.00%	#REF!	0%	#REF!	
				SK pensiun PNS	95%				89%		5.90%		5.9%		5.90%		6.2%		
				Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai	1300 orang	500,000,000			250 Orang	174,035,000			0	#REF!	0.00%	#REF!	0%	#REF!	
				Jumlah ASN yang mengikuti Workshop Pembekalan ASN yang akan memasuki masa Pensiun	360 ASN				80 ASN				0.0%	#REF!	0.00%	#REF!	0%		
				Persentase ASN yang memperoleh SK Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu	100%				100%		25%		25.0%	#REF!	25.00%	#REF!	25%		
				Penghargaan OPD pengelola kepegawaian terbaik					6 OPD				0	#REF!	0.00%	#REF!			
				Data ASN yang lengkap dan akurat	100%	3,067,440,000			80%		72%		72%	#REF!	72%	#REF!	72%	#REF!	
				Supervisi Database Kepegawaian	38 OPD				38 OPD				0		0.00%		0%		
				Sistem aplikasi layanan kepegawaian online	5 aplikasi / Tahun				5 aplikasi		5		5		5		100%		
				sosialisasi peraturan dan rakor kepegawaian	15 kali				3 kali				0		0.00%		0%		
				Penataan arsip kepegawaian	100%		0.56%	196,000,000	70%		62%		62%		62.00%		62%		
Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara							0.56%	196,000,000	1.11%		0%		0%	-	0.56%	196,000,000			
	Program : Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan	100%	2,301,812,000	98.46%	155,420,100	85%		1.31%		1.31%	-	99.77%	155,420,100	0%	0%			
							83%	379,790,000	0%	-	0%	-	0.00%	-	0%	0%			
	Pembinaan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Spritual	1000 orang	2,301,812,000					100 ASN	379,790,000			0	-	0.00%	-	0%	0%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN			Program : Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mendapat layanan konseling	85 orang				20 ASN				0	-	0.00%		0%		
				Jumlah ASN yang diambil Sumpah / Janji PNS	639 orang				239 ASN		239		239	-		239	37%		
				Jumlah ASN Kota Jambi yang menjadi duta atlit Korpri ke Pekan Olah raga Korpri Tk. Provinsi	255 ASN				30 ASN				0	-	0.00%		0%		
				Penegakan atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN	20 Dok				4 Dok				0	-	0.00%		0%		
				Supervisi (Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Asistensi Pembinaan Pegawai)	39 OPD				39 OPD				0	-	0.00%		0%		
				Persentase Penilaian Kinerja ASN	87%	1,800,000,000			87%	48,185,000	1.31%	-	1.31%	-	1.31%	-	2%	0%	
				Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	100%	1,800,000,000			83%	48,185,000	30%		30%	-	30.00%	-	30%	0%	
				Supervisi (Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Asistensi Disiplin dan Kinerja Pegawai)	38 OPD				38 OPD		5		5	-	5 OPD		13%		
				Laporan SKP dan P2KP	87%		45.08%	2,607,615,100	87%		1.31%		1.31%	-	1.31%		2%		
									48%		46.76%		46.76%	-	91.84%	2,607,615,100			
							12.36%		40%		20.34%		20.34%	-	32.70%	-			
				Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	67%	10,648,596,000			46%	1,944,560,250	40%	46,076,850	40.00%	46,076,850	40.00%	46,076,850	60%	0%	
				ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional	46%	1,900,000,000			31%	325,960,000	30.27%	46,076,850	30.27%	46,076,850	30.27%	46,076,850	66%	2%	
				Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	80%	3,724,596,000			65%	946,010,250			0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	
				Jumlah CPNS yang mengikuti Latsar	626 CPNS	3,704,000,000			146 CPNS	342,590,000			0	-	0.00%	-	0%	0%	
				ASN yang mengikuti kompetensi dan potensi	30%	1,320,000,000			12%	330,000,000			0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	
				Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN	100%	1,396,000,000			27%	284,000,000	23%	-	23.00%	-	23.00%	-	23%	0%	
URUSAN PENDUDUKAN SEKRETARIAT DAERAH			Pendidikan dan pelatihan pengkaderan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	1,396,000,000			2 Orang	284,000,000			0	-	0.00%	-	0.00%	0%	
				Jumlah ASN yang memperoleh tugas belajar	74 Orang				30 Orang				0	-	0.00%		0%		
				Jumlah ASN yang memperoleh izin belajar	590 Orang				30 Orang		42 orang		42 orang	-	42 orang		7.1%		
																			SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang pemerintahan, Humas, Hukum dan Kerjasama		Program Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan (2019)																
			Kegiatan Penilaian aparatur teladan/berprestasi (2019)	Penilaian aparatur teladan/berprestasi dalam kota jambi tahun 2019 Terlaksananya rakor camat dan lurah Terciptanya tertib administrasi bagi aparatur kecamatan dan kelurahan dalam kota	11 kecamatan		91%	159,891,000											
			Kegiatan Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan (2019)	Rakor Camat dan Lurah se-Kota Jambi Tahun 2019 Pembinaan dan monitoring administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	2 semester rakormcamat dan lurah 11 kecamatan dan 62 kelurahan dalam kota		91%	562,157,400											
			Kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (2019)	Monitoring evaluasi PATEN, optimalisasi PATEN	11 kecamatan dalam kota jambi		71%	85,050,637											
			Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian (2019)	Penataan batas wilayah administrasi Pengadaan tanah Pendataan nama unsur rupa bumi	30 titik 10 hektar 20 penamaan unsur rupa bumi		100%	9,628,587,980											
			Program Penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan (2020)	Penyelesaian sengketa tanah Ketepatan waktu Penyampaian LPPD Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	10 pensil 100% 32% 11 Kec				48% 16% 6 Kec										
			Kegiatan Pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan (2020)	Jumlah kecamatan berkinerja baik Jumlah kelurahan yang dilakukan pembinaan dan monitoring administrasi pemerintah kelurahan	11 kecamatan 62 Kelurahan	1,450,000,000			3 Kecamatan 10 Kelurahan			12,555,000							
			Kegiatan Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah (2020)	Jumlah Tersusunnya dokumen LPPD Pemerintah Kota Jambi	1 Dokumen	650,000,000			1 Dokumen			30,825,000							
			Kegiatan Pengadaan tanah (2020)	Jumlah bidang tanah diadakan	11 bidang	17,000,000,000			5 bidang			20,135,000							
			Kegiatan Fasilitasi percepatan tapal batas wilayah (2020)	Jumlah batas wilayah administrasi yang tertata	13 Kelurahan	1,235,267,000			10 kelurahan			3,500,000							
			Program Peningkatan Kerjasama Daerah (2019-2020)	Persentase Fasilitasi kerjasama antar daerah dan daerah lainnya	80%				100.00%										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti	100%				76.92%										
			Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri (2019-2020)	Jumlah kegiatan fasilitas kerjasama Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan dengan lembaga di luar negeri yang dilaksanakan	1 Kegiatan fasilitas kerja sama luar negeri	268,375,000	80%	170,444,500	2 fasilitas kerja sama luar negeri			90,824,300							
			Kegiatan Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama (2019-2020)	Jumlah tersusunnya dokumen kerjasama	1 Dokumen	306,051,000	91%	220,815,100	1 Dokumen			22,688,000							
			Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri (2019-2020)	Jumlah kerjasama baik dengan antar instansi, antar pemerintah daerah maupun dengan pihak swasta yang dilaksanakan	2 Kerja sama	340,345,000	93%	250,101,300	10 fasilitas kerja sama Dalam Negeri			102,221,500							
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Perkara (2019-2020)	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%				20%										
				Persentase Penyelesaian Perkara	27.27%				100%										
			Kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan (2019-2020)	Jumlah pertimbangan hukum	15 Pertimbangan	665,461,000	93%	681,140,400	15 Pertimbangan			75,596,250							
				Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum	10 Kali				10 kali										
				Jumlah tersusunnya Laporan RANHAM	4 Laporan				4 Laporan										
				Jumlah pelaksanaan FGD	6 Kali				6 Kali										
				Jumlah penyelesaian perkara	3 Perkara				3 Perkara										
			Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyusunan Perda	12 Peraturan Daerah	208,400,000	95%	194,340,400	7 Peraturan Daerah			39,619,800							
				Jumlah penyusunan Perwal	18 Peraturan Walikota				10 Peraturan Walikota										
				Jumlah penelitian dan pengkoreksian SK Walikota	139 Surat Keputusan				200 Keputusan Walikota										
			Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (2019-2020)	Jumlah pengelolaan JDIIH	-	362,000,000	93%	337,465,000	Berita Daerah dan Lembaran Daerah			62,881,000							
				Jumlah sosialisasi produk hukum	16 Kali				16 Kali										
				Jumlah pengolahan arsip Bagian Hukum	-				1 Tahun										
				Jumlah publikasi produk hukum	4 Kali				4 Kali										
				Jumlah Pendokumentasian SK Walikota	450 SK				430 SK										
			Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (2019)	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah															
			Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (2019)	Terlaksananya publikasi pembangunan pemerintah daerah	Publikasi media masa		100%	7,359,333,785											
				Terlaksananya publikasi media cetak	1000 kali														
				Terlaksananya publikasi media elektronik	1000 kali terbit														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ekonomi, administrasi pembangunan dan kesra			Kegiatan Pengembangan data informasi dan komunikasi sosial	Terlaksananya publikasi media luar ruang	1 paket														
				Cetak foto kepala daerah	1 paket														
				Tersedianya peralatan pendukung kerja (komputer/PC)	2 unit														
				Tersedianya kamera	1 unit														
				Tersedianya handycam	1 unit														
				Tersedianya perlengkapan kamera dan studio	1 unit														
				Tersedianya perlengkapan kerja (komputer notebook)	2 unit														
				Tersedianya perlengkapan kerja (printer)	1 unit														
				Tersedianya perlengkapan komputer (hardisk external)	5 unit														
				Tersedianya media informasi penyelenggaraan pemerintah dan	16 media massa kota		100%	1,236,694,000											
				Tersediannya surat kabar/majalah	1000 buku MKJ														
				Tersediannya majalah kota jambi	3,750 kalender dinding														
			Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2020)	Tersedianya kalender	400 kalender duduk				72.23%										
				Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	76.19%														
				Kegiatan Publikasi dan kerjasama pengelolaan informasi daerah (2020)	Jumlah publikasi media cetak	4,977,539,000			Media cetak 30			735,709,000							
					Jumlah publikasi media elektronik				Media elektronik 36										
					Jumlah publikasi media luar ruang				Media luar ruang 3 jenis										
				Kegiatan Pengembangan an data dan informasi komunikasi sosial (2020)	Jumlah media informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang disediakan	1,500,000,000			Koran (10.000 Eks), Tabloid (1000 Eks), Majalah (1000 Eks), Pamflet (200 Eks), Kalender (3500 Eks)			57,603,952							
				Kegiatan Peliputan dan dokumentasi pemerintah daerah (2020)	Jumlah Kegiatan yang diliput dan didokumentasi	500,000,000			700 Kegiatan			5,450,000							
					Jumlah Release yang dibuat				300 Kegiatan										
					Jumlah materi dalam bentuk video dan audio visual				350 Kegiatan										
				Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik (2019)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi CSR di Kota Jambi		67%	166,969,330											
					Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum CSR														
					Terlaksananya Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi														
			Kegiatan Pembinaan, pemantauan penyelenggaraan kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat (KUPEM) (2019)	Terlaksananya rapat/saserahan FDEP	2 kali		90%	223,889,460											
				Rakor bidang perekonomian	2 kali														
				Sosialisasi ekonomi kerakyatan	2 kali														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pengendalian produksi dan distribusi (2019)	Rapat koordinasi KUEM Terlaksananya rakor perekonomian Terlaksananya pengendalian pada pedagang bahan pokok bersubsidi Terlaksananya penyuluhan ketahanan energi dan perlindungan konsumen	2 kali 4 kali 3 kali 4 kali		96%	287,189,340											
			Kegiatan Penataan Sistem Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah (2019)	Fasilitas Penerapan SP dan SOP	100%		100%	338,638,700											
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (2019)	Terlaksananya survey IKM	100%		92%	170,807,197											
			Program Peningkatan Koordinasi Fasilitasi Monitoring bidang Perekonomian (2020)	Persentase tindakan lanjut Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monitoring Bidang Perekonomian	75%				75%										
			Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, CSR dan BUD (2020)	Terlaksananya inventarisasi data pelaku usaha yang berkontribusi dalam program CSR	8 Pelaku Usaha	280,000,000			5 Pelaku Usaha			10,360,000							
				Jumlah sosialisasi CSR Jumlah seleksi/pengangkatan kembali dan pemberhentian Dewan Pengawas dan dan Direksi PDAM Tirta Mayang	1 Kali 1 kali				1 Kali 1 Kali										
			Kegiatan Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan sarana dan prasarana ekonomi (2020)	Jumlah rapat koordinasi forum pengembangan ekonomi daerah	2 Kali	295,000,000			2 Kali			17,230,000							
				Jumlah rapat fasilitasi dan koordinasi dibidang perekonomian antar instansi di lingkup pemerintah Kota Jambi	2 kali				2 kali										
				Jumlah sosialisasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	2 kali				2 kali										
				Jumlah koordinasi dan pembinaan penyaluran kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat	1 kali				1 kali										
			Kegiatan Pengendalian Produksi dan Distribusi (2020)	Jumlah rakor perekonomian Jumlah pengendalian pelaku barang bersubsidi Jumlah penyuluhan ketahanan energi	3 Kali 3 Kali 4 Kali	323,582,000			3 Kali 3 Kali 4 Kali			29,310,000							
			Program Pembinaan dan Fasilitasi bagi organisasi dan kegiatan keagamaan (2019)	Persentase tindakan lanjut Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	100%														
			Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kualitas Umat Beragama (2019)	Jumlah MTQ tingkat kota jambi Jumlah festival anak sholeh tingkat kota jambi dan provinsi jambi	1 kali kegiatan 1 kali kegiatan		96%	8,335,824,450											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah pelaksanaan TC Kafilah MTQ untuk Provinsi Jambi	6 kali kegiatan														
				Kepesertaan MTQ tingkat provinsi jambi	1 kali kegiatan														
				Jumlah safari ramadhan 1440 H	11 masjid														
				Jumlah pelaksanaan pengiriman TPHD/TKHD kota jambi	11 masjid														
				Jumlah pemberian Insentif Petugas Syara', Ponpes, Diniyah Taklimiyah dan Tenaga Pengajar Pengajian Keagamaan (TPPK) Kota Jambi	Petugas syara' 396 orang, guru ponpes 900, TPPK 55 orang														
				Pengajian mingguan rutin di rumah dinas walikota jambi dan wakil walikota jambi	22 kali kegiatan														
				kegiatan keagamaan PHBI festival muharram 1441 H	5 kali kegiatan 1 kali kegiatan														
				Palatihan guru Pami dalam kota jambi	200 orang x 3 kali kegiatan														
			Kegiatan Kesejahteraan dan Jaminan Kesejahteraan Aparatur (2019)	Terlaksananya rapat koordinasi dalam kota jambi	1 kali kegiatan		95%	190,395,000											
				Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan dalam kota jambi	1 kali kegiatan														
			Kegiatan Peningkatan Peran Fungsi Pemuda dan Masyarakat (2019)	penilaian LSS	1 kali kegiatan		88%	176,112,500											
				Terlaksananya rapat koordinasi kepemudaan dalam kota	1 kali														
				Terlaksananya rapat koordinasi penguatan kebijakan penanganan narkoba serta, HIV dan AIDS	1 kali														
				Terlaksananya evaluasi kepemudaan dan narkoba serta HIV dan AIDS	2 kali														
				Terlaksananya senam kesegaran jasmani di lingkungan sekretariat daerah kota jambi	12 kali														
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan dan Kelembagaan Keagamaan (2020)	Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	100%				75%										
			Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan (2020)	Jumlah pelaksanaan TC Kafilah MTQ untuk Provinsi Jambi	1 Kali	9,501,397,000			1 Kali		1,871,645,000								
				Jumlah pelaksanaan MTQ Kota Jambi	1 Kali				1 Kali										
				Jumlah pelaksanaan Kepesertaan pada MTQ tingkat Provinsi Jambi	1 Kali				1 Kali										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah pelaksanaan FASI tingkat Kota maupun Provinsi Jambi	1 Kali				1 Kali										
				Jumlah Kegiatan Keagamaan (PHBI) Kota Jambi	5 Kali				5 Kali										
				Jumlah Pengiriman TPHDTKHD Kota Jambi	3 Orang				3 Orang										
				Jumlah Pengajian Rutin di Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Jambi	22 Kali				22 Kali										
				Jumlah Festival Muharam Kota Jambi	1 Kali				1 Kali										
				Jumlah pemberian Insentif Petugas Syara', Ponpes, Diniyah Taklimiyah dan Tenaga Pengajar Pengajian Keagamaan (TPPK) Kota Jambi	396 Petugas Syara, 900 Guru Ponpes, 550 Orang TPPK				396 Petugas Syara, 900 Guru Ponpes, 550 Orang TPPK										
				Jumlah pelaksanaan Safari Ramadhan	11 Kali				11 Kali										
				Jumlah Pelatihan Guru PAMI dalam Kota Jambi	200 orang x 12 kali kegiatan				200 orang x 12 kali kegiatan										
			Kegiatan Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Kesejahteraan (2020)	Jumlah Rakor Kesejahteraan	1 Kali	292,820,000			1 Kali										
				Jumlah pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan	1 kali				1 Kali										
			Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga (2020)	JumlahRakor Kepemudaan dalam Kota Jambi	1 Kali	292,820,000			1 Kali										
				Jumlah pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Kepemudaan	2 Kali				2 Kali										
				Jumlah pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani Di lingkungan Setda Kota Jambi	12 Kali				12 Kali										
				Jumlah Rakor Narkoba HIV & AIDS	1 kali				1 Kali										
			Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan (2019)	Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	69.06%														
				Persentase tertib Administrasi Pembangunan	100%														
			Kegiatan Pengendalian Pembangunan (2019)	Terlaksananya pengendalian fisik program pembangunan	30 kali		92%	184,943,750											
				Terlaksananya workshop pengadaan barang/jasa pemerintah	80 orang														
				Terlaksananya workshop advokasi hukum	80 orang														
				Terlaksananya koordinasi penyusunan standar LPSE	4 standar dan 11 standar														
			Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan (2019)	Tersedianya data monitoring dan evaluasi administrasi, konsolidasi input SIMEP	4 triwulan, 39 SKPD		97%	140,245,000											
			Kegiatan Pengelolaan administrasi pembangunan (2019)	Terlaksananya koordinasi pengadaan	1 Tahun		96%	1,869,324,350											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (2019)	Rapat koordinasi evaluasi reformasi birokrasi pemerintah kota jambi	1 kali		85%	77,894,750											
			Kegiatan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) (2019)	Tersusun laporan AD-PPK dan Laporan data wajib LHKPN	1 Tahun		68%	40,651,600											
			Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (2019)	Terbayarnya kontribusi/uran tersesdasi	1 kali		77%	42,695,000											
			Kegiatan Penataan Instrumen Analisis Jabatan PNS (2019)	Tersedianya aplikasi anjab	150 buku														
				Terlaksananya workshop pemuktahiran anjab	3 aplikasi		64%	92,392,000											
			Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan (2020)	Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	1 kali				19.13%										
				Persentase tertib Administrasi Pembangunan			100%		75%										
			Kegiatan Fasilitas Evaluasi Pelaporan (2020)	Tersedianya data monitormg dan evaluasi administrasi pembangunan SKPD	3 Triwulan	100,000,000			3 Triwulan			9,137,000							
				Terlaksananya konsolidasi sistem evaluasi dan pelaporan OPD	40 OPD				40 OPD										
				Terlaksananya pengendalian dokumen standart UKPBJ	22 Variabel				22 Variabel										
				Terlaksananya evaluasi kinerja pengadaan	22 Variabel				22 Variabel										
				Tercapainya penilaian kinerja pengelola pengadaan dan penyedia	120 Orang				120 Orang										
			Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (2020)	Terlaksananya prosedur PBJ sesuai ketentuan yang berlaku	40 OPD dan 62 Kelurahan	1,720,410,000			40 OPD dan 62 Kelurahan			262,515,800							
				Terlaksananya pendampingan dokumen perencanaan pengadaan OPD	40 OPD dan 62 Kelurahan				40 OPD dan 62 Kelurahan										
				Terlaksananya proses pemantauan/ evaluasi kontrak OPD	300 Paket				300 Paket										
				Terlaksananya koordinasi pengadaan barang/jasa OPD	40 OPD dan 62 Kelurahan				40 OPD dan 62 Kelurahan										
			Kegiatan Pengembangan an Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) (2020)	Terpenuhinya sarana dan prasarana LPSE sesuai standarisasi	80%	300,000,000			60%			48,907,000							
				Terlaksananya pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	17 Standar				17 Standar										
				Terlaksananya fasilitasi verifikasi dan kualifikasi penyedia	300 Penyedia				55%										
				Terlaksananya pengendalian dokumen standart LPSE	17 Standar				17 Standar										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi umum, kelembagaan dan pelayanan publik			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (2020)	Terlaksananya fasilitas jabatan fungsional/ pengadaan barang/jasa bagi personal UKPBJ	25 Orang	369,522,000			12 orang			56,858,016							
			Program Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan (2020)	Terlaksananya workshop pengadaan barang/jasa	3 Kegiatan				3 Kegiatan										
				Terlaksananya pengendalian kelembagaan organisasi pengadaan/ jabatan fungsional/ pembentukan Tim penilai Angka kredit/ Pembinaan pelaku usaha	4 Kegiatan				4 Kegiatan										
				Rata-rata Indeks Pelayanan Publik	A				B										
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan (2019)	Persentase Meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%				38%										
				Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%				30%										
				Kegiatan Penyusunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi (2020)	Jumlah evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Kali Evaluasi	225,000,000		1 Kali			45,815,425							
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan (2019)	Kegiatan Peningkatan ketatalaksanaan pelayanan publik (2020)	Jumlah fasilitas dan penerapan SP dan SOP	3 OPD	872,981,000		3 OPD			10,424,500							
				Kegiatan Penataan perangkat daerah (2020)	Jumlah evaluasi kelembagaan daerah (2020)	5 OPD	135,000,000		5 OPD			11,194,900							
				Penerimaan kunjungan kerja pejabat	Oprimalnya kunjungan kerja pejabat	100%		83%	317,087,040										
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan (2020)	Kunjungan kerja/inspeksi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (2019)	Meningkatnya pelayanan Kunjungan kerja/inspeksi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%		96%	317,087,040 4,822,665,579										
				Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	100%				80%										
				Jumlah Telaahan Staf Ahli Walikota terhadap rancangan kebijakan Kepala Daerah	3 Telaah/ rekomendasi				2 Telaah/ rekomendasi										
			Kegiatan Pelayanan administrasi kepala daerah (2020)	Jumlah administrasi ketatalaksanaan kepala daerah	1500 surat masuk terdiri dari surat undangan, surat audiensi dan surat permohonan	492,400,000			1200 surat masuk terdiri dari surat undangan, surat audiensi dan surat permohonan			34,210,000							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pelaksanaan keprotokolan kepala daerah (2020)	Jumlah pelayanan keprotokolan kepala daerah	1500 kegiatan keprotokolan terdiri dari keprotokolan KDH, WKDH, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	445,000,000			1200 kegiatan keprotokolan terdiri dari keprotokolan KDH, WKDH, Sekda, Asisten dan Staf Ahli			99,880,000							
			Kegiatan fasilitasi perjalanan dinas kepala daerah (2020)	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas kepala daerah	1200 perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	3,062,600,000			900 perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri			284,586,400							
			Kegiatan Pemberdaya an dan kapasitas Staf Ahli Walikota Jambi (2020)	Jumlah Rapat koordinasi lurah, camat, kepala OPD	3 kali	40,805,000			3 kali			-							
				Jumlah Seminar staf ahli walikota	1 Kali				1 Kali										
				Jumlah FGD yang dilaksanakan	1 kali				1 Kali										
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumah tanggaan (2019-2020)	Persentase pemenuhan pemeliharaan kesehatan dan perlengkapan kebutuhan rumah tangga kepala daerah wakil kepala daerah	100%				100%										
			Kegiatan Belanja pemeliharaan kesehatan (2019-2020)	Jumlah pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	5 Jenis	25,000,000	28%	7,004,990	5 Jenis										
			Kegiatan Rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah (2019-2020)	Jumlah kebutuhan rumah tangga KDH dan WKDH yang disediakan	3 Jenis	1,669,074,000	90%	1,162,029,612	2 Rumah Jabatan			293,770,000							
			Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah (2019)	Tersedianya jasa kerja tenaga pendukung administrasi perkantoran	15 orang		98%	270,400,000											
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2019)	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%										
				Cakupan sarana dan prasarana perkantoran	100%				100%										
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2019)	Terlaksanaka belanja perangko KDH, WKDH dan SETDA Kota Jambi	1 Tahun		57%	12,004,000											
				Terlaksananya Pengiriman Paket KDH, WKDH dan SETDA															
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (2019)	Terlaksananya Pembayaran rekening listrik			97%	2,256,559,978											
				Terlaksananya Pembayaran Rekening Air gedung setda, Rumah Dinas KSH, WKDH, Sekda															
				Terlaksananya pembayaran speedy rumah dinas KDH, WKDH dan Kantor Setda Kota Jambi															
			Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (2019)	Tersedianya komponen instalasi listrik elektronik keperluan kantor setda kota jambi, rumah dinas KDH,WKDH dan Sekda.	1 Tahun		100%	252,467,000											
			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2019)	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun		86%	1,105,176,000											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (2019)	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan untuk menghasilkan rasa nyaman dan bersih	100%		98%	926,286,950											
			Kegiatan penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubahkti dan penjaga malam (2019)	Terpenuhinya pemenuhan tenaga pengaman kantor, pengemudi, pramubahkti dan penjaga malam	17 orang		99%	303,816,650											
			Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (2019)	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sekretariat daerah kota jambi	1 Tahun		100%	109,536,950											
			Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (2019)	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sekretariat daerah kota jambi	1 Tahun		100%	149,590,700											
			Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman (2019)	Tersedianya kebutuhan makan minum tamu dan rapat pemerintah kota jambi	100%		70%	1,970,874,127											
			Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2019)	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor guna keperluan operasional setda kota	1 Tahun		94%	502,584,951											
			Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran (2019)	Tersedianya pembayaran gaji tenaga pendukung administrasi perkantoran	1 Tahun		68%	45,172,250											
			Kegiatan Perjalanan Dinas (2019)	Terlaksananya Perjalanan Dinas	1 Tahun		100%	3,902,056,235											
			Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran (2020)	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%														
				Cakupan sarana dan prasarana perkantoran	100%														
			Kegiatan jasa surat menyurat dan perizinan (2020)	Pengiriman paket dan belanja perangko KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah Kota Jambi	4 Jenis	17,000,000			4 Jenis			900,000							
			Kegiatan Penyediaan jasa dan komponen/ instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik (2020)	Jumlah Pembayaran rekening listrik	253.700 Watt	3,863,422,807			253.700 Watt			653,522,971							
				Jumlah Pembayaran rekening telepon (kartu Halo) dan Wifi	55 rekening telepon dan wifi				55 rekening telepon dan wifi										
				Jumlah Pembayaran rekening PDAM	25 Gedung				25 Gedung										
			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset (2020)	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Penyusunan RKA/DPA 1 Dokumen	1,478,712,000			Penyusunan RKA/DPA 1 Dokumen			178,550,000							
					Penyusunan RKAP/ DPPA 1 Dokumen				Penyusunan RKAP/ DPPA 1 Dokumen										
					Pembinaan evaluasi pengelolaan keuangan				Pembinaan evaluasi pengelolaan keuangan										
					Pembinaan sosialisasi SOP pengelolaan keuangan				Pembinaan sosialisasi SOP pengelolaan keuangan										
			Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung/ tenaga administrasi/ teknis perkantoran (2020)	Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kebersihan serta bahan bakar minyak pemotong rumput	21 Jenis	1,659,414,000	98%		21 Jenis			388,680,000							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah	16 jenis				16 jenis										
				Jumlah pakaian kerja lapangan cleaning service Sekretariat Daerah	56 stel				56 stel										
				Jumlah pakaian batik pramusaji yang disediakan	8 Buah				8 Buah										
				Jumlah sepatu kerja petugas Cleaning Service yang disediakan	56 Pasang				56 Pasang										
				Jumlah personil cleaning service yang dibayarkan gajinya	56 orang				56 orang										
				Jumlah honor daerah yang dibayarkan gajinya	2 Orang				2 Orang										
				Jumlah sopir yang dibayarkan gajinya	9 Orang				9 Orang										
				Jumlah pramubhakti yang dibayarkan gajinya	8 Orang				8 Orang										
				Jumlah tenaga kontrak khusus rumah dinas	1 Orang				1 Orang										
				Jumlah tenaga kontrak bagian umum Sekretariat Daerah	18 Orang				18 Orang										
			Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan (2020)	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Daerah yang disediakan	62 Jenis	145,000,000	11 Bagian		54 Jenis		19,500,000								
			Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman(2020)	Jumlah makan minum harian pegawai yang disediakan	1 Tahun	3,105,329,581			1 Tahun		255,687,185								
				Jumlah makan minum rapat yang disediakan	1 Tahun				1 Tahun										
				Jumlah makan minum tamu yang disediakan	1 Tahun				1 Tahun										
			Kegiatan Pengadaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan hiburan/stand/ panggung, tanaman, dan AC/Kipas angin embun yang disewakan (2020)	Jumlah meja kursi, tenda, alat hiburan/stand/ panggung, tanaman, dan AC/Kipas angin embun yang disewakan	50 Kegiatan	1,665,911,297			50 Kegiatan		151,025,775								
				Jumlah tenda samatli yang diadakan	13 unit				13 unit										
				Jumlah lemari arsip yang diadakan	2 Unit				2 Unit										
				Jumlah AC yang diadakan	5 unit				5 unit										
				Jumlah komputer/ laptop yang diadakan	2 Unit				2 Unit										
				Jumlah kursi futura yang diadakan	200 unit				200 unit										
				Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 Jenis				5 Jenis										
				Jumlah bahan bakar minyak genset rumah dinas KDH, WKDH, Sekda dan kantor Sekretariat Daerah yang disediakan	5 Genset				5 Genset										
				Jumlah peralatan dan perlengkapan peralatan kantor yang disediakan	15 Jenis	535,000,000			15 Jenis										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas (2020)	Jumlah tv kabel/internet/ faksmlil Sekretariat Daerah yang dibayarkan	6 TV Kabel /Internet/ Faksmlil Sekretaris Daerah				6 TV Kabel /Internet/ Faksmlil Sekretaris Daerah										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas (2020)	Jumlah peralatan rumah tangga, peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas KDH, WKDH dan Sekda yang disediakan	21 jenis	658,205,840			21 jenis			42,061,815							
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah tv kabel/internet rumah dinas KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah yang dibayarkan	5 tv kabel/ internet rumah dinas KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah				5 tv kabel/ internet rumah dinas KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah peralatan rumah dinas KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Jenis				7 Jenis										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah kendaraan dinas roda empat ketua PKK dan staf ahli walikota yang disediakan	2 unit	2,684,066,303			2 unit			286,691,931							
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah premi asuransi kendaraan dinas KDH dan WKDH yang dibayarkan	Roda 4: 2 Unit				Roda 4: 2 Unit										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah penggantian suku cadang kendaraan dinas KDH dan WKDH	5 Jenis				5 Jenis										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah pajak STNK kendaraan dinas KDH dan WKDH yang dibayarkan	Roda 4: 2 Unit				Roda 4: 2 Unit										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah aksesoris dan perlengkapan kendaraan dinas KDH dan WKDH yang disediakan	6 Jenis				6 Jenis										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah kendaraan operasional KDH dan WKDH yang dilakukan pemeliharaan	Roda 4: 2 Unit				Roda 4: 2 Unit										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah premi asuransi kendaraan dinas Sekda, Asisten dan staf ahli yang dibayarkan	Roda 4: 5 Unit				Roda 4: 5 Unit										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional Sekretariat Daerah	5 Jenis				5 Jenis										
			Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional (2020)	Jumlah pajak STNK kendaraan dinas/ operasional Sekretariat Daerah yang dibayarkan	Roda 4: 44 dan Roda 2 : 67				Roda 4: 44 dan Roda 2 : 67										
			Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor (2020)	Jumlah gedung Sekretariat Daerah yang dilakukan pemeliharaan	11 Bagian dan Gedung Putro Retno	360,000,000			11 Bagian dan Gedung Putro Retno			47,739,500							
			Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan/ Dinas (2020)	Jumlah Rehab sedang/berat gedung Sekretariat Daerah yang akan dilakukan	11 Bagian				11 Bagian										
			Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan/ Dinas (2020)	Jumlah pajak bumi dan bangunan rumah dinas KDH, WKDH dan Sekda yang dilakukan pembayaran	3 Rumah Dinas	375,692,000			2 Rumah Dinas			-							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2019)	Jumlah rumah dinas KDH, WKDH dan Sekda yang dilakukan pemeliharaan	3 Rumah Dinas				3 Rumah Dinas										
				Jumlah Rehab sedang/berat rumah dinas KDH, WKDH, Sekretaris Daerah, Mess dan Aula rumah Dinas	5 Gedung				5 Gedung										
			Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional (2019)	Terciptanya kelancaran bertransortasi dalam melaksanakan tugas kedinasan	100%		98%	875,218,000											
			Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas (2019)	Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3 gedung		83%	528,502,530											
				Terlaksananya pembelian peralatan rumah tangga	3 gedung														
				Terlaksananya pembelian pengadaan karpet	1 paket														
			Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor (2019)	Terlaksananya pembelian lemari arsip	2 Unit		95%	284,782,400											
				Terlaksananya pembelian tenda samafil	11 Unit														
				Terlaksananya pembelian podium	2 Unit														
				Terlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor	1 Tahun														
			Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas (2019)	Meningkatnya kebutuhan peralatan rumah dinas KDH,WKDH dan Sekda	1 Tahun		100%	443,984,000											
			Kegiatan mebeleur (2019)	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun		99%	355,860,000											
			Kegiatan pengadaan peralatan kantor (2019)	Tersedianya peralatan kebutuhan aparatur setda kota jambi dalam menunjang tugas kedinasan	1 Tahun		98%	268,437,214											
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan (2019)	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah jabatan	3 rumah dinas		49%	113,153,925											
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (2019)	Terlaksananya pemeliharaan gedung sekretariat (rehab kecil, bocor, dll)			91%	219,167,699											
				Terlaksananya service peralatan di Putra Retno (service ac)															
				Terlaksananya pembelian alat kebersihan gedung putra retno															
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (2019)	Terlaksananya premi asuransi untuk mobil dinas KDH & WKDH	1 Tahun		86%	165,568,116											
				Terlaksananya pengantian suku cadang kendaraan KDH & WKDH	1 Tahun														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (2019)	Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan KDH & WKDH	1 Tahun														
				Terlaksananya belanja aksesoris kendaraan KDH & WKDH	12 bulan														
				Terlaksananya pembayaran BBM KDH & WKDH	12 bulan														
				Terlaksananya Penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional sekretariat daerah kota jambi	1 Tahun		90%	1,779,296,647											
				Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas operasional sekretariat daerah kota jambi															
				Terlaksananya pembelian aksesoris dan perlengkapan kendaraan dinas operasional sekretariat daerah kota jambi															
				Terlaksananya serice kendaraan dinas operasional sekretariat daerah kota jambi															
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (2019)	Terlaksananya pembelian BBM genset untuk rumah dinas KDH, WKDH, Sekda dan kantor walikota.	12 bulan		100%	52,800,000											
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas (2019)	Terlaksananya service peralatan di rumah jabatan	100%		72%	192,754,724											
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (2019)	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%		71%	183,505,657											
			Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan (2019)	Terlaksananya rehabilitas sedang/berat rumah dinas WKDH	1 Tahun		100%	949,113,000											
			Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (2019)	Terlaksananya rehabilitas sedang/berat gedung kantor sekretariat daerah kota jambi	Ruang Kerja dan WC Ruang Pola		100%	99,888,000											
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur (2019)	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%				100%										
			Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (2019)	Terlaksananya pembelian pakaian dinas KDH/WKDH	KDH, WKDH : P.JH : 2 Stel x 2, PSR : 2 Stel x 2, PSL : 2 Stel x 2, PDH : 2 Stel x 2		96%	188,121,066											
				Terlaksananya pembelian pakaian dinas (PSH) Sekda Asisten & Staf Ahli	Pakaian PSH Sekda Asisten & Staf Ahli 9 Org x 1 stel : 9														
				Terlaksananya pembelian pakaian dinas Sekda, Asisten & Staf Ahli	Pakaian PDH 9 Orang x 1 stel : 9														
				Terlaksananya pembelian pakaian dinas pegawai di lingkungan setda Kota Jambi	Pakaian PDH ASN 250 x 1 stel : 250														
			Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (2019)	Terpenuhinya saran pendukung kerja sumber daya aparatur	6 stel		100%	15,240,000											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2019)	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%														
			Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (2019)	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam BinteK	18 ASN		98%	254,321,343											
			Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2020)	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%				100%										
			Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya (2020)	Penyediaan pakaian dinas harian KDH, WKDH, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan aparatur Sekretariat Daerah	275 stel	312,678,172			275 stel		-								
				Penyediaan pakaian dinas upacara, bati tradisional, pramuka dan kelengkapan KDH dan WKDH	6 stel				6 stel										
			Kegiatan Pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis/kursus (2020)	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam BinteK	30 ASN	355,000,000			23 ASN		6,550,000								
			Kegiatan Perjalanan Dinas (2020)	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di lingkup Sekretariat daerah	587 Study banding, 537 rapat koordinasi dan konsultasi, 508 menghadiri undangan dan seminar	2,642,103,000			442 Study banding, 405 rapat koordinasi dan konsultasi, 382 menghadiri undangan dan seminar		646,761,811								
			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (2019)																
			Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2019)	Penyusunan buku laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kota jambi tahun 2018	120 buku		81%	217,282,000											
				Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kota jambi tahun 2019 terhadap buku laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kota jambi tahun 2018															
			Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (2019)	Dokumen LKJ Pemerintah Kota Jambi Tahun 2018	1 Dokumen		77%	126,300,750											
			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi (2019)	Sosialisasi SAKIP	1 Kali														
				Tersedianya penyusunan RKA/DPA/DPPA, Laporan	1 Dokumen		75%	565,216,037											
				Keuangan dan pembinaan penatausahaan keuangan	1 Dokumen														
				setda yang akuntabel	Pembinaan evaluasi pengelolaan keuangan														
			Program Perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah (2020)	Persentase Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan	93%		75%		89%										
			Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan (2020)	Tersusunnya dokumen RKA/DPA/ DPPA, Laporan Keuangan Setda yang akuntabel	4 Dokumen	943,922,000			4 Dokumen		100,574,600								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD		URUSAN PENDUDUKUNG SEKRETARIAT DPRD																SEKRETARIAT DPRD
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DAN PELAYANAN KEDINASAN DPRD	1. JUMLAH DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN PADA SETIAP ALAT KELENGKAPAN DEWAN	1 DOKUMEN	39,342,416,000	1 DOKUMEN			30,309,185,000									
				2. JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK MENGAKOMODIR PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD	9 DOKUMEN		9 DOKUMEN												
			1. Penyediaan Kebutuhan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah	Keluaran : 1. Himpunan Ranperda 2. Rapat Pansus 3. Rapat Bapemperda 4. Rapat Paripurna 5. Studi Banding Pansus Ranperda Dan Non Ranperda 6. Studi Banding Bapemperda 7. Konsultasi/Koordinasi Pansus Ranperda dan Non Ranperda 8. Konsultasi/Koordinasi Bapemperda 9. Naskah Akademik 10. Bantuan Hukum 11. Jumlah Ranperda	1. 200 Buku 2. 150 Kali 3. 50 Kali 4. 24 Kali 5. 10 Kali 6. 4 Kali 7. 2 Kali 8. 2 Kali 9. 2 Paket 10. 1 Perkara 11. 15 Ranperda	5,320,487,000	100%	2,668,710,487	1. 100 Buku 2. 70 Kali 3. 40 Kali 4. 24 Kali 5. 7 Kali 6. 4 Kali 7. 2 Paket 8. 1 Perkara 9. 7 Ranperda	4,648,500,000	11%	1,049,674,403	11%	1,049,674,403	111%	3,718,384,890	0.70		
			2. Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : 1. ADEKSI 2. Pendalaman Tugas DPRD 3. Kegiatan FGD 4. Medical Check Up DPRD	1. 53 Orang Kali 2. 90 Orang Kali 3. 1 Kali 4. 45 Orang	7,460,322,000	100%	7,147,517,537	1. 53 Orang Kali 2. 1 Kali 3. 1 Kali 4. 45 Orang	2,283,280,000	59%	682,482,696	59%	682,482,696	159%	7,830,000,233	1.05		
			3. Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD	Keluaran : 1. Rapat Pimpinan 2. Rapat Banmus 3. Studi Banding Banmus 4. Konsultasi/Koordinasi Pimpinan	1. 20 Kali 2. 30 Kali 3. 4 Kali 4. 4 Kali	2,363,106,000	100%	4,159,687,228	1. 12 Kali 2. 20 Kali 3. 4 Kali 4. 4 Kali	2,806,800,000	40%	776,328,131	40%	776,328,131	140%	4,936,015,359	2.09		
			4. Penyediaan Kebutuhan Rapat-Rapat Paripurna Istimewa	Keluaran : 1. Rapat Paripurna HUT Kota 2. Rapat Parupurna HUT RI 3. Rapat Parupurna PAW	1. 1 Kali 2. 1 Kali 3. 1 Kali	814,400,000	100%	2,601,701,152	1. 1 Kali 2. 1 Kali 3. 1 Kali	871,255,000	0%	-	0%	-	100%	2,601,701,152	3.19		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Keluaran : 1. Liputan Media Cetak 2. Liputan Khusus Media Cetak Pro Parlemen 3. Liputan Khusus Media Elektronik 4. Liputan Khusus Siaran Langsung Media Elektronik (LIVE) 5. Liputan Khusus Siaran Langsung Media Elektronik (DELAY) 6. Liputan Media Online 7. Cetak Buku Kegiatan Anggota dan Pimpinan DPRD	1. 75 Kali 2. 50 Kali 3. 50 Kali 4. 2 Tayang 5.1 Tayang 6.300 Kali 7. 100 Buku	2,709,025,000	100%	911,650,000	1. 75 Kali 2. 50 Kali 3. 50 Kali 4. 2 Tayang 5.1 Tayang 6.300 Kali 7. 100 Buku	707,250,000	22%	130,950,000	22%	130,950,000	122%	1,042,600,000	0.38		
			6. Pelayanan Keprotokolan DPRD	Keluaran : 1. Menghadiri Undangan 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri	1. 15 Orang Kali 2. 4 Orang Kali	524,510,000	100%	410,000,000	1. 15 Orang Kali 2. 4 Orang Kali	575,000,000	0%	-	0%	-	100%	410,000,000	0.78		
			7. Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Kelengkapannya	Keluaran : 1. PSH 2. PSL 3. PDH 4. PSR 5. Pakaian Adat 6. Pakaian Batik	1. 47 Stel 2. 2 Stel 3. 47 Stel 4. 47 Stel 5. 47 Stel	714,038,000	100%	1,001,235,100	1. 47 Stel 2. 2 Stel 3. 47 Stel 4. 47 Stel 5. 47 Stel 6. 47 Stel	418,590,000	0%	-	0%	-	100%	1,001,235,100	1.40		
			8. Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Penganggaran	Keluaran : 1. Rapat LKPD T.A. 2019 2. Rapat KUPA PPAS APBD Perubahan T.A. 2020 3. Rapat Panperda APBD Perubahan T.A. 2020 4. Rapat KUA PPAS APBD T.A. 2021 5. Rapat Ranperda APBD T.A. 2021 6. Studi Banding LKPD T.A. 2019 7. Studi Banding KUPA PPAS APBD Perubahan T.A. 2020 8. Studi Banding Ranperda APBD Perubahan T.A. 2020 9. Studi Banding KUA PPAS APBD T.A. 2021 10. Studi Banding Ranperda APBD T.A. 2021 11. Konsultasi/Koordinasi Banggar	1. 16 Kali 2. 10 Kali 3. 12 Kali 4. 10 Kali 5. 12 Kali 6. 1 Kali 7. 1 Kali 8. 1 Kali 9. 1 Kali 10. 1 Kali 11. 4 Kali	6,072,941,000	100%	4,159,587,228	1. 16 Kali 2. 10 Kali 3. 12 Kali 4. 10 Kali 5. 12 Kali 6. 1 Kali 7. 1 Kali 8. 1 Kali 9. 1 Kali	2,842,310,000	0%	-	0%	-	100%	4,159,587,228	0.68		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik			9. Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan	Keluaran : 1. Rapat LKPJ Walikota T.A. 2019 2. Rapat Badan Kehormatan 3. Kunjungan Lapangan Komisi 4. Rapat Komisi 5. Studi Banding LKPJ Walikota T.A. 2019 6. Studi Banding Badan Kehormatan 7. Kunjungan Kerja Komisi dan Studi Banding Komisi 8. Konsultasi/Koordinasi Komisi	1. 16 Kali 2. 4 Kali 3. 96 Kali 4. 192 Kali 5. 1 Kali 6. 3 Kali 7. 1 Kali 8. 6 Kali 9. 3 Kali	10,696,683,000	100%	7,147,517,537	1. 16 Kali 2. 4 Kali 3. 96 Kali 4. 192 Kali 5. 1 Kali 6. 3 Kali 7. 1 Kali 8. 6 Kali	13,636,400,000	22%	4,480,548,206	22%	4,480,548,206	122%	11,628,065,743	1.09			
			10. Penyediaan Kebutuhan Reses dan Penerimaan Aspirasi Masyarakat	Keluaran : 1. Kegiatan Reses 2. Penerimaan Aspirasi Masyarakat	1. 3 Kali 2. 12 Kali	2,666,904,000	100%	880,444,310	1. 2 Kali 2. 12 Kali	1,519,800,000	0%	-	0%	-	100%	880,444,310	0.33			
			URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN KECAMATAN KOTABARU																	
			Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan		750,000,000		1,995,632,060		270,757,500		43,800,000	98	43,800,000	98	2,039,432,060	272%			
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	95%	150,000,000		634,712,060		73,550,000	0%	23,300,000	95%	23,300,000	95%	658,012,060	439%			
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan	12 Bulan	250,000,000		1,257,320,000		66,295,000	0	-	12 Bulan	0	12 Bulan	1,257,320,000	503%			
			Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan gotong royong	12 Bulan	200,000,000		103,600,000		58,100,000	12 Bulan	-	12 Bulan	0	12 Bulan	103,600,000	52%			
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan , Pengawasan Kententrman, Kelerbitan Umum dan Fasilitasi Bencana	Persentase Lokasi Penerbitan dalam Kecamatan	90%	150,000,000		-		72,812,500	90%	20,500,000	90%	20,500,000	90%	20,500,000	14%			
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan		1,355,500,000		616,403,140		616,401,140	70%	74,025,000	90%	74,025,000	90%	#REF!	#REF!			
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan	12 Bulan	950,000,000		276,148,140		340,255,000	12 Bulan	13,800,000	12 Bulan	13,800,000	12 Bulan	289,948,140	31%			
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	12 Bulan	405,500,000		340,255,000		276,146,140	12 Bulan	60,225,000	12 Bulan	60,225,000	12 Bulan	400,480,000	99%			
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir		1,495,000,000		1,184,644,586		1,495,000,000	50%	-	65%	0	70%	1,184,644,586	79%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan publik			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukakarya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299,000,000		245,812,648		299,000,000		-		0		245,812,648		82%	KECAMATAN TELANAIPURA
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang III Sipin	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299,000,000		183,710,250		299,000,000		-		0		183,710,250		61%	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paal Lima	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299,000,000		250,983,847		299,000,000		-		0		250,983,847		84%	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenali Asam Bawah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299,000,000		251,703,488		299,000,000		-		0		251,703,488		84%	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenali Asam Atas	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299,000,000		252,434,353		299,000,000		-		0		252,434,353		84%	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rasio Usulan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakomodir		3,575,247,000		1,529,614,429		4,411,885,800	45%	-	80%	0	80%	1,529,614,429		43%	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	586,681,400		104,560,315		481,287,600	5 lembaga	-	8 lembaga	0	8 lembaga	104,560,315		18%	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang III Sipin	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	526,041,400		102,255,905		735,588,400	6 lembaga	-	8 lembaga	0	8 lembaga	102,255,905		19%	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Lima	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	470,841,400		110,838,000		691,500,200	4 lembaga	-	6 lembaga	0	6 lembaga	110,838,000		24%	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenali Asam Bawah	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	594,341,400		101,872,209		931,699,600	4 lembaga	-	8 lembaga	0	8 lembaga	101,872,209		17%	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenali Asam Atas	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	397,341,400		110,088,000		571,810,000	4 lembaga	-	6 lembaga	0	6 lembaga	110,088,000		28%	
			Kegiatan Bangkit Berdaya	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	5 Kel	1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	37 Titik	-	37 Titik	0	37 Titik	1,000,000,000		100%	
			KECAMATAN TELANAIPURA																
			Program Pelayanan Umum Kecamatan	IKM	98%	481,875,000		-		72,750,000									
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase Perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	25%	25,000,000			1 tahun	12,000,000									
			Pembinaan Administrasi Pemerintah Umum Kecamatan	Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan	48 kali	321,875,000			1 tahun	16,000,000									
			Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong	68 kali	69,000,000			30	23,000,000									
			Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Ketersiban Umum dan Fasilitas Bencana	Persentase lokasi penerbitan dalam Kecamatan	100%	66,000,000			30	21,750,000									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat yang di bina di tingkat Kecamatan		904,075,000													
			Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	10 lembaga	504,075,000			40	419,425,000									
			Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	7 kali	400,000,000			40	264,590,000									
	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana di lingkungan kelurahan		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana prasarana Kelurahan yang diakomodir	90%	2,070,582,000		1,698,725,620		1,783,019,000									
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Simpang IV Sipin	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345,097,000	100	283,111,420	50	296,200,000									
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Buluran Kenali	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345,097,000	100	315,078,000	50	297,383,000									
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Teluk Kenali	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345,097,000	90	287,360,000	50	297,000,000									
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Telanaipura	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345,097,000	100	219,012,300	50	296,200,000									
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Penyengat Rendah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345,097,000	100	298,638,000	50	296,200,000									
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pematang Sulu	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345,097,000	100	295,525,900	50	300,036,000									
	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang di bina di tingkat Kelurahan	80%	3,516,246,000		1,609,187,380		3,986,278,760									
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang IV Sipin	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	5 lembaga	586,041,000	90	87,026,580	50	654,158,480									
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buluran Kenali	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	5 lembaga	586,041,000	100	55,060,000	50	456,040,920									
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Kenali	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	5 lembaga	586,041,000	95	82,778,000	50	297,268,080									
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telanaipura	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	5 lembaga	586,041,000	99	151,125,700	50	401,525,520									
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penyengat Rendah	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	12 lembaga	586,041,000	100	71,500,000	50	667,460,080									
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pematang Sulu	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	4 lembaga	586,041,000	100	74,612,100	50	509,825,680									
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Simpang IV Sipin	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100	133,837,000	50	196,000,000									
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Buluran Kenali	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100	231,479,000	50	133,000,000									
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Teluk Kenali	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100	90,593,000	50	90,000,000									
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Telanaipura	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100	186,542,000	50	192,000,000									
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Penyengat Rendah	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100	229,746,000	50	190,000,000									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Pematang Sulur	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100	214,888,000	50	199,000,000			-						KECAMATAN JELUTUNG
			KECAMATAN JELUTUNG																
			Pelayanan Umum Kecamatan																
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Umum pada kecamatan	1 Tahun	18,000,000			1 Tahun	63,100,000	13,78%	8,700,000	13,78%	8,700,000	13,78%	8,700,000	48,33%		
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	1 Tahun	80,000,000			1 Tahun	34,390,000	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan	12 Bulan	129,950,000			12 Bulan	266,110,400	10,74%	28,602,300	10,74%	28,602,300	10,74%	28,602,300	22,01%		
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Fasilitas Bencana	Terlaksananya Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini	12 Bulan	116,500,000			12 Bulan	63,475,000	1,73%	1,100,000	1,73%	1,100,000	1,73%	1,100,000	0,94%		
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan																
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Keterlibatan Lembaga Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembagunan	1 Tahun	699,500,000			1 Tahun	528,155,000	7,17%	37,875,000	7,17%	37,875,000	7,17%	37,875,000	5,41%		
			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Masyarakat	1 Tahun	571,587,500			1 Tahun	291,850,000	16,5%	48,150,000	16,5%	48,150,000	16,5%	48,150,000	8,42%		
			Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana KELURAHAN																
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cempaka Putih		1 Tahun	280,864,000			1 Tahun	296,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebun Handil		1 Tahun	343,392,000			1 Tahun	296,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jelutung		1 Tahun	296,430,000			1 Tahun	296,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Jaya		1 Tahun	338,471,875			1 Tahun	296,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Payo Lebar		1 Tahun	251,426,000			1 Tahun	296,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lebak Bandung		1 Tahun	346,582,000			1 Tahun	296,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Jauh		1 Tahun	363,618,000			1 Tahun	296,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
			Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih		1 Tahun	495,773,500			1 Tahun	432,180,000	14,04%	60,695,000	14,04%	60,695,000	14,04%	60,695,000	12,24%		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebun Handil		1 Tahun	460,500,000			1 Tahun	495,682,400	16,12%	79,950,800	16,12%	79,950,800	16,12%	79,950,800	17,36%		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jelutung		1 Tahun	712,800,000			1 Tahun	794,574,000	15,85%	125,959,000	15,85%	125,959,000	15,85%	125,959,000	17,67%		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Jaya		1 Tahun	423,600,000			1 Tahun	471,621,200	19,47%	91,845,000	19,47%	91,845,000	19,47%	91,845,000	21,68%		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Payo Lebar		1 Tahun	564,700,000			1 Tahun	582,954,800	14,52%	84,700,000	14,52%	84,700,000	14,52%	84,700,000	15%		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Bandung		1 Tahun	490,700,000			1 Tahun	643,916,000	15,07%	97,095,000	15,07%	97,095,000	15,07%	97,095,000	19,77%		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Jauh		1 Tahun	302,200,000			1 Tahun	270,474,400	11,27%	30,500,000	11,27%	30,500,000	11,27%	30,500,000	11%		
			Kegiatan Bangkit Berdaya		1 Tahun	1,000,000,000			1 Tahun	1,000,000,000	73,50%	734,974,600	73,50%	734,974,600	73,50%	734,974,600	73,50%		
			KECAMATAN PASAR																
	Persentase Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina ditingkat Kelurahan.			85%	1,879,959,700	-	-	-	-	-	-	85%	1,879,959,700	-	-	KECAMATAN PASAR
			Bangkit Berdaya	Terlaksananya Pemberian Bantuan Bahan Material untuk Masyarakat			22 titik / 20%	215,743,100	-	-	-	-	-	-	22 titik / 20%	215,743,100	-	-	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Keg.Murenbang, MTQ,Lemb.Adad, PKK, PAUD, LPTQ,BujangGadis,P entas Seni, Budaya Daerah, Sosial Kemasy, Pramuka, PKL			12 keg./40%	770,601,400	-	-	-	-	-	-	12 keg./40%	770,601,400	-	-	
			Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Gotong Royong Kemasyarakatan			1 orang, 4 keg./10%	39,976,000	-	-	-	-	-	-	1 orang, 4 keg./10%	39,976,000	-	-	
			Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Pendataan PBB,Pembinaan RT, Guru PAMI, Tenaga Adm, PKK Kel, LPM, LAM, ATK			7 keg. / 30%	853,639,200	-	-	-	-	-	-	7 keg. / 30%	853,639,200	-	-	
			Pembangunan Sarana & Prasarana di Kel. Beringin	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal			1 tahun/100%	284,896,025	-	-	-	-	-	-	1 tahun/100%	284,896,025	-	-	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kel. Beringin				6 Lembaga	77,461,550	-	-	-	-	-	-	6 Lembaga	77,461,550	-	-	
			Pembangunan Sarana & Prasarana di Kel. OKH	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal			1 tahun/100%	249,243,750	-	-	-	-	-	-	1 tahun/100%	249,243,750	-	-	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kel. OKH				6 Lembaga	120,038,000	-	-	-	-	-	-	6 Lembaga	120,038,000	-	-	
			Pembangunan Sarana & Prasarana di Kel. Pasar	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal			1 tahun/100%	147,429,075	-	-	-	-	-	-	1 tahun/100%	147,429,075	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik			Pemberdayaan Masyarakat di Kel. Pasar	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal			4 Lembaga	62,788,000	-	-	-	-	-	-	4 Lembaga	62,788,000	-	-	
			Pembangunan Sarana & Prasarana di Kel. Sungai Asam				1 tahun/100%	229,821,875	-	-	-	-	-	1 tahun/100%	229,821,875	-	-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kel. Sungai Asam				7 Lembaga	139,138,000	-	-	-	-	-	7 Lembaga	139,138,000	-	-		
			Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	95%	1,625,000,000			85%	(A)	270,228,600	28	39,747,950	28	39,747,950	28	39,747,950	89	2.45
			Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	Persentase perizinan dan Non perizinan yang sesuai SOP	85%	595,000,000			50%		80,200,000	15%	27,358,100	15%	27,358,100	15%	27,358,100	35	18
			Pembinaan Administrasi Pemerintah umum	Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan	12 Kali	480,000,000			12 Kali		68,874,600	3 Kali	7,225,000	3 Kali	7,225,000	3 Kali	7,225,000	25	1.51
			Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong, Kampung Bentar, PHBS, LBs, Uks, Kecamatan Sehat, Fogging	20 Kali	255,000,000			20 Kali		64,054,000	6 Kali	4,489,850	6 Kali	4,489,850	6 Kali	4,489,850	30	1.76
			Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentrman, keterlibatan umum dan Fasilitas bencana	Persentase lokasi penerbitan dalam kecamatan	80%	295,000,000			60%		57,100,000	20%	675,000	20%	675,000	20%	675,000	41	0.23
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan Masy. Yang Berpartisipasi dalam Pembangunan yang difasilitasi	90%	975,000,000			95%		731,729,400	79%	85,872,000	79%	85,872,000	79%	85,872,000	43	8.72
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang Dilaksanakan	14 Kali	620,000,000			14 Kali		444,029,400	3 Kali	31,885,000	3 Kali	31,885,000	3 Kali	31,885,000	21	5.14
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat oleh Kecamatan	7 Lembaga	355,000,000			7 Lembaga		287,700,000	4 Lembaga	53,987,000	4 Lembaga	53,987,000	4 Lembaga	53,987,000	57	15.21
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Sarana dan Prasarana Masyarakat yang diakomodir	70%	1,180,000,000			95		1,184,800,000	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beringin	Jumlah Lokasi yang di Bangun/mendapatkan bantuan di kelurahan Beringin	5 Lokasi	295,000,000			18 RT		296,200,000	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah Lokasi yang di Bangun/mendapatkan bantuan di kelurahan Orang Kayo Hitam	5 Lokasi	295,000,000			9 RT		296,200,000	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah Lokasi yang di Bangun/mendapatkan bantuan di kelurahan Pasar Jambi	5 Lokasi	295,000,000			6 RT		296,200,000	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Asam	Jumlah Lokasi yang di Bangun/mendapatkan bantuan di kelurahan Sungai Asam	5 Lokasi	295,000,000			9 RT		296,200,000	-	-	-	-	-	-	-	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina ditingkat Kelurahan.	75%	3,325,000,000			50%		1,615,584,640	45	298,536,480	45	298,536,480	45	298,536,480	60	8.98

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beringin	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/diberdayakan diKelurahan Beringin	7 Lembaga	845,000,000			7 Lembaga	371,931,440	6 Lembaga	69,160,000	6 Lembaga	69,160,000	6 Lembaga	69,160,000	86	8.18	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/diberdayakan diKelurahan Orang Kayo Hitam	7 Lembaga	795,000,000			9 Lembaga	265,340,880	5 Lembaga	46,046,480	5 Lembaga	46,046,480	5 Lembaga	46,046,480	56	5.79	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/diberdayakan diKelurahan Pasar Jambi	7 Lembaga	655,000,000			6 Lembaga	219,290,480	5 Lembaga	20,390,000	5 Lembaga	20,390,000	5 Lembaga	20,390,000	83	3	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Asam	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/diberdayakan diKelurahan Sungai Asam	7 Lembaga	905,000,000			7 Lembaga	459,021,840	5 Lembaga	78,940,000	5 Lembaga	78,940,000	5 Lembaga	78,940,000	71	8.72	
			Kegiatan Bangkit Berdaya di Kelurahan Beringin	Jumlah Usulan RT yang di akomodir	3 RT	125,000,000			3 RT	100,000,000	2 RT	84,000,000	2 RT	84,000,000	2 RT	84,000,000	67	67.2	
			Kegiatan Bangkit Berdaya di Kelurahan OKH	Jumlah Usulan RT yang di akomodir	2 RT	100,000,000			2 RT	70,000,000									
			Kegiatan Bangkit Berdaya di Kelurahan Pasar	Jumlah Usulan RT yang di akomodir	2 RT	50,000,000			3 Titik	30,000,000									
			Kegiatan Bangkit Berdaya di Kelurahan Sungai Asam	Jumlah Usulan RT yang di akomodir	4 RT	125,000,000			4 RT	100,000,000									
			KECAMATAN JAMBI SELATAN																
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik		Program pelayanan umum kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100%	2.335.490.000		2.315.229.000	90%	1.350.000.000		10.860.000	0,00%	10.860.000		2.326.089.000		1,00	
			Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian kecamatan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai SOP	100%	261.950.000		1.068.079.000	95%	50.000.000	13%	9.360.000	12,87%	9.360.000		1.077.439.000		4,11	
			Kegiatan Pembinaan administrasi pemerintahan umum	Jumlah pembinaan oleh kecamatan	60 kali	599.640.000		1.247.150.000	12 kali	1.000.000.000		-	0,00%	-		1.247.150.000		2,08	
			Kegiatan Pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah Pelaksanaan gotong royong	60 kali	473.900.000		-	12 kali	100.000.000	2%	1.500.000	2,21%	1.500.000		1.500.000		0,00	
			Kegiatan Koordinasi pembinaan, pengawasan kelenframan, ketertiban umum dan fasilitasi bencana	Persentase lokasi penerbitan dalam kecamatan	90%	1.000.000.000		-	90%	200.000.000		-	0,00%	-		-		-	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	Persentase jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	40%	7.399.790.000		-	20%	1.388.000.000		1.388.000.000	0,00%	1.388.000.000		1.388.000.000		0,19	
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	100%	2.984.815.000		-	95%	568.000.000	9%	30.650.000	8,74%	30.650.000		30.650.000		0,01	
			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	180 kegiatan	4.414.975.000		-	30 kegiatan	820.000.000	8%	13.125.000	8,25%	13.125.000		13.125.000		0,00	
			Program pembangunan sarana dan prasarana KELURAHAN	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir		6.470.617.000		1.219.054.000		1.295.483.000		1.295.483.000	0,00%	1.295.483.000		2.514.537.000		0,39	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pasir Putih	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/lokasi/ kegiatan	1.288.415.400		245.176.000	6 titik/lokasi/ kegiatan	259.096.600			0,00%	-		245.176.000			0,19	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Tambak Sari	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/lokasi/ kegiatan	1.297.369.400		252.644.400	6 titik/lokasi/ kegiatan	259.096.600			0,00%	-		252.644.400			0,19		
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan The Hok	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/lokasi/ kegiatan	1.295.733.400		254.672.000	6 titik/lokasi/ kegiatan	259.096.600			0,00%	-		254.672.000			0,20		
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pakuan Baru	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/lokasi/ kegiatan	1.293.646.400		231.149.100	6 titik/lokasi/ kegiatan	259.096.600			0,00%	-		231.149.100			0,18		
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Wijaya Pura	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/lokasi/ kegiatan	1.295.452.400		235.412.500	6 titik/lokasi/ kegiatan	259.096.600			0,00%	-		235.412.500			0,18		
			Program Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN	Rasio Usulan Pemberdayaan Masyarakat yang diakomodir		7.782.833.000		1.557.552.850		1.555.207.000			- 0,00%	-		1.557.552.850			0,20		
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Pasir Putih	Jumlah kelembagaan yang dibina kelurahan	10 kali	562.274.600		106.609.000	2 kali	111.041.400			0,00%	-		106.609.000			0,19		
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Tambak Sari	Jumlah kelembagaan yang dibina kelurahan	10 kali	553.320.600		109.155.000	2 kali	111.041.400			0,00%	-		109.155.000			0,20		
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Thehok	Jumlah kelembagaan yang dibina kelurahan	10 kali	554.956.600		107.830.000	2 kali	111.041.400			0,00%	-		107.830.000			0,19		
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pakuan Baru	Jumlah kelembagaan yang dibina kelurahan	10 kali	557.043.600		125.624.500	2 kali	111.041.400			0,00%	-		125.624.500			0,23		
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wijaya Pura	Jumlah kelembagaan yang dibina kelurahan	10 kali	555.237.600		110.169.000	2 kali	111.041.400			0,00%	-		110.169.000			0,20		
			Kegiatan Bangkit Berdaya	Jumlah urusan yang diakomodir	100 kali	5.000.000.000		998.165.350	20 kali	1.000.000.000			0,00%	-		998.165.350			0,20		
			KECAMATAN JAMBI TIMUR																		
			Program Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	98	-	85,23	14,050,000	-	-	-	-	-	-	-	85,23	14,050,000	86.97	-		
				Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	90%	-	78,57%	3,147,105,000	-	-	-	-	-	-	-	78,57%	3,147,105,000	87.3	-		
	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	70%	-	64.66%	2,814,693,322	-	-	-	-	-	-	-	64.66%	2,814,693,322	92.37	-					
	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	80%	-	81.11%	970,203,300	-	-	-	-	-	-	-	81.11%	970,203,300	10.14	-					
	Bangkit Berdaya	Jumlah usulan RT yang diakomodir	60 lokasi	5,000,000,000	31 Lok	699,893,400	-	-	-	-	-	-	31 Lok	699,893,400	51.67	14.00					
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai PATEN	A	8,500,000,000	B-	1,538,865,000	-	-	-	-	-	-	B-	1,538,865,000	51.67	18.10					
	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gotong Royong	116 kali	226,400,000	8 kali	19,400,000	-	-	-	-	-	-	8 kali	19,400,000	51.67	8.57					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Pembinaan RT dan LPM	60 kali	5,839,944,000	12 kali	1,588,840,000	-	-	-	-	-	-	12 kali	1,588,840,000	51.67	27.21	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	5 sarana	229,085,000	-	-	-	-	-	-	5 sarana	229,085,000	51.67	13.28	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	7 sarana	231,274,395	-	-	-	-	-	-	7 sarana	231,274,395	51.67	13.40	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rajawali	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	6 sarana	220,459,063	-	-	-	-	-	-	6 sarana	220,459,063	51.67	12.78	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Banjar	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	7 sarana	238,763,153	-	-	-	-	-	-	7 sarana	238,763,153	51.67	13.84	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijenjang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	8 sarana	236,225,806	-	-	-	-	-	-	8 sarana	236,225,806	51.67	13.69	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budiman	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	5 sarana	253,774,293	-	-	-	-	-	-	5 sarana	253,774,293	51.67	14.71	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	9 sarana	251,126,000	-	-	-	-	-	-	9 sarana	251,126,000	51.67	14.55	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sulanjana	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	7 sarana	237,066,306	-	-	-	-	-	-	7 sarana	237,066,306	51.67	13.74	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	6 sarana	217,025,906	-	-	-	-	-	-	6 sarana	217,025,906	51.67	12.58	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,821,707,000	8 lembaga	103,604,000	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	103,604,000	51.67	3.67	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,531,707,000	8 lembaga	116,134,000	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	116,134,000	51.67	4.59	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rajawali	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,269,807,000	8 lembaga	87,549,500	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	87,549,500	51.67	3.86	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Banjar	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,861,207,000	8 lembaga	111,294,000	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	111,294,000	51.67	3.89	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sijenjang	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	1,933,207,000	8 lembaga	114,754,800	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	114,754,800	51.67	5.94	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budiman	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,054,807,000	8 lembaga	113,798,000	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	113,798,000	51.67	5.54	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,136,607,000	8 lembaga	108,936,000	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	108,936,000	51.67	5.10	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sulanjana	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 lembaga	1,886,707,000	8 lembaga	112,416,000	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	112,416,000	51.67	5.96	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	1,918,207,000	8 lembaga	101,717,000	-	-	-	-	-	-	8 lembaga	101,717,000	51.67	5.30	
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	98	2,063,265,000	-	-	89	284,821,000	-	7,700,000	-	7,700,000	0	7,700,000	0	0.37	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	98%	525,000,000	-	-	90%	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan	85	373,015,000	-	-	17 kali	61,321,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan gotong royong	80	698,000,000	-	-	18 kali	88,400,000	2 kali	6,700,000	2 kali	6,700,000	2 kali	6,700,000	2.50	0.96	
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan , Pengawasan Kententrman, Keterliban Umum dan Fasilitasi Bencana	Persentase Lokasi Penerbitan dalam Kecamatan	80%	467,250,000	-	-	65%	60,100,000	0,02%	1,000,000	0,02%	1,000,000	0,02%	1,000,000	0.025	0.21	
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	90%	5,832,939,560	-	-	75%	704,024,600	43,75%	42,150,000	43,75%	42,150,000	43,75%	42,150,000	48.61	0.72	
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan	14 lembaga	3,148,089,560	-	-	8 lembaga	474,100,000	2 lembaga	16,300,000	2 lembaga	16,300,000	2 lembaga	16,300,000	14.29	0.52	
			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	38 kali	2,684,850,000	-	-	8 kali	229,924,600	5 kali	25,850,000	5 kali	25,850,000	5 kali	25,850,000	13.16	0.96	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	70%	15,529,347,000	110.57%	2,114,799,922	55%	2,642,091,300	-	-	-	-	55.28%	2,114,799,922	78.97	13.62	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	5 sarana	229,085,000	6 sarana	292,200,000	-	-	-	-	5 sarana	229,085,000	27.78	13.28	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	7 sarana	231,274,395	7 sarana	310,989,700	-	-	-	-	7 sarana	231,274,395	38.89	13.40	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rajawali	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	6 sarana	220,459,063	6 sarana	292,200,000	-	-	-	-	6 sarana	220,459,063	66.67	12.78	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Banjar	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	7 sarana	238,763,153	7 sarana	273,903,400	-	-	-	-	7 sarana	238,763,153	38.89	13.84	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijenjang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	8 sarana	236,225,806	8 sarana	329,355,400	-	-	-	-	8 sarana	236,225,806	44.44	13.69	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budiman	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	5 sarana	253,774,293	5 sarana	288,819,400	-	-	-	-	5 sarana	253,774,293	27.78	14.71	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	9 sarana	251,126,000	9 sarana	292,200,000	-	-	-	-	9 sarana	251,126,000	50.00	14.55	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sulanjana	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	7 sarana	237,066,306	7 sarana	292,200,000	-	-	-	-	7 sarana	237,066,306	38.89	13.74	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000	6 sarana	217,025,906	6 sarana	270,223,400	-	-	-	-	6 sarana	217,025,906	33.33	12.58	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	80%	26,573,963,000	81.11%	1,609,092,200	50%	5,027,005,500	-	-	-	-	40.55%	1,609,092,200	50.69	6.06	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,821,707,000	8 lembaga	103,604,000	6 lembaga	601,093,200	-	-	-	-	8 lembaga	103,604,000	40.00	3.67	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,531,707,000	8 lembaga	116,134,000	6 lembaga	491,120,300	-	-	-	-	8 lembaga	116,134,000	40.00	4.59	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rajawali	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,269,807,000	8 lembaga	87,549,500	5 lembaga	441,810,000	-	-	-	-	8 lembaga	87,549,500	40.00	3.86	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Banjar	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,861,207,000	8 lembaga	111,294,000	5 lembaga	631,610,600	-	-	-	-	8 lembaga	111,294,000	40.00	3.89	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sijenjang	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	1,933,207,000	8 lembaga	114,754,800	5 lembaga	333,948,600	-	-	-	-	8 lembaga	114,754,800	40.00	5.94	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budiman	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,054,807,000	8 lembaga	113,798,000	4 lembaga	382,988,600	-	-	-	-	8 lembaga	113,798,000	40.00	5.54	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,136,607,000	8 lembaga	108,936,000	4 lembaga	417,906,000	-	-	-	-	8 lembaga	108,936,000	40.00	5.10	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sulanjana	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 lembaga	1,886,707,000	8 lembaga	112,416,000	6 lembaga	334,466,400	-	-	-	-	8 lembaga	112,416,000	40.00	5.96	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	1,918,207,000	8 lembaga	101,717,000	6 lembaga	392,061,800	-	-	-	-	8 lembaga	101,717,000	40.00	5.30	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Tanjung pinang	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	38 lokasi	780,000,000	4 lokasi	44,714,200	7 lokasi	100,000,000	-	-	-	-	4 lokasi	44,714,200	10.53	5.73	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Tanjung Sari	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	28 lokasi	560,000,000	-	-	5 lokasi	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Rajawali	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	28 lokasi	560,000,000	-	-	5 lokasi	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Talang Banjar	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	45 lokasi	1,000,000,000	13 lokasi	236,295,000	9 lokasi	200,000,000	-	-	-	-	13 lokasi	236,295,000	28.89	23.63	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Sijenjang	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	36 lokasi	960,000,000	8 lokasi	227,166,400	6 lokasi	180,000,000	-	-	-	-	8 lokasi	227,166,400	22.22	23.66	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Budiman	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	28 lokasi	560,000,000	-	-	5 lokasi	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kasang Jaya	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	38 lokasi	780,000,000	5 lokasi	83,716,500	7 lokasi	120,000,000	-	-	-	-	5 lokasi	83,716,500	13.16	10.73	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Sulanjana	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	15 lokasi	400,000,000	1 lokasi	46,996,800	3 lokasi	80,000,000	-	-	-	-	1 lokasi	46,996,800	6.67	11.75	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kasang	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	28 lokasi	560,000,000	-	-	5 lokasi	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			KECAMATAN DANAU TELUK																
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	100	303,834,322		1,655,635,000		137,990,800	0.06	16,454,806	0.06	16,454,806		1,672,089,806			KECAMATAN DANAU TELUK
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	100	93,230,854		1,201,035,000		36,500,800	1.96%	7,154,806	1.96%	7,154,806		1,208,189,806			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan Administrasi Pemerintah Umum	Terciptanya tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan	100	53,618,750		378,600,000		18,870,000	4.29%	8,100,000	4.29%	8,100,000		386,700,000			
			Pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	100	118,050,318		76,000,000		77,620,000	0.15%	1,200,000	0.15%	1,200,000		77,200,000			
			Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Ketersiban Umum dan Fasilitas Bencana	Terwujudnya ketentraman dan keteriban lingkungan di wilayah kecamatan	100	38,934,400		-		5,000,000	0.00%	-	-	-		-			
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina Ditingkat Kecamatan	100	1,471,829,800		-		550,642,400	0.02	60,249,000	0.02	60,249,000		60,249,000			
			Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	100	1,045,155,995		-		406,597,400	1.03%	42,049,000	1.03%	42,049,000		42,049,000			
			Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya keaktifan lembaga masyarakat	100	426,673,805		-		144,045,000	1.26%	18,200,000	1.26%	18,200,000		18,200,000			
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat diKelurahan yang Diakomodir	100	2,113,452,520		685,860,491		181,950,000	-	-	-	-		-			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasir Panjang	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Pasir Panjang yang diakomodir	100	425,576,130		187,231,000		26,000,000	0.00%	-	-	-		-			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Raden	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Tanjung Raden yang diakomodir	100	381,207,290		107,969,091		54,150,000	0.00%	-	-	-		-			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Olak Kemang	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Olak Kemang yang diakomodir	100	410,732,045		22,738,800		30,900,000	0.00%	-	-	-		-			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Pasir	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Tanjung Pasir yang diakomodir	100	447,132,075		157,895,000		34,900,000	0.00%	-	-	-		-			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Ulu Gedong	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Ulu Gedong yang diakomodir	100	448,804,980		210,026,600		36,000,000	0.00%	-	-	-		-			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan	100	3,157,442,910		654,658,800		1,710,367,600	-	-	-	-		-			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Pasir Panjang	100	322,500,595		158,854,000		170,272,400	0.00%	-	-	-		-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Raden	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Tanjung Raden	100	424,801,375		245,746,000		208,004,000	0.00%	-		-					
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Olak Kemang	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Olak Kemang	100	631,528,365		120,219,400		280,165,200	0.00%	-		-					
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Tanjung Pasir	100	580,460,085		25,500,000		169,042,400	0.00%	-		-					
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Ulu Gedong	100	598,152,490		104,339,400		282,883,600	0.00%	-		-					
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Bangkit Berdaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	600,000,000		549,144,672		600,000,000	0.00%	-		-					
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik		KECAMATAN PELAYANGAN																KECAMATAN PELAYANGAN
	Peningkatan Paartisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan yang diberikan		2,701,506,750		720,595,000		439,456,000		17,830,000		17,830,000		738,425,000		27.33	
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	98%	134,312,200	98%	14,520,000	98%	285,006,000	98%	2,630,000	0.98	2,630,000	98%	17,150,000	98%	12.77	
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Data Dinamis	4 Laporan	268,624,400	4 Laporan	629,100,000	4 Laporan	48,400,000	4 Laporan	-	4 Laporan	0	4 Laporan	629,100,000	4 Laporan	234.19	
			Kegiatan Pembinaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Persentase Kebersihan di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	2,197,836,000	1 Tahun	76,975,000	1 Tahun	84,050,000	1 Tahun	15,200,000		15,200,000	1 Tahun	92,175,000	1 Tahun	4.19	
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Kertertiban Umum dan Fasilitas Bencana	Persentase Jumlah Penertiban dalam Kecamatan	18 Kali	100,734,150	18 Kali	-	18 Kali	22,000,000	18 Kali	-		-	18 Kali	-	18 Kali	-	
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	98%	11,692,670,674	98%		98%		98%	3,600,000	0.98	3,600,000	98%	3,600,000	98%	0.03	
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Mengajukan Usulan Pembangunan	9 Lembaga	7,325,845,271	9 Lembaga	629,100,000	9 Lembaga	1,328,244,000	9 Lembaga	30,250,000	9 Lembaga	30,250,000	9 Lembaga	659,350,000	9 Lembaga	9	
			Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	5 Kali	4,366,825,403	5 Kali	598,600,000	5 Kali	10,600,000	5 Kali	37,950,000	5 Kali	37,950,000	5 Kali	636,550,000	5 Kali	14.58	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir	85%	7,302,076,611	85%	1,329,775,776	85%		85%	-	85%	-	85%	1,329,775,776	85%	18.21	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Arab Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	677,918,851	9 Lokasi	172,902,600	9 Lokasi	147,041,000	9 Lokasi	-	9 Lokasi	-	9 Lokasi	172,902,600	9 Lokasi	25.50	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jelm	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	677,918,851	9 Lokasi	219,034,086	9 Lokasi	147,041,000	9 Lokasi	-	9 Lokasi	-	9 Lokasi	219,034,086	9 Lokasi	32	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	677,918,851	9 Lokasi	259,096,600	9 Lokasi	147,041,000	9 Lokasi	-	9 Lokasi	-	9 Lokasi	259,096,600	9 Lokasi	38	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	1,756,106,686	9 Lokasi	259,096,600	9 Lokasi	147,041,000	9 Lokasi	-	9 Lokasi	-	9 Lokasi	259,096,600	9 Lokasi	14.75	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	1,756,106,686	9 Lokasi	193,834,100	9 Lokasi	147,041,000	9 Lokasi	-	9 Lokasi	-	9 Lokasi	193,834,100	9 Lokasi	11.04	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	1,756,106,686	9 Lokasi	225,811,790	9 Lokasi	147,041,000	9 Lokasi	-	9 Lokasi	-	9 Lokasi	225,811,790	9 Lokasi	12.86	
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Rasio Usulan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakomodir	80%	13,153,923,918	80%	1,170,061,725	80%	-	80%	-	80%	-	80%	1,170,061,725	80%	8.90	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arab Melayu	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	10 Kali	52,585,000	10 Kali	459,096,000	10 Kali	-	10 Kali	-	10 Kali	52,585,000	10 Kali	3.32	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelm	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	10 Kali	101,680,000	10 Kali	358,596,000	10 Kali	-	10 Kali	-	10 Kali	101,680,000	10 Kali	6.43	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mudung Laut	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	10 Kali	106,541,400	10 Kali	412,596,000	10 Kali	-	10 Kali	-	10 Kali	106,541,400	10 Kali	6.74	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahtul Yaman	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	10 Kali	111,041,400	10 Kali	457,596,000	10 Kali	-	10 Kali	-	10 Kali	111,041,400	10 Kali	7.02	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	10 Kali	91,977,400	10 Kali	420,096,000	10 Kali	-	10 Kali	-	10 Kali	91,977,400	10 Kali	5.81	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tengah	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	10 Kali	107,636,525	10 Kali	363,096,000	10 Kali	-	10 Kali	-	10 Kali	107,636,525	10 Kali	6.80	
			Kegiatan Bangkit Berdaya	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	40 Titik	3,663,060,000	33 Titik	598,600,000	40 Titik	600,000,000	40 Titik	-	40 Titik	-	40 Titik	598,600,000	40 Titik	16.34	
			KECAMATAN ALAM BARAJO																KECAMATAN ALAM BARAJO
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	100.00%	620,000,000			89.00%	340,000,000	11.88%	45,369,300	11.88%	45,369,300	11.88%	45,369,300	11.88%	7%	
	Peningkatan Paartisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan		Kegiatan Peningkatan kaulitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	Belanja Modal Interior Ruangn Pater, 1 unit Printer A3, 6 Stel Seragam Pelayanan	28.23%	175,000,000			26.18%	100,000,000	6.49%	24,789,300	6.49%	24,789,300	6.49%	24,789,300	22.99%	14%	
			Kegiatan Pembinaan Adminitras Pemerintah umum	Lomba Adminitras 5 Kelurahan Monev PBB ke 5 Kelurahan	25.00%	155,000,000			15.71%	60,000,000	4.32%	16,500,000	4.32%	16,500,000	4.32%	16,500,000	17.28%	11%	
			Kegiatan Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Gotong Royong, Kegiatan Foging, Pembinaan Lomba PHBS, LBS, Kampung Bantar, UKS, Kesling	18.55%	115,000,000			20.94%	80,000,000	0.28%	1,080,000	0.28%	1,080,000	0.28%	1,080,000	1.52%	1%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, keterlibatan umum dan fasilitas bencana	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Seragam Salgas Trantib 20 sett	28.23%	175,000,000			26.18%	100,000,000	0.79%	3,000,000	0.79%	3,000,000	0.79%	3,000,000	2.78%		2%	
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	100.00%	1,280,000,000			75.00%	1,032,517,700	11.27%	155,180,650	11.27%	155,180,650	11.27%	155,180,650	11.27%		12%	
			Kegiatan Pemeberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Pekerjaan Musrenbang, Pentas Seni, Bujang Gadis, Pawai/Karnaval, Stand Bazar UKM, PAUD, BKMT, PHBI	64.84%	830,000,000			51.02%	702,345,700	4.71%	64,900,000	4.71%	64,900,000	4.71%	64,900,000	7.27%		8%	
			Kegiatan Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	Pembinaan 8 Lembaga Masyarakat (Kwaran Pramuka, PKK, LAM, LPM, Komda Lansia, DMI, PMI)	35.16%	450,000,000			23.98%	330,172,000	6.56%	90,280,650	6.56%	90,280,650	6.56%	90,280,650	18.65%		20%	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir	100.00%	1,745,483,000			50.00%	1,476,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Belung	Jalan Lingkungan , Poskamling, Wahana Peralatan Bermain Anak	20.00%	349,096,600			10.00%	295,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mayang Mangurai	Jalan Lingkungan, Drainase, Pos Kamling, Taman Baca	20.00%	349,096,600			10.00%	295,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Bagan Pete	Jalan Lingkungan, Drainase, POSYANDU	20.00%	349,096,600			10.00%	295,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kenali Besar	Jalan Lingkungan, Drainase, Pos Kamling, Taman Bacaan	20.00%	349,096,600			10.00%	295,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Rawasari	Jalan Lingkungan, Drainase, Pos Kamling	20.00%	349,096,600			10.00%	295,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rasio Usulan Pemeberdayaan Masyarakat yang diakomodir	100.00%	6,908,850,600			50.00%	4,352,621,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Kenali Besar	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	23.02%	1,590,148,700			11.37%	990,148,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Rawasari	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	12.38%	855,041,400			6.30%	548,812,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Mayang Mangurai	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	15.37%	1,061,599,100			8.75%	761,599,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Bagan Pete	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	13.72%	947,855,100			7.44%	647,855,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Belung	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	10.19%	704,206,300			4.64%	404,206,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan pelayanan public berbasis TIK	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Kenali Besar	Pekerjaan Jalan Lingkungan	5.79%	400,000,000			2.87%	250,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0%	KECAMATAN DANAU SIPIN
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Rawasari	Pekerjaan Jalan Lingkungan	4.34%	300,000,000			1.72%	150,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0%	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Mayang Mangurai	Pekerjaan Jalan Lingkungan	5.79%	400,000,000			2.87%	250,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0%	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Bagan Pete	Pekerjaan Jalan Lingkungan, Poskamling, Posyandu	5.79%	400,000,000			2.87%	250,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0%	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Belung	Pekerjaan Jalan Lingkungan, Poskamling	3.62%	250,000,000			1.15%	100,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0%	
			KECAMATAN DANAU SIPIN																
			PELAYANAN UMUM KECAMATAN/	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan	98%	2,635,000,000	-		89%	282,288,000	48%	7,923,000	3%	7,923,000	3%	7,923,000	3%	0.30%	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	98%	780,000,000	-		89%	64,688,000	55%	3,323,000	5%	3,323,000	5%	3,323,000	5%	0.43%	
			Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah laporan administrasi umum	18 Kali	1,270,000,000	-		10 Kali	62,200,000	0%	-	0%	-	0%	-	0.00%		
			Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Gotong Royong	25 Kali	260,000,000	-		20 kali	85,570,000	30%	4,600,000	5%	4,600,000	5%	4,600,000	1.77%		
			Koordinasi Pembinaan, pengawasan, ketrampilan, ketrampilan umum dan Fasilitas Bencana	Persentase pembinaan dan koordinasi pelanggaran ketrampilan umum	80%	325,000,000	-		50%	69,830,000	0%	-	0%	-	0%	-	0.00%		
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KECAMATAN	Persentase jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	90%	1,727,012,200	-		75%	809,261,642	50%	33,575,000	4%	33,575,000	4%	33,575,000	4%	1.94%	
			Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi	90%	1,137,012,200	-		75%	540,700,000	46%	8,500,000	2%	8,500,000	2%	8,500,000	2%	0.75%	
			Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	90%	590,000,000	-		75%	268,561,642	56%	25,075,000	9%	25,075,000	9%	25,075,000	10%	4.25%	
			PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN		80%	1,475,483,000	-		50%	2,850,310,000	-	-	0%	-	0%	-	0.00%		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Putri		80%	295,096,600	80%	203.526.950	50%	517,092,200	-	-	80%	-	80%	#VALUE!	100%	#VALUE!	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Murni		80%	259,096,600	73%	185.192.556	50%	295,096,600	-	-	73%	-	73%	#VALUE!	91%	#VALUE!	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Legok		80%	295,096,600	98%	251.208.853	50%	295,096,600	-	-	98%	-	98%	#VALUE!	123%	#VALUE!	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selamat		80%	295,096,600	88%	209.930.654	50%	295,096,600	-	0	88%	-	88%	#VALUE!		#VALUE!	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Solok Sipin		80%	295,096,600	94%	242.297.000	50%	295,096,600	-	-	94%	-	94%	#VALUE!	118%	#VALUE!	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		70%	6,050,000,000		990,986,326	45%	3,850,310,000		-	-	-	0%	990,986,326	0%	16.38%	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Putri		70%	1,000,000,000	99%	109,942,375	45%	517,092,200		-	-	99%	#VALUE!	141%	#VALUE!		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mumi		70%	1,000,000,000	99%	109,443,250	45%	431,169,800		-	-	99%	#VALUE!	141%	#VALUE!		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Legok		70%	1,050,000,000	96%	106,396,400	45%	743,218,600		-	-	96%	#VALUE!	137%	#VALUE!		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selamat		70%	1,000,000,000	95%	123,853,304	45%	563,835,600		-	-	95%	#VALUE!	136%	#VALUE!		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Solok Sipin		70%	1,000,000,000	98%	108,415,400	45%	594,993,800		-	-	98%	#VALUE!	140%	#VALUE!		
			Bangkit Berdaya Kelurahan Sungai Putri			200,000,000		89,933,808		200,000,000		-	-	0%		89,933,808		44.97%	
			Bangkit Berdaya Kelurahan Mumi			200,000,000		85,499,814		200,000,000		-	-	0%		85,499,814		42.75%	
			Bangkit Berdaya Kelurahan Legok			200,000,000		296,727,053		200,000,000		-	-	0%		296,727,053		148.36%	
			Bangkit Berdaya Kelurahan Selamat			200,000,000		215,277,452		200,000,000		-	-	0%		215,277,452		107.64%	
			Bangkit Berdaya Kelurahan Solok Sipin			200,000,000		303,548,199		200,000,000		-	-	0%		303,548,199		151.77%	
			KECAMATAN PAAL MERAH																
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	98	184,657,967	85	224,636,013	89.0	157,061,500	12.10	19,000,000	12.10	19,000,000.00	-	-	-	-	KECAMATAN PAAL MERAH
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	19.7	37,043,445	17	45,063,270	12.4	21,900,000	68.49	15,000,000	68.49	15,000,000.00	-	-	-	-	
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		Pembinaan Administrasi Pemerintah umum	Terciptanya tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan	13.8	26,006,902	12	31,637,340	13.5	23,800,000	4.20	1,000,000	4.20	1,000,000.00	-	-	-	-	
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	20.5	38,645,383	18	47,012,023	20.2	35,686,500	8.41	3,000,000	8.41	3,000,000.00	-	-	-	-	
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan di wilayah kecamatan	44.0	82,962,237	38	100,923,380	42.9	75,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	90	1,537,522,795	70	1,766,466,100	75.0	1,297,575,700	2.37	30,700,000	2.37	30,700,000.00	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	75.6	1,291,805,313	59	1,484,160,300	64.4	1,113,958,000	1.81	20,200,000	1.81	20,200,000.00	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	Meningkatnya keaktifan lembaga masyarakat	14.4	245,717,482	11	282,305,800	10.6	183,617,700	5.72	10,500,000	5.72	10,500,000.00	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	80	1,898,604,950	50	1,897,178,500	50.0	1,433,338,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Talang Bakung	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Talang Bakung yang diakomodir	12.2	290,490,750	8	290,272,500	7.6	218,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Payo Selincah	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Payo Selincah yang diakomodir	16.8	397,969,000	10	397,670,000	10.4	299,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Eka Jaya	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Eka Jaya yang diakomodir	16.8	397,969,000	10	397,670,000	10.4	299,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Lingkar Selatan yang diakomodir	16.5	392,645,000	10	392,350,000	10.5	301,888,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Paal Merah	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Paal Merah yang diakomodir	17.7	419,531,200	11	419,216,000	11.0	315,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan	80	6,506,146,281	45	6,501,258,120	50.0	4,815,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Bakung	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Talang Bakung	13.8	1,118,373,282	8	1,117,533,032	8.6	826,018,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payo Selincah	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Payo Selincah	11.0	897,361,264	6	896,687,064	6.9	661,984,800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Eka Jaya	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Eka Jaya	15.5	1,260,551,234	9	1,259,604,164	9.7	935,694,800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Lingkar Selatan	13.7	1,118,041,064	8	1,117,201,064	8.5	818,904,800	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		11 = 7 + 13		12 = 11/6 x 100%		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paal Merah	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Paal Merah	9.6	780,819,437	5	780,232,796	5.9	572,505,200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Talang Bakung	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talang Bakung	3.3	266,200,000	2	266,000,000	2.1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Payo Selincah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Payo Selincah	3.3	266,200,000	2	266,000,000	2.1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Eka Jaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Eka Jaya	3.3	266,200,000	2	266,000,000	2.1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Lingkar Selatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Lingkar Selatan	3.3	266,200,000	2	266,000,000	2.1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Paal Merah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Paal Merah	3.3	266,200,000	2	266,000,000	2.1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	